PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2029

BAPPERIDA PROVINSI PAPUA
2024

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Pasal 5 ayat (1), maka diamanatkan kepada Gubernur untuk menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Papua Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Undang-Undang ...../3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN 2024-2029 PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) disingkat RAD-TPB/SDGs adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2024-2029 Provinsi Papua.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

8. Organisasi ...../4

8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD-TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD- TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bukan hanya Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Filontropi, Pelaku Usaha Akademisi dan Pihak terkait lainnya untuk melaksanakan rencana aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB ...../5

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Sasaran dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Papua dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Sekretariat SDGs Nasional.
(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur bersama dengan Instansi Teknis terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-TPB/SDGs.
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD–TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR,SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

NELWAN SAGRIM,SH.,M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/300/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2029

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2024 – 2029, serta untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* ke dalam agenda Pembangunan Provinsi Papua baik untuk periode jangka panjang maupun jangka menengah Provinsi Papua, perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Papua Tahun 2024 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11.Peraturan.../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21.Peraturan.../4

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian /Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Papua Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals)* Provinsi Papua Tahun 2019-2023 Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 49);
26. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/M.PPN/ HK/03/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Papua Tahun 2024 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pengarah, bertugas :
   a. memberikan arahan kepada tim terkait penyusunan rencana aksi TPB/SDGs serta memantau pelaksanaan kegiatan; dan
   b. memantau pencapaian TPB/SDGs Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.Tim.../5

2. Tim Pelaksana, bertugas :

   a. memfasilitasi penyusunan rencana aksi TPB/SDGs Provinsi Papua periode 2024-2029 melalui mekanisme dan tahapan pada pedoman teknis penyusunan TPB/SDGs yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020.

   b. melaksanakan rapat-rapat kelompok kerja, *Forum Grup Discusion* (FGD) dengan para pihak dan konsultasi publik.

   c. menjamin kualitas dan pendokumentasian rencana aksi TPB/SDGs Provinsi Papua periode Tahun 2024 – 2029;

   d. melaksanakan pengintegrasian hasil renaksi TPB/SDGs dengan penyusunan Rencana Strategis Urusan dan Dinas, Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

   e. melaksanakan koordinasi, konsolidasi serta asistensi rencana aksi TPB/SDGs Provinsi Papua dengan Sekretariat Nasional TPB/SDGs;

   f. melaporkan hasil akhir proses dan tahapan penyusunan rencana aksi TPB/SDGs Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Gubernur Papua;

   g. menyusun dan mengumpulkan penetapan Surat Keputusan terkait tim koordinasi dan rencana aksi TPB/SDGs Provinsi Papua Tahun 2024 – 2029; dan

   h. mempublikasikan hasil rencana aksi TPB/SDGs kepada publik dalam bentuk deseminasi hasil penyusunan.

3. Tim Pakar/Tenaga Ahli Penyusun, bertugas :

   a. melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan rencana aksi TPB/SDGs Provinsi Papua sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana aksi TPB/SDGs yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan arahan nasional;

   b. melakukan identifikasi capaian indikator TPB/SDGs dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada setiap *goals* untuk periode RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya;

   c. merumuskan target pencapaian indikator melalui penyusunan alternatif proyeksi secara sinergis dengan rencana pembangunan jangka Panjang atau jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) Tahun ke depan;

d.merumuskan.../6

d. merumuskan arah kebijakan pencapaian target indikator TPB/SDGs dengan merujuk pada Visi dan Misi pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan

e. merumuskan mekanisme pemantauan dan evaluasi dan mekanisme pelaporan pencapaian indikator TPB/SDGs pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat, bertugas :

a. menyediakan dan menunjang kinerja kelompok kerja dalam semua tahapan yang harus dilewati;

b. mempersiapkan dokumen pendukung baik *softcopy* maupun *hardcopy* serta notulen hasi-hasil rapat dan FGD, konsultasi publik, koordinasi dan seterusnya; dan

c. mendukung logistik dan administrasi kegiatan tahapan kelompok Kerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekratariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 9 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Papua
Nomor : 188.4/300/Tahun 2024
Tanggal : 9 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	I. PENGARAH	
1.	Gubernur Papua	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Sekretaris
3.	Kepala Kepolisian Daerah Papua	Anggota
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Anggota
5.	Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua	Anggota
6.	Direktur Bank Indonesia	Anggota
7.	Rektor Universitas Cenderawasih Papua	Anggota
8.	Rektor Universitas Yapis Papua	Anggota
9.	Rektor Universitas Ottow dan Geissler Papua	Anggota
10.	Direktur Institut Pemerintah Dalam Negeri	Anggota
	II. TIM PELAKSANA	
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Ketua
12.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
18.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota
21.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	Anggota
22.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	Anggota
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota

24.Kepala.../2

1	2	3
24.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	Anggota
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua	Anggota
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	Anggota
27.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	Anggota
29.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua	Anggota
30.	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua	Anggota
31.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
32.	Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi Papua	Anggota
33.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
34.	Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan SETDA Provinsi Papua	Anggota
35.	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua	Anggota
36.	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua	Anggota
37.	Ketua Majelis Rakyat Papua	Anggota
	KELOMPOK KERJA (POKJA)	
	A. POKJA PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	
38.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Koordinator
39.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	Anggota
40.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Anggota
41.	Sekretaris Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	Anggota
42.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua	Anggota
43.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	Anggota
44.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	Anggota
45.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua	Anggota
46.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota
47.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua	Anggota
48.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua	Anggota

49.Sekretaris.../3

1	2	3
49.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
50.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Anggota
51.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	Anggota
52.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	Anggota
53.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
54.	Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
55.	Kepala Bagian Program Sosial United Nations Children's Fund (UNICEF) Papua	Anggota
56.	Pimpinan SKALA	Anggota
57.	Pimpinan WVI	Anggota
58.	Pimpinan USAID INFID	Anggota
59.	Pimpinan WWF	Anggota
60.	Wakil Rektor I Universitas Yapis Papua	Anggota
61.	Kepala Cabang PT. Pertamina Wilayah Papua	Anggota
62.	Kepala Cabang Telkom Jayapura	Anggota
63.	Pimpinan Telkomsel	Anggota
	B. POKJA PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	
64.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Koordinator
65.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
66.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
67.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
68.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	Anggota
69.	Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
70.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
71.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua	Anggota
72.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	Anggota
73.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	Anggota
74.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua	Anggota

75.Kepala.../4

1	2	3
75.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua	Anggota
76.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	Anggota
77.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua	Anggota
78.	Kepala Sub Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua	Anggota
79.	Kepala Sub Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota
80.	Kepala Sub Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua	Anggota
81.	Kepala Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
82.	Pimpinan CLUE	Anggota
83.	Bidang Lingkungan pada WWF	Anggota
84.	Pimpinan ECONUSA	Anggota
85.	Wakil Rektor II Universitas Cenderawasih	Anggota
86.	Pimpinan Universitas Ottow Geissler Papua	Anggota
87.	Pimpinan BBJN	Anggota
88.	Pimpinan Perusahaan Listrik Negara Cabang Jayapura	Anggota
89.	Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	Anggota
90.	Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Papua	Anggota
91.	Pimpinan PT. Bank Negera Indonesia (BNI)	Anggota
92.	Pimpinan PT. Bank Mandiri	Anggota
93.	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Anggota
	C. POKJA PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP	
94.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Koordinator
95.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
96.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
97.	Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
98.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
99.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	Anggota
100.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua	Anggota

101.Sekretaris.../5

1	2	3
101.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota
102.	Kepala Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
103.	Pimpinan CLUA	Anggota
104.	Pimpinan USAID AIOS TANGGUH	Anggota
105.	Pimpinan WRI	Anggota
106.	Pimpinan USAID IUSWASH	Anggota
107.	Pimpinan GIZ FORCLIME	Anggota
108.	Pimpinan KEMITRAAN	Anggota
109.	Pimpinan BWS	Anggota
110.	Wakil Rektor I USTJ	Anggota
111.	Kepala Balai permukiman	Anggota
112.	Kepala BPKH	Anggota
	D. POKJA PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
113.	Kepala Bidang Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Koordinator
114.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
115.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	Anggota
116.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	Anggota
117.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua	Anggota
118.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Anggota
119.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Provinsi Papua	Anggota
120.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
121.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua	Anggota
122.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota
123.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Anggota
124.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Majelis Rakyat Papua	Anggota
125.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
126.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota

127.Pimpinan.../6

1	2	3
127.	Pimpinan GIZ	Anggota
128.	Wakil Rektor III Universitas Cenderawasih	Anggota
129.	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua	Anggota
130.	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua	Anggota
	III. TIM SEKRETARIAT	
131.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
132.	Kapusdalisbang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
133.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda padaBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
134.	Kepala Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
135.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
136.	Kepala Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pudalisbang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
137.	Kepala Sub Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua	Anggota
138.	Pimpinan Media Cenderawasih Pos	Anggota
	IV. TIM AHLI/PAKAR	
139.	Ahli Perencanaan Wilayah dan Pengelolaan SDAL	Koordinator
140.	Ahli Sosial dan Budaya	Anggota
141.	Ahli Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
142.	Ahli Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2029

POKJA RAD TPB
PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2029

KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, memerlukan sinergitas kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Papua tahun 2024 – 2029, telah disusun dan dirumuskan melalui serangkaian tahapan proses diskusi, koordinasi, integrasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil, Filantropi, Akademisi, Pelaku Bisnis serta para Pakar.

Penyusunan RAD TPB/SDGs ini juga mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 - 2029, dengan harapan dapat bermanfaat dalam memastikan keselarasan pembangunan daerah Provinsi Papua dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, cara pencapaian dan proses monitoring evaluasi.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan pemangku kepentingan, dan semoga kerja keras yang telah dilakukan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tahun 2024 – 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua, sekaligus dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional dan global secara berkelanjutan

BAPPEDA PROVINSI PAPUA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR PUSTAKA xvi

DAFTAR SINGKATAN xvii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Keselarasan TPB/SDGs terhadap Agenda RPJMN 2020 – 2024 dan Agenda RPD Provinsi Papua 2023 – 2026 2

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 4

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs 5

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs 7

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs 7

1.1 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs 9

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun 11

2.1 Tanpa Kemiskinan 11

A. Status Capaian 11

B. Tantangan 26

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Meningkatkan Pertanian Berkelanjun 28

A. Status Capaian 28

B. Tantangan 34

2.3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua 35

A. Status Capaian 35

B. Tantangan 46

2.4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan 51

A. Status Capaian 51

B. Tantangan 64
2.5 Mencapai kesetaraan gender danmemberdayakan kaum perempuan 65
A. Status Capaian 65
B. Tantangan 68
2.6 Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak 70
A. Status Capaian 70
B. Tantangan 73
2.7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern 75
A. Status Capaian 75
B. Tantangan 76
2.8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 78
A. Status Capaian 78
B. Tantangan 84
2.9 Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 86
A. Status Capaian 86
B. Tantangan 88
2.10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara 90
A. Status Capaian 90
B. Tantangan 95
2.11 Kota dan permukiman berkelanjutan 96
A. Status Capaian 97
B. Tantangan 96
2.12 Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 97
A. Status Capaian 105
B. Tantangan 106
2.13 Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan perubahan iklim dan penanggulangan 108
A. Status Capaian 109
B. Tantangan 111

2.14 Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan 113
A. Status Capaian 113
B. Tantangan 119
2.15 Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan 121
A. Status Capaian 121
B. Tantangan 128
2.16 Menciptakan perdamai Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global kses keadilan, dan 129
A. Status Capaian 129
B. Tantangan 140
2.17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global 143
A. Status Capaian 144
B. Tantangan 147
BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs 148
3.1 Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan 148
3.2 Tujuan 2. Tanpa Kelaparan 161
3.3 Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera 166
3.4 Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas 178
3.5 Tujuan 5. Kesetaraan Gender 193
3.6 Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 198
3.7 Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau 203
3.8 Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 206
3.9 Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 212
3.10 Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan 219
3.11 Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 224
3.12 Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 230
3.13 Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim 236
3.14 Tujuan 14. Ekosistem Lautan 241
3.15 Tujuan 15. Ekosistem Daratan 246
3.16 Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 251

3.17 Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan 264
BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 271
4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 271
4.1.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs oleh Pemerintah Daerah 271
4.1.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs oleh Pemerintah Pusat .. 273
4.1.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Non-Pemerintah 275
4.1.4 Alat Pemantauan Dan Evaluasi..... 276
4.1.5 Bahan Pemantauan dan Evaluasi 282
4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs 282
4.3 Laporan Pencapaian TPB/SDGs 283
4.3 Publikasi Hasil Pemantauan 283
BAB V. PENUTUP 285

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keselarasan TPB/SDGs dengan Agenda RPJMN 2020 – 2024 3

Gambar 1. 2 Indikator TPB/SDGs berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 6

Gambar 1. 3 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Papua 8

Gambar 2. 1 Presentase Penduduk Miskin per Kabupaten 12

Gambar 2. 2 Garis kemiskinan per Kabupaten 13

Gambar 2. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) per Kabupaten..... 13

Gambar 2. 4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per Kabupaten 14

Gambar 2. 5 Indikator Kemiskinan Multidimensi 15

Gambar 2. 6 Presentase Imunisasi Dasar per Kabupaten..... 16

Gambar 2. 7 PresentaseAnak Kurang Gizi (Underweight) per Kabupaten 16

Gambar 2. 8 Presentase Penduduk yang mengalami gangguan Kesehatan per Kabupaten 17

Gambar 2. 9 Presentase Lama Sekolah per Kabupaten..... 17

Gambar 2. 10 Presentase anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak bersekolah per kabupaten ... 18

Gambar 2. 11 Presentase Rumah tangga yang penerangannya bukan listrik per kabupaten 18

Gambar 2. 12 Presentase rumah tangga tanpa WC layak atau menggunakan WC bersama 19

Gambar 2. 13 Presentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah 20

Gambar 2. 14 Presentase rumah tangga dengan bahan bakar elpiji 3 kg 20

Gambar 2. 15 Presentase rumah tangga tanpa asset produktif..... 21

Gambar 2. 16 Presentase penduduk usia 0 – 17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran..... 21

Gambar 2. 17 Presentase rumah tangga tanpa akses internet 22

Gambar 2. 18 Presentase rumah tangga dengan anggota keluarga yang bekerja kurang dari 20 jam/minggu 22

Gambar 2. 19 Presentase penduduk yang menerima program jamina sosial 23

Gambar 2. 20 Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenangakerjaan 24

Gambar 2. 21 Presentase rumah tangga dengan air minum layak..... 24

Gambar 2. 22 Presentase rumah tangga yang memiliki WC layak 25
Gambar 2. 23 Peta Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2021 28
Gambar 2. 24 Status Kerawanan Pangan Provinsi Papua 29
Gambar 2. 25 Status Gizi Anak Per Kabupaten/Kota 31
Gambar 2. 26 Pola Konsumsi Pangan Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 32
Gambar 2. 27 Nilai Tambah Pertanian Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 33
Gambar 2. 28 Angka Kematian Ibu per 1.000 hari kehidupan 35
Gambar 2. 29 Angka Kematian Bayi per 1.000 hari kehidupan 36
Gambar 2. 30 Angka kematian Neonatal per 1.000 hari kehidupan 36
Gambar 2. 31 Kejadian Malaria per 1.000 Orang 37
Gambar 2. 32 Insiden Hepatitis B per Kabupaten/Kota 38
Gambar 2. 33 Kejadian Filariasis per Kabupaten/Kota 39
Gambar 2. 34 Kejadian Kusta per KabUpaten/Kota 39
Gambar 2. 35 Prevelensi Hipertensi per Kabupaten/Kota 40
Gambar 2. 36 Presentase Obesitas per Kabupaten/Kota 41
Gambar 2. 37 Proporsi Perempuan Usia 15-49 Tahun dengan Kontrasepsi Modern 42
Gambar 2. 38 Total Fertility Rate pe Kabupaten/Kota 42
Gambar 2. 39 Presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan 43
Gambar 2. 40 Presentase penduduk merokok usia ≥ 15 Tahun 43
Gambar 2. 41 Presentase anak yang menerima vaksin DPT 44
Gambar 2. 42 Presentase Anak yang menerima Vaksin Campak 44
Gambar 2. 43 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir ditolong tenaga Kesehatan terlatih 46
Gambar 2. 44 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir di fasilitas kesehatan 46
Gambar 2. 45 Presentase anak dan remaja usia 13 – 15 tahun yang menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai rentang usia 52

Gambar 2. 46 Presentase tidak sekolah usia 16-18 tahun 52
Gambar 2. 47 Presentase partisipasi anak sekolah usia 6 tahun 53
Gambar 2. 48 Presentase remaja dan dewasa dalam pendidikan formal dan non-formal 53
Gambar 2. 49 Presentase partisipasi kasar Perguruan Tinggi 54
Gambar 2. 50 Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilam TIK 55
Gambar 2. 51 Rasio APM SD antara Perempuan dan Laki-Laki 55
Gambar 2. 52 Rasio APK SMP/sederajatmya antara Perempuan dan Laki-Laki 56
Gambar 2. 53 Rasio APK SMA/sederajatmya antara Perempuan dan Laki-Laki 56
Gambar 2. 54 Presentase Angka Melek Aksara Penduduk umur ≥ 15 Tahun Provinsi Papua 57
Gambar 2. 55 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Listrik 57
Gambar 2. 56 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Internet 58
Gambar 2. 57 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar 58
Gambar 2. 58 Proporsi SD/Sederajatnya dengan Fasilitas Cuci Tangan 58
Gambar 2. 59 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Listrik 59
Gambar 2. 60 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Internet 59
Gambar 2. 61 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Sanitasi Dasar 59
Gambar 2. 62 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan 60
Gambar 2. 63 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Listrik 60
Gambar 2. 64 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Internet 60
Gambar 2. 65 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Sanitasi Dasar 61
Gambar 2. 66 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan 61
Gambar 2. 67 Presentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 62
Gambar 2. 68 Presentase guru SD yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 62
Gambar 2. 69 Presentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 62
Gambar 2. 70 Presentase guru SMA yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 63
Gambar 2. 71 Presentase guru SMK yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 63
Gambar 2. 72 Presentase guru SLB yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 63

Gambar 2. 73 Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) dan Pemberdayaan Gender (IDG) 65
Gambar 2. 74 IPG dan IDG Tahun 2021 per Kabupaten Kota 66
Gambar 2. 75 Proporsi Kursi Perempuan di DPRRI dan DPRD per Kabupaten Kota 67
Gambar 2. 76 Proporsi Kursi Perempuan di posisi managerial 67
Gambar 2. 77 Presentase kepemilikan ha katas tanah 67
Gambar 2. 78 Proporsi Individu yang memiliki telepon genggam 68
Gambar 2. 79 Presentase rumah tangga dengan akses air minum 71
Gambar 2. 80 Presentase rumah tangga dengan akses pasilitas cuci tangan dan sanitasi layak 71
Gambar 2. 81 Presentase proporsi pengambilan air baku dari air permukaan 72
Gambar 2. 82 Presentase proporsi pengambilan air baku dari air tanah 73
Gambar 2. 83 Presentase rumah tangga dengan sumber air utama 73
Gambar 2. 84 Presentase rumah tangga dengan listrik PLN dan Non-PLN 75
Gambar 2. 85 Konsumsi Listrik Perkapita 76
Gambar 2. 86 Presentase rumah tangga pengguna gas elpiji 5,5 kg 76
Gambar 2. 87 PDB per Kapita 78
Gambar 2. 88 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita 79
Gambar 2. 89 Proporsi lapangan kerja informal 80
Gambar 2. 90 Upah rata-rata per jam pekerja 80
Gambar 2. 91 Presentase Tingkat pengangguran terbuka 81
Gambar 2. 92 Presentase setengah pengangguran 82
Gambar 2. 93 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan 82
Gambar 2. 94 Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja 83
Gambar 2. 95 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 84
Gambar 2. 96 Presentase Kondisi Mantap Jalan Nasional 86
Gambar 2. 97 Jumlah penumpang dan barang dengan pesawat terbang 87
Gambar 2. 98 Jumlah penumpang berangkat dengan pesawat terbang 87

Gambar 2. 99 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur 88
Gambar 2. 100 Gini Rasio Kab/Kota di Provinsi Papua 90
Gambar 2. 101 Presentase Penduduk Miskin 91
Gambar 2. 102 Jumlah Desa Tertinggal 92
Gambar 2. 103 Jumlah Desa Mandiri 93
Gambar 2. 104 Indeks Kebebasan 94
Gambar 2. 105 Proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan 95
Gambar 2. 106 Presentase Rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau 98
Gambar 2. 107 Pengelolaan Sampah 103
Gambar 2. 108 Indeks Kualitas Udara Provinsi Papua 104
Gambar 2. 109 Penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 105
Gambar 2. 110 Presentase Sisa Makanan 106
Gambar 2. 111 Bobot sampah di laut Indonesia berdasarkan jenisnya tahun 2020 114
Gambar 2. 112 Peta Kawasan Konservasi 115
Gambar 2. 113 Luas Kawasan Hutan pe Kabupaten/Kota 122
Gambar 2. 114 Sebaran Unit KPHP dan Unit KPHL di Provinsi Papua 125
Gambar 2. 115 Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan 130
Gambar 2. 116 Alur Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 132
Gambar 2. 117 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia 132
Gambar 2. 118 Presentase Keterwakilan Perempuan di DPRRI dan DPRD 134
Gambar 2. 119 Presentase Keterwakilan Perempuan di Esalon I dan Esalon II 134
Gambar 2. 120 Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran 135
Gambar 2. 121 Proporsi anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 135
Gambar 2. 122 Indeks Demokrasi Indonesia 140
Gambar 2. 123 Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang 143
Gambar 2. 124 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang 144
Gambar 2. 125 Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB 145

Gambar 2. 126 Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB 145
Gambar 2. 127 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh PAD 146
Gambar 2. 128 Proporsi penduduk pengguna internet 147
Gambar 3. 1 Target Pencapaian TPB 1. 148
Gambar 3. 2 Target Pencapaian TPB 2 161
Gambar 3. 3 Target Pencapaian TPB 3 166
Gambar 3. 4 Target Pencapaian TPB 4 178
Gambar 3. 5 Target Pencapaian TPB 5 193
Gambar 3. 6 Target Pencapaian TPB 6 198
Gambar 3. 7 Target Pencapaian TPB 7 203
Gambar 3. 8 Target Pencapaian TPB 8 206
Gambar 3. 9 Target Pencapaian TPB 9 212
Gambar 3. 10 Target Pencapaian TPB 10 219
Gambar 3. 11 Target Pencapaian TPB 11 224
Gambar 3. 12 Target Pencapaian TPB 12 230
Gambar 3. 13 Target Pencapaian TPB 13 236
Gambar 3. 14 Target Pencapaian TPB 14 241
Gambar 3. 15 Target Pencapaian TPB 15 246
Gambar 3. 16 Target Pencapaian TPB 16 251
Gambar 3. 17 Target Pencapaian TPB 17 264
Gambar 4. 1 Alur Pelaporan dan Umpan Balik 272
Gambar 4. 2 Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs 274

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 indeks kerentanan wilayah dan perubahan iklim per kabupaten 26

Tabel 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2022 29

Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022 45

Tabel 2. 4 Daftar perusahaan industri besar/sedang di Papua tahun 2021 88

Tabel 2. 5 Klasifikasi kampung berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 92

Tabel 2. 6 Dampak Multi Bencana Tahun 2021 99

Tabel 2. 7 Dampak Bencana Gempa Bumi Tahun 2021 99

Tabel 2. 8 Dampak Bencana Tsunami Tahun 2021 100

Tabel 2. 9 Bencana Banjir Tahun 2021 100

Tabel 2. 10 Dampak Bencana Banjir Bandang Tahun 2021 100

Tabel 2. 11 Dampak Bencana Tanah Longsor Tahun 2021 100

Tabel 2. 12 Dampak Bencana Kekeringan Tahun 2021 101

Tabel 2. 13 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 101

Tabel 2. 14 Dampak Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2021 101

Tabel 2. 15 Dampak Bencana Gelombang Ekstrem Tahun 2021 101

Tabel 2. 16 Dampak Bencana Likuefaksi Tahun 2021 102

Tabel 2. 17 Konsentrasi Partikulat halus (SPM) Provinsi Papua 104

Tabel 2. 18 Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Papua 109

Tabel 2. 19 Emisi GRK per Sektor Provinsi Papua 110

Tabel 2. 20 Estimasi Potensi Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPRI 717 113

Tabel 2. 21 Jumlah Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya Provinsi Papua 118

Tabel 2. 22 Luas Kawasan Hutan Provinsi Papua 121

Tabel 2. 23 Perkembangan Status Kawasan Konservasi di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2021 122

Tabel 2. 24 Perkembangan Penataan Blok/Zona Pada Hutan Konservasi s/d Desember 2022 .. 123
Tabel 2. 25 Perkembangan Status Kerjasama (PKS) Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2021 124
Tabel 2. 26 KPHP dan KPHL Provinsi Papua 126
Tabel 2. 27 Perubahan luas tutupan lahan tahun 2012 – 2021 di Provinsi Papua 126
Tabel 2. 28 Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2021 127
Tabel 2. 29 Bentuk Kekerasan dan Tingkat Kematian tahun 2018 - 2022 129
Tabel 2. 30 Bentuk Kekerasan terhadap anak tahun 2018 - 2022 130
Tabel 2. 31 Penegakan hukum dan akses keadilan 131
Tabel 3. 1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan 152
Tabel 3. 2 Target dan Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan 163
Tabel 3. 3 Target dan Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 169
Tabel 3. 4 Target dan Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas 187
Tabel 3. 5 Target dan Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender 196
Tabel 3. 6 Target dan Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 201
Tabel 3. 7 Target dan Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau 205
Tabel 3. 8 Target dan Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 210
Tabel 3. 9 Target dan Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 217
Tabel 3. 10 Target dan Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan 222
Tabel 3. 11 Target dan Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 226
Tabel 3. 12 Target dan Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan 233
Tabel 3. 13 Target dan Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim 239
Tabel 3. 14 Target dan Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan 244
Tabel 3. 15 Target dan Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan 249
Tabel 3. 16 Target dan Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 258
Tabel 3. 17 Target dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan 267

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

BAB I.
PENDAHULUAN

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal*s (TPB/*SDGs*) telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015, dimana dalam agenda tersebut telah mengakui dan berkomitmen bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim merupakan tantangan utama bersama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda TPB/SDGs sebagai rencana aksi global yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* yang diselaraskan dalam 4 Pilar Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilah Hukum dan Tata Kelola.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam menentukan sasaran TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam dokumen "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*", dan sebagai bentuk komitmen tersebut dalam pencapaian agenda TPB/*SDGs* tersebut, maka Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim hingga Tahun 2030. Keberhasilan tujuan TPB/SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media. Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian TPB/SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator TPB/SDGs dapat terlaksana dengan baik di tingkat lokal.

Berdasarkan decade aksi (*Decade of Action*), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan, sehingga diperlukan adanya upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua tahun 2019 – 2023 (tahap ke 1) akan segera berakhir, dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua tahun 2024 – 2029 (tahap ke 1). Pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahap ke 2 ini merujuk pada amanat Peraturan Presiden (PERPRES) Pasal 5 Nomor 111 Tahun 2022, yang telah di tetapkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2022. Penetapan PERPRES 111 Tahun 2022 ini didasarkan pada rencana percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sebelumnya telah ditetapkan melalui PERPRES 59 tahun 2017. Selain itu, penetapan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam PERPRES 111 tahun

2022 ini juga telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan.

Dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden (PERPRES) Pasal 5 Nomor 111 Tahun 2022, maka saat ini Pj. Gubernur Papua telah membentuk tim pelaksana TPB/SDGs Provinsi Papua 2024 – 2029 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor …… yang selanjutnya akan bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan penguatan kapasitas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang ada di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi, serta para pihak terkait lainnya dari organisasi atau lembaga non-Pemerintah tentang upaya pencapaian target TPB/SDGs hingga tahun 2029. Selain itu, tugas utama dari tim pelaksana ini adalah melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs tahun 2024 – 2029, serta mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh indikator TPB/SDGs ke dalam agenda Pembangunan Provinsi Papua baik untuk periode jangka panjang maupun jangka menengah Provinsi Papua.

1.1. Keselarasan TPB/SDGs terhadap Agenda RPJMN 2020 – 2024 dan Agenda RPD Provinsi Papua 2023 – 2026

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki tahun ke 10 (sepuluh) atau di tingkat global disebut memasuki periode “decade of action”, dan bagi Indonesia momentum ini menjadi saat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan lima tahun pertama dan perumusan perencanaan untuk lima tahun berikutnya, seperti yang telah dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs yang sejalan dengan target dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024. Agenda pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Target-target dari 17 *goals* beserta indikatornya terefleksikan dalam agenda pembangunan nasional. Sinergi Nawacita, 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN, dan TPB/SDGs dapat dilihat pada gambar 1.1 Keselarasan TPB/SDGs dengan Agenda RPJMN 2020 – 2024.

Gambar 1. 1 Keselarasan TPB/SDGs dengan Agenda RPJMN 2020 – 2024

Sumber: Lampiran 1 RAD SDGs 2021-2024

Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah memasuki periode ke IV atau periode terakhir agenda pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025, dengan tema "**Mewujudkan Masyarakat Papua Yang Mandiri Di Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan Yang Harmonis, Selaras Dengan Alam**". Tahapan ini akan menjadi dasar untuk memasuki tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang visioner dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama orang asli papua, melalui pertumbuhan ekonomi yang baik paska pandemic covid 19, dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan (Hutan Papua) sebagai modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Agenda pembangunan jangka panjang periode ke IV ini juga telah diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026, dengan mempertimbangkan Misi RPJPD Provinsi Tahun 2005 – 2025, Agenda Pembangungan RPJMN 2020 – 2024 dan isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 – 2026. Tujuan Rencana Pembangunan Papua tahun 2024 – 2026 antara lain:

1. Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar; dan
4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung.

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Papua telah dimulai sejak dideklarasikannya Visi Papua 2100, dengan tema "***Kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata, serta kondisi alam Papua, baik daratan, perairan, udara, tetap lestari dan terjaga serta meningkat kualitasnya***". Dalam visi Papua 2100, telah digambarkan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat papua, namun upaya untuk tetap menjaga dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungannya untuk generasi mendatang juga tetap menjadi prioritas. Keselarasan antara kebijakan Visi Papua 2100 dengan TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut ini.

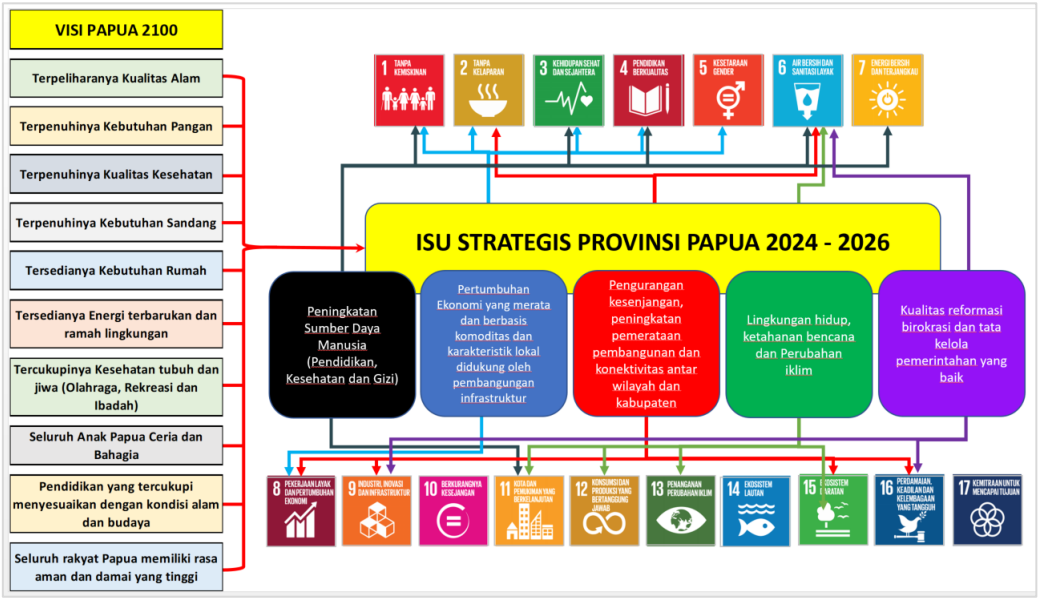

Visi Papua 2100 yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah salah satu bentuk konkrit dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua. Dasar yang diterjemahkan dalam konteks perencanaan Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua merujuk kepada filosofi orang Papua yaitu lingkungan atau Alam adalah Mama/Ibu bagi kehidupan Masyarakat Papua.

"Hutan dan Alam sekitar Bagaikan Air Susu dan Madu ibaratnya tanah bagaikan seorang Mama/Ibu yang memberikan air susu yaitu kekayaan yang ada di atas tanah"

Selama puluhan ribu tahun secara turun temurun, masyarakat Papua telah hidup menyatu dengan alam sebagai dasar atau sumber utama penghidupan mereka. Dengan bentang alam Papua yang masih menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan rumah bagi beragam

ekosistem penting serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya, maka alam Papua hingga saat ini masih merupakan modal dasar penghidupan masyarakat khususnya untuk Orang Asli Papua. Pembangunan berkelanjutan di Papua dapat diwujudkan dengan melestarikan hubungan yang baik antara manusia Papua dengan alamnya berdasarkan daya dukung, daya tampung dan peruntukan ruang yang telah disepakati bersama. Gambar berikut ini menunjukan bentuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Visi Papua 2100.

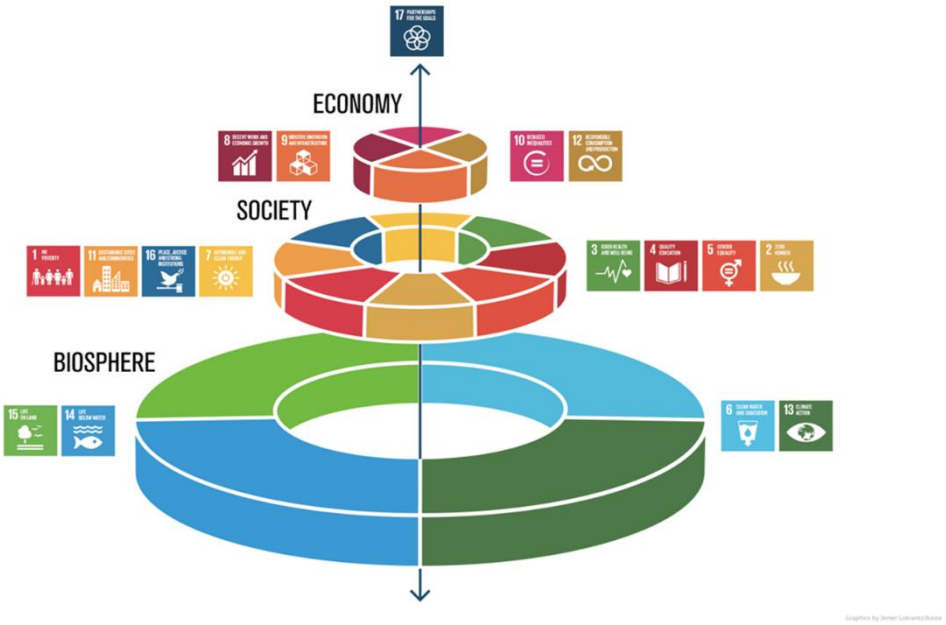

Gambar … Posisi Goals SDGs berdasarkan Visi Papua 2100

Alam dan lingkungan merupakan dasar dari segala upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Jika kualitas alam meningkat, meningkat pula kualitas hidup mereka. Kualitas alam yang baik ini akan dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Papua secara adil, merata dan berkelanjutan baik pada masa sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Dampak dari pelaksanaan TPB/SDGs di Papua adalah keluaran dari pelaksanaan agenda pembangunan daerah sekaligus memenuhi komitment pembangunan nasional dan pembangunan global. Untuk itu, pelaksanaan TPB/SDGs harus menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan antara lain:

- ***"Universality"*** yaitu mendorong terlaksanannya TPB/SDGs di seluruh wilayah Provinsi Papua yang mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota

- ***"Integration"*** yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dalam setiap perencanaan pembangunan daerah; dan
- **"*No One Left Behind*"** atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal" yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua orang tanpa terkecuali.
- ***"Inclusive"*** yang dilaksanakan melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah.

Sebagai salah satu perwujudan dari prinsip inklusif tersebut dapat dilakukan melalui penetapan Tim Koordinasi Provinsi yang beranggotakan keempat *platform* partisipasi, yaitu: 1). Pemerintah dan Parlemen; 2). Organisasi Kemasyarakatan; 3). Filantropi dan Pelaku Usaha; dan 4). Akademisi. Setiap pihak dan unsur dapat berpartisipasi dan berkontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip inklusif, partisipasi, dan tranparansi dilaksanakan sehingga kepercayaan antar pihak tumbuh dan terjaga.

Pelaksanaan pencapaian indikator TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPD Provinsi Papua 2024-2026. Rincian target dan indikator pada 4 (empat) Pilar Pembangunan Berkelanjutan yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs 2024-2029

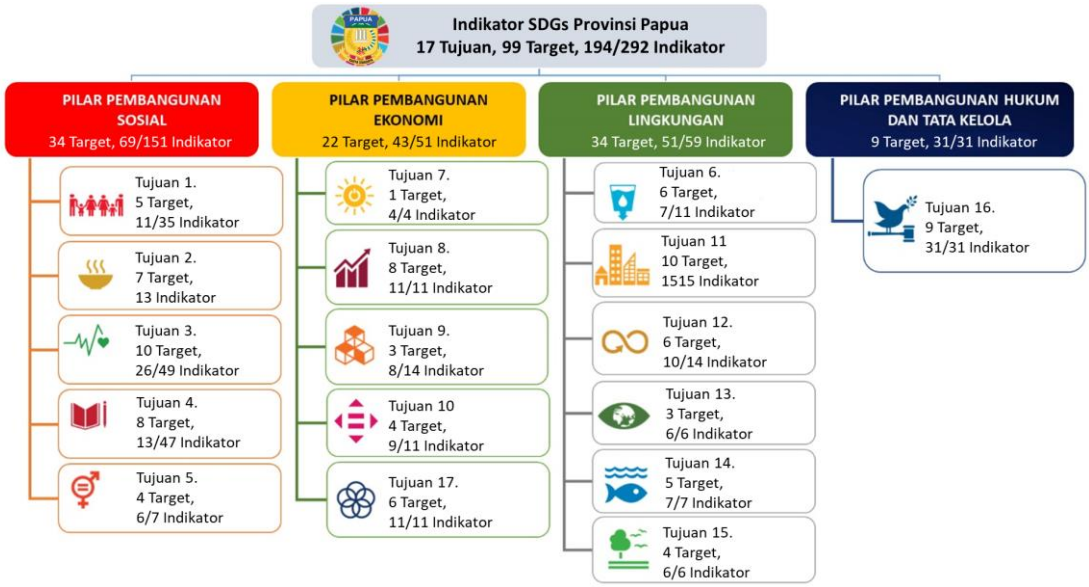

Gambar 1. 2 Indikator TPB/SDGs berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Meta Data TPB/SDGs Edisi II (PPN/BAPPENAS) Tahun 2020

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, pemerintah Provinsi Papua berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

1. **Optimalisasi Penerimaan Daerah.**

   Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, pendapatan bukan pajak, hibah (grant), retribusi daerah, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi salah satu indikator SDGs pada Goals 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan Provinsi Papua.

2. **Sumber Pembiayaan Non Pemerintah**

   Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukan perkembangan yang ditunjukan oleh makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari tiga triliun rupiah per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya "ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*" yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

3. **Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah**

   Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index), dan pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd financing, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (pemerintah, swasta dan filantropi).

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Tahapan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Papua Tahun 2024-2029 ini dilakukan setelah penyusunan RPD Provinsi Papua 2024 – 2026. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 ini menjadi dasar penyusunan RAD TPB yang selanjutnya akan

di integrasikan kedalam dokumen RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Papua tahun 2025 – 2029.

Koordinator pelaksana penyusunan RAD TPB/SDGs ini adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua dengan melibatkan ke-4 platform partisipasi (Pemerintah dan Parlemen, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha), melalui pentahapan pelaksanaan penyusunan RAD TPB/SDGs sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

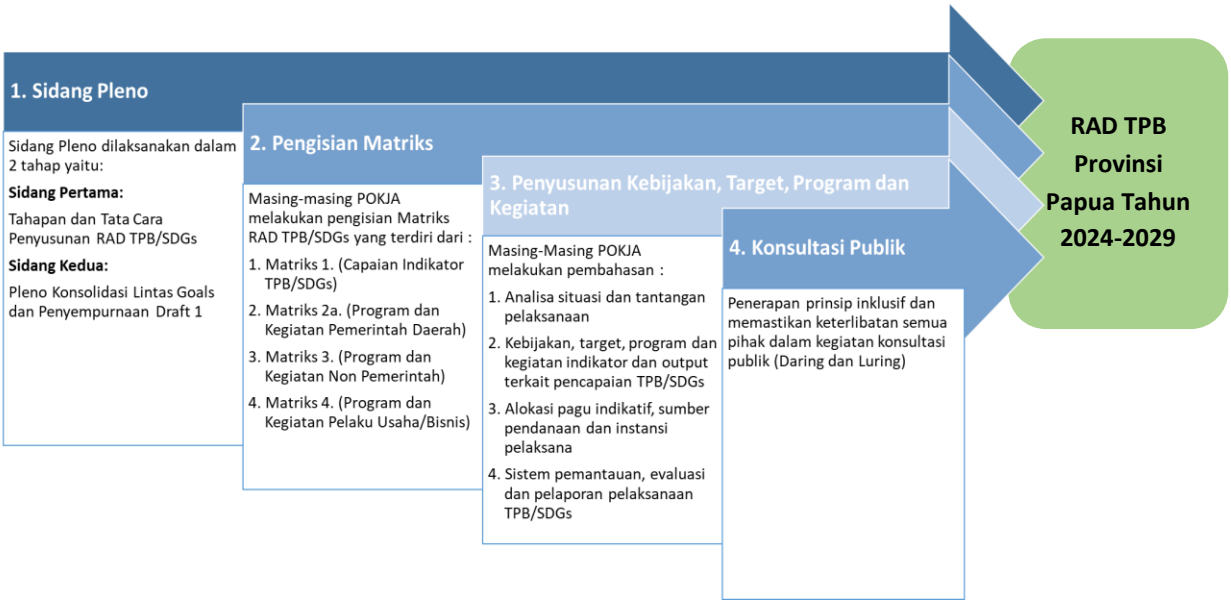

Gambar 1. 3 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Papua

Pelaksanaan penyusunan RAD TPB Provinsi Papua tahun 2024 – 2029 ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu 1). Sidang Pleno; 2). Pengisian Matriks; 3). Penyusunan Kebijakanm Target, Program dan Kegiatan; dan 4). Konsultasi Publik. Rincian tahapan pelaksanaan penyusunan antara lain:

1. **Sidang Pleno.** Sidang Pleno dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
    - Sidang Pertama dilaksanakan untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs
    - Sidang Kedua dilaksanakan untuk melakukan pleno konsolidasi lintas goals dan penyempurnaan draft 1
2. **Pengisian Matriks.** Masing-masing POKJA melakukan pengisian Matriks RAD TPB/SDGs yang terdiri dari :
    - Matriks 1. (Capaian Indikator TPB/SDGs)
    - Matriks 2b. (Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah)
    - Matriks 3. (Program dan Kegiatan Non Pemerintah)

- Matriks 4. (Program dan Kegiatan Pelaku Usaha/Bisnis)

3. **Penyusunan Kebijakan, Target, Program dan Kegiatan.** Masing-Masing POKJA melakukan pembahasan :
   - Analisa situasi dan tantangan pelaksanaan
   - Kebijakan, target, program dan kegiatan indikator dan output terkait pencapaian TPB/SDGs
   - Alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
   - Sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs
4. **Konsultasi Publik.** Penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan konsultasi publik (Daring dan Luring)

1.1 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Papua 2022 – 2026 terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang mengenai keselarasan TPB/SDGs terhadap agenda RPJMN 2020 – 2024 dan agenda RPD Provinsi Papua 2024 – 2026, Komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, pembiayaan TPB/SDGs, metodologi penyusunan rencana aksi TPB/SDGs dan sistematika rencana aksi TPB/SDGs.

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap tujuan TPB/SDGs. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2022 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program, dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2029.

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Menggambarkan arah kebijakan pencapaian Pemerintah Daerah Provinsi Papua seperti yang dituangkan dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dengan target pencapaian setiap tujuan TPB/SDGs hingga tahun 2029. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis

(Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program kerja non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB ini menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif, serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs Papua Tahun 2024-2029. BAB ini berisi teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs berdasarkan arahan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.

BAB II
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai Indonesia dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Kondisi inilah yang menjadikan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yanglebih besar kepada target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024.

A. Status Capaian

Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Persentase Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kabupaten dengan jumlah presentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi papua adalah Kabupaten supiori, mencapai 37,91 persen di tahun 2021. Presentase penduduk miskin di Kabupaten Supiori ini telah mengalami penurunan dari 39,22 persen di tahun 2018 menjadi 36,91 persen di tahun 2020, namun kembali meningkat di tahun 2021 seiring dengan kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia pada tahun tersebut. Kabupaten Waropen menduduki posisi kedua dengan presentase

penduduk miskin di tahun 2021 sebesar 29,85 persen dan diikuti Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 28,78 persen. Kota Jayapura memiki presentase penduduk miskin tersedikit yaitu sebesar 11,39 persen dan kabupaten Jayapura sebesar 12,13 persen di tahun 2021. Lihat tabel berikut ini.

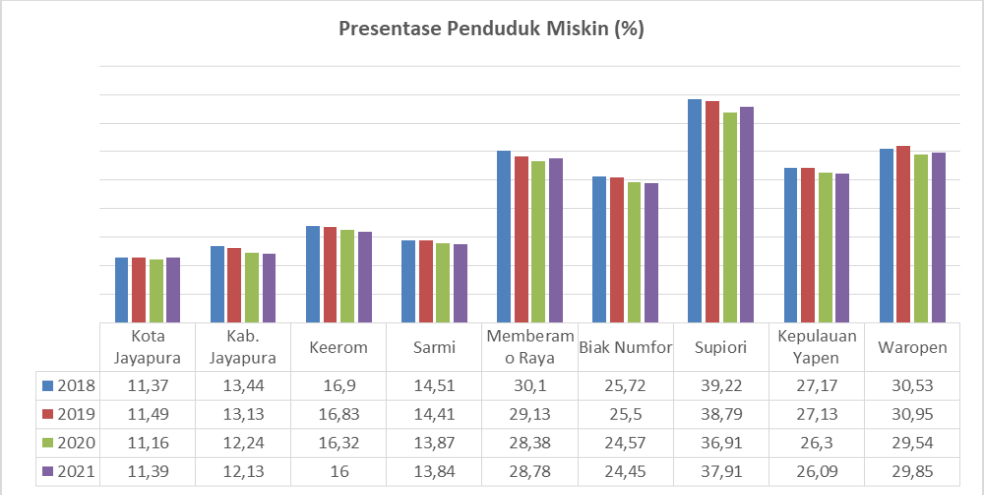

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	11,37	13,44	16,9	14,51	30,1	25,72	39,22	27,17	30,53
2019	11,49	13,13	16,83	14,41	29,13	25,5	38,79	27,13	30,95
2020	11,16	12,24	16,32	13,87	28,38	24,57	36,91	26,3	29,54
2021	11,39	12,13	16	13,84	28,78	24,45	37,91	26,09	29,85

Gambar 2. 1 Presentase Penduduk Miskin per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). 1). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), dan 2). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Garis kemiskinan tertinggi berada di Kota Jayapura dan terus mengalami kenaikan dari Rp. 944.479 di tahun 2018 menjadi Rp. 1.051.297 di tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa nilai rupiah minimum yang diperlukan penduduk kota jayapura untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan rata-rata di atas satu juta rupiah. Untuk kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah kabupaten supiori yang secara fluktuatif meningkat dari Rp. 434.625 di tahun 2018 menjadi Rp. 496.615 di tahun 2021. Apabila dibandingkan angka garis kemiskinan dengan presentase penduduk miskin, maka terlihat bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pokok penduduk di kabupaten Supiori selama sebulan masih termasuk kategori rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua, namun dalam

mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan kebutuhan lainnya terlihat masih sangat rendah sehingga presentase penduduk miskin di kabupaten Supiori masih cukup tinggi. Selain itu, beberapa faktor seperti upah minimum, kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran akan semakin mepengaruhi peningkatan presentase penduduk miskin di daerah tersebut. Gambar berikut ini menujukan angka garis kemiskinan per kabupaten di Provinsi Papua.

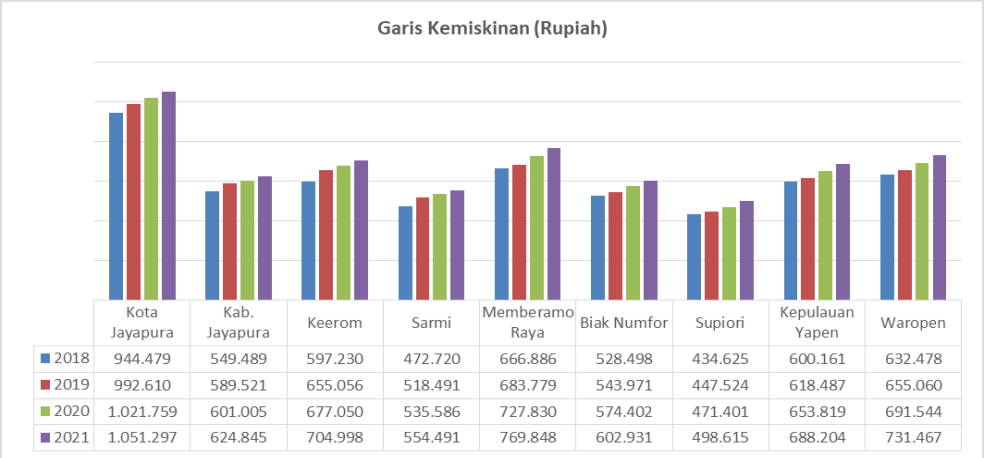

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	944.479	549.489	597.230	472.720	666.886	528.498	434.625	600.161	632.478
2019	992.610	589.521	655.056	518.491	683.779	543.971	447.524	618.487	655.060
2020	1.021.759	601.005	677.050	535.586	727.830	574.402	471.401	653.819	691.544
2021	1.051.297	624.845	704.998	554.491	769.848	602.931	498.615	688.204	731.467

Gambar 2. 2 Garis kemiskinan per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

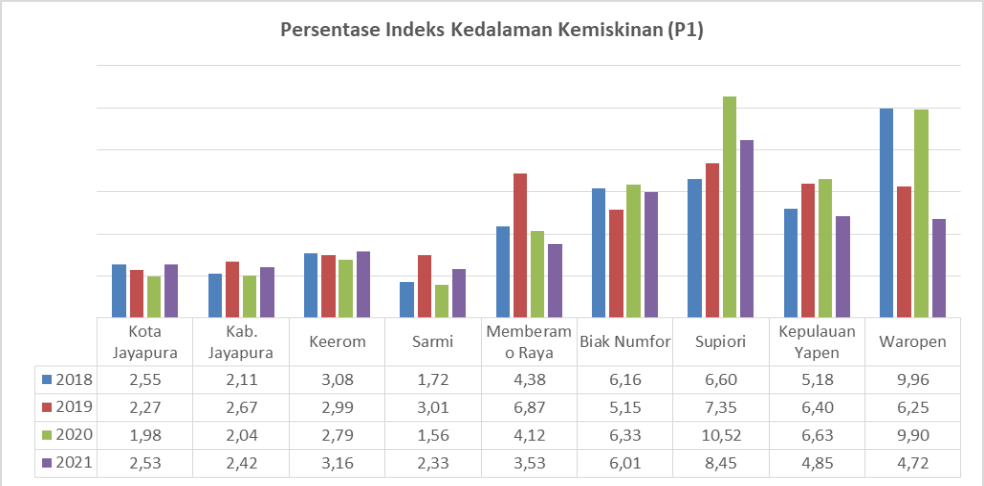

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	2,55	2,11	3,08	1,72	4,38	6,16	6,60	5,18	9,96
2019	2,27	2,67	2,99	3,01	6,87	5,15	7,35	6,40	6,25
2020	1,98	2,04	2,79	1,56	4,12	6,33	10,52	6,63	9,90
2021	2,53	2,42	3,16	2,33	3,53	6,01	8,45	4,85	4,72

Gambar 2. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Dari gambar di atas, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kota Jayapura sebesar 2,53 di tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan di beberapa kabupaten selain kota Jayapura

seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, terlihat menurun sejak tahun 2018 hingga 2020, namun kembali meningkat di tahun 2021. Kondisi berbanding terbalik terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kep. Yapen dan Kabupaten Waropen yang indeks kedalaman kemiskinan terlihat menurun di tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan menurun artinya rata-rata pengeluaran penduduk semakin dekat dengan garis kemiskinan, demikian sebaliknya apabila indeks kedalaman semakin meningkat maka rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan

Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan kemiskinan di beberapa kabupaten selain kota Jayapura seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, terlihat menurun sejak tahun 2018 hingga 2020, namun kembali meningkat di tahun 2021.

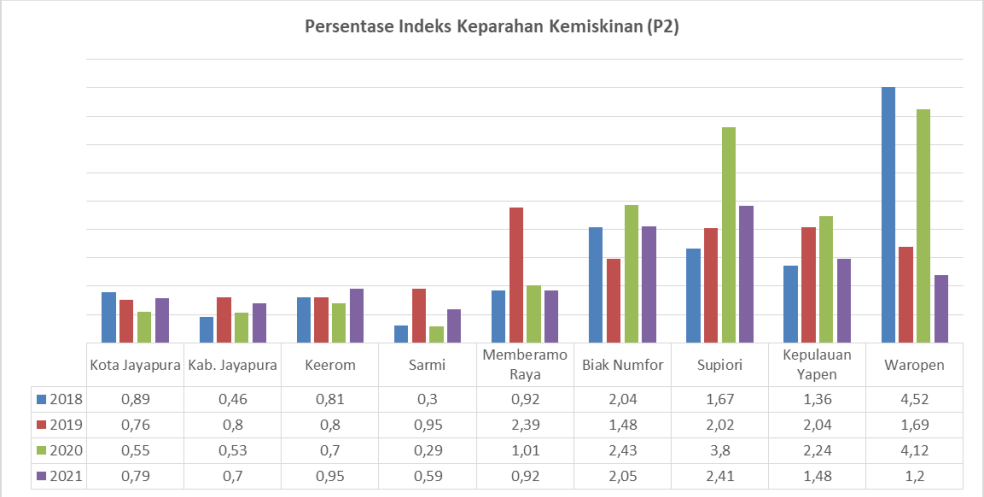

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	0,89	0,46	0,81	0,3	0,92	2,04	1,67	1,36	4,52
2019	0,76	0,8	0,8	0,95	2,39	1,48	2,02	2,04	1,69
2020	0,55	0,53	0,7	0,29	1,01	2,43	3,8	2,24	4,12
2021	0,79	0,7	0,95	0,59	0,92	2,05	2,41	1,48	1,2

Gambar 2. 4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Kondisi berbanding terbalik terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kep. Yapen dan Kabupaten Waropen yang indeks kedalaman kemiskinan terlihat menurun di tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan menurun artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menurun, demikian sebaliknya apabila indeks keparahan kemiskinan meningkat maka Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi.

Kemiskinan di Semua Dimensi

Analisis Kemiskinan multidimensi yang diukur melalui indikator Kemiskinan Multidimensi adalah indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan. Kemiskinan berbagai dimensi adalah kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seperti perumahan, sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan asset pokok untuk bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda dan luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator. Setiap indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan

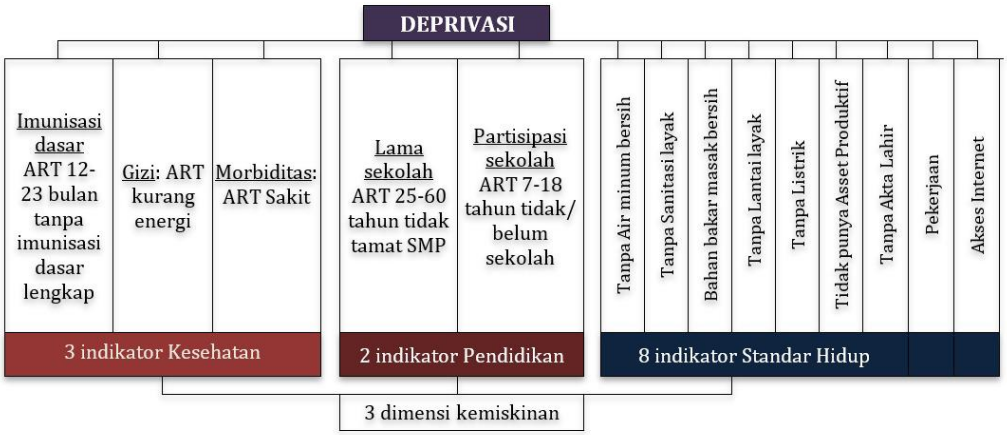

Gambar 2. 5 Indikator Kemiskinan Multidimensi

Sumber: Meta Data Pilar Sosial Edisi II

Dimensi #1. Kesehatan

1.1. Imunisasi Dasar.

Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan pada anak. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah imunisasi dasar untuk bayi sebelum berumur 1 (satu) tahun dan dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan untuk anak umur di bawah 2 (dua) tahun. Imunisasi dasar terdiri atas imunisasi terhadap beberapa penyakit, yaitu imunisasi BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis (TBC), hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B, polio untuk mencegah penyakit poliomyelitis, DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, serta imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Program imunisasi dasar lengkap dari pemerintah diberikan pada bayi berumur sebelum 1 (satu) tahun. Anak umur 12-23 bulan dikatakan menerima imunisasi dasar lengkap jika anak sudah menerima 1 (satu) kali imunisasi

BCG, 3 (tiga) kali imunisasi polio, 3 (tiga) kali imunisasi DPT, 3 (tiga) kali imunisasi hepatitis B dan 1 (satu) kali imunisasi campak.

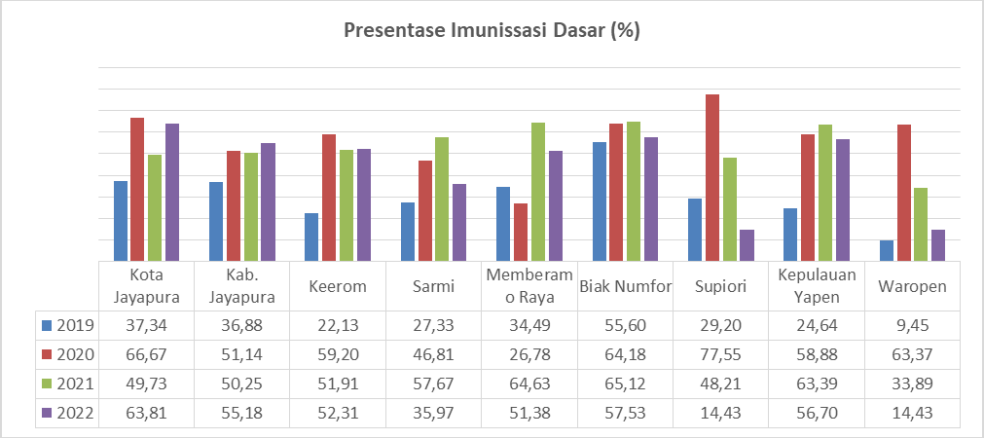

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2019	37,34	36,88	22,13	27,33	34,49	55,60	29,20	24,64	9,45
2020	66,67	51,14	59,20	46,81	26,78	64,18	77,55	58,88	63,37
2021	49,73	50,25	51,91	57,67	64,63	65,12	48,21	63,39	33,89
2022	63,81	55,18	52,31	35,97	51,38	57,53	14,43	56,70	14,43

Gambar 2. 6 Presentase Imunisasi Dasar per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

1.2. Gizi. *Prevalensi of Undernourishment* (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi.

Kekurangan Gizi yang meliputi kategori Gizi buruk dan Gizi Kurang dihitung berdasarkan Indeks Berat Badan menurut panjang dan tinggi badan (BB/PB atau TB).

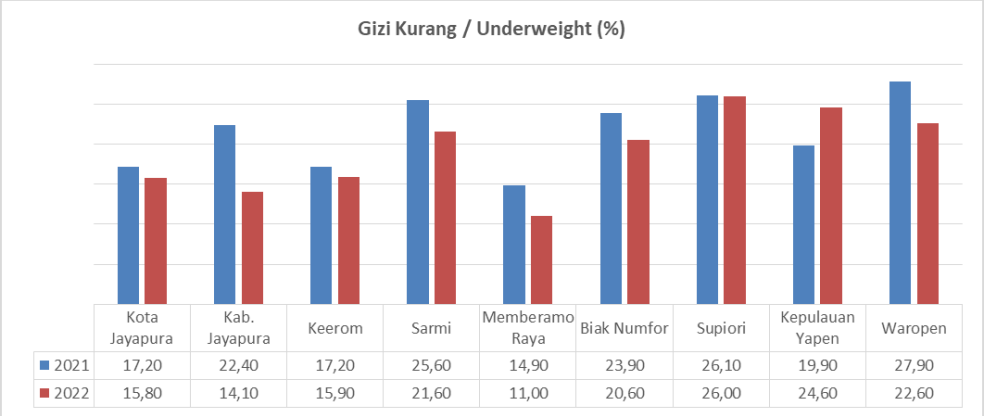

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2021	17,20	22,40	17,20	25,60	14,90	23,90	26,10	19,90	27,90
2022	15,80	14,10	15,90	21,60	11,00	20,60	26,00	24,60	22,60

Gambar 2. 7 PresentaseAnak Kurang Gizi (Underweight) per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

1.3. Morbilitas. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Status kesehatan masyarakat dapat mencerminkan seberapa banyak penduduk dalam sebulan terakhir yang sakit yaitu mereka mempunyai keluhan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Sakit yang dimaksud dalam definisi ini adalah sakit yang bersifat akut (mendadak) maupun sakit yang bersifat kronis yang tidak selalu dapat mengancam jiwa.

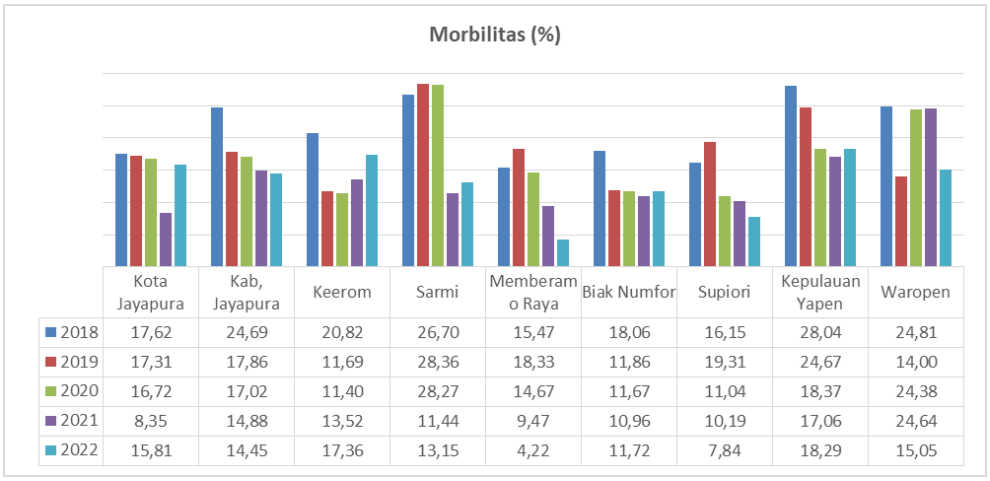

	Kota Jayapura	Kab, Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	17,62	24,69	20,82	26,70	15,47	18,06	16,15	28,04	24,81
2019	17,31	17,86	11,69	28,36	18,33	11,86	19,31	24,67	14,00
2020	16,72	17,02	11,40	28,27	14,67	11,67	11,04	18,37	24,38
2021	8,35	14,88	13,52	11,44	9,47	10,96	10,19	17,06	24,64
2022	15,81	14,45	17,36	13,15	4,22	11,72	7,84	18,29	15,05

Gambar 2. 8 Presentase Penduduk yang mengalami gangguan Kesehatan per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Dimensi #2. Pendidikan

2.1. Lama Sekolah.

Persentase penduduk usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun. Indikator ini mencerminkan penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) yang tidak mendapatkan akses pada pendidikan SMP pada saat program wajib belajar 9 tahun diberlakukan sejak tahun 1994. Mereka yang tidak mempunyai ijazah SMP adalah mereka yang dirugikan karena tidak memperoleh atau memanfaatkan kesempatan bersekolah di tingkat SMP sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.

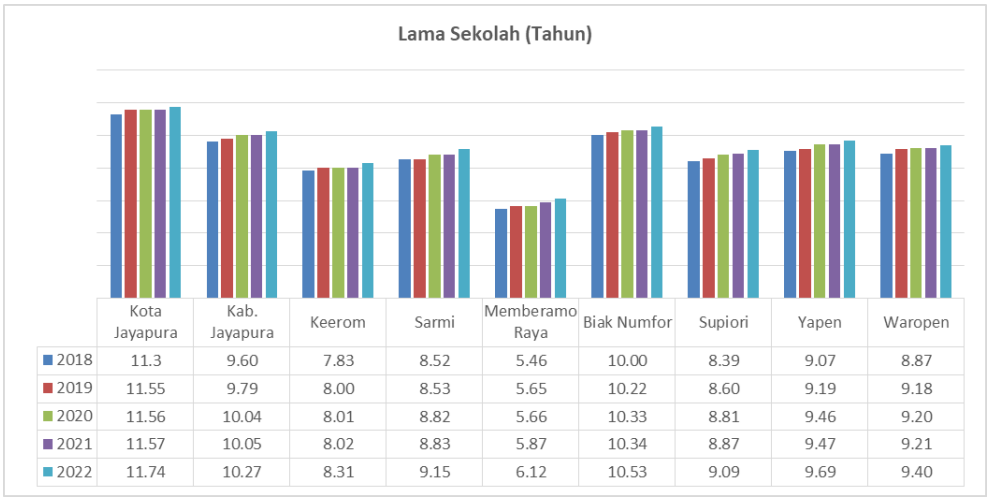

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	11.3	9.60	7.83	8.52	5.46	10.00	8.39	9.07	8.87
2019	11.55	9.79	8.00	8.53	5.65	10.22	8.60	9.19	9.18
2020	11.56	10.04	8.01	8.82	5.66	10.33	8.81	9.46	9.20
2021	11.57	10.05	8.02	8.83	5.87	10.34	8.87	9.47	9.21
2022	11.74	10.27	8.31	9.15	6.12	10.53	9.09	9.69	9.40

Gambar 2. 9 Presentase Lama Sekolah per Kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

2.2. Partisipasi sekolah.

Persentase anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak/belum bersekolah.

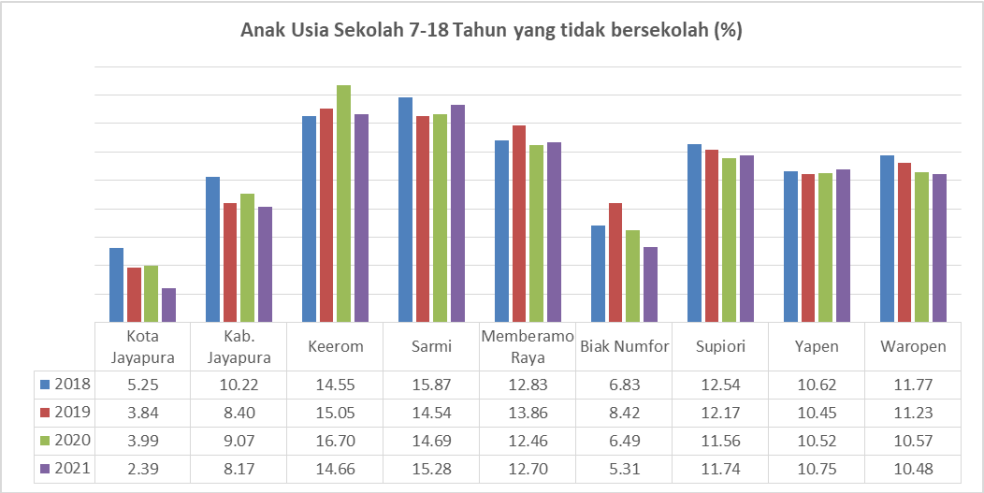

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	5.25	10.22	14.55	15.87	12.83	6.83	12.54	10.62	11.77
2019	3.84	8.40	15.05	14.54	13.86	8.42	12.17	10.45	11.23
2020	3.99	9.07	16.70	14.69	12.46	6.49	11.56	10.52	10.57
2021	2.39	8.17	14.66	15.28	12.70	5.31	11.74	10.75	10.48

Gambar 2. 10 Presentase anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak bersekolah per kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Dimensi #3. Standar Hidup

3.1. Listrik.

Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik.

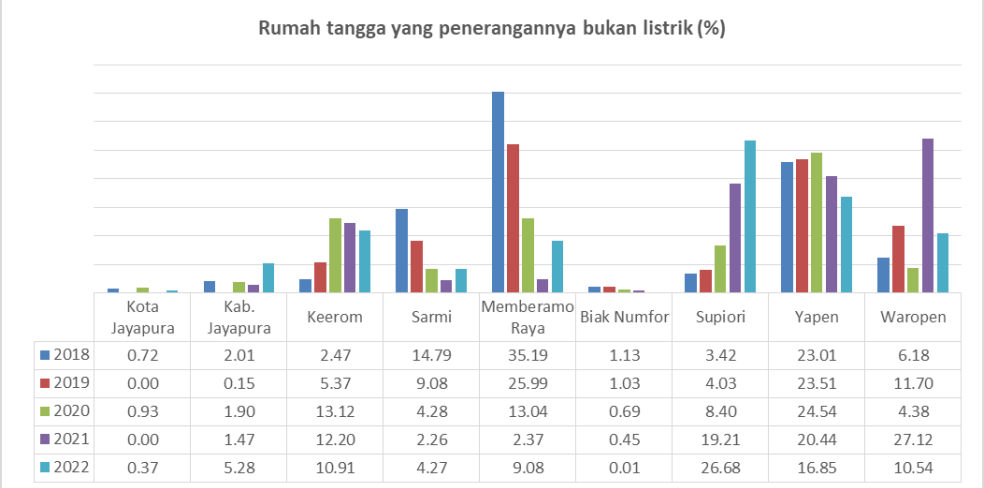

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	0.72	2.01	2.47	14.79	35.19	1.13	3.42	23.01	6.18
2019	0.00	0.15	5.37	9.08	25.99	1.03	4.03	23.51	11.70
2020	0.93	1.90	13.12	4.28	13.04	0.69	8.40	24.54	4.38
2021	0.00	1.47	12.20	2.26	2.37	0.45	19.21	20.44	27.12
2022	0.37	5.28	10.91	4.27	9.08	0.01	26.68	16.85	10.54

Gambar 2. 11 Presentase Rumah tangga yang penerangannya bukan listrik per kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.2. Air minum.

Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.

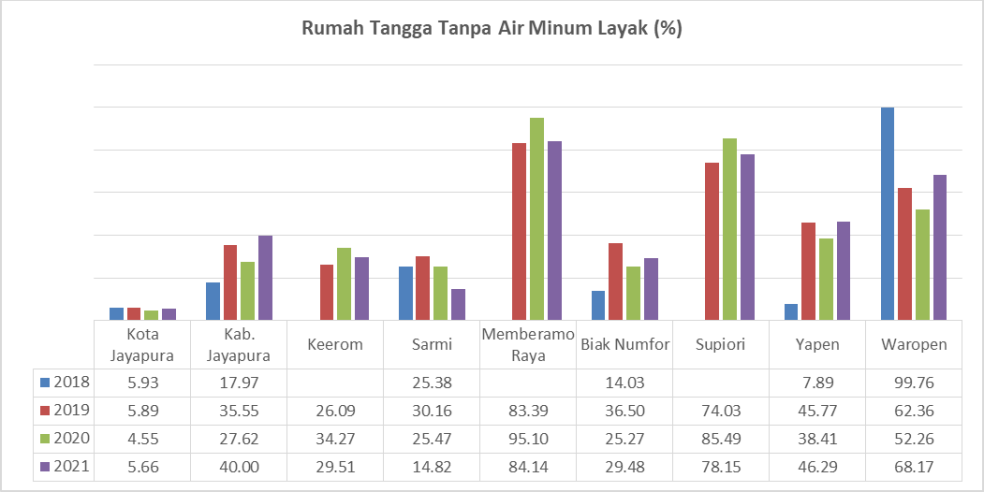

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	5.93	17.97		25.38		14.03		7.89	99.76
2019	5.89	35.55	26.09	30.16	83.39	36.50	74.03	45.77	62.36
2020	4.55	27.62	34.27	25.47	95.10	25.27	85.49	38.41	52.26
2021	5.66	40.00	29.51	14.82	84.14	29.48	78.15	46.29	68.17

Presentase rumah tangga tanpa air minum layak per kabupaten

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.3. Sanitasi.

Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama.

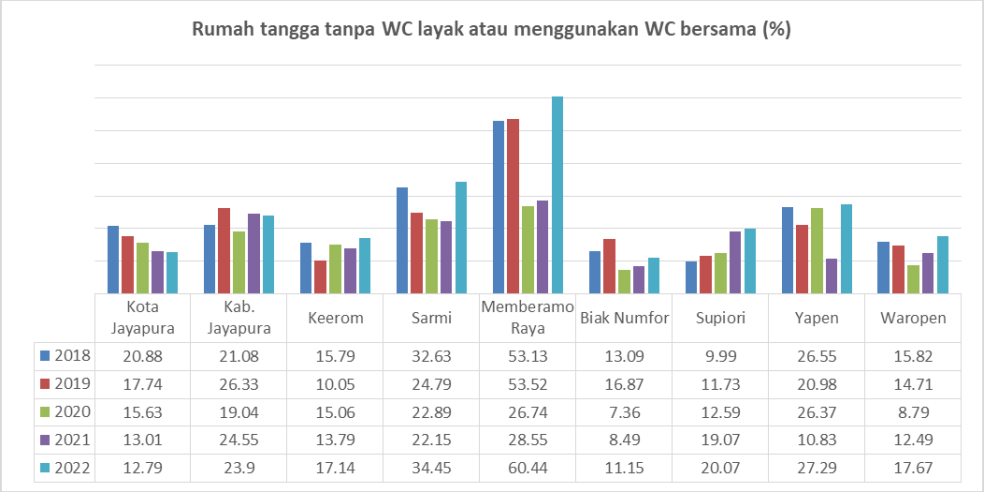

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	20.88	21.08	15.79	32.63	53.13	13.09	9.99	26.55	15.82
2019	17.74	26.33	10.05	24.79	53.52	16.87	11.73	20.98	14.71
2020	15.63	19.04	15.06	22.89	26.74	7.36	12.59	26.37	8.79
2021	13.01	24.55	13.79	22.15	28.55	8.49	19.07	10.83	12.49
2022	12.79	23.9	17.14	34.45	60.44	11.15	20.07	27.29	17.67

Gambar 2. 12 Presentase rumah tangga tanpa WC layak atau menggunakan WC bersama

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.4. Lantai.

Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m^2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m^2.

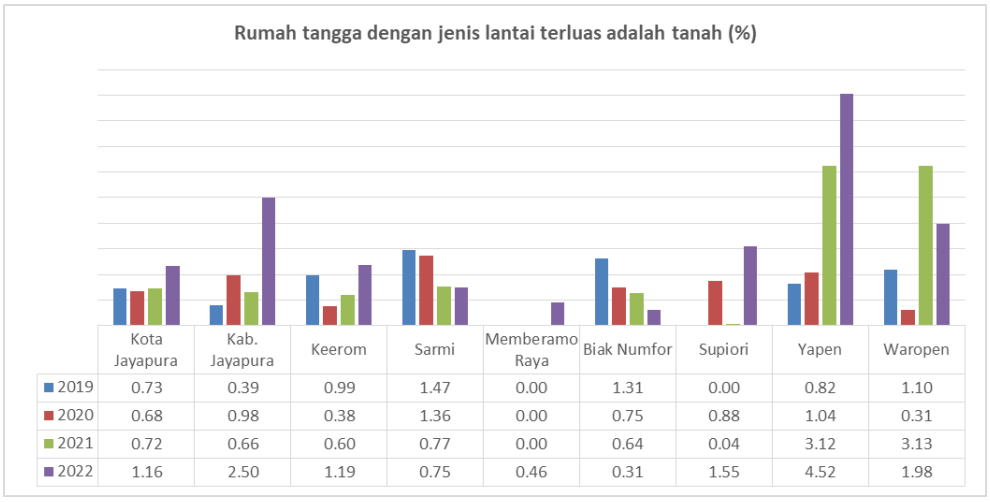

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	0.73	0.39	0.99	1.47	0.00	1.31	0.00	0.82	1.10
2020	0.68	0.98	0.38	1.36	0.00	0.75	0.88	1.04	0.31
2021	0.72	0.66	0.60	0.77	0.00	0.64	0.04	3.12	3.13
2022	1.16	2.50	1.19	0.75	0.46	0.31	1.55	4.52	1.98

Gambar 2. 13 Presentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.5. Bahan bakar memasak.

Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg.

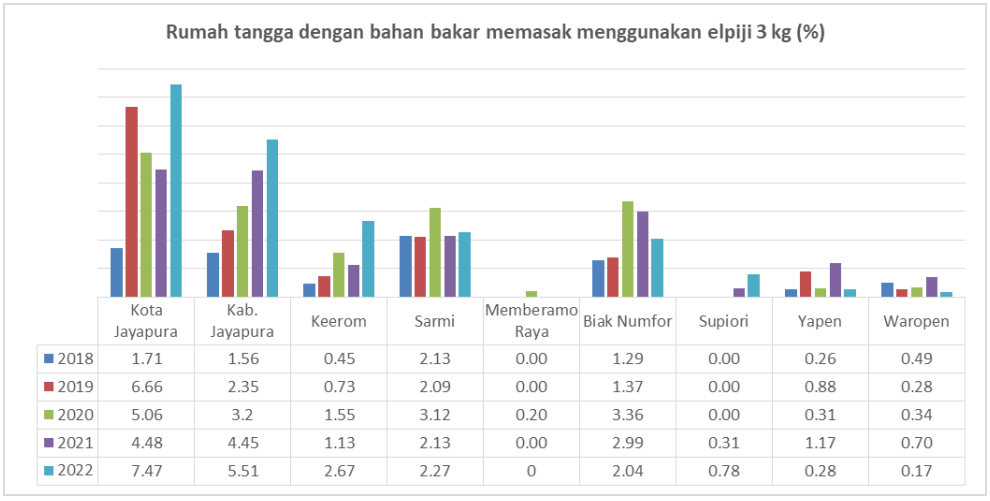

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	1.71	1.56	0.45	2.13	0.00	1.29	0.00	0.26	0.49
2019	6.66	2.35	0.73	2.09	0.00	1.37	0.00	0.88	0.28
2020	5.06	3.2	1.55	3.12	0.20	3.36	0.00	0.31	0.34
2021	4.48	4.45	1.13	2.13	0.00	2.99	0.31	1.17	0.70
2022	7.47	5.51	2.67	2.27	0	2.04	0.78	0.28	0.17

Gambar 2. 14 Presentase rumah tangga dengan bahan bakar elpiji 3 kg

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.6. Aset.

Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.

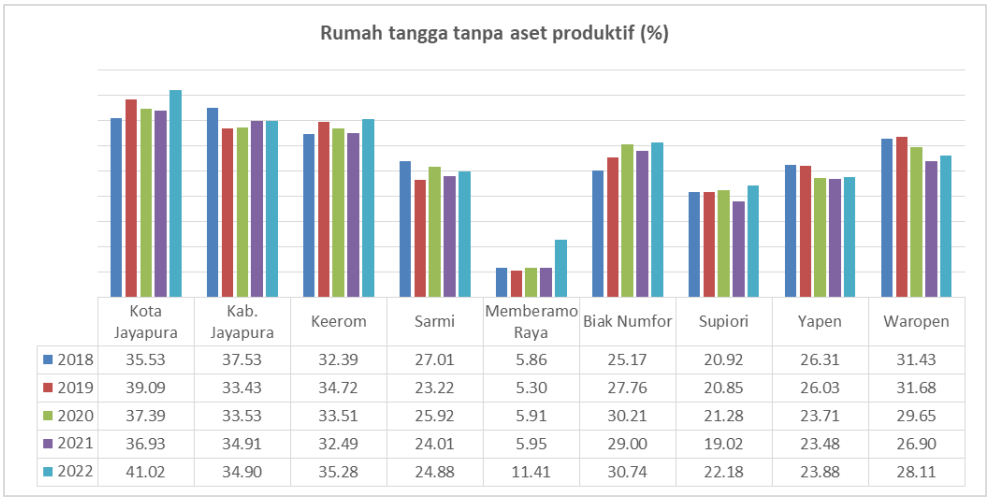

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	35.53	37.53	32.39	27.01	5.86	25.17	20.92	26.31	31.43
2019	39.09	33.43	34.72	23.22	5.30	27.76	20.85	26.03	31.68
2020	37.39	33.53	33.51	25.92	5.91	30.21	21.28	23.71	29.65
2021	36.93	34.91	32.49	24.01	5.95	29.00	19.02	23.48	26.90
2022	41.02	34.90	35.28	24.88	11.41	30.74	22.18	23.88	28.11

Gambar 2. 15 Presentase rumah tangga tanpa asset produktif

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.7. Akta kelahiran.

Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.

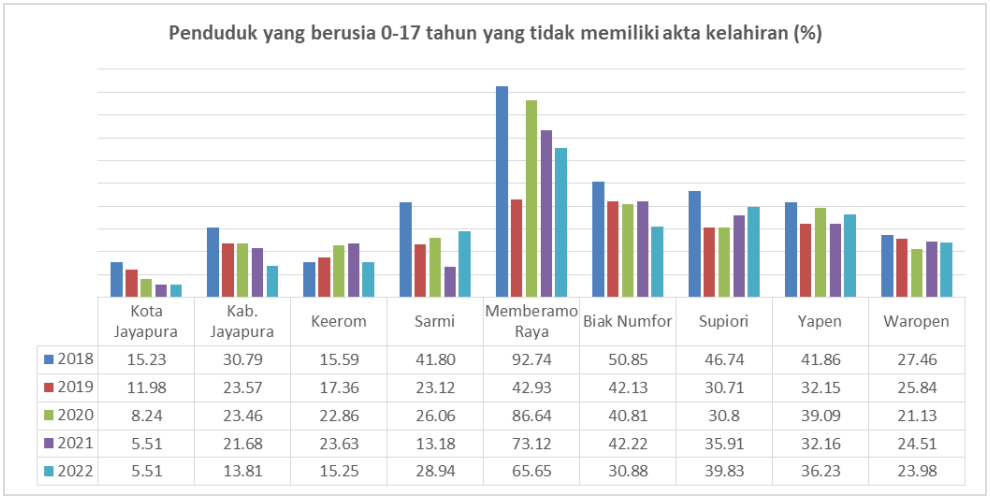

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	15.23	30.79	15.59	41.80	92.74	50.85	46.74	41.86	27.46
2019	11.98	23.57	17.36	23.12	42.93	42.13	30.71	32.15	25.84
2020	8.24	23.46	22.86	26.06	86.64	40.81	30.8	39.09	21.13
2021	5.51	21.68	23.63	13.18	73.12	42.22	35.91	32.16	24.51
2022	5.51	13.81	15.25	28.94	65.65	30.88	39.83	36.23	23.98

Gambar 2. 16 Presentase penduduk usia 0 – 17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.8. Akses internet.

Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet.

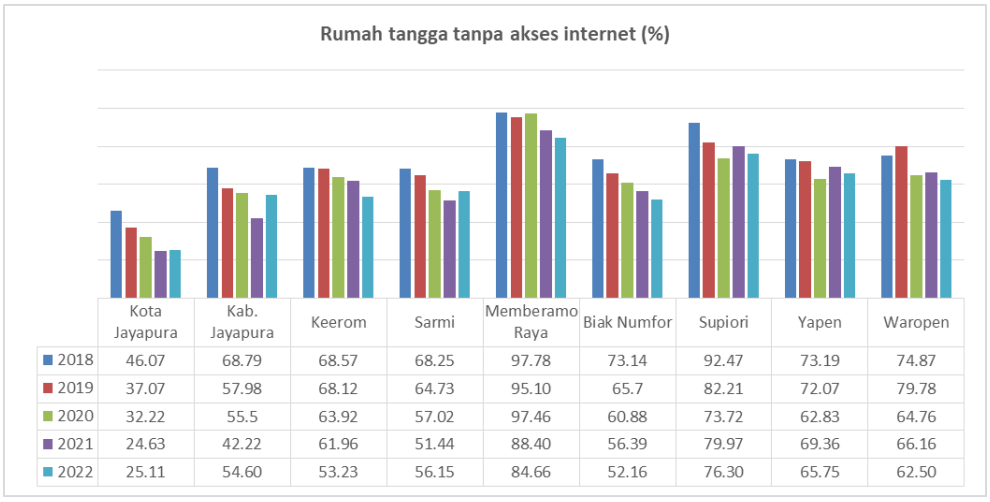

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	46.07	68.79	68.57	68.25	97.78	73.14	92.47	73.19	74.87
2019	37.07	57.98	68.12	64.73	95.10	65.7	82.21	72.07	79.78
2020	32.22	55.5	63.92	57.02	97.46	60.88	73.72	62.83	64.76
2021	24.63	42.22	61.96	51.44	88.40	56.39	79.97	69.36	66.16
2022	25.11	54.60	53.23	56.15	84.66	52.16	76.30	65.75	62.50

Gambar 2. 17 Presentase rumah tangga tanpa akses internet

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

3.9. Pekerjaan

Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.

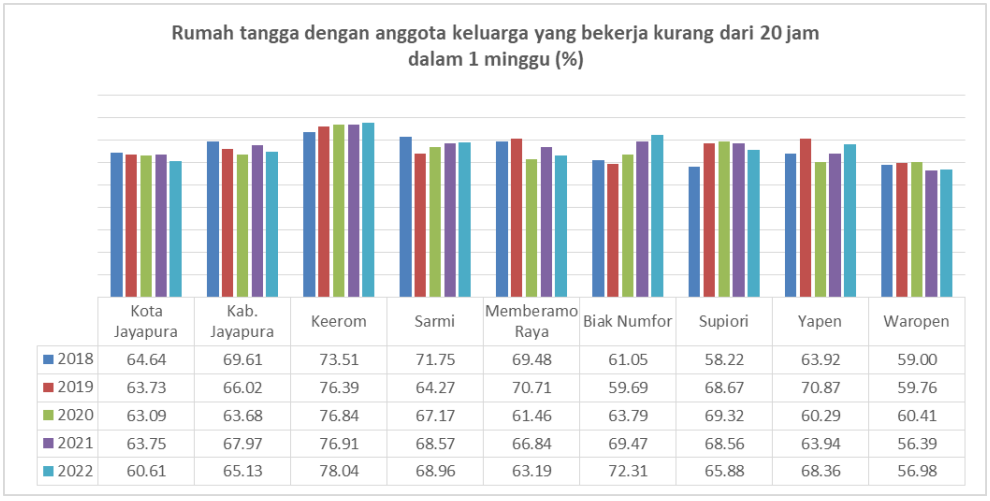

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	64.64	69.61	73.51	71.75	69.48	61.05	58.22	63.92	59.00
2019	63.73	66.02	76.39	64.27	70.71	59.69	68.67	70.87	59.76
2020	63.09	63.68	76.84	67.17	61.46	63.79	69.32	60.29	60.41
2021	63.75	67.97	76.91	68.57	66.84	69.47	68.56	63.94	56.39
2022	60.61	65.13	78.04	68.96	63.19	72.31	65.88	68.36	56.98

Gambar 2. 18 Presentase rumah tangga dengan anggota keluarga yang bekerja kurang dari 20 jam/minggu

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Perlindungan Sosial – Program Jaminan perlindungan sosial PBI menurut SJSN.

Program Bantuan Iuran (PBI) merupakan bentuk iuran jaminan kesehatan yang disetorkan oleh Pemerintah kepada pihak BPJS kesehatan setiap bulannya yang peruntukannya bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang tidak mampu. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan sosial PBI ini antara lain: 1). Masyarakat yang termasuk dalam golongan masyarakat miskin atau kurang mampu; 2). Terdaftar dalam data terpadu

kesejahteraan sosial (DTKS); 3). Memiliki data yang sesuai dengan data di Dukcapil; dam 4). Bukan termasuk pekerja penerima upah. Jika sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka Dinas Sosial akan mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya saat hendak berobat di fasilitas kesehatan rujukan tanpa membayar. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

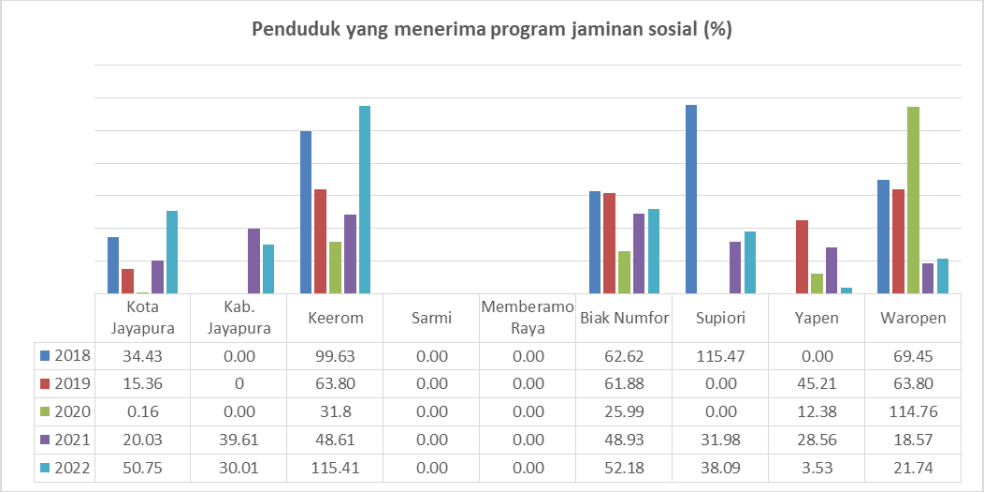

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	34.43	0.00	99.63	0.00	0.00	62.62	115.47	0.00	69.45
2019	15.36	0	63.80	0.00	0.00	61.88	0.00	45.21	63.80
2020	0.16	0.00	31.8	0.00	0.00	25.99	0.00	12.38	114.76
2021	20.03	39.61	48.61	0.00	0.00	48.93	31.98	28.56	18.57
2022	50.75	30.01	115.41	0.00	0.00	52.18	38.09	3.53	21.74

Gambar 2. 19 Presentase penduduk yang menerima program jaminan sosial

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Perlindungan Sosial – Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Selain program jaminan sosial kesehatan, Pemerintah melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 juga telah menunjuk PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, yang saat ini dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan pembiayaan yang berkelanjutan merupakan tantangan yang sangat besar dan membutuhkan serangkaian langkah-langkah besar dari Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.

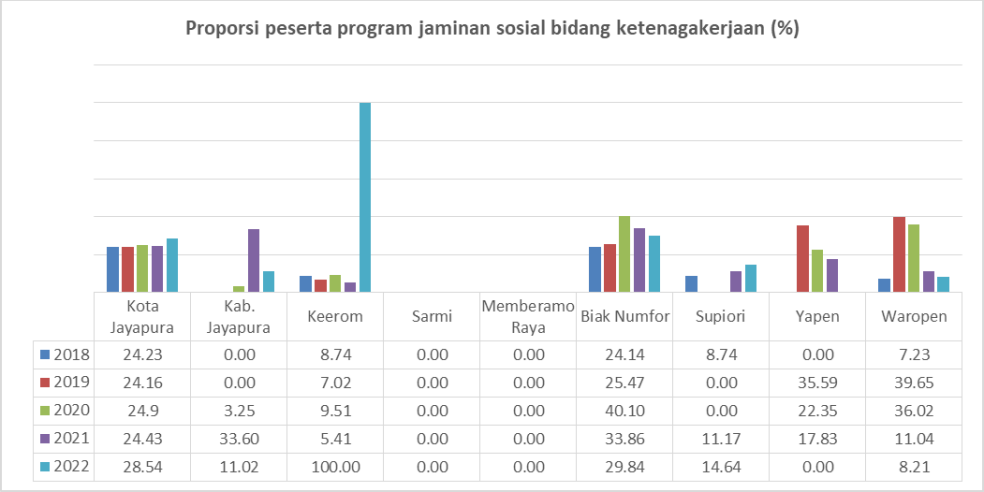

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	24.23	0.00	8.74	0.00	0.00	24.14	8.74	0.00	7.23
2019	24.16	0.00	7.02	0.00	0.00	25.47	0.00	35.59	39.65
2020	24.9	3.25	9.51	0.00	0.00	40.10	0.00	22.35	36.02
2021	24.43	33.60	5.41	0.00	0.00	33.86	11.17	17.83	11.04
2022	28.54	11.02	100.00	0.00	0.00	29.84	14.64	0.00	8.21

Gambar 2. 20 Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenangakerjaan

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Akses Terhadap Pelayanan Dasar - layanan air minum dan Layanan Sanitasi Dasar

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat.

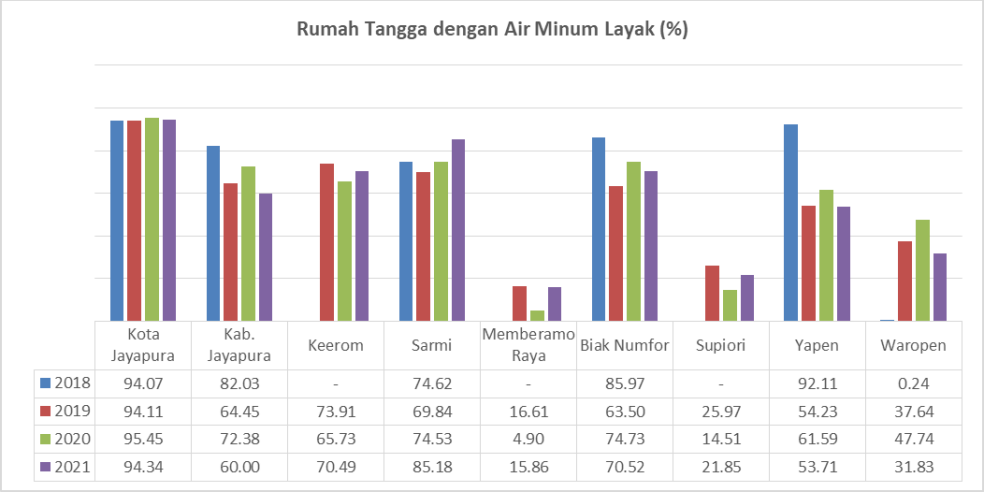

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	94.07	82.03	-	74.62	-	85.97	-	92.11	0.24
2019	94.11	64.45	73.91	69.84	16.61	63.50	25.97	54.23	37.64
2020	95.45	72.38	65.73	74.53	4.90	74.73	14.51	61.59	47.74
2021	94.34	60.00	70.49	85.18	15.86	70.52	21.85	53.71	31.83

Gambar 2. 21 Presentase rumah tangga dengan air minum layak

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit, dimana semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan dan menunjukkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di suatu wilayah.

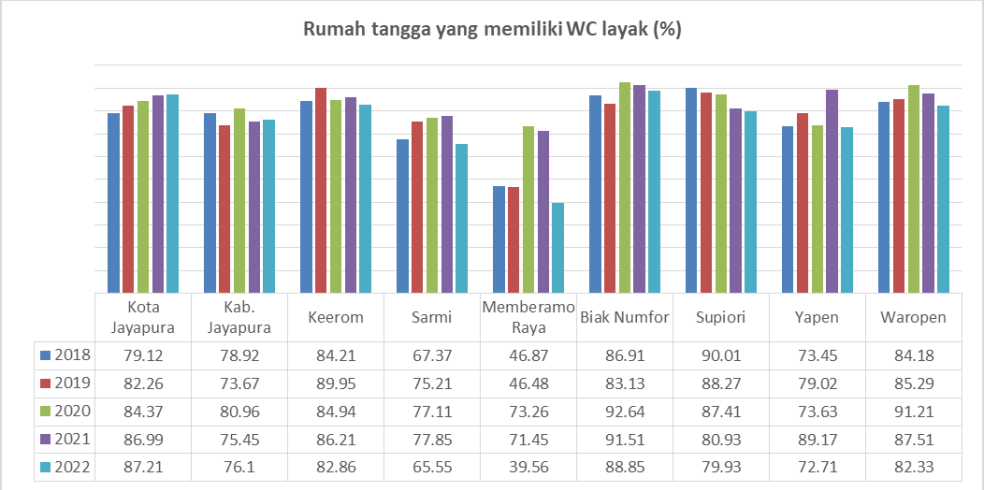

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	79.12	78.92	84.21	67.37	46.87	86.91	90.01	73.45	84.18
2019	82.26	73.67	89.95	75.21	46.48	83.13	88.27	79.02	85.29
2020	84.37	80.96	84.94	77.11	73.26	92.64	87.41	73.63	91.21
2021	86.99	75.45	86.21	77.85	71.45	91.51	80.93	89.17	87.51
2022	87.21	76.1	82.86	65.55	39.56	88.85	79.93	72.71	82.33

Gambar 2. 22 Presentase rumah tangga yang memiliki WC layak

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Ketahanan Masyarakat Miskin

Risiko perubahan iklim dan bencana merupakan ancaman serius pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia dan dapat mengganggu perolehan pendapatan negara yang saat ini juga sudah cukup sulit. Berbagai risiko tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dengan adanya perubahan iklim, dengan dampak yang meluas pada empat sektor prioritas dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045. Guncangan dan tekanan iklim juga akan memaksa penduduk yang hampir miskin masuk ke dalam kategori miskin, oleh karena itu diperlukan hubungan yang lebih erat antara upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan iklim sehingga pencapaian keduanya dapat berkelanjutan. Intervensi pengentasan kemiskinan, termasuk penurunan

beban ekonomi, penanganan isolasi spasial, dan peningkatan kapasitas ekonomi, perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko iklim saat ini dan masa depan. Aksi iklim perlu direncanakan dengan seksama sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat miskin dan hampir miskin serta mencegah meningkatnya kerentanan dan ketidaksetaraan.

Kemetrian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia telah mengembangkan suatu sistem yang dapat mengeluarkan informasi berupa indeks tingkat kerentanan suatu wilayah dengan satuan analisa terkecil adalah pada tingkat desa/kampung. Sistem tersebut dinamakan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan), dimana Indeks kerentanan suatu wilayah disusun dengan mengkombinasikan Indeks Keterpaparan dan Sensivitas (IKS) dan Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA). Tabel berikut ini menunjukan data indeks kerentanan, resiko banjir dan resiko kekeringan di setiap kota/kabupaten di Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Kementrian LHK Tahun 2023.

Tabel 2. 1 indeks kerentanan wilayah dan perubahan iklim per kabupaten

Kota/Kabupaten	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Kota Jayapura	0.70	0.58	2	3	5
Kab. Jayapura	0.70	0.69	2	2	4
Keerom	0.64	0.71	2	2	4
Sarmi	0.68	0.66	2	2	4
Memberamo Raya	0.51	0.74	3	4	5
Biak Numfor	0.70	0.67	2	2	4
Supiori	0.69	0.66	2	3	4
Yapen	0.63	0.71	2	2	4
Waropen	0.61	0.68	2	2	4

Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIDIK) Tahun 2023

Keterangan:

Angka 1 : Tidak Rentan; Angka 2 : Agak Rentan; Angka 3 : Cukup Rentan; Angka 4 : Rentan; dan Angka 5 : Sangat Rentan

B. Tantangan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di provinsi Papua, tantangan utama yang dihadapi penanggulangan kemiskinan antara lain 1). Konektivitas (akses jalan) antar wilayah masih terbatas, 2). Akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih terbatas, 3). Tingkat kesenjangan antar wilayah di Papua, 4) stabilitas harga komoditas konsumsi penduduk miskin dan kebutuhan konsumsi non-makanan seperti rumah, listrik, BBM, sanitasi dll masih terbatas, 5) belum maksimalnya pendataan penduduk miskin, dan 6). Akses terhambat program perlindungan dan jaminan sosial masih sangat terbatas. Kondisi ini yang selalu menjadikan disparitas penduduk miskin antar kabupaten dan kota semakin meningkat, dan upaya untuk memberdayakan penduduk marjinal yang pendapatan/pengeluaran sedikit diatas garis kemiskinan berjalan lambat sehingga sangat rentan untuk masuk dalam katagori penduduk miskin. Kondisi ini yang selalu menjadikan disparitas penduduk

miskin antar kabupaten dan kota semakin meningkat, dan upaya untuk memberdayakan penduduk marjinal yang pendapatan/pengeluaran sedikit diatas garis kemiskinan berjalan lambat sehingga sangat rentan untuk masuk dalam katagori penduduk miskin.

Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan TPB 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini dicapai apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif.

A. Status Capaian

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dan Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat memerlukan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

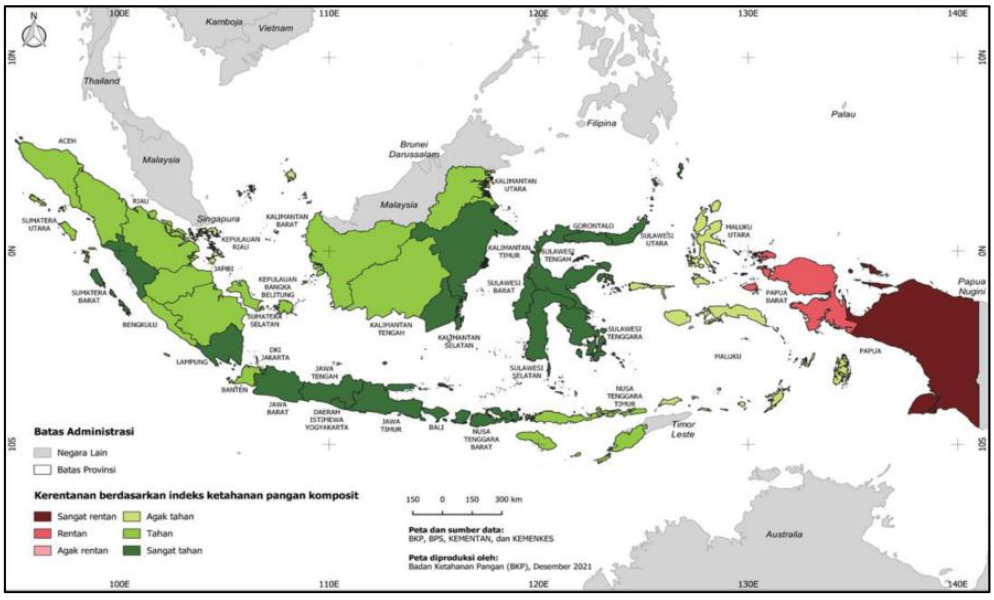

Gambar 2. 23 Peta Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2021

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, maka Badan Pangan Nasional telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam

bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) Ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

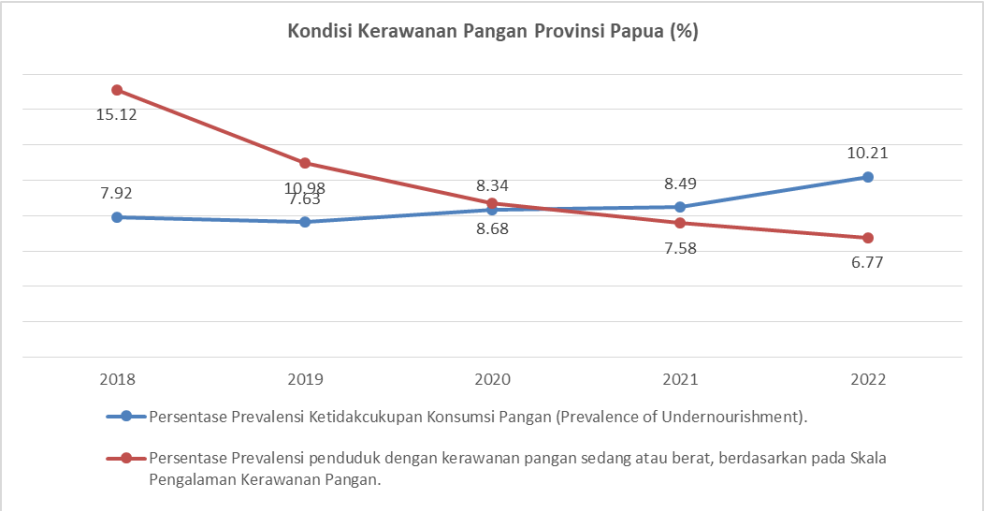

Gambar 2. 24 Status Kerawanan Pangan Provinsi Papua

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021

Tabel berikut ini menunjukan indeks ketahanan pangan pada kota/kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2019 – 2022

Tabel 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2022

Kota/ Kabupaten	2019				2020				2021				2022			
	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
Kota Jayapura	0.00	76.94	62.20	68.83	0.00	65.87	73.69	70.18	8.89	49.00	43.71	35.48	17.68	49.89	42.34	37.80
Kab. Jayapura	24.90	81.54	65.44	58.11	10.35	83.38	66.98	54.91	10.35	83.38	66.98	54.91	58.91	85.88	67.96	70.62
Keerom	37.72	75.67	65.55	60.24	48.84	71.85	62.94	61.38	48.84	71.85	62.94	61.38	55.66	73.57	56.13	61.22
Sarmi	0.00	70.54	58.79	44.68	0.00	68.91	60.14	44.73	0.00	68.91	60.14	44.73	38.26	77.97	55.49	57.07
Memberamo Raya	0.00	39.45	19.92	19.80	0.00	41.14	24.03	21.95	0.00	41.14	24.03	21.95	0.00	46.94	22.19	22.96
Biak Numfor	0.00	67.80	70.43	48.51	0.00	68.43	71.35	49.07	0.00	68.43	71.35	49.07	0.00	67.44	69.82	48.16
Supiori	0.00	41.97	47.48	31.59	0.00	39.03	41.01	28.11	0.00	39.03	41.01	28.11	0.00	34.88	48.50	29.87
Yapen	0.00	57.15	65.59	43.38	0.00	57.82	66.44	43.92	0.00	57.82	66.44	43.92	0.00	61.54	65.90	44.82
Waropen	0.00	52.49	54.39	37.50	39.13	53.95	55.27	50.03	39.13	53.95	55.27	50.03	41.53	53.00	41.33	44.89

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021

Keterangan	Kab	Kota
Sangat Rentan	<= 41.52	<= 28.84

Rentan	> 41.52 - 51.42	> 28.84 - 41.44
Agak Rentan	> 51.42 - 59.58	> 41.44 - 51.29
Agak Tahan	> 59.58 - 67.75	> 51.29 - 61.13
Tahan	> 67.75 - 75.68	> 61.13 - 70.64
Sangat Tahan	> 75.68	> 70.64

Gizi

Kondisi gizi sangat berpengaruh terhadap angka kesakitan, kematian dan kualitas hidup seseorang. Telah diketahui bahwa masa yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk pembentukan perkembangan otak, kecerdasan, dan pertumbuhan fisik adalah masa 1000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun). Gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi pada periode ini akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit-penyakit metabolisme pada usia dewasa. Pengukuran status gizi dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur/*Underweight* (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur/*Stunted* (TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan/*Wasted* (BB/TB). Pengukuran ini didasarkan atas standar World Health Organization dan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Kondisi Gizi suatu daerah sangatlah dipengaruhi oleh pola konsumsi kalori dan protein perkapita per hari, terutama pengaruh asupan gizi yang dikonsumsi seorang ibu proses dalam 1000 (seribu) hari kehidupan yang dapat berdampak besar terhadap status gizi bayi yang akan dilahirkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, maka telah ditentukan bahwa rata-rata angka kecukupan konsumsi kalori/energi (AKE) untuk masyarakat Indonesia sebesar 2100 (dua ribu seratus) kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi, dan rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Angka kecukupan tersebut menunjukkan banyak kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap penduduk dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif.

Gambar 2. 25 Status Gizi Anak Per Kabupaten/Kota

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 dan 2022

Selain angka kecukupan gizi (Energi/Protein), kualitas konsumsi pangan juga sangat berpengaruh pada prevalensi status gizi di suatu daerah. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Tahapan perhitungan PPH dimulai dengan Mengelompokkan jenis pangan ke dalam 8 (delapan) kelompok pangan, yaitu (1) Padi-padian, (2) Umbi-umbian, (3) Pangan Hewani, (4) Minyak dan Lemak, (5) Buah/Biji Berminyak, (6) Kacang-kacangan (7) Gula, dan (8) Sayur dan Buah. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan

Makanan), dan Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

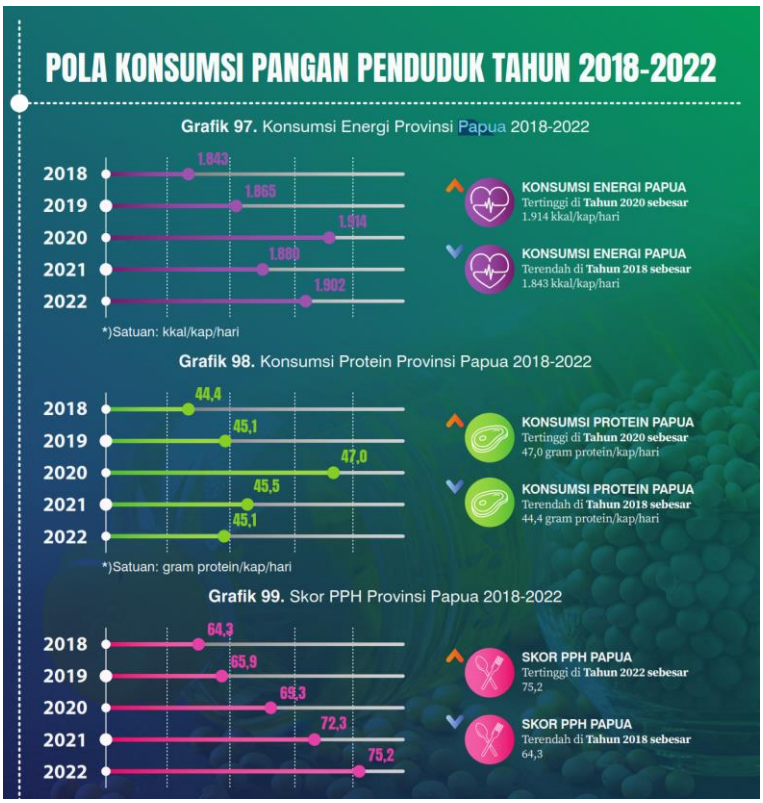

Gambar 2. 26 Pola Konsumsi Pangan Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Sumber: Susenas Maret 2018 – 2022 (BPS) diolah Badan Pangan Nasional

Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan) dengan luas lahan atau biaya yang dikorbankan atau dengan kata lain Produktivitas pertanian merupakan rasio keluaran pertanian terhadap masukan. Meskipun produk individual biasanya diukur berdasarkan berat, yang dikenal sebagai hasil panen, produk yang bervariasi membuat pengukuran hasil pertanian secara keseluruhan menjadi sulit. Oleh karena itu, produktivitas pertanian biasanya diukur sebagai nilai pasar dari hasil akhir. Produktivitas ini dapat dibandingkan dengan berbagai jenis input seperti tenaga kerja atau tanah. Perbandingan seperti ini disebut ukuran produktivitas parsial. Produktivitas pertanian juga dapat diukur dengan apa yang disebut produktivitas faktor total (TFP). Metode penghitungan produktivitas pertanian ini membandingkan indeks masukan pertanian dengan indeks keluaran. Ukuran produktivitas pertanian ini ditetapkan untuk memperbaiki kekurangan ukuran produktivitas parsial; khususnya, seringkali sulit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan TFP biasanya disebabkan oleh kemajuan teknologi.

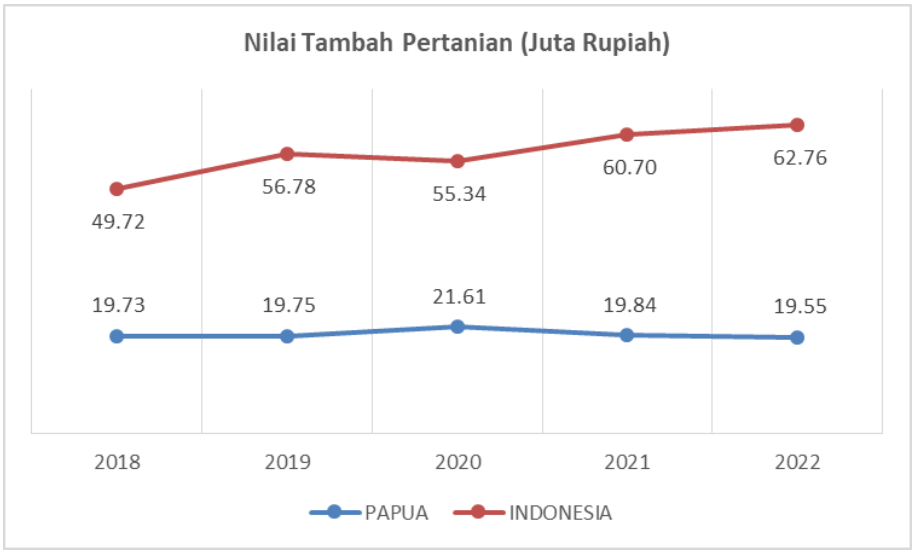

Gambar 2. 27 Nilai Tambah Pertanian Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2022

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pengan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sumberdaya Genetik Tanaman dan Hewan untuk Pangan

Sumber daya genetik hewan untuk pangan dan pertanian (SDGT), juga dikenal sebagai sumber daya genetik hewan ternak atau keanekaragaman hayati ternak, adalah sumber daya genetik (yaitu materi genetik dengan nilai aktual atau potensial) dari spesies unggas dan mamalia, yang digunakan untuk tujuan pangan dan pertanian. Sumber daya genetik merupakan bagian dan elemen spesifik dari keanekaragaman hayati pertanian.

Indeks Orientasi Pertanian (IOP)

Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Cakupan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan. 1). Nilai IOP > 1 merefleksikan orientasi yang lebih tinggi ke arah sektor pertanian, yaitu sektor ini menerima proporsi pengeluaran pemerintan yang lebih tinggi relatif terhadap sumbangannya bagi nilai tambah ekonomi nasional; 2). Nilai IOP < 1 merefleksikan orientasi lebih rendah terhadap pertanian; dan 3). Nilai IOP =1 merefleksikan orientasi pemerintah netral terhadap sektor pertanian.

Indikator Anomali Harga Pangan

Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di berbagai pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan tertimbang dari harga-harga pangan, baik dalam satu tahun atau beberapa tahun. IAHP ini secara angsung mengevaluasi peningkatan harga-harga pangan dalam satu bulan tertentu selama beberapa tahun, dengan memperhitungkan sifat pasar pertanian musiman dan inflasi, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah perubahan harga tersebut dikategorikan abnormal atau tidak dalam suatu periode tertentu.

B. Tantangan

Tantangan dalam mencapai target TPB tujuan 2 Tanpa Kelaparan di Papua terkait erat dengan pembangunan sistem pangan, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungannya dengan ketahanan Papua, beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain ketersediaan pangan lokal yang belum merata, akses terhadap pangan yang masih sulit, pemanfaatan pangan yang masih kurang maksimal sehingga memicu tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi rentan, terutama pada daerah pegunungan yang masih terbatas akses jalan. Kondisi ini sangat mempengaruhi akses masyarakat lokal terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup untuk bayi dan anak. Selain itu, masih banyak terdapat penduduk miskin yang mengalami kekurangan gizi yang ditunjukkan oleh prevalensi stunting, malnutrisi, anemia pada ibu hamil, dan rendahnya pemberian ASI eklusif pada bayi. Nilai Tambah Peranian (NTP) juga masih terlihat menurun sejak kondisi pandemic covid-19 melanda daerah ini di awal tahun 2020. Pandemi ini sangat mempengaruhi kemampuan dalam penyediaan pangan di beberapa kabupaten di Papua, menghambat kelancaran kinerja rantai pasok pangan, dan menurunkan kemampuan masyarakat, terutama golongan 40% pendapatan terendah, dalam memenuhi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Kelompok yang paling terkena dampak pandemi ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan disabilitas. Pandemi ini juga menyebabkan disparitas perawatan kesehatan yang lebar dan menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, sarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pembiayaan yang sangat mahal.

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan dari TPB 3 adalah Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular

A. Status Capaian

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup

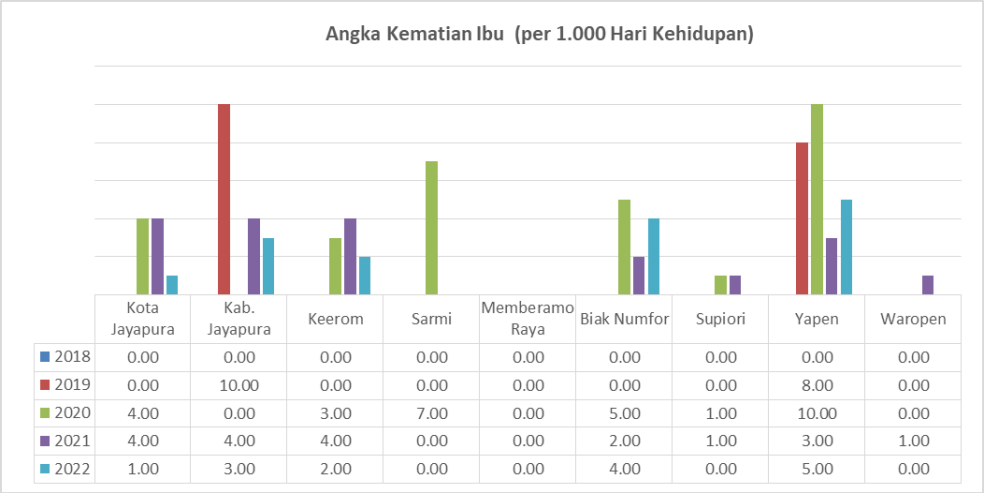

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
2020	4.00	0.00	3.00	7.00	0.00	5.00	1.00	10.00	0.00
2021	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00
2022	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00

Gambar 2. 28 Angka Kematian Ibu per 1.000 hari kehidupan

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Tingkat kesehatan umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena erat hubungannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan membawa implikasi kebijakan peningkatan cakupan sarana dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku sehat masyarakat. Angka kematian bayi/*Infant Mortality* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000

kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian Post Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

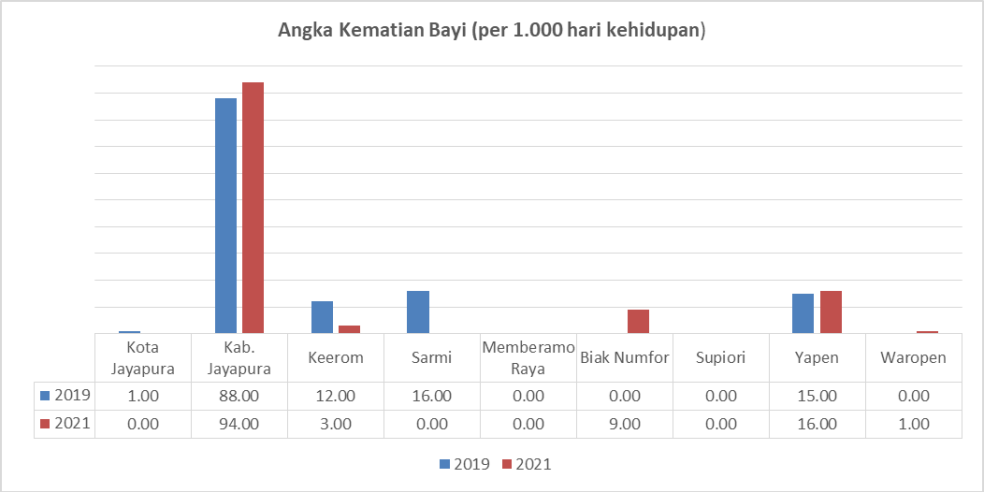

Gambar 2. 29 Angka Kematian Bayi per 1.000 hari kehidupan

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

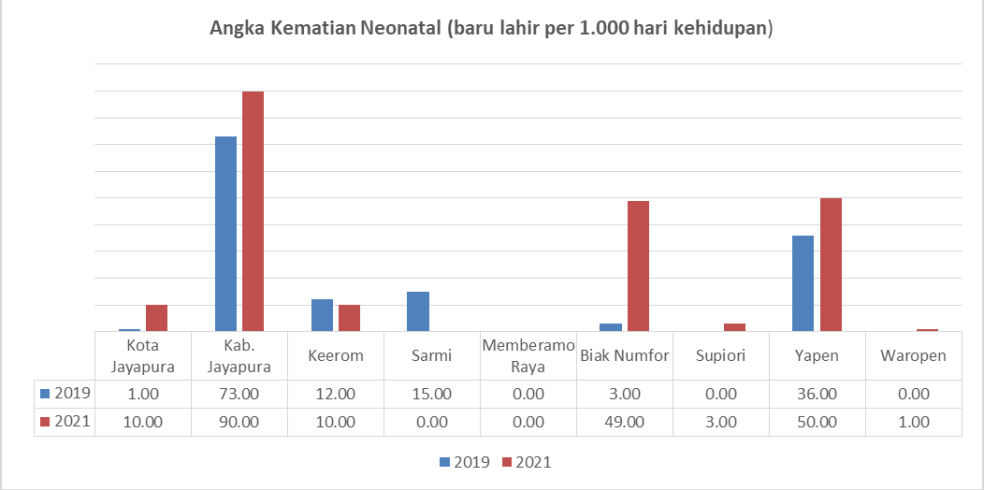

Gambar 2. 30 Angka kematian Neonatal per 1.000 hari kehidupan

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkolusis yang pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional program eliminasi

malaria ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang "Eliminasi Malaria di Indonesia". Target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Penilaian eliminasi malaria diawali dari tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020 terdapat tiga provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Tiga provinsi di Indonesia bagian timur belum memiliki kabupaten/kota yang berstatus eliminasi malaria, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Meskipun belum ada kabupaten/kota yang eliminasi di tiga provinsi tersebut namun sudah ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap menuju eliminasi malaria. Gambar berikut ini menunjukkan persebaraan kabupaten/kota endemis malaria pada tahun 2020 di seluruh Indonesia. Warna putih menunjukkan kabupaten/kota eliminasi. Tingkat endemisitas digambarkan dengan warna hijau, kuning dan gradasi merah.

Angka Kesakitan Malaria

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tersebut dengan konstanta 1.000.

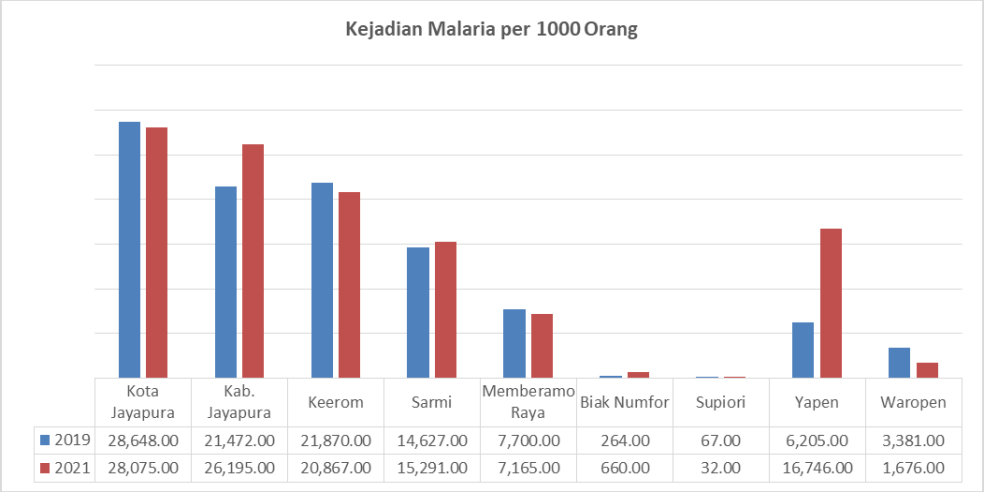

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	28,648.00	21,472.00	21,870.00	14,627.00	7,700.00	264.00	67.00	6,205.00	3,381.00
2021	28,075.00	26,195.00	20,867.00	15,291.00	7,165.00	660.00	32.00	16,746.00	1,676.00

Gambar 2. 31 Kejadian Malaria per 1.000 Orang

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Hepatitis B

Hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Infeksi hepatitis B umumnya tidak bertahan lama dalam tubuh penderita dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Kondisi ini disebut infeksi hepatitis akut atau hepatitis B akut. Namun, infeksi hepatitis B juga bisa menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang atau menjadi kronis. Sejak tahun 2013 telah dilakukan Kegiatan

Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas) dan Jaringannya. Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan menggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi aktif sesuai program Nasional (HB0, HB1, HB2 dan HB3). HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi. Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% anak berisiko tertular Hepatitis B kronik dari ibunya yang Positif Hepatitis B.

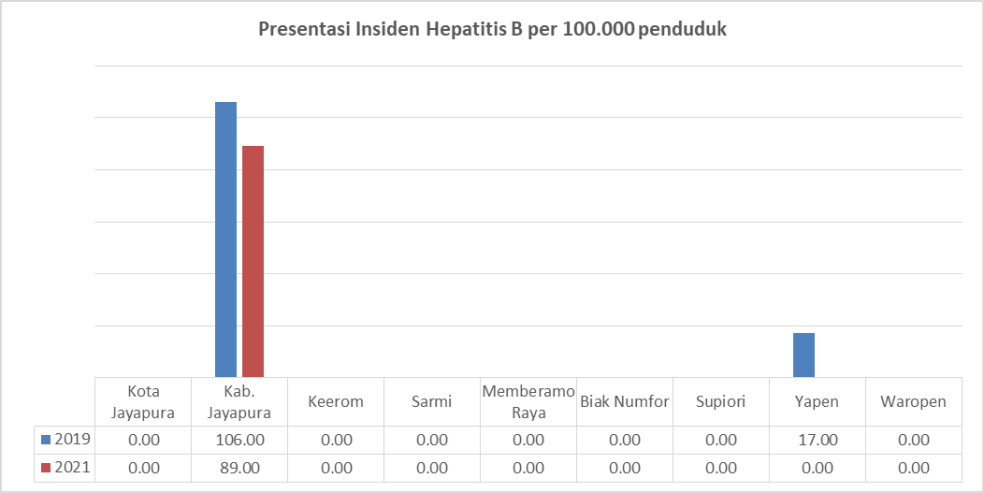

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
2021	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 2. 32 Insiden Hepatitis B per Kabupaten/Kota

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

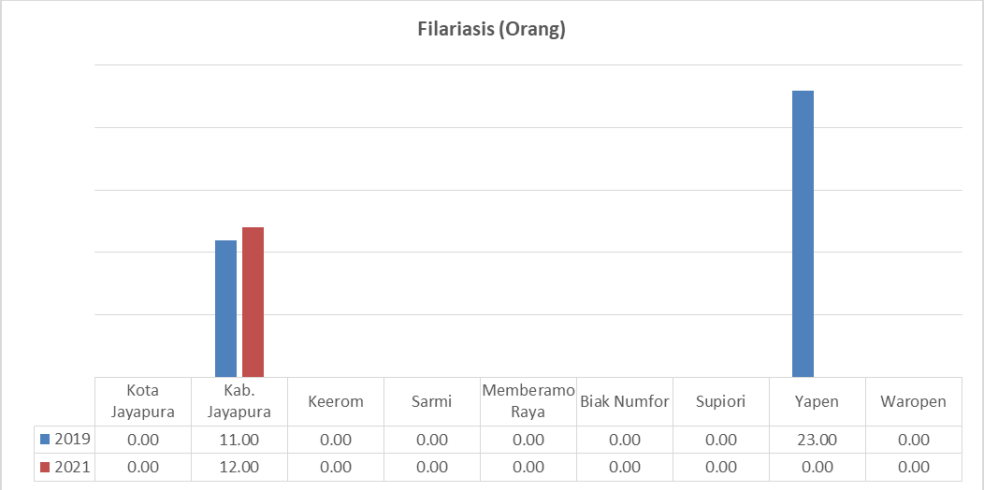

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
2021	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 2. 33 Kejadian Filariasis per Kabupaten/Kota

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 9.906 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya.

Kusta

Penyakit Kusta dalah penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Penyebab penyakit kusta ada bakteri Mycobacterium leprae.

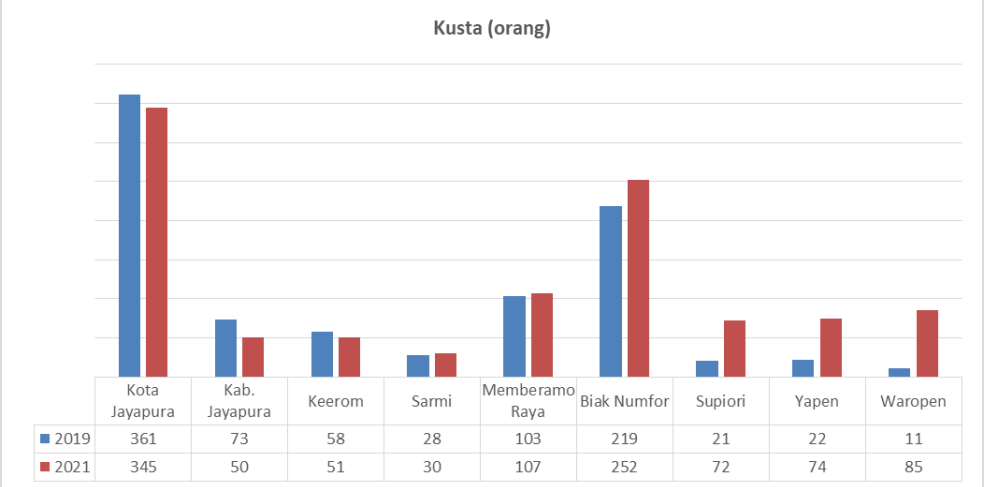

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	361	73	58	28	103	219	21	22	11
2021	345	50	51	30	107	252	72	74	85

Gambar 2. 34 Kejadian Kusta per KabUpaten/Kota

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Tekanan darah tinggi (Hipertensi)

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal (130/80 mmHg atau lebih). Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja.

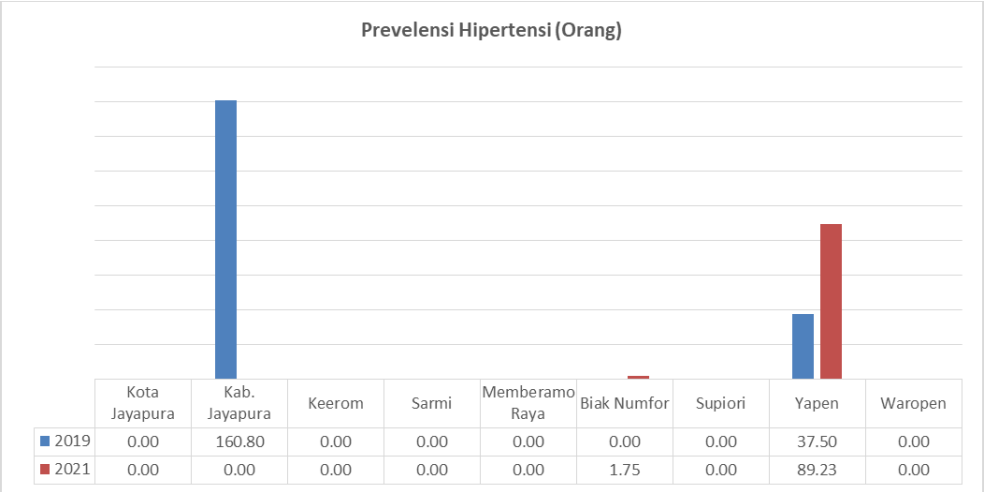

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	89.23	0.00

Gambar 2. 35 Prevelensi Hipertensi per Kabupaten/Kota

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Obesitas

Obesitas adalah kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan berlebih, kegemukan dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Terdapat bermacam cara untuk melakukan klasifikasi terhadap kegemukan, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan indeks massa tubuh (IMT). Metode ini dilakukan dengan mengukur perbandingan antara berat badan (kilogram) dan tinggi badan (meter) kuadrat.

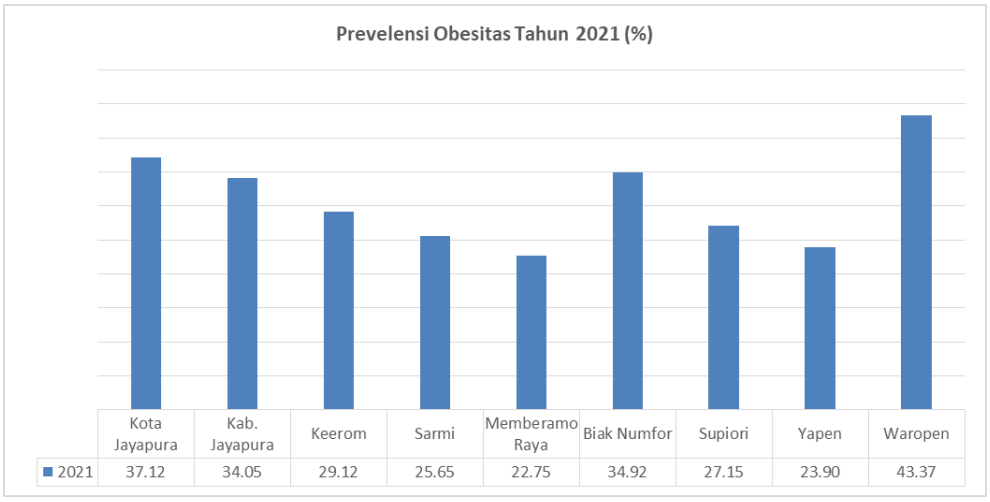

Gambar 2. 36 Presentase Obesitas per Kabupaten/Kota

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021

Narkotika, Psikotropoja dan Obat Terlarang (NAPZA)

Penyalahgunaan Napza merupakan penyakit otak yang bersifat chronic relapsing disease. Terdapat berbagai aspek yang terkait penyalahgunaan Napza, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosial. Secara biologis terjadi perubahan fungsi dan struktur otak pada seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat mempersulit proses perubahan perilaku. Dalam proses pemulihan setiap penyalahguna harus menjalani program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dari masingmasing individu. Stigma yang berkembang di masyarakat dan petugas kesehatan terhadap penyalahguna Napza membuat aksesibilitas dalam rehabilitasi belum optimal. Pemerintah melalui Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna Napza melalui fasilitas pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).

Setiap penyalahguna wajib melaporkan diri ke Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) antara lain puskesmas, rumah sakit umum, BNN, POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN, dan kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi medis. IPWL yang aktif dapat memberikan layanan pencegahan dan rahabilitasi penyalahgunaan Napza sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan Napza dan mencegah penyalahgunaan zat yang lain.

Pelayanan KB

Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi. Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda melahirkan di bawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, Terlalu dekat jarak

kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 (dua). Persentase ibu meninggal yang melahirkan berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah 33% dari seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan baik lagi, kemungkinan 33% kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian kontrasepsi.

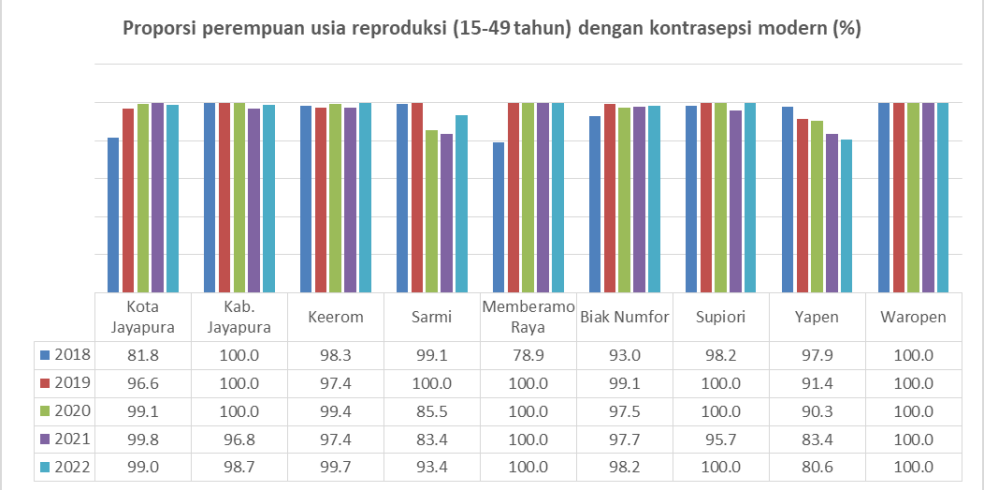

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	81.8	100.0	98.3	99.1	78.9	93.0	98.2	97.9	100.0
2019	96.6	100.0	97.4	100.0	100.0	99.1	100.0	91.4	100.0
2020	99.1	100.0	99.4	85.5	100.0	97.5	100.0	90.3	100.0
2021	99.8	96.8	97.4	83.4	100.0	97.7	95.7	83.4	100.0
2022	99.0	98.7	99.7	93.4	100.0	98.2	100.0	80.6	100.0

Gambar 2. 37 proporsi Perempuan Usia 15-49 Tahun dengan Kontrasepsi Modern

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

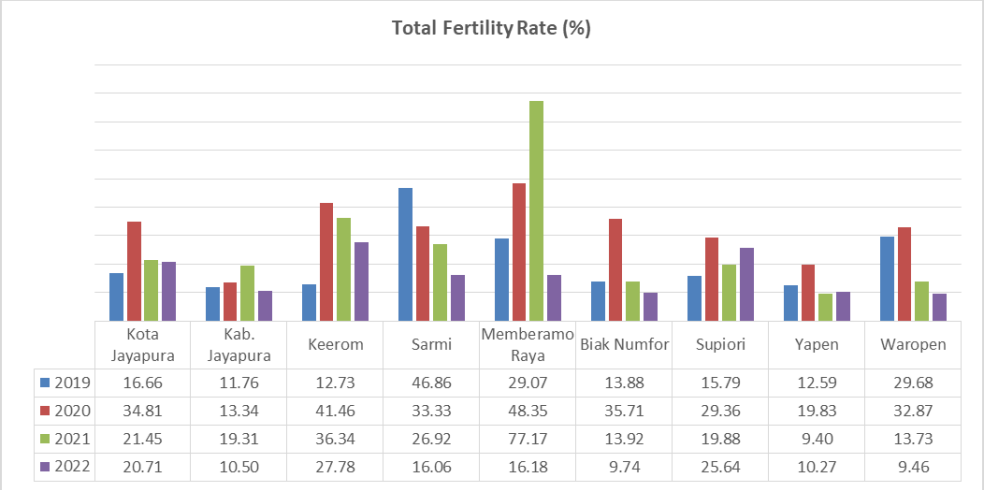

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	16.66	11.76	12.73	46.86	29.07	13.88	15.79	12.59	29.68
2020	34.81	13.34	41.46	33.33	48.35	35.71	29.36	19.83	32.87
2021	21.45	19.31	36.34	26.92	77.17	13.92	19.88	9.40	13.73
2022	20.71	10.50	27.78	16.06	16.18	9.74	25.64	10.27	9.46

Gambar 2. 38 Total Fertility Rate pe Kabupaten/Kota

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Pelayanan Kesehatan Dasar

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.

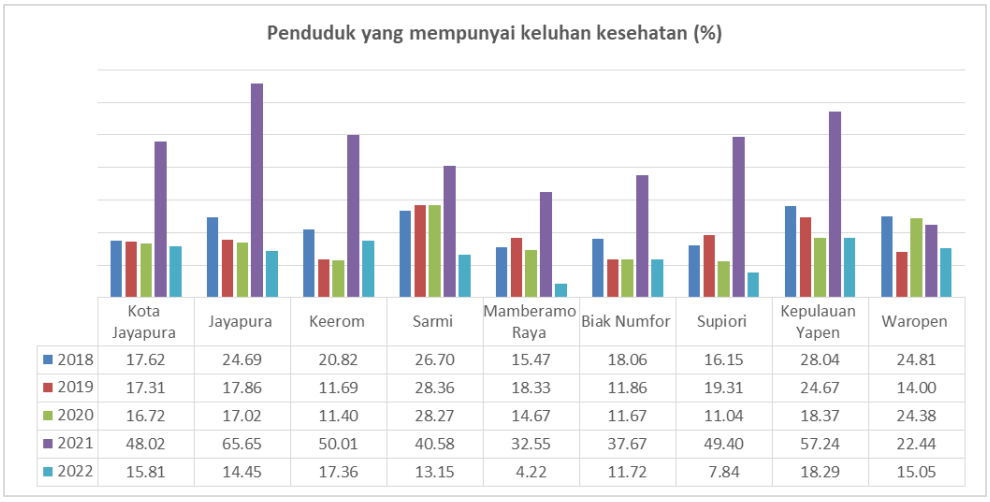

	Kota Jayapura	Jayapura	Keerom	Sarmi	Mamberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	17.62	24.69	20.82	26.70	15.47	18.06	16.15	28.04	24.81
2019	17.31	17.86	11.69	28.36	18.33	11.86	19.31	24.67	14.00
2020	16.72	17.02	11.40	28.27	14.67	11.67	11.04	18.37	24.38
2021	48.02	65.65	50.01	40.58	32.55	37.67	49.40	57.24	22.44
2022	15.81	14.45	17.36	13.15	4.22	11.72	7.84	18.29	15.05

Gambar 2. 39 Presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis pada usia produktif dan meningkatkan morbiditas serta kematian prematur yang tinggi. Penyebab utama kematian terkait kebiasaan merokok adalah penyakit jantung, kanker, stroke dan penyakit saluran pernapasan (WHO, 2020b). Lebih jauh lagi, studi di Indonesia menunjukkan beberapa dampak kesehatan dari perokok pasif antara lain pertumbuhan berat badan anak yang lebih rendah (TCSC-IAKMI, 2020) dan peningkatan peluang pneumonia pada balita (Alnur, Ismail, & Padmawati, 2017).

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan jumlah perokok di Indonesia antara lain membentuk kawasan tanpa rokok, membatasi iklan, promosi, dan sponshorship rokok, serta peningkatan tarif cukai hasil tembakau.

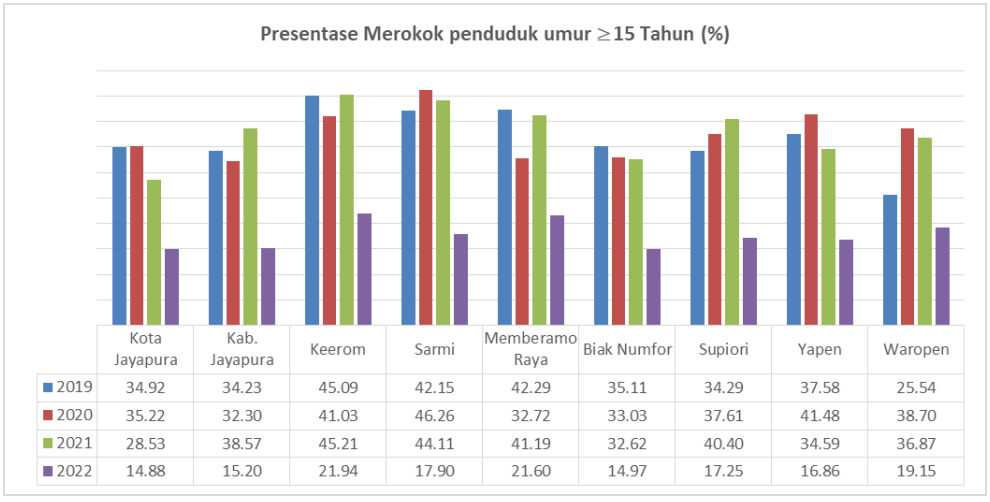

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	34.92	34.23	45.09	42.15	42.29	35.11	34.29	37.58	25.54
2020	35.22	32.30	41.03	46.26	32.72	33.03	37.61	41.48	38.70
2021	28.53	38.57	45.21	44.11	41.19	32.62	40.40	34.59	36.87
2022	14.88	15.20	21.94	17.90	21.60	14.97	17.25	16.86	19.15

Gambar 2. 40 Presentase penduduk merokok usia ≥ 15 Tahun

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022

Vaksin Nasional

Indikator ini mencakup target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional antara lain 1). Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke-3) : Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu; 2). Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu; dan 3). Cakupan vaksin konjugat pneumokus/PCV (dosis terakhir dalam jadwal): Persentase bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu.

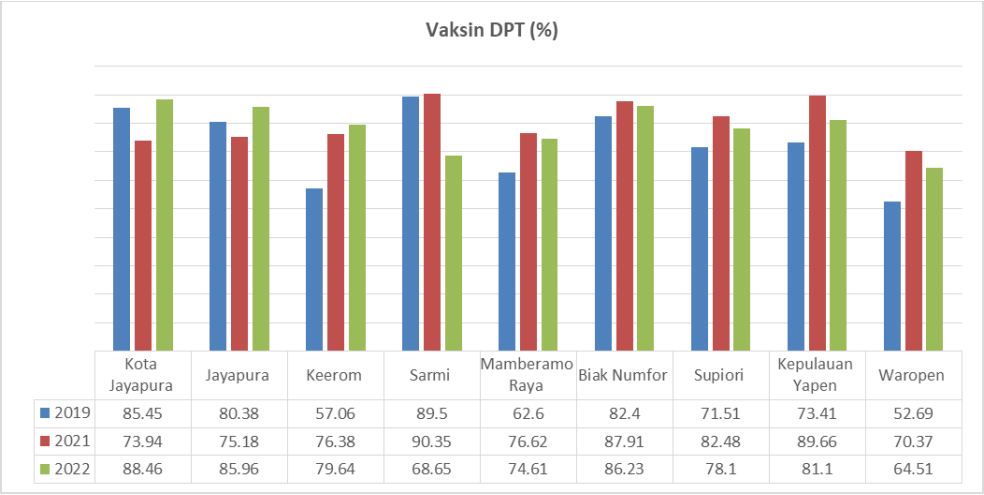

	Kota Jayapura	Jayapura	Keerom	Sarmi	Mamberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2019	85.45	80.38	57.06	89.5	62.6	82.4	71.51	73.41	52.69
2021	73.94	75.18	76.38	90.35	76.62	87.91	82.48	89.66	70.37
2022	88.46	85.96	79.64	68.65	74.61	86.23	78.1	81.1	64.51

Gambar 2. 41 Presentase anak yang menerima vaksin DPT

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022

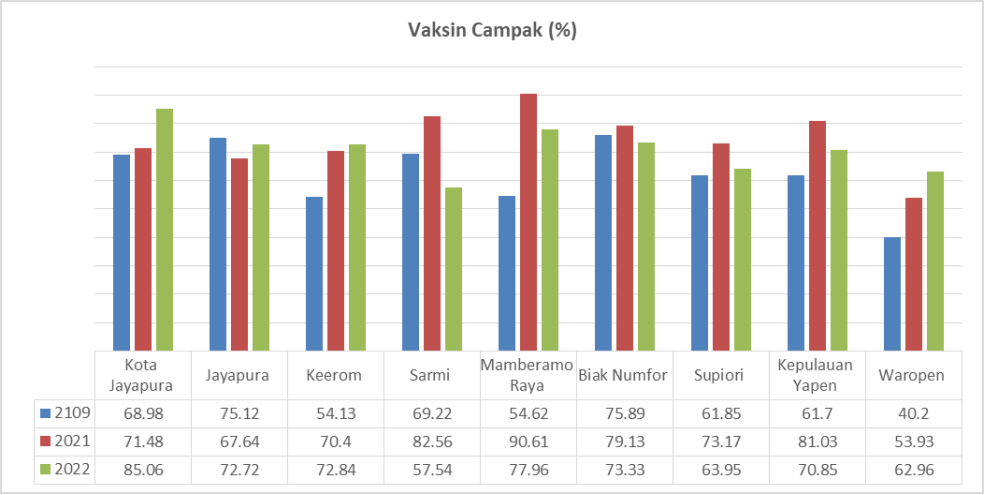

	Kota Jayapura	Jayapura	Keerom	Sarmi	Mamberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2109	68.98	75.12	54.13	69.22	54.62	75.89	61.85	61.7	40.2
2021	71.48	67.64	70.4	82.56	90.61	79.13	73.17	81.03	53.93
2022	85.06	72.72	72.84	57.54	77.96	73.33	63.95	70.85	62.96

Gambar 2. 42 Presentase Anak yang menerima Vaksin Campak

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, 2019, dan 2025. Maka proyeksi rasio kebutuhan SDMK untuk tahun 2025 untuk setiap 100.000 penduduk adalah: (a) 12 dokter spesialis, (b) 50 dokter umum; (c) 14 dokter gigi, (d) 200 perawat, (e) 130 bidan, (f) 21 perawat gigi, (g) 15 apoteker, (h) 30 asisten apoteker, (i) 18 SKM, (j) 20 sanitarian, (k) 12 ahli gizi, (l) 5 keterapian fisik, (m) 18 keterapian medis, (n) analis, (o) biomedis, (p) epidemiolog, dan (q) tenaga laboratorium. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dapat dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal di puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan dengan perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas berdasarkan beban kerja.

Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

Kab/Kota	Data Tenaga Kesehatan Tahun 2022					Keterangan
	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Ahli Gizi	
Kota Jayapura	67	1,588	339	233	137	
Kab. Jayapura	36	240	165	30	37	
Keerom	25	226	129	36	0	
Sarmi	19	177	124	14	13	
Memberamo Raya	0	0	0	0	0	Belum ada Data
Biak Numfor	66	708	396	69	41	
Supiori	29	240	116	15	21	
Yapen	0	385	149	38	29	
Waropen	8	160	1	9	7	

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2022

Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan

Dalam rangka menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian upaya tersebut.

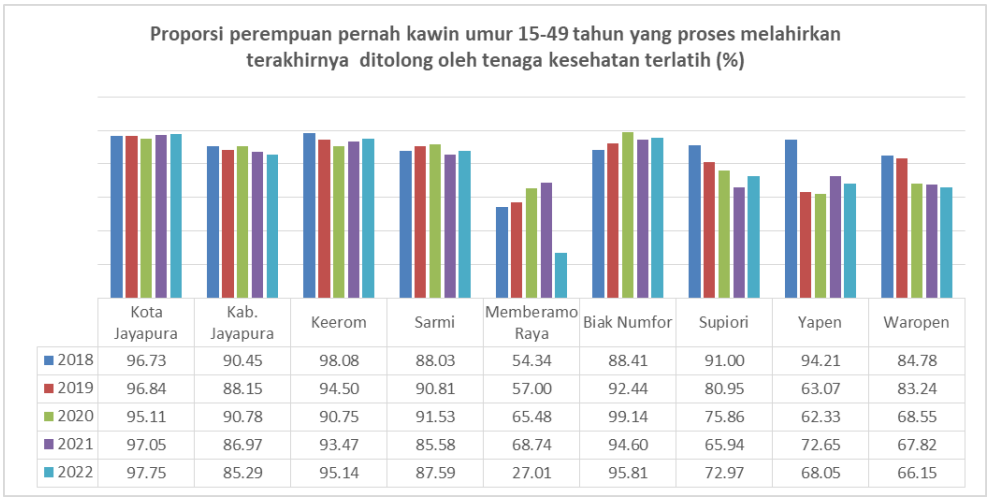

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	96.73	90.45	98.08	88.03	54.34	88.41	91.00	94.21	84.78
2019	96.84	88.15	94.50	90.81	57.00	92.44	80.95	63.07	83.24
2020	95.11	90.78	90.75	91.53	65.48	99.14	75.86	62.33	68.55
2021	97.05	86.97	93.47	85.58	68.74	94.60	65.94	72.65	67.82
2022	97.75	85.29	95.14	87.59	27.01	95.81	72.97	68.05	66.15

Gambar 2. 43 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir ditolong tenaga Kesehatan terlatih

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022

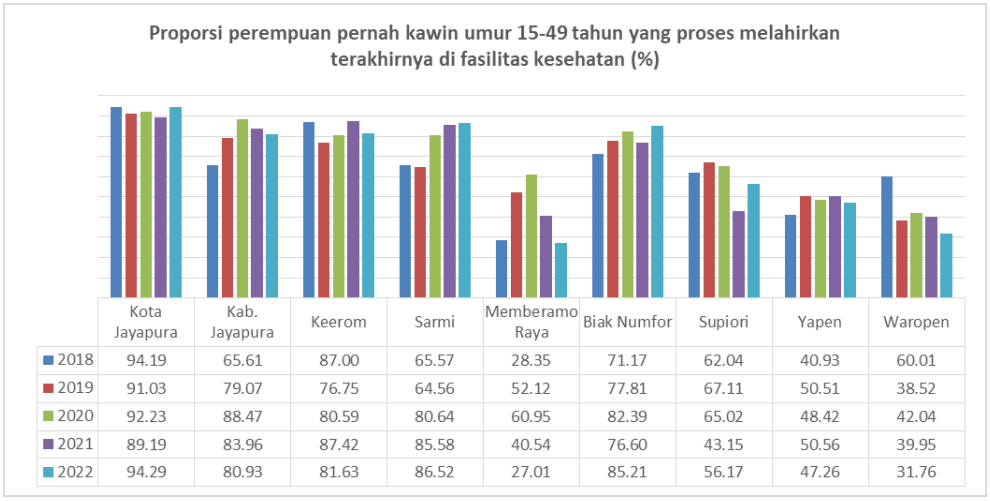

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	94.19	65.61	87.00	65.57	28.35	71.17	62.04	40.93	60.01
2019	91.03	79.07	76.75	64.56	52.12	77.81	67.11	50.51	38.52
2020	92.23	88.47	80.59	80.64	60.95	82.39	65.02	48.42	42.04
2021	89.19	83.96	87.42	85.58	40.54	76.60	43.15	50.56	39.95
2022	94.29	80.93	81.63	86.52	27.01	85.21	56.17	47.26	31.76

Gambar 2. 44 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir di fasilitas kesehatan

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022

B. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera antara lain: Rasio Angka Kematian Ibu hingga masih di atas 70 per 100 ribu kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal masih di atas 12 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 kelahiran hidup, Masih tingginya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, Masih rendahnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan masih rendahnya perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik.

Angka Kematian Ibu

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) termasuk menjamin ketersediaan obat kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan;
- Perbaikan kesehatan ibu hamil, dan jika memungkinkan sebelum kehamilan terjadi, dengan mengurangi prevalensi anemia, dan perbaikan gizinya. Perlu dipastikan bahwa seluruh Ibu hamil dapat mengonsumsi tablet besi sekurang-kurangnya 120 tablet selama kehamilan, dan juga perbaikan konsumsi gizi selama kehamilan;
- Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil;
- Penurunan unmet need KB untuk mencegah meningkatknya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan juga peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan;
- Peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk kesehatan reproduksi dan seksualitas, khususnya pada remaja;
- Peningkatan status gizi wanita pra-hamil dan persiapan calon ibu yang berkualitas;
- Memprioritaskan wilayah sasaran mempunyai AKI tinggi dan cakupan rendah persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan; dan
- Aksesibilitas layanan dan fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilititas perlu menjadi pertimbangan, diikuti dengan peningkatan kapasitas petugas tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

Angka Kematian Bayi

- Peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan untuk mencegah kematian neonatal yang disebabkan oleh komplikasi intrapartum, gangguan pernafasan, dan berat lahir rendah serta prematuritas;
- Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanaan kesehatan dasar dan rujukan;
- Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;
- Penguatan UKBM (desa siaga, kelas ibu hamil dan posyandu); dan
- Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum

Endemi Penyakit Menular

- Perluasan screening wajib pada ibu hamil (triple eliminasi) dalam mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS, Sifilis dan Hepatitis B yang harus dilakukan saat pemeriksaan kehamilan, sehingga penularan kepada bayi dapat dicegah;
- Perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB keseluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB;
- Peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR);
- Peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan kit diagnostic), untuk TB (obat anti TB dan kit diagnostic), dan untuk malaria (obat anti malaria);
- Peningkatan cakupan HIV testing, terutama pada daerah yang jumlah kasus terbanyak, selain meningkatkan 'treatment retention rates' Mempercepat peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang dapat melakukan HIV treatment di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas; dan
- Peningkatan upaya pencegahan COVID-19 yang terus menerus dengan melaksanakan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Penyakit tidak menular

- Penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah mengidap PTM dengan menyediakan tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas pemeriksaan gula darah, fasilitas pemeriksaan tekanan darah gratis disertai dengan konseling jika terdeteksi pre-diabetes, atau pre-hipertensi;
- Upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM seperti promosi terus menerus untuk tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, serta aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk perubahan perilaku untuk mencegah obesitas dan penyediaan fasilitas umum yang aman untuk melakukan aktivitas fisik;
- Diberlakukannya Permenkes Nomor 30/2013 untuk pengaturan GGL pada pangan siap saji atau minuman berpemanis yang diproduksi oleh industri pangan;
- Diberlakukannya sanksi untuk implementasi Perda tentang KTR untuk mengurangi perokok;
- Upaya pencegahan PTM yang dimulai pada usia sebelum 50 tahun;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM; dan
- Deteksi dini dan screening faktor risiko PTM: rokok, obesitas, hipertensi, dan diabetes melitus, termasuk pada anak di sekolah.

NAPZA dan Alkohol

- Implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi pengendalian Napza;
- Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara BNN, Kemenkes, dan institusi yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian masalah napza dan alkohol;
- Integrasi data untuk optimalisasi peningkatan layanan pascarehabilitasi; dan
- Melakukan advokasi dan sosialisasi yang intensif pada pemegang kebijakan untuk menyediakan anggaran dan komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Napza dan alkohol.

Kesehatan seksual dan reproduksi

- Peningkatan partisipasi pendidikan atau pengetahuan perempuan untuk mencegah pernikahan anak;
- Peningkatan pemahaman kehidupan berkeluarga, dan peningkatan kualitas pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah/remaja;
- Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan
- Peningkatan inovasi layanan dan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi selama masa pandemi COVID-19.

Kesehatan Universal

- Menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah;
- Memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri;
- Meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu;
- Meningkatkan koordinasi dan pola komunikasi yang efektif antar Dinas Kesehatan dan BPJS agar informasi terdistribusi secara lebih berdaya guna dan mengantisipasi terjadinya salah komunikasi;
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan BPJS pada semua pihak (rumah sakit, PUSKESMAS, dan warga masyarakat), terutama tentang komponen-komponen pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh skema JKN/ BPJS;
- Meningkatkan perhatian, kepedulian terhadap keluhan dan/atau pengaduan warga masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang dicakup oleh skema JKN/BPJS; dan

- Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.

Tenaga Kesehatan

- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;
- Pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- Redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah dengan kekosongan tenaga kesehatan;
- Meningkatkan kemandirian obat dan bahan baku obat;
- Meningkatkan penggunaan obat rasional; dan
- Memperkuat sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri dapat menjamin mutu produk yang diproduksi dan didistribusikan.

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Penddikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pembahasan Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebekerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 8 target dan 13 indikator, terdapat target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan membutuhkan solusi yang sistematis.

A. Status Capaian

Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

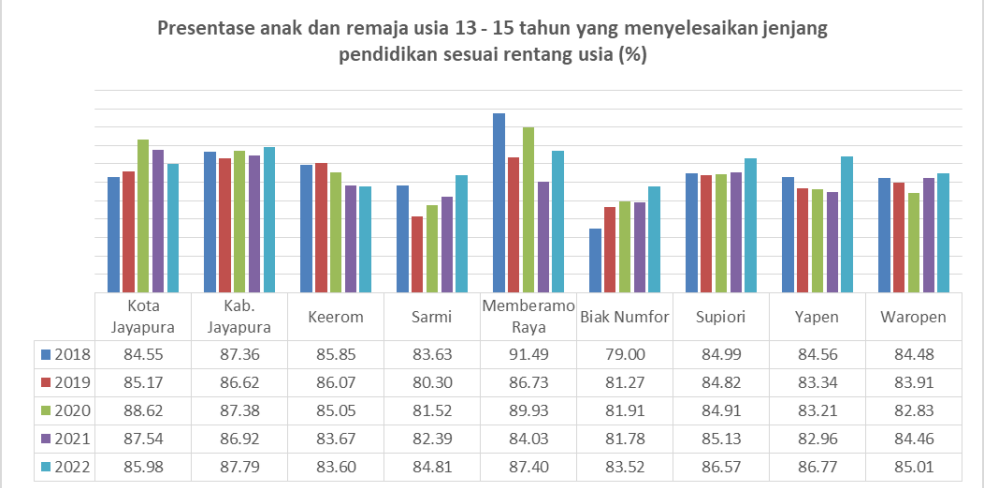

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	84.55	87.36	85.85	83.63	91.49	79.00	84.99	84.56	84.48
2019	85.17	86.62	86.07	80.30	86.73	81.27	84.82	83.34	83.91
2020	88.62	87.38	85.05	81.52	89.93	81.91	84.91	83.21	82.83
2021	87.54	86.92	83.67	82.39	84.03	81.78	85.13	82.96	84.46
2022	85.98	87.79	83.60	84.81	87.40	83.52	86.57	86.77	85.01

Gambar 2. 45 Presentase anak dan remaja usia 13 – 15 tahun yang menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai rentang usia

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 6 s.d. 21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial, kesehatan. Selain itu, mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, dan sosial.

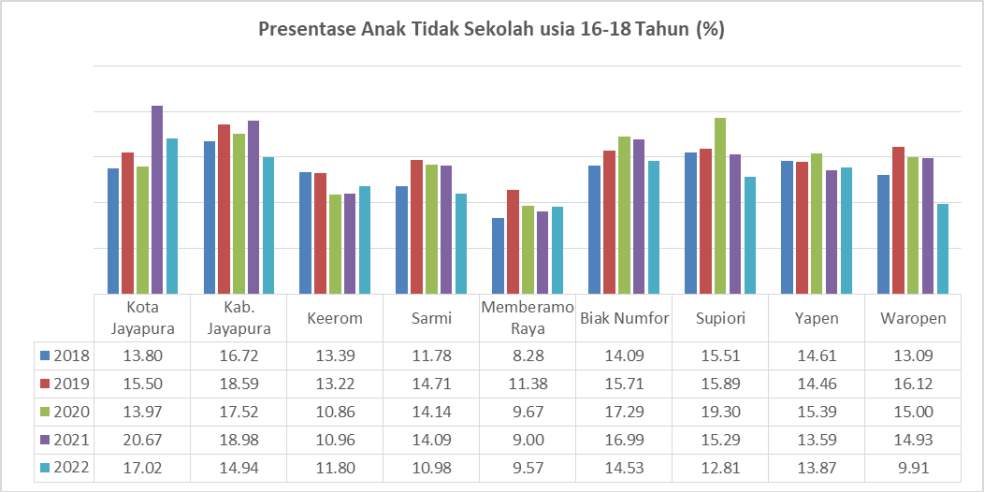

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	13.80	16.72	13.39	11.78	8.28	14.09	15.51	14.61	13.09
2019	15.50	18.59	13.22	14.71	11.38	15.71	15.89	14.46	16.12
2020	13.97	17.52	10.86	14.14	9.67	17.29	19.30	15.39	15.00
2021	20.67	18.98	10.96	14.09	9.00	16.99	15.29	13.59	14.93
2022	17.02	14.94	11.80	10.98	9.57	14.53	12.81	13.87	9.91

Gambar 2. 46 Presentase tidak sekolah usia 16-18 tahun

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu 1). Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD, dan 2). Sekolah Dasar/sederajat.

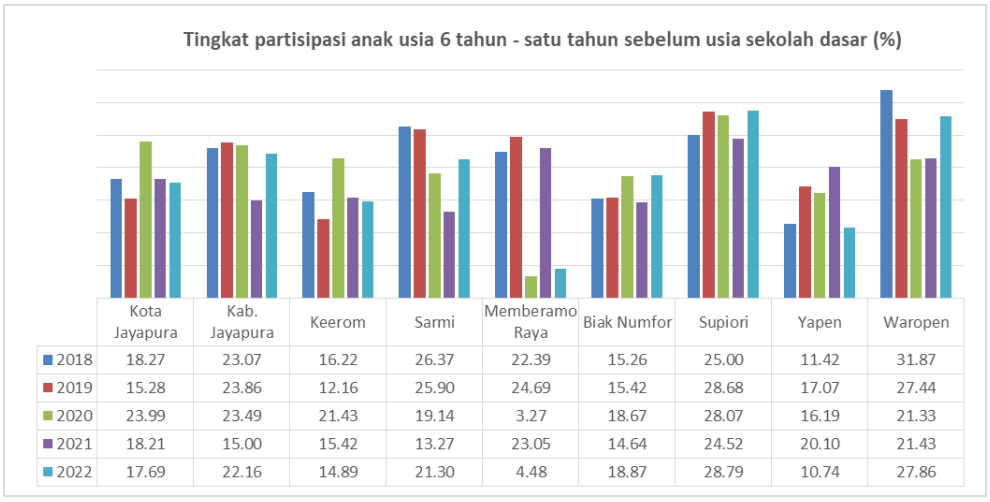

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	18.27	23.07	16.22	26.37	22.39	15.26	25.00	11.42	31.87
2019	15.28	23.86	12.16	25.90	24.69	15.42	28.68	17.07	27.44
2020	23.99	23.49	21.43	19.14	3.27	18.67	28.07	16.19	21.33
2021	18.21	15.00	15.42	13.27	23.05	14.64	24.52	20.10	21.43
2022	17.69	22.16	14.89	21.30	4.48	18.87	28.79	10.74	27.86

Gambar 2. 47 Presentase partisipasi anak sekolah usia 6 tahun

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin

Indikator ini mengukur partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan baik formal ataupun nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan non-formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

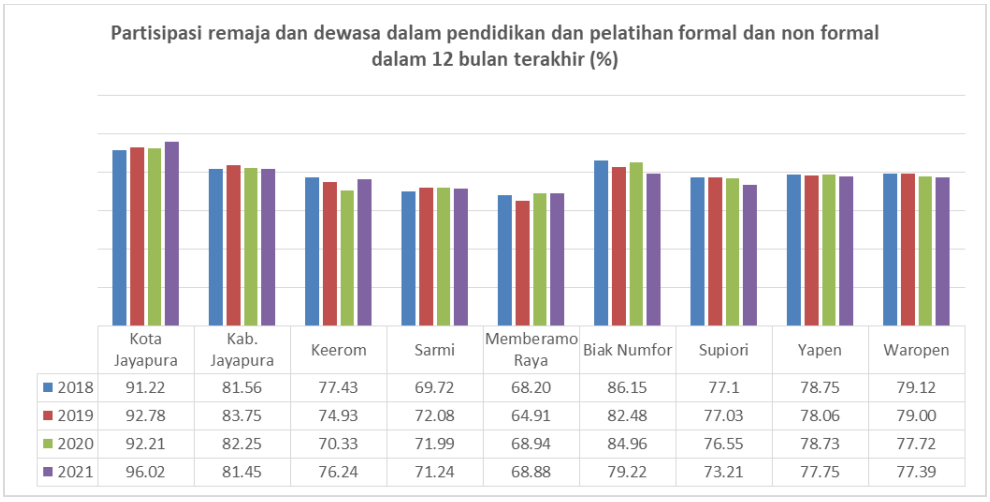

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	91.22	81.56	77.43	69.72	68.20	86.15	77.1	78.75	79.12
2019	92.78	83.75	74.93	72.08	64.91	82.48	77.03	78.06	79.00
2020	92.21	82.25	70.33	71.99	68.94	84.96	76.55	78.73	77.72
2021	96.02	81.45	76.24	71.24	68.88	79.22	73.21	77.75	77.39

Gambar 2. 48 Presentase remaja dan dewasa dalam pendidikan formal dan non-formal

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Perguruan Tinggi.

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun. Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

Gambar 2. 49 Presentase partisipasi kasar Perguruan Tinggi

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini menjadi salah satu hambatan utama untuk orang dan pada perempuan khususnya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari potensi teknologi informasi dan komunikasi. Indikator ini akan membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampak serta membantu mengukur dan melacak tingkat kemahiran pengguna TIK.

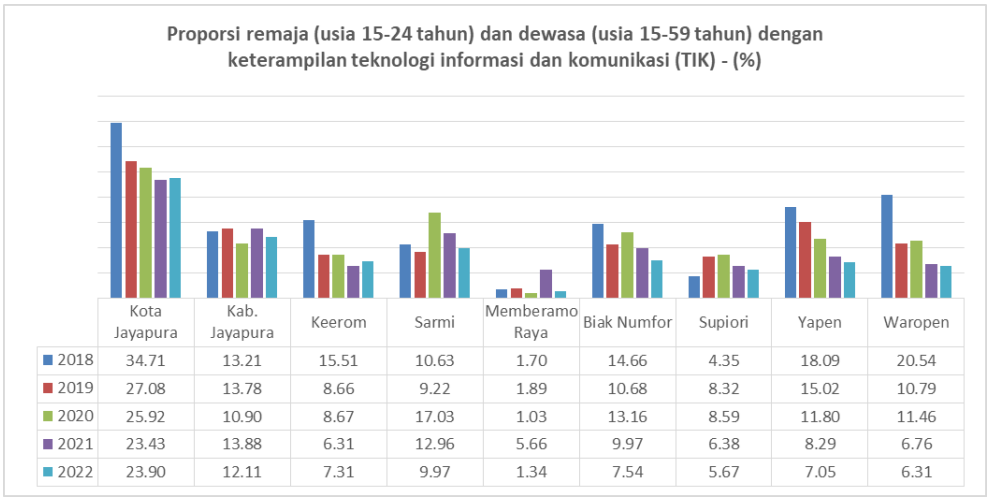

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	34.71	13.21	15.51	10.63	1.70	14.66	4.35	18.09	20.54
2019	27.08	13.78	8.66	9.22	1.89	10.68	8.32	15.02	10.79
2020	25.92	10.90	8.67	17.03	1.03	13.16	8.59	11.80	11.46
2021	23.43	13.88	6.31	12.96	5.66	9.97	6.38	8.29	6.76
2022	23.90	12.11	7.31	9.97	1.34	7.54	5.67	7.05	6.31

Gambar 2. 50 Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilam TIK

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

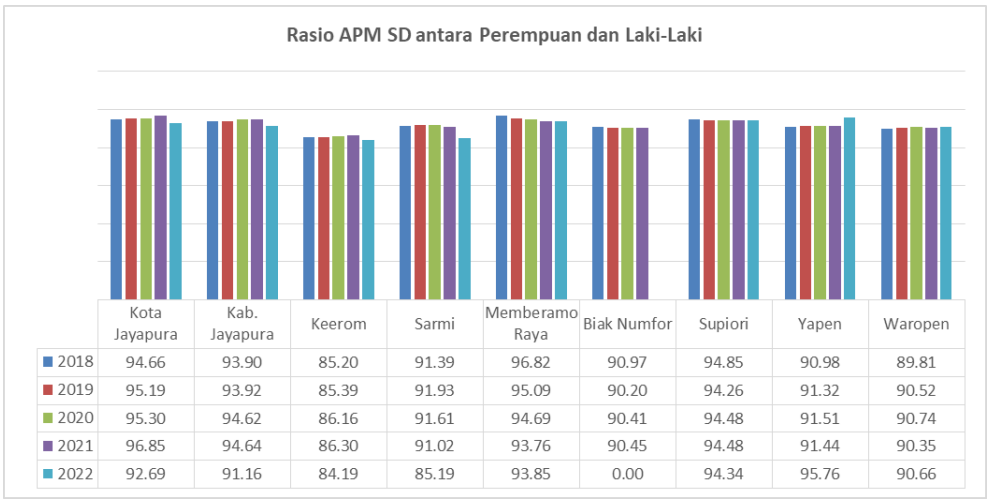

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	94.66	93.90	85.20	91.39	96.82	90.97	94.85	90.98	89.81
2019	95.19	93.92	85.39	91.93	95.09	90.20	94.26	91.32	90.52
2020	95.30	94.62	86.16	91.61	94.69	90.41	94.48	91.51	90.74
2021	96.85	94.64	86.30	91.02	93.76	90.45	94.48	91.44	90.35
2022	92.69	91.16	84.19	85.19	93.85	0.00	94.34	95.76	90.66

Gambar 2. 51 Rasio APM SD antara Perempuan dan Laki-Laki

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

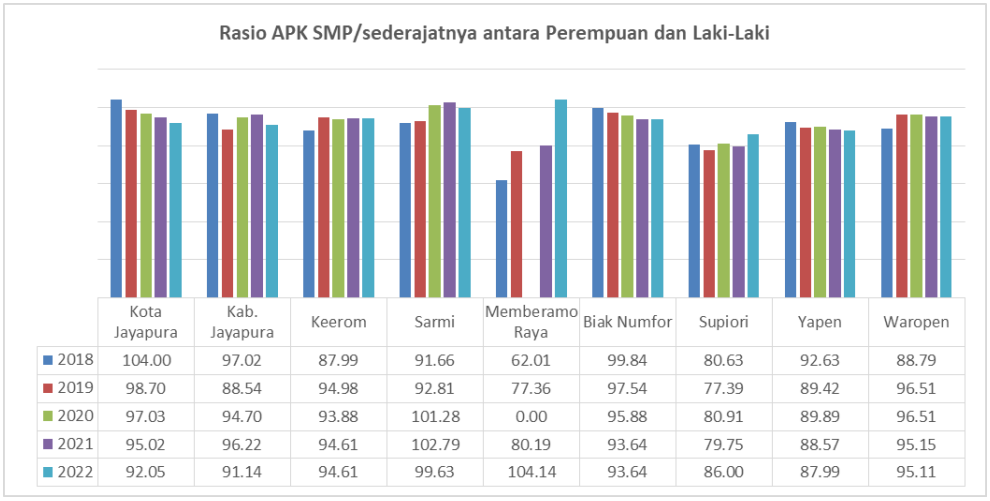

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	104.00	97.02	87.99	91.66	62.01	99.84	80.63	92.63	88.79
2019	98.70	88.54	94.98	92.81	77.36	97.54	77.39	89.42	96.51
2020	97.03	94.70	93.88	101.28	0.00	95.88	80.91	89.89	96.51
2021	95.02	96.22	94.61	102.79	80.19	93.64	79.75	88.57	95.15
2022	92.05	91.14	94.61	99.63	104.14	93.64	86.00	87.99	95.11

Gambar 2. 52 Rasio APK SMP/sederajatmya antara Perempuan dan Laki-Laki

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

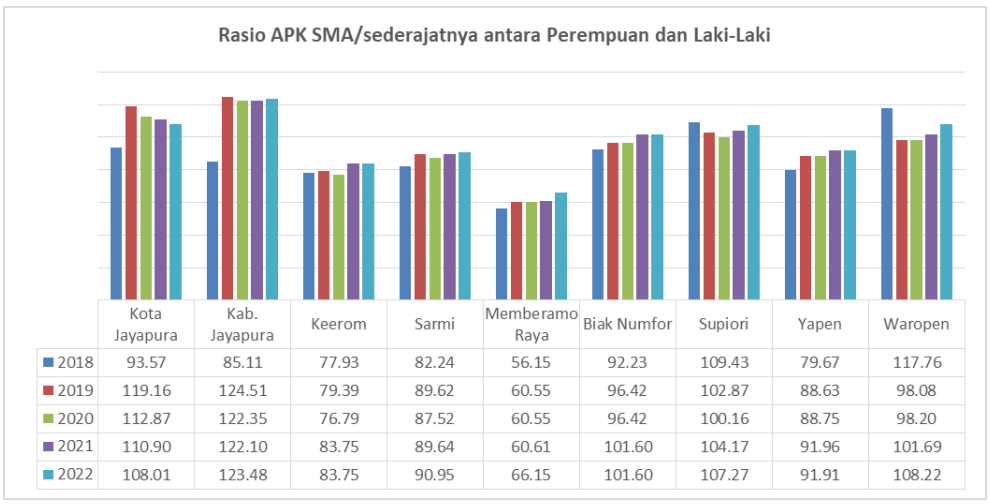

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	93.57	85.11	77.93	82.24	56.15	92.23	109.43	79.67	117.76
2019	119.16	124.51	79.39	89.62	60.55	96.42	102.87	88.63	98.08
2020	112.87	122.35	76.79	87.52	60.55	96.42	100.16	88.75	98.20
2021	110.90	122.10	83.75	89.64	60.61	101.60	104.17	91.96	101.69
2022	108.01	123.48	83.75	90.95	66.15	101.60	107.27	91.91	108.22

Gambar 2. 53 Rasio APK SMA/sederajatmya antara Perempuan dan Laki-Laki

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun. AMH merefleksikan outcome pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

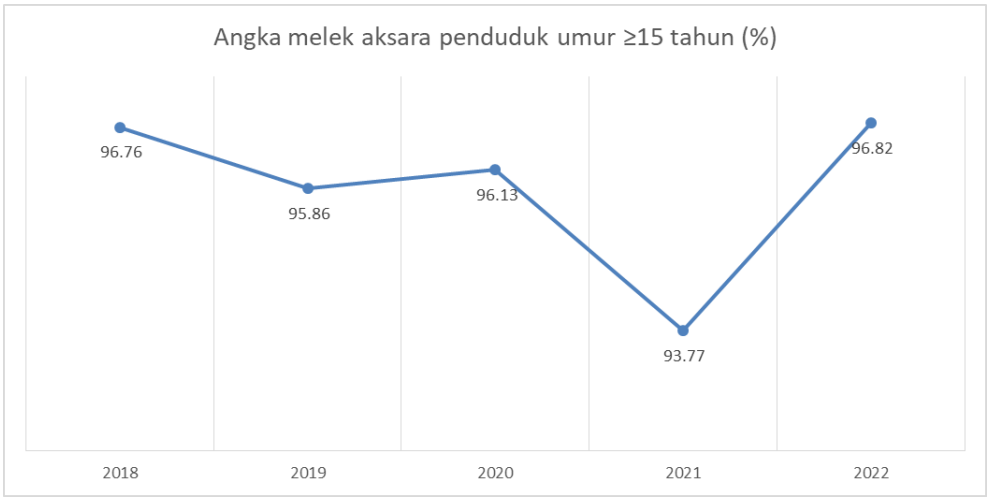

Gambar 2. 54 Presentase Angka Melek Aksara Penduduk umur ≥ 15 Tahun Provinsi Papua

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas pendidikan ramah anak

Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk mengukur aksesibiltas siswa pada setiap jenjang pendidikan dan untuk mengembangkan berbagai bentuk layanan dasar yang diperlukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan efektif untuk semua siswa.

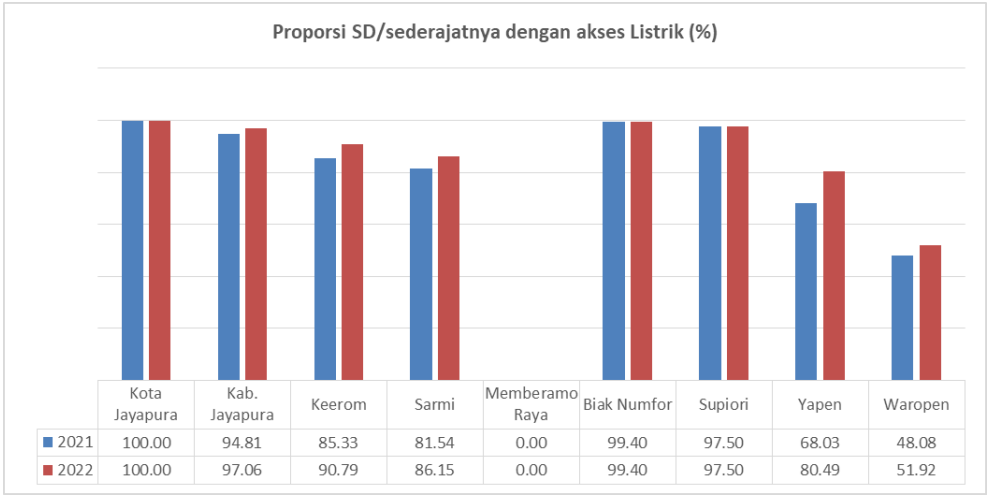

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	100.00	94.81	85.33	81.54	0.00	99.40	97.50	68.03	48.08
2022	100.00	97.06	90.79	86.15	0.00	99.40	97.50	80.49	51.92

Gambar 2. 55 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Listrik

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

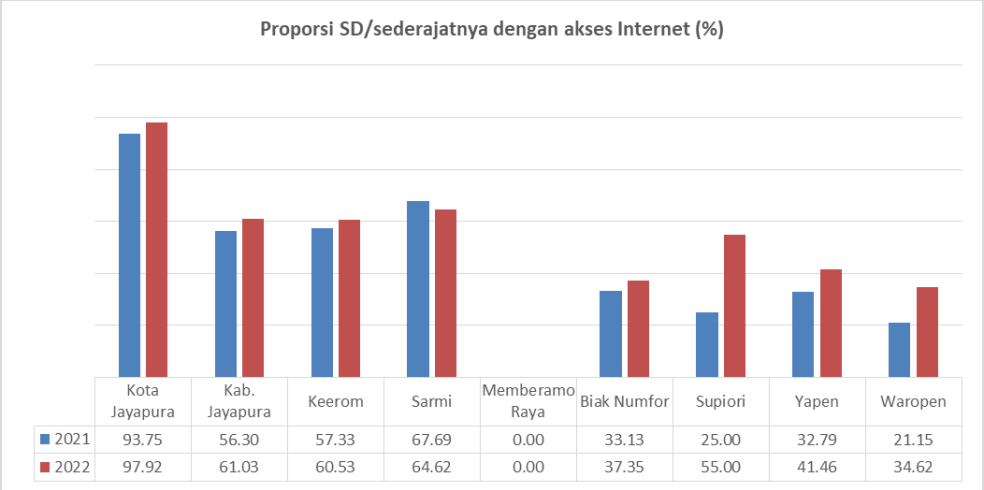

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	93.75	56.30	57.33	67.69	0.00	33.13	25.00	32.79	21.15
2022	97.92	61.03	60.53	64.62	0.00	37.35	55.00	41.46	34.62

Gambar 2. 56 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Internet

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

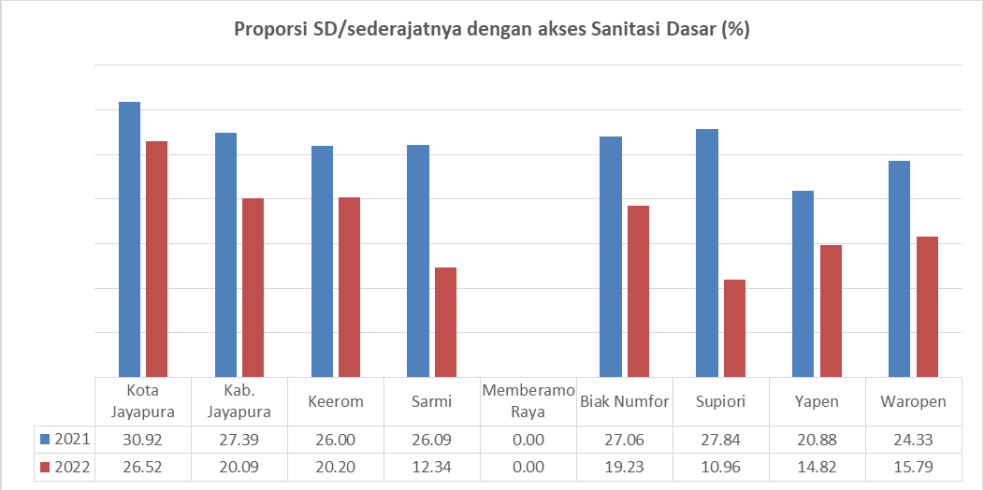

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	30.92	27.39	26.00	26.09	0.00	27.06	27.84	20.88	24.33
2022	26.52	20.09	20.20	12.34	0.00	19.23	10.96	14.82	15.79

Gambar 2. 57 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

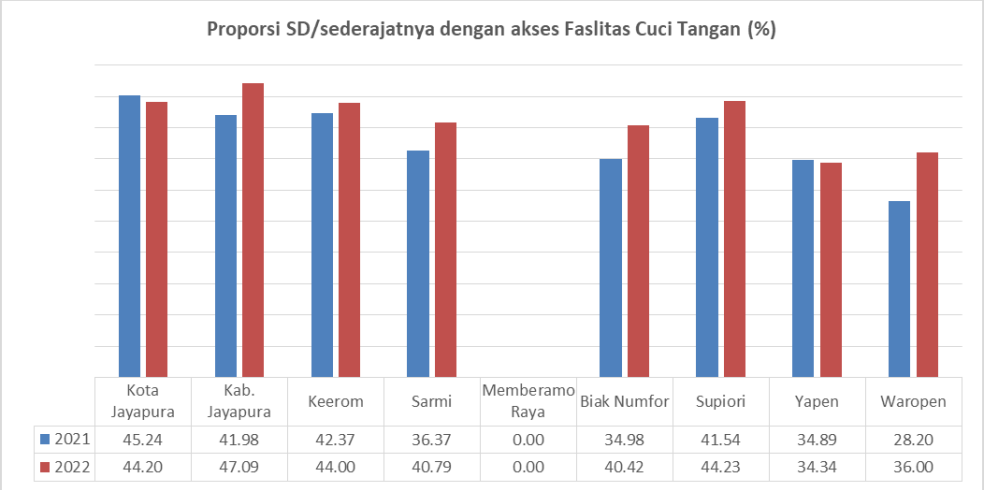

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	45.24	41.98	42.37	36.37	0.00	34.98	41.54	34.89	28.20
2022	44.20	47.09	44.00	40.79	0.00	40.42	44.23	34.34	36.00

Gambar 2. 58 Proporsi SD/Sederajatnya dengan Fasilitas Cuci Tangan

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

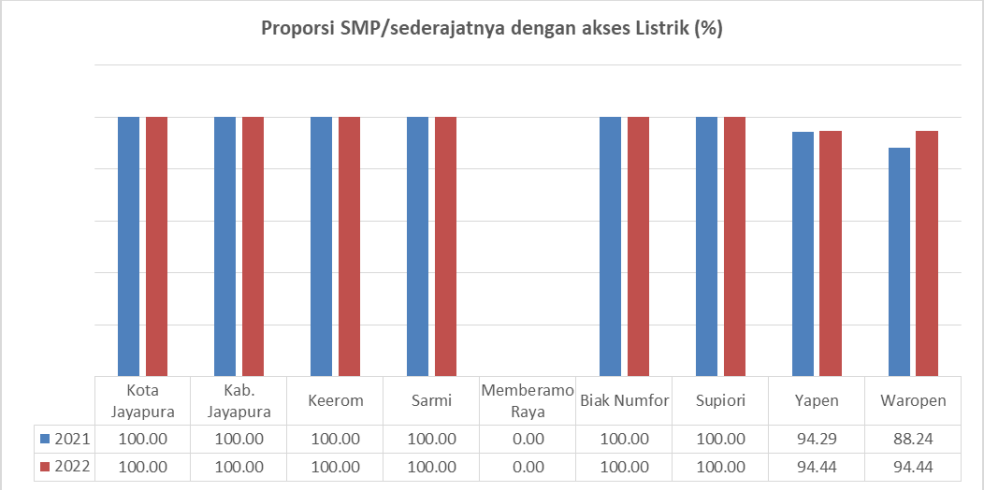

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.29	88.24
2022	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	94.44	94.44

Gambar 2. 59 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Listrik

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

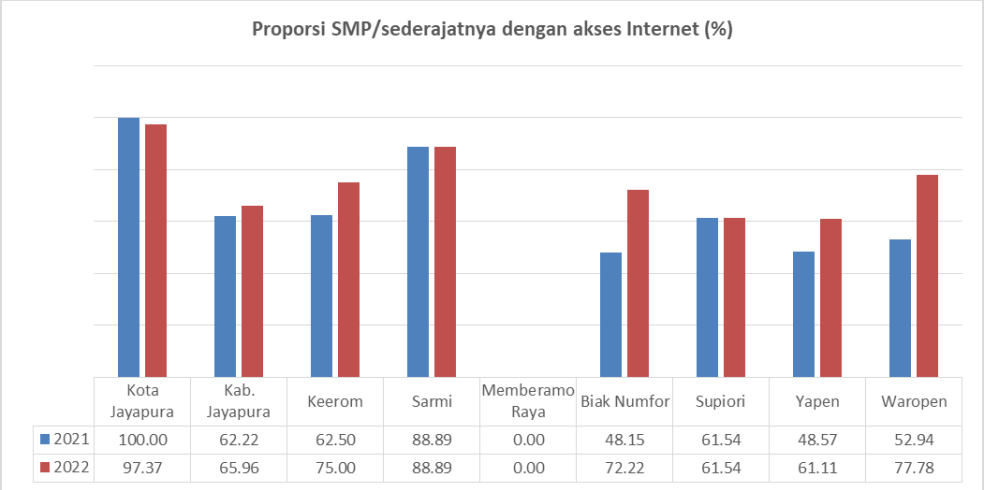

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	100.00	62.22	62.50	88.89	0.00	48.15	61.54	48.57	52.94
2022	97.37	65.96	75.00	88.89	0.00	72.22	61.54	61.11	77.78

Gambar 2. 60 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Internet

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

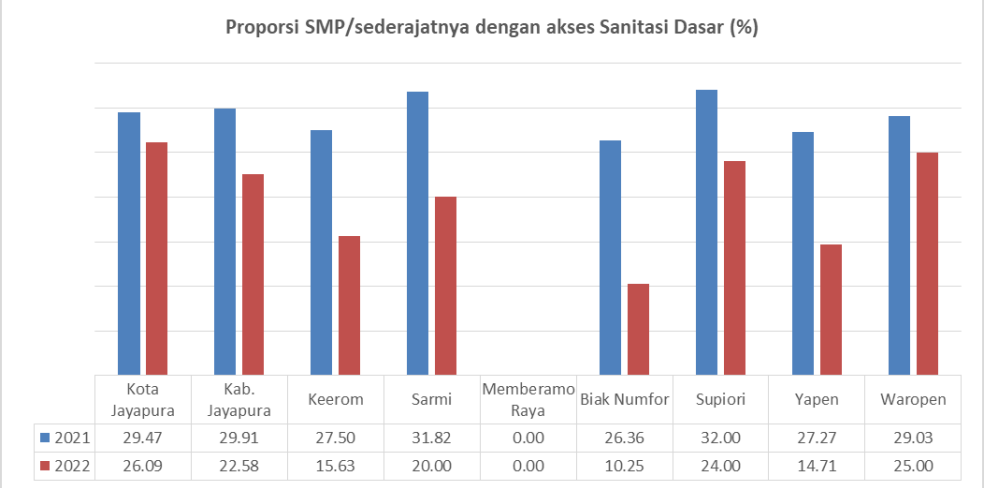

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	29.47	29.91	27.50	31.82	0.00	26.36	32.00	27.27	29.03
2022	26.09	22.58	15.63	20.00	0.00	10.25	24.00	14.71	25.00

Gambar 2. 61 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Sanitasi Dasar

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

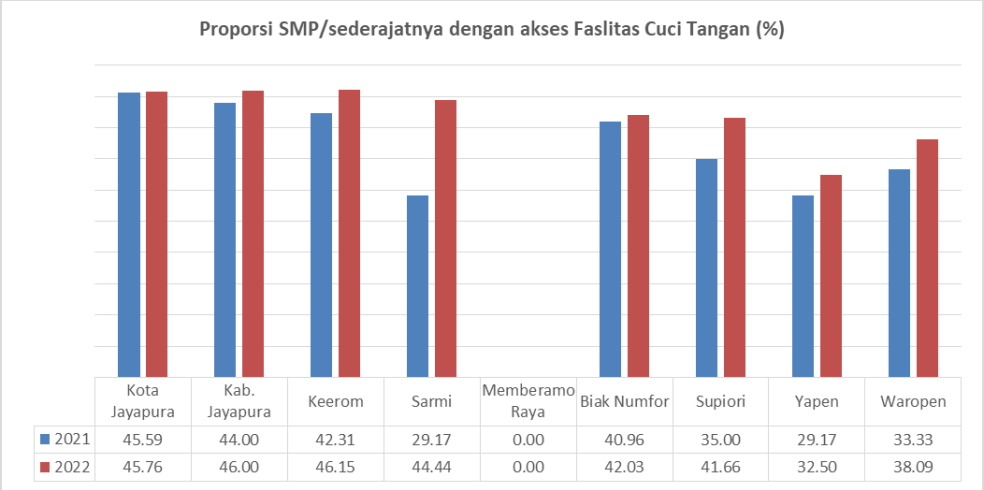

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	45.59	44.00	42.31	29.17	0.00	40.96	35.00	29.17	33.33
2022	45.76	46.00	46.15	44.44	0.00	42.03	41.66	32.50	38.09

Gambar 2. 62 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

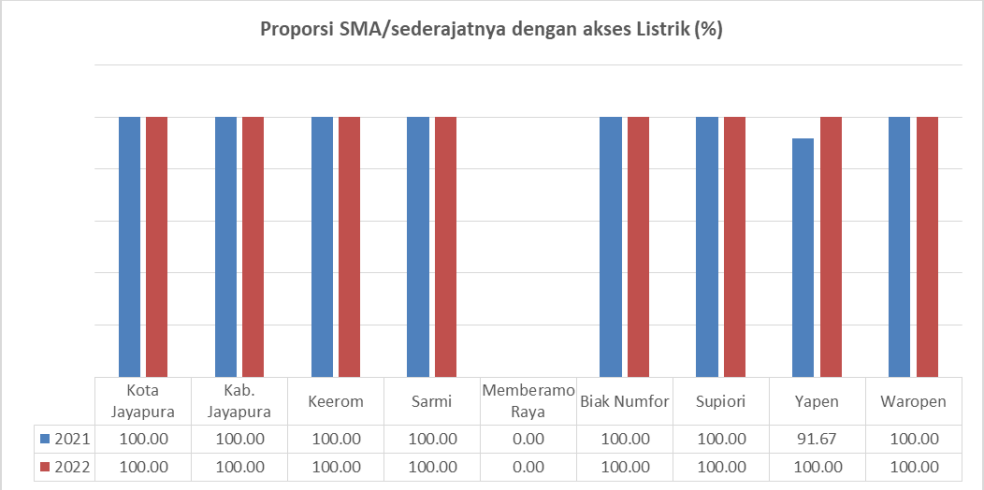

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	91.67	100.00
2022	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Gambar 2. 63 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Listrik

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

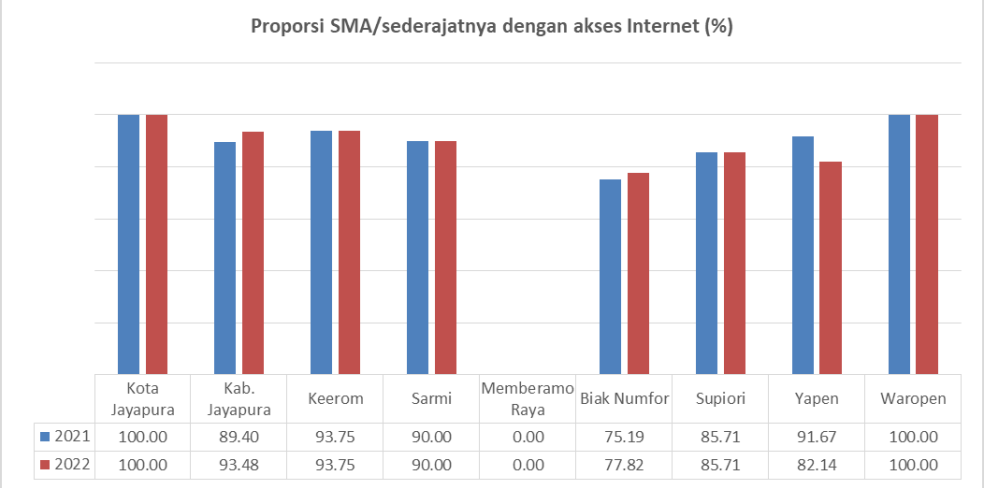

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	100.00	89.40	93.75	90.00	0.00	75.19	85.71	91.67	100.00
2022	100.00	93.48	93.75	90.00	0.00	77.82	85.71	82.14	100.00

Gambar 2. 64 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Internet

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

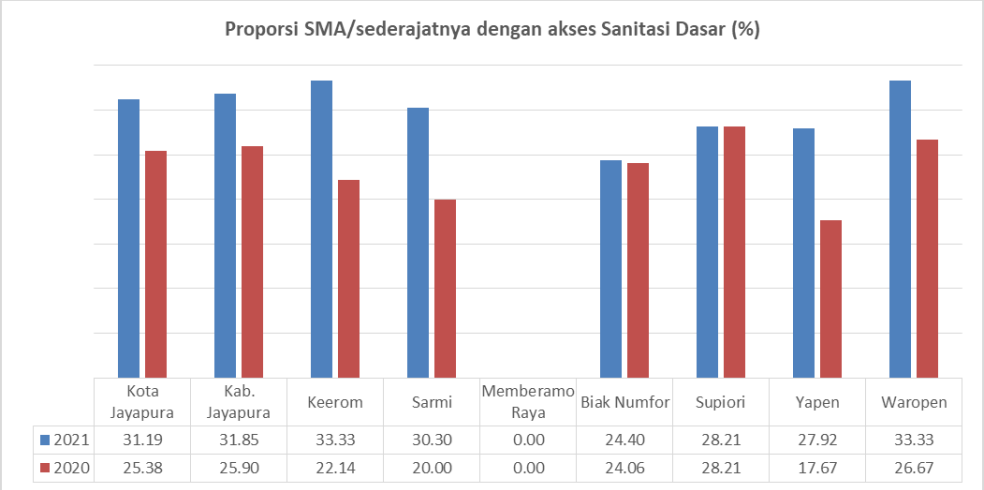

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	31.19	31.85	33.33	30.30	0.00	24.40	28.21	27.92	33.33
2020	25.38	25.90	22.14	20.00	0.00	24.06	28.21	17.67	26.67

Gambar 2. 65 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Sanitasi Dasar

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

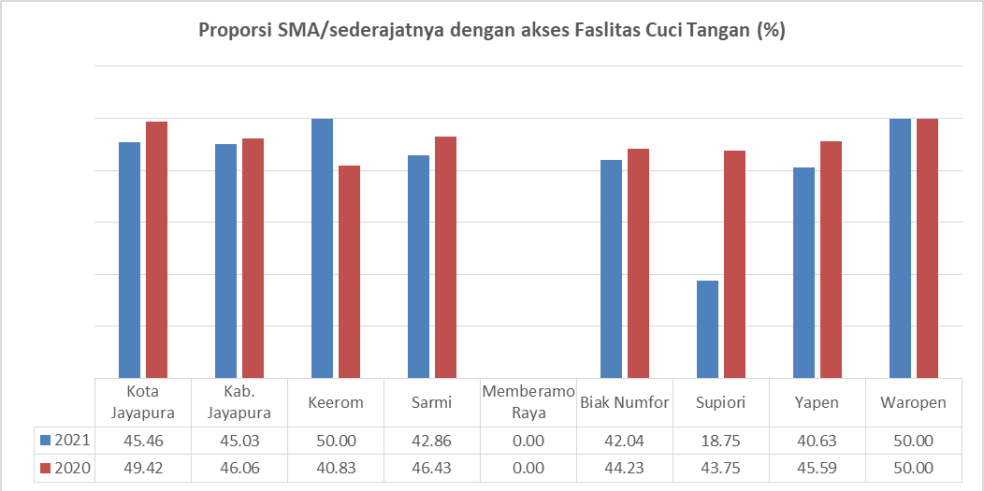

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2021	45.46	45.03	50.00	42.86	0.00	42.04	18.75	40.63	50.00
2020	49.42	46.06	40.83	46.43	0.00	44.23	43.75	45.59	50.00

Gambar 2. 66 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

Indikator ini memberikan informasi terkait kualitas guru serta untuk memantau upaya peningkatan kualitas guru yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah.

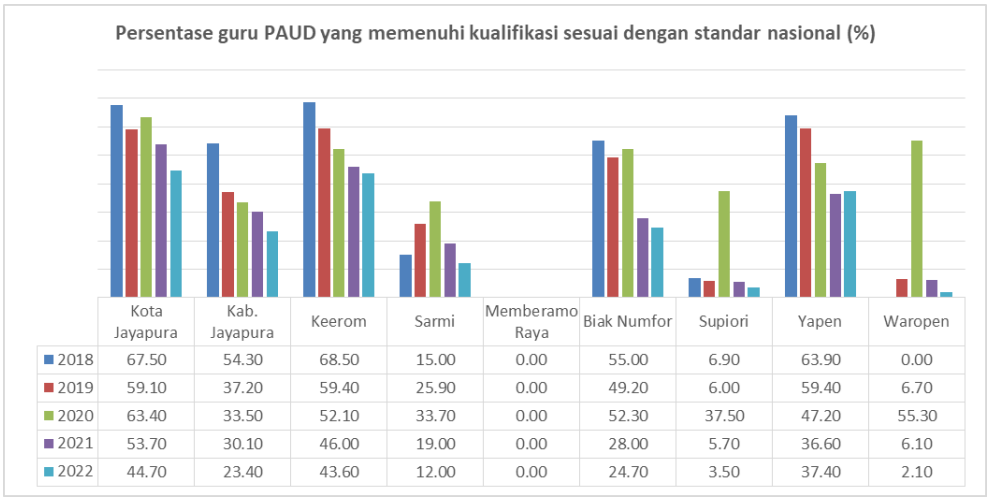

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	67.50	54.30	68.50	15.00	0.00	55.00	6.90	63.90	0.00
2019	59.10	37.20	59.40	25.90	0.00	49.20	6.00	59.40	6.70
2020	63.40	33.50	52.10	33.70	0.00	52.30	37.50	47.20	55.30
2021	53.70	30.10	46.00	19.00	0.00	28.00	5.70	36.60	6.10
2022	44.70	23.40	43.60	12.00	0.00	24.70	3.50	37.40	2.10

Gambar 2. 67 Presentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

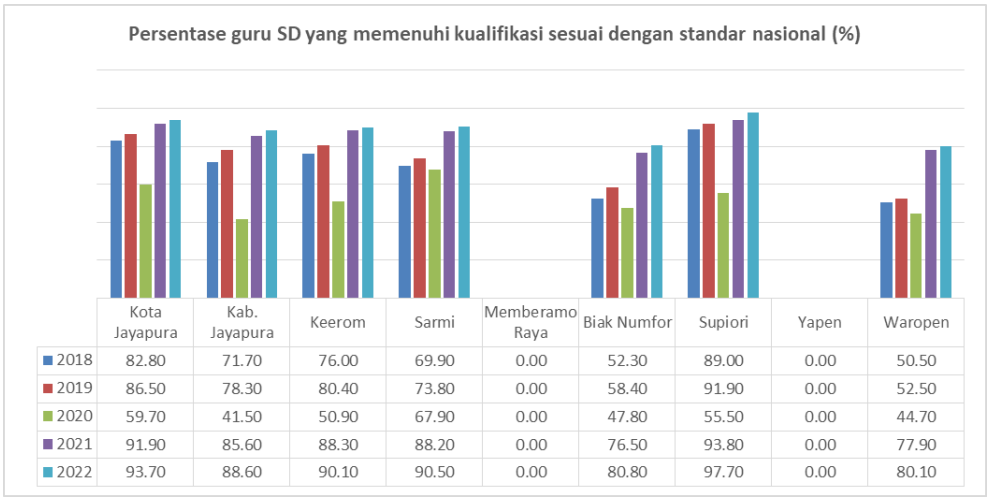

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	82.80	71.70	76.00	69.90	0.00	52.30	89.00	0.00	50.50
2019	86.50	78.30	80.40	73.80	0.00	58.40	91.90	0.00	52.50
2020	59.70	41.50	50.90	67.90	0.00	47.80	55.50	0.00	44.70
2021	91.90	85.60	88.30	88.20	0.00	76.50	93.80	0.00	77.90
2022	93.70	88.60	90.10	90.50	0.00	80.80	97.70	0.00	80.10

Gambar 2. 68 Presentase guru SD yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

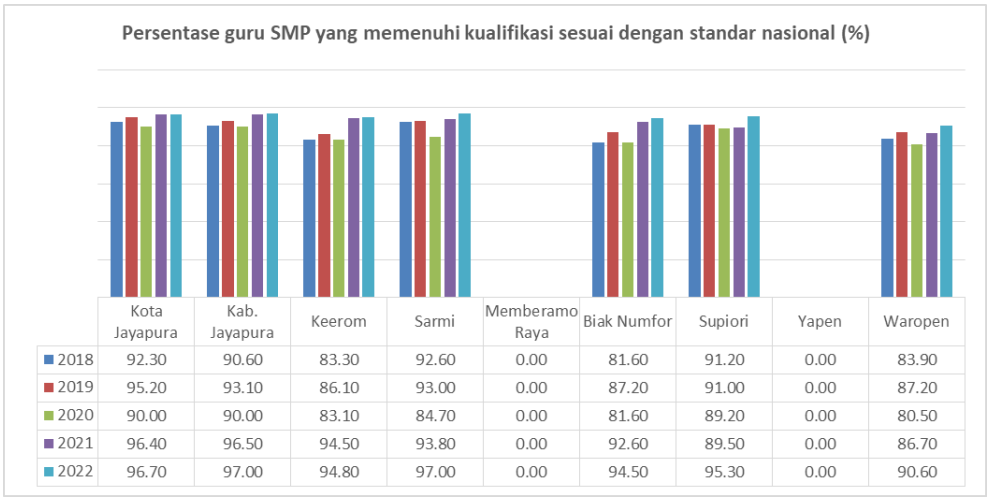

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	92.30	90.60	83.30	92.60	0.00	81.60	91.20	0.00	83.90
2019	95.20	93.10	86.10	93.00	0.00	87.20	91.00	0.00	87.20
2020	90.00	90.00	83.10	84.70	0.00	81.60	89.20	0.00	80.50
2021	96.40	96.50	94.50	93.80	0.00	92.60	89.50	0.00	86.70
2022	96.70	97.00	94.80	97.00	0.00	94.50	95.30	0.00	90.60

Gambar 2. 69 Presentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

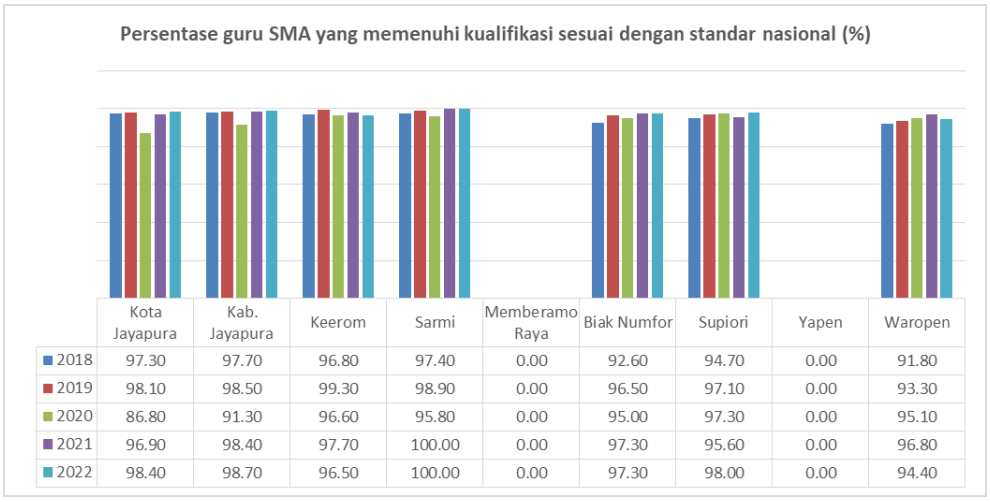

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	97.30	97.70	96.80	97.40	0.00	92.60	94.70	0.00	91.80
2019	98.10	98.50	99.30	98.90	0.00	96.50	97.10	0.00	93.30
2020	86.80	91.30	96.60	95.80	0.00	95.00	97.30	0.00	95.10
2021	96.90	98.40	97.70	100.00	0.00	97.30	95.60	0.00	96.80
2022	98.40	98.70	96.50	100.00	0.00	97.30	98.00	0.00	94.40

Gambar 2. 70 Presentase guru SMA yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

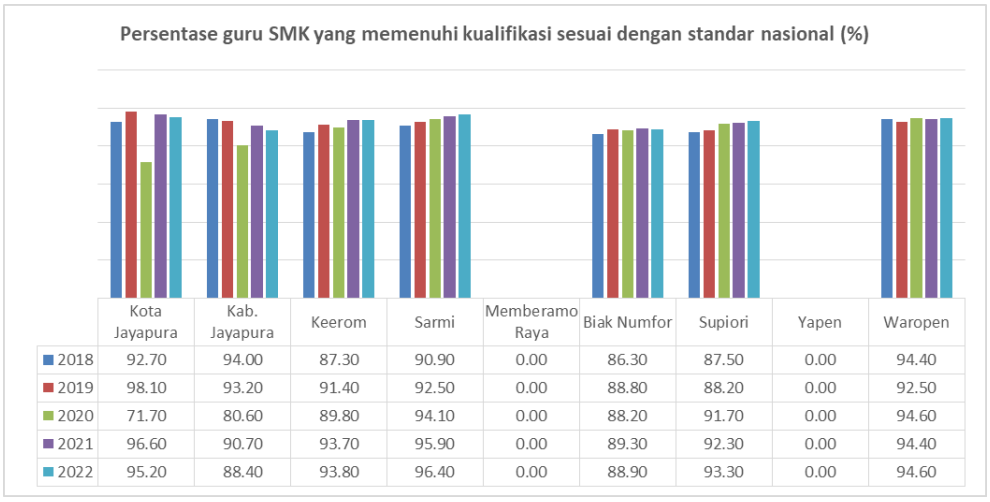

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	92.70	94.00	87.30	90.90	0.00	86.30	87.50	0.00	94.40
2019	98.10	93.20	91.40	92.50	0.00	88.80	88.20	0.00	92.50
2020	71.70	80.60	89.80	94.10	0.00	88.20	91.70	0.00	94.60
2021	96.60	90.70	93.70	95.90	0.00	89.30	92.30	0.00	94.40
2022	95.20	88.40	93.80	96.40	0.00	88.90	93.30	0.00	94.60

Gambar 2. 71 Presentase guru SMK yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

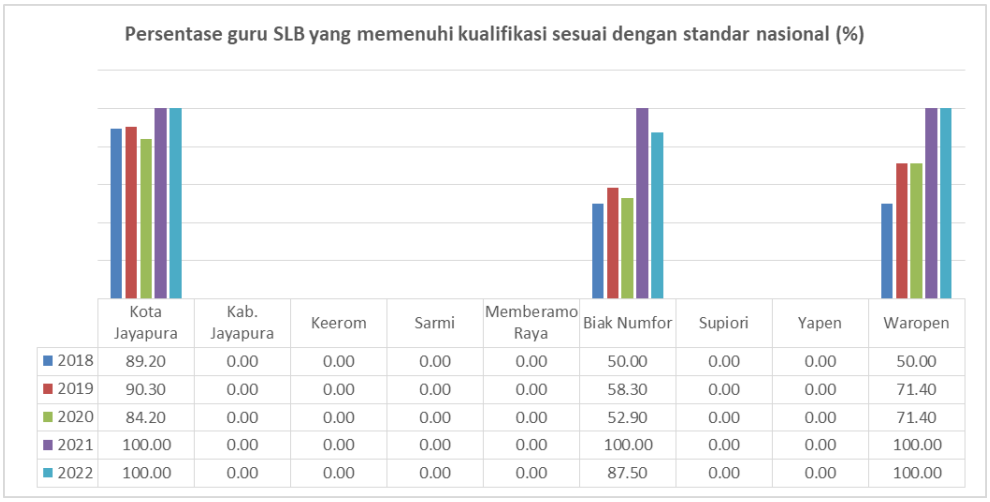

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2019	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	0.00	0.00	71.40
2020	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00	71.40
2021	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	100.00

Gambar 2. 72 Presentase guru SLB yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

B. Tantangan

Salah satu dampak terbesar di sistem pendidikan di Indonesia dari kejadian pandemic covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada awal maret 2020 adalah penghentian pembelajaran tatap muka di setiap jenjang pendidikan dan mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah dengan menggunakan metode dalam jaringan (Daring). Dengan sistem daring tersebut, para siswa dan guru harus menggunakan perangkat teknologi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perangkat teknologi yang dipakai bervariasi dari ponsel pintar, tablet, laptop, hingga *router*. Namun dibalik kecanggihan alat-alat tersebut, perangkat teknologi masih memiliki kendala yang dapat memberikan dampak pada kegiatan belajar mengajar. Salah satu contoh dari kendala tersebut adalah kendala internet. Tidak jarang kita mengalami kendala internet yang mengakibatkan kita tidak dapat mendengar suara guru saat menjelaskan materi atau mengakses *Google Classroom*. Berbeda dengan pembelajaran luring, karena tidak menggunakan jaringan internet, kegiatan belajar mengajar tidak akan terganggu, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

Turunnya kualitas belajar di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi pedagogi guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring dan ketrampilan TIK masih terbatas dan fasilitas belajar yang tersedia baik untuk pendidik maupun peserta didik. Salah satu yang memberatkan proses belajar PJJ adalah kurang terampilnya guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menuntut anak dan remaja untuk duduk berjam-jam di depan laptop ataupun telepon selular mereka untuk mendengarkan guru berceramah. Hal ini berdampak negatif pada motivasi dan fokus anak dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar tanpa kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan, selain itu distraksi dari perangkat yang gunakan untuk menunjang kegiatan belajar kita. Distraksi tersebut dapat berupa notifikasi dari media sosial kita maupun video atau gim yang dapat kita temukan di ponsel kita. Dengan adanya distraksi tersebut, daya tangkap siswa terhadap materi yang sedang dijelaskan oleh guru dapat berkurang, mengakibatkan siswa mendapatkan nilai yang kurang baik saat pengambilan nilai. Dibandingkan dengan pembelajaran luring, para siswa tidak dapat mengakses distraksi tersebut karena saat pembelajaran, ponsel akan dititipkan agar pembelajaran tidak terganggu dengan ponsel tersebut. Dukungan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak juga sangat penting, namun tidak semua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang sama terutama badi mereka yang tinggal di daerah perkampungan dan jauh dari akses internet.

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan TPB 5 memiliki 4 target yang diukur melalui 6 indikator untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Mendorong terwujudnya Tujuan 5 TPB/SDGs ini tidak hanya upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tapi juga merupakan landasan untuk menciptakan bangsa yang lebih sejahtera. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara bermakna dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan dari TPB/SDGs untuk memastikan bahwa jalan menuju kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan.

A. Status Capaian

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender di suatu wilayah dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

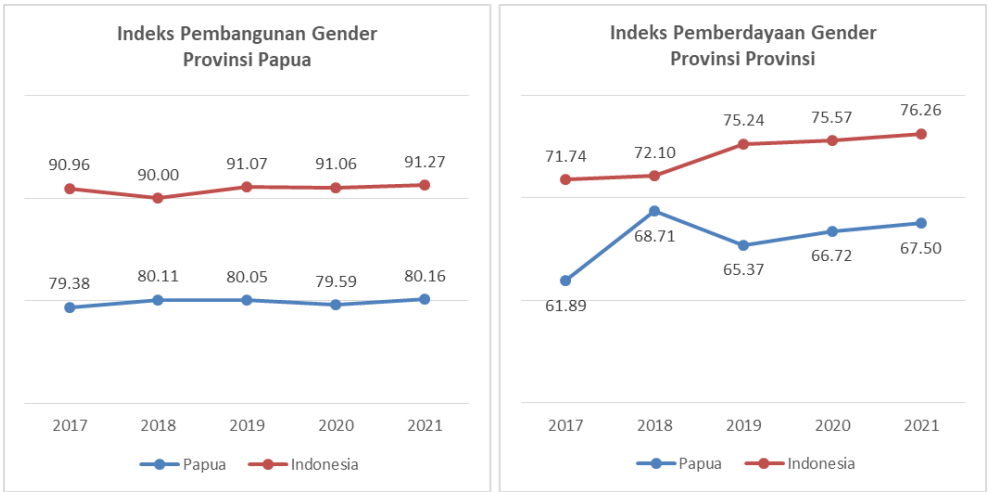

Gambar 2. 73 Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) dan Pemberdayaan Gender (IDG)

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

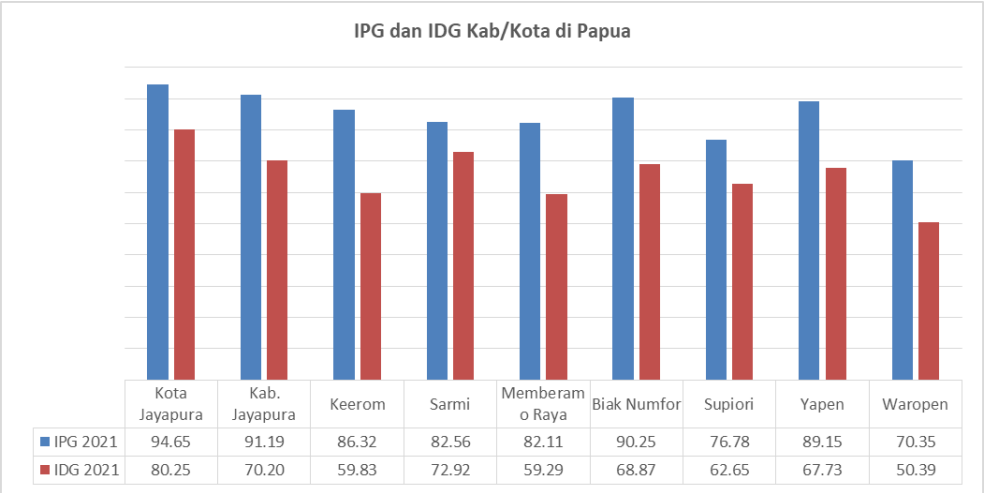

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
IPG 2021	94.65	91.19	86.32	82.56	82.11	90.25	76.78	89.15	70.35
IDG 2021	80.25	70.20	59.83	72.92	59.29	68.87	62.65	67.73	50.39

Gambar 2. 74 IPG dan IDG Tahun 2021 per Kabupaten Kota

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Partisipasi Perempuan dalam Legislatif dan Pemerintahan

Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif memperlihatkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan keputusan dalam proses politik formal, khususnya di Lembaga legilatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya. Meskipun proporsi perempuan yang duduk di posisi DPR masih tergolong sangat rendah, namun jumlahnya meningkat cukup tinggi pada tahun 2020.

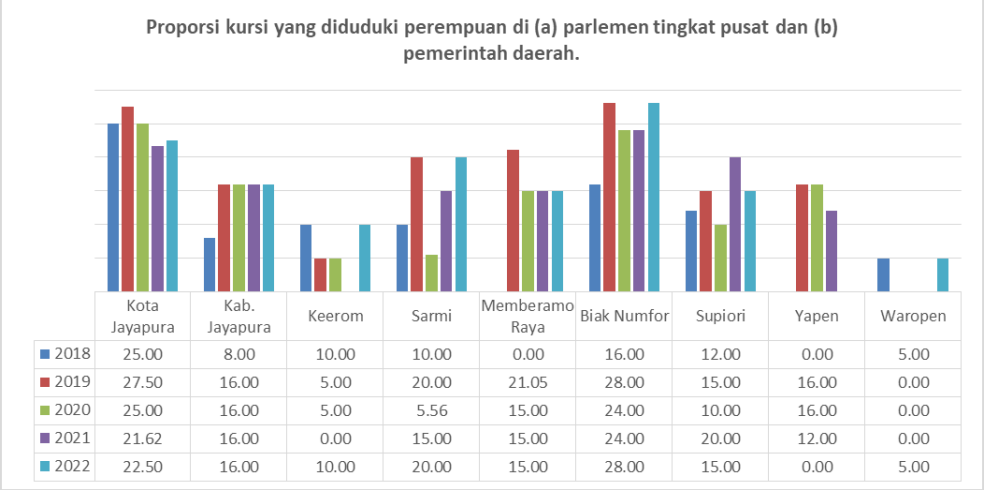

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	25.00	8.00	10.00	10.00	0.00	16.00	12.00	0.00	5.00
2019	27.50	16.00	5.00	20.00	21.05	28.00	15.00	16.00	0.00
2020	25.00	16.00	5.00	5.56	15.00	24.00	10.00	16.00	0.00
2021	21.62	16.00	0.00	15.00	15.00	24.00	20.00	12.00	0.00
2022	22.50	16.00	10.00	20.00	15.00	28.00	15.00	0.00	5.00

Gambar 2. 75 Proporsi Kursi Perempuan di DPRRI dan DPRD per Kabupaten Kota

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

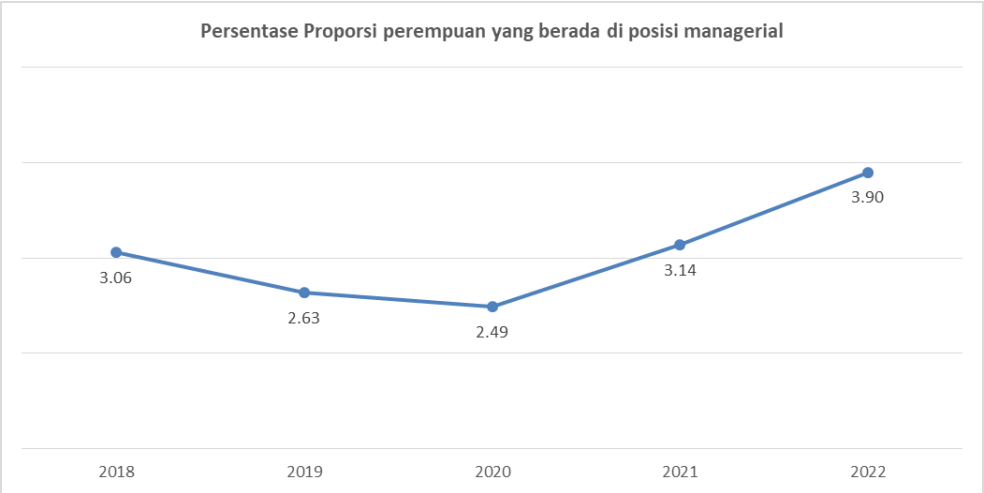

Gambar 2. 76 Proporsi Kursi Perempuan di posisi managerial

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Kepemilikan hak atas tanah pertanian

Kepemilikan hak atas tanah di Papua sangat terkait dengan praktik pewarisan lahan pertanian sebagai sumber daya ekonomi yang condong dikuasai oleh laki-laki karna didorong oleh aspek sosial budaya pada masyarakat yang umumnya menganut sistem patrilienal. Sistem tersebut mensyaratkan masyarakat yang menganutnya untuk menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Oleh karena itu, kedudukan anak laki-laki diletakkan lebih utama daripada anak perempuan termasuk dalam pengaturan harta warisan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fenomena pengambilan keputusan tentang penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sepenuhnya dilakukan oleh laki-laki dan tidak melibatkan perempuan meski mereka merupakan pemilik lahan tersebut.

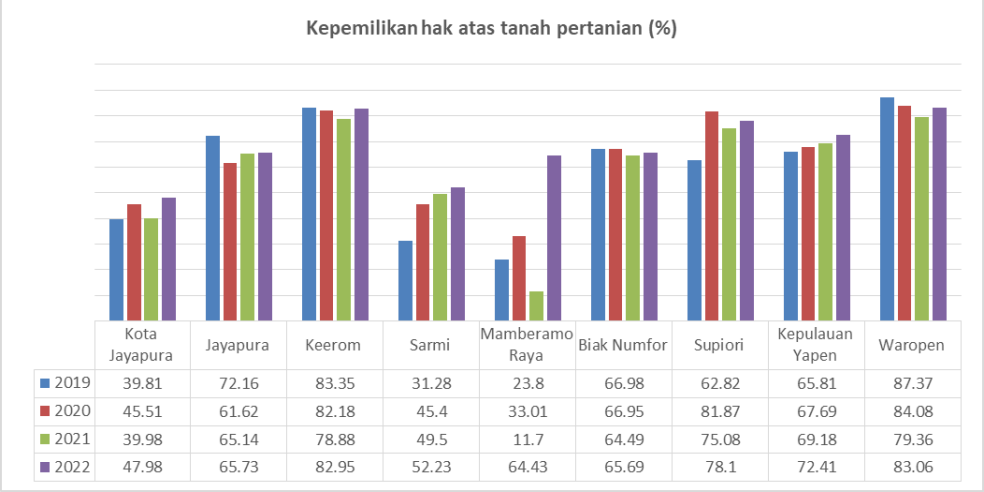

	Kota Jayapura	Jayapura	Keerom	Sarmi	Mamberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2019	39.81	72.16	83.35	31.28	23.8	66.98	62.82	65.81	87.37
2020	45.51	61.62	82.18	45.4	33.01	66.95	81.87	67.69	84.08
2021	39.98	65.14	78.88	49.5	11.7	64.49	75.08	69.18	79.36
2022	47.98	65.73	82.95	52.23	64.43	65.69	78.1	72.41	83.06

Gambar 2. 77 Presentase kepemilikan ha katas tanah

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Indikator ini untuk menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler.

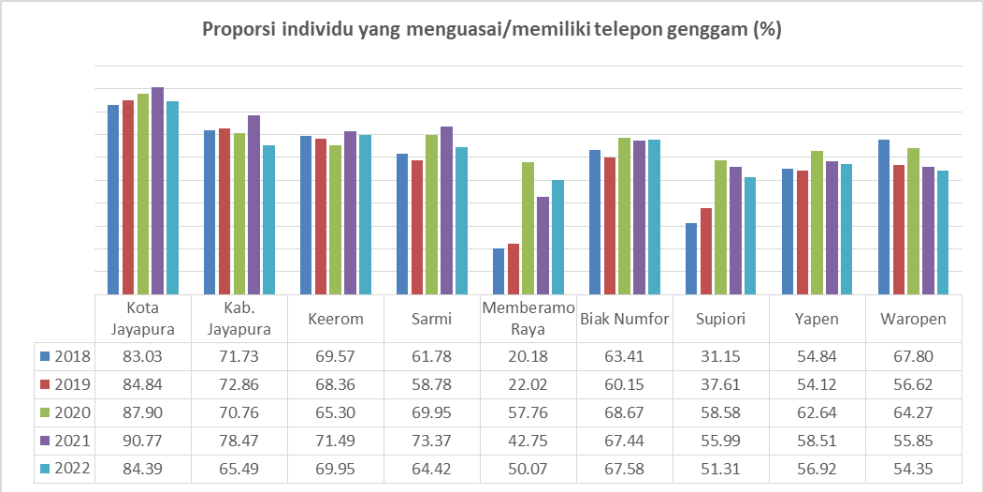

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	83.03	71.73	69.57	61.78	20.18	63.41	31.15	54.84	67.80
2019	84.84	72.86	68.36	58.78	22.02	60.15	37.61	54.12	56.62
2020	87.90	70.76	65.30	69.95	57.76	68.67	58.58	62.64	64.27
2021	90.77	78.47	71.49	73.37	42.75	67.44	55.99	58.51	55.85
2022	84.39	65.49	69.95	64.42	50.07	67.58	51.31	56.92	54.35

Gambar 2. 78 Proporsi Individu yang memiliki telepon genggam

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

B. Tantangan

Tantangan besar dalam pencapaian tujuan TPB 5 ini adalah proses implementasi dari kebijakan afirmasi terhadap perempuan di segala bidang. Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „"Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Selanjutnya dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga telah mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa: Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Pada kelembagaan partai politikpun, *affirmatic action* dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penidirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: Pendirian dan pembentukan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Tidak hanya pada pendirian partai politik, affirmative action terhadap keterlibatan perempuan juga telah ditentukan dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Namun dengan berbagai ragam kerangka hukum yang telah tersedia, masih terdapat tantangan yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah. Hal ini mengakar pada budaya patriarki yang berlaku di masyarakat Papua hingga saat ini sehingga menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan baik di dunia manajerial maupun dunia politik. Di dunia politik, (Gelgel dan Apriani, 2019) mengidentifikasi adanya perlakuan yang berbeda yang diberikan partai politik dalam menyeleksi calon perempuan dan laki-laki. Di internal partai, perempuan cenderung ditempatkan sebagai anggota partai. Dengan kata lain, hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Tantangan lain yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah adalah faktor internal perempuan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan adalah adanya keterbatasan sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat perempuan untuk berkarir di dunia politik (Gelgel & Apriani, 2019; Margret et al., 2018). Ambisi perempuan untuk merencanakan karir dan menduduki posisi manajerial juga ditemukan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Lidyah, 2017).

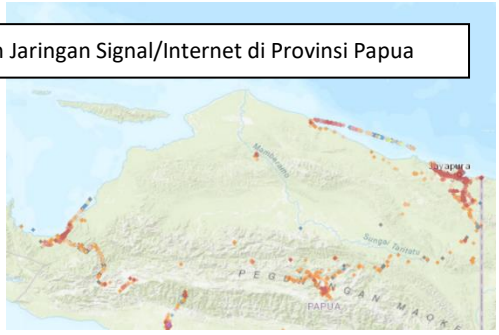

Cakupan Jaringan Signal/Internet di Provinsi Papua

Tantangan terkait akses terhadap telepon genggam sangat dipengaruhi oleh cakupan area signal dan jaringan telepon selular hingga signal internet dan kapasitas daya beli perangkat telepon oleh masyarakat dan keterjangkauan harga perangkat telpon. Wilayah cakupan jaringan telepon dan signal internet di Papua masih sangat terbatas baru mencapai ± 20%. Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan karakteristik Provinsi Papua dan konektivitas yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah di daerah pegunungan dan pinggiran pantai. Investasi yang dibutuhkan untuk menyediaakan jaringan signal terutama jaringan internet sangat besar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar/jarang. Selain itu, masih kurangnya kualitas SDM handal yang bekerja di bidang TIK dan

rawannya pencurian dan vandalism pada daerah-daerah tertentu menyebabkan keinginan untuk melakukan investasi penyediaan jaringan signal di Papua masih sangat terbatas.

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Tujuan TPB 6 mencakup 6 Target dan 7 Indikator yang terdiri atas (6.1) pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (6.2) pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (6.3) pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (6.4) pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (6.5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6.6) Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

A. Status Capaian

Air Minum

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

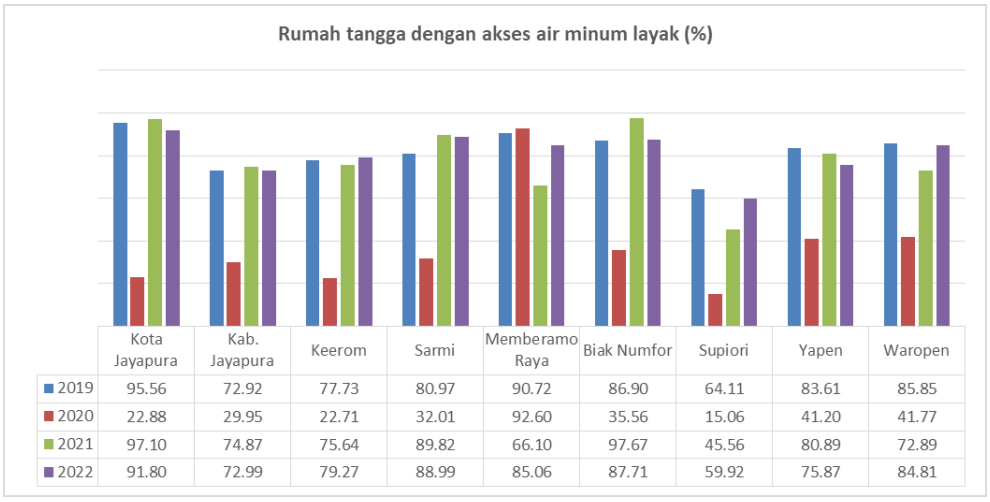

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	95.56	72.92	77.73	80.97	90.72	86.90	64.11	83.61	85.85
2020	22.88	29.95	22.71	32.01	92.60	35.56	15.06	41.20	41.77
2021	97.10	74.87	75.64	89.82	66.10	97.67	45.56	80.89	72.89
2022	91.80	72.99	79.27	88.99	85.06	87.71	59.92	75.87	84.81

Gambar 2. 79 Presentase rumah tangga dengan akses air minum

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Sanitasi Layak

Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

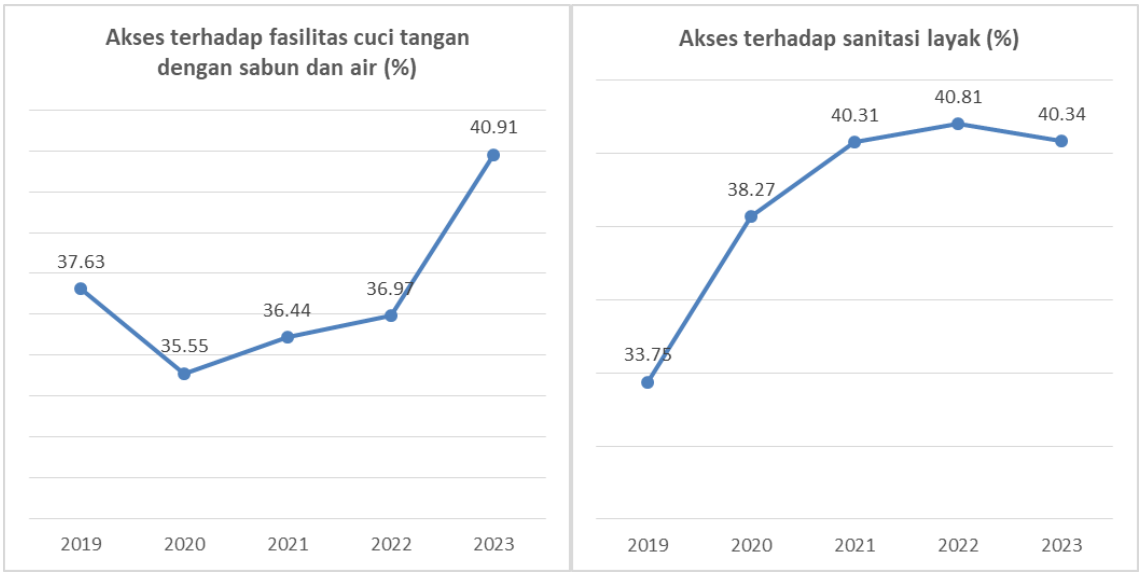

Gambar 2. 80 Presentase rumah tangga dengan akses pasilitas cuci tangan dan sanitasi layak

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya adalah perbandingan antara kuantitas air tawar yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya yang dinyatakan dalam benruk persentase. Proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar untuk keperluan domestik terhadap ketersediannya adalah rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai keperluan lainnya. Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi).

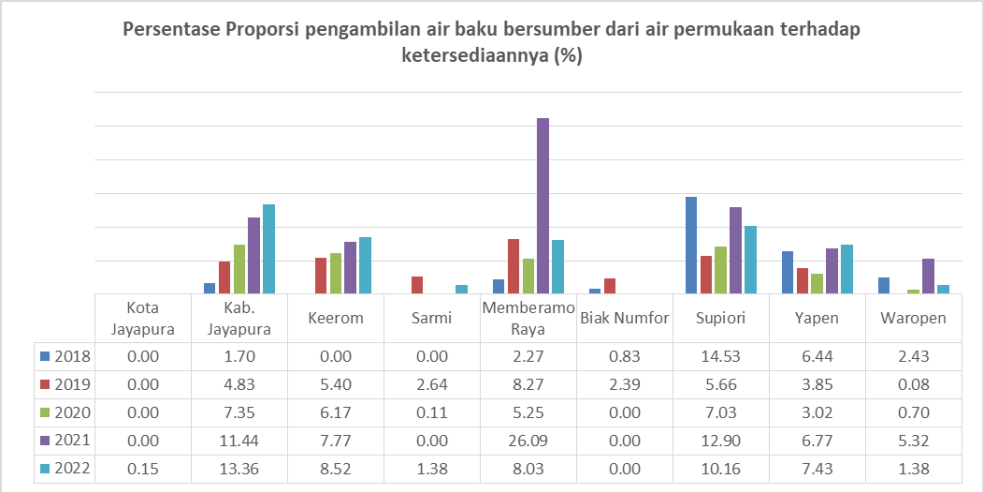

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	0.00	1.70	0.00	0.00	2.27	0.83	14.53	6.44	2.43
2019	0.00	4.83	5.40	2.64	8.27	2.39	5.66	3.85	0.08
2020	0.00	7.35	6.17	0.11	5.25	0.00	7.03	3.02	0.70
2021	0.00	11.44	7.77	0.00	26.09	0.00	12.90	6.77	5.32
2022	0.15	13.36	8.52	1.38	8.03	0.00	10.16	7.43	1.38

Gambar 2. 81 Presentase proporsi pengambilan air baku dari air permukaan

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya adalah perbandingan antara kuantitas air tawar yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar untuk keperluan domestik terhadap ketersediannya adalah rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai keperluan lainnya. Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi).

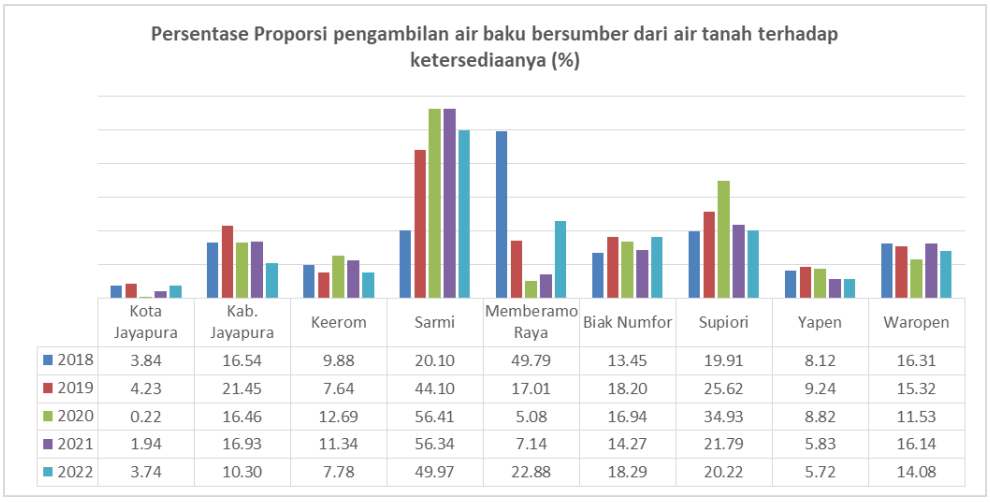

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	3.84	16.54	9.88	20.10	49.79	13.45	19.91	8.12	16.31
2019	4.23	21.45	7.64	44.10	17.01	18.20	25.62	9.24	15.32
2020	0.22	16.46	12.69	56.41	5.08	16.94	34.93	8.82	11.53
2021	1.94	16.93	11.34	56.34	7.14	14.27	21.79	5.83	16.14
2022	3.74	10.30	7.78	49.97	22.88	18.29	20.22	5.72	14.08

Gambar 2. 82 Presentase proporsi pengambilan air baku dari air tanah

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

B. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air minum di beberapa kabupaten di Provinsi Papua adalah masih lemahnya kelembagaan dan sistem tata kelola penyelenggaraan air minum dan kebutuhan domestik, serta komitmen pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum. (SPAM).

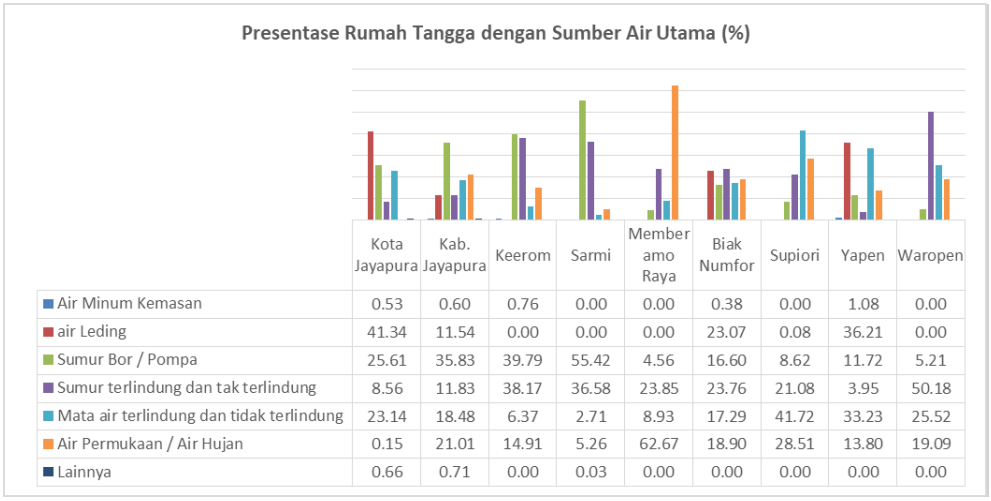

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
Air Minum Kemasan	0.53	0.60	0.76	0.00	0.00	0.38	0.00	1.08	0.00
air Leding	41.34	11.54	0.00	0.00	0.00	23.07	0.08	36.21	0.00
Sumur Bor / Pompa	25.61	35.83	39.79	55.42	4.56	16.60	8.62	11.72	5.21
Sumur terlindung dan tak terlindung	8.56	11.83	38.17	36.58	23.85	23.76	21.08	3.95	50.18
Mata air terlindung dan tidak terlindung	23.14	18.48	6.37	2.71	8.93	17.29	41.72	33.23	25.52
Air Permukaan / Air Hujan	0.15	21.01	14.91	5.26	62.67	18.90	28.51	13.80	19.09
Lainnya	0.66	0.71	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 2. 83 Presentase rumah tangga dengan sumber air utama

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Belum optimalnya laju peningkatan sambungan rumah melalui sistem perpipaan di beberapa kabupaten sepeti kota Jayapura dan Kepulaan Yapen berdampak pada meningkatnya penggunaan air kemasan dan air isi ulang untuk air minum. Selain itu, karna akses terhadap air leding belum optimal maka terlihat di beberapa kabupaten seprti Keerom, Waropen, Sarmi masih menggunakan Sumur

sebagai sumber air utama. Sedangkan di Mamberamo Raya, sebagian besar penduduk masih menggunakan air hujan atau air permukaan untuk kebutuhan air domestik maupun untuk minum,

Tantangan dalam penyediaan akses sanitasi layak dan aman secara umum adalah belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari teknis, perilaku masyarakat, pendanaan, kelembagaan dan regulasinya.

Terdapat beberapa indikator TPB 6 yang belum dapat dipresentasikan dalam RAD ini karna ketidak tersediaan data antara lain:

- Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.
- Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
- Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.

Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Tujuan TPB 7 terkait sektor energi dan sumber daya mineral yang merupakan sektor strategis dan menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Papua. Papua memiliki potensi energi dan Sumber daya mineral yang sangat besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan dalam pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

A. Status Capaian

Rasio elektrifikasi.

Rasio Elektrifikasi (RE) adalah salah satu indikator utama pembangunan ketenagalistrikan yang menunjukan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik baik dari listrik PLN maupun non-PLN dengan jumlah rumah tangga total Konsumsi listrik per kapita.

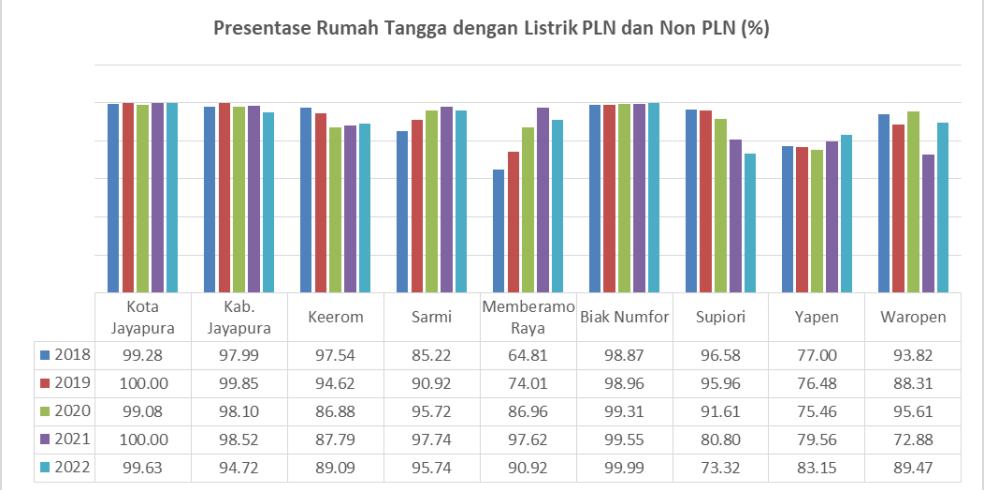

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	99.28	97.99	97.54	85.22	64.81	98.87	96.58	77.00	93.82
2019	100.00	99.85	94.62	90.92	74.01	98.96	95.96	76.48	88.31
2020	99.08	98.10	86.88	95.72	86.96	99.31	91.61	75.46	95.61
2021	100.00	98.52	87.79	97.74	97.62	99.55	80.80	79.56	72.88
2022	99.63	94.72	89.09	95.74	90.92	99.99	73.32	83.15	89.47

Gambar 2. 84 Presentase rumah tangga dengan listrik PLN dan Non-PLN

Sumber: Statistik PLN

Konsumsi Listrik per kapita

Salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah adalah pada penyediaan energi yang memadai dan andal untuk seluruh masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan tingkat konsumsi listrik. Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan antara total penjualan tenaga listrik PLN per kelompok pelanggan dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

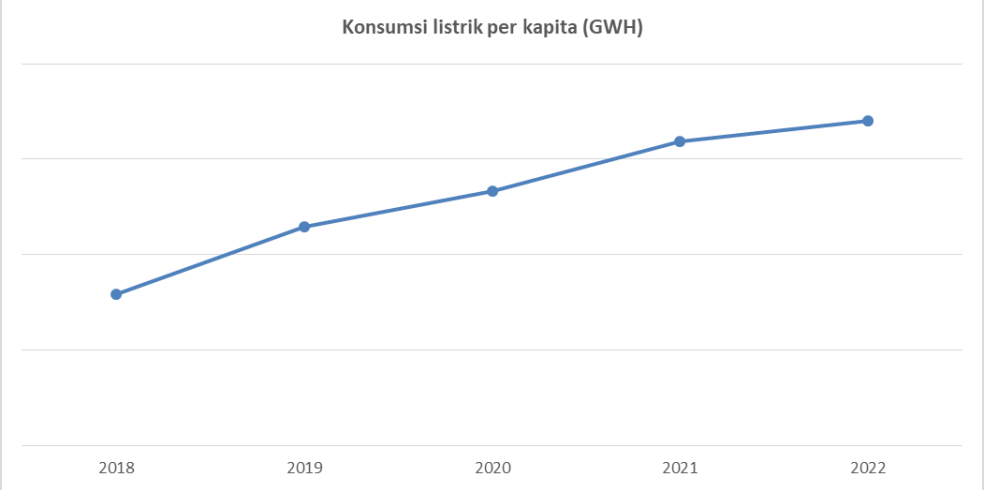

Gambar 2. 85 Konsumsi Listrik Perkapita

Sumber: Statistik PLN

Rasio penggunaan gas rumah tangga.

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (gas LPG dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga.

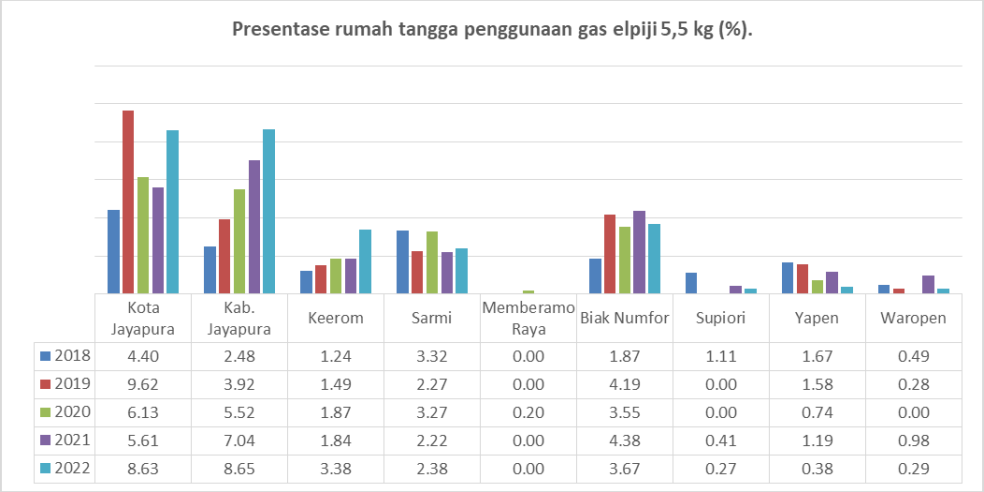

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	4.40	2.48	1.24	3.32	0.00	1.87	1.11	1.67	0.49
2019	9.62	3.92	1.49	2.27	0.00	4.19	0.00	1.58	0.28
2020	6.13	5.52	1.87	3.27	0.20	3.55	0.00	0.74	0.00
2021	5.61	7.04	1.84	2.22	0.00	4.38	0.41	1.19	0.98
2022	8.63	8.65	3.38	2.38	0.00	3.67	0.27	0.38	0.29

Gambar 2. 86 Presentase rumah tangga pengguna gas elpiji 5,5 kg

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

B. Tantangan

HIngga saat ini, target pencapaian Rasio Elektrifikasi di Papua belum dapat mencapai 100% dan program melistriki kampung yang belum berlistrik masih terhambat. Kondisi ini terjadi karna lokasi

kampung yang belum berlistrik sangat sulit dijangkau serta alokasi anggaran pelaksanaan pencapaian akses terhadap tenaga listrik PLN yang masih sangat terbatas.

Pemanfaatan gas (Elpiji) sebagai bahan bakar rumah tangga sudah dilakukan oleh masyarakat Papua, walaupun masih dalam presentasi yang sangat kecil. Kondisi ini disebabkan karna harga gas elpiji masih tergolong mahal di Papua dan hampir sebagian besar masyarakat masih lebih merasa aman menggunakan minyak tanah atau kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak.

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produkstif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Tujuan TPB 8 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang sejalan dengan peningkatan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Bagian ini tidak membahas isu pola konsumsi berlanjutan yang akan dibahas pada TPB ini.

A. Status Capaian

Laju pertumbuhan PDB per kapita

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.

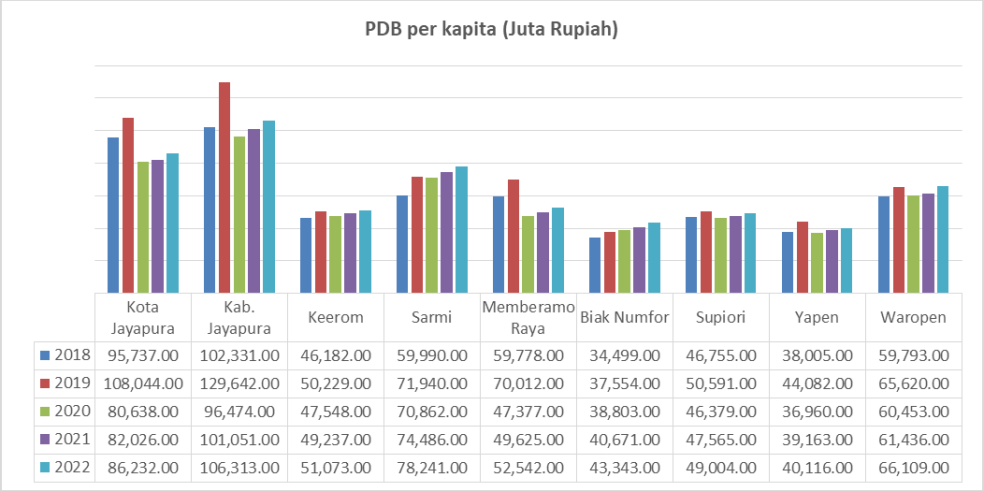

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	95,737.00	102,331.00	46,182.00	59,990.00	59,778.00	34,499.00	46,755.00	38,005.00	59,793.00
2019	108,044.00	129,642.00	50,229.00	71,940.00	70,012.00	37,554.00	50,591.00	44,082.00	65,620.00
2020	80,638.00	96,474.00	47,548.00	70,862.00	47,377.00	38,803.00	46,379.00	36,960.00	60,453.00
2021	82,026.00	101,051.00	49,237.00	74,486.00	49,625.00	40,671.00	47,565.00	39,163.00	61,436.00
2022	86,232.00	106,313.00	51,073.00	78,241.00	52,542.00	43,343.00	49,004.00	40,116.00	66,109.00

Gambar 2. 87 PDB per Kapita

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

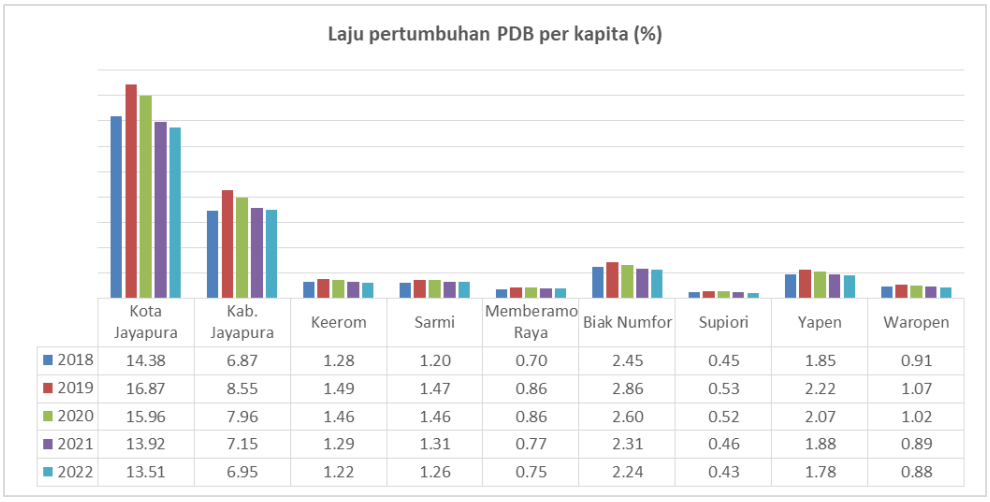

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	14.38	6.87	1.28	1.20	0.70	2.45	0.45	1.85	0.91
2019	16.87	8.55	1.49	1.47	0.86	2.86	0.53	2.22	1.07
2020	15.96	7.96	1.46	1.46	0.86	2.60	0.52	2.07	1.02
2021	13.92	7.15	1.29	1.31	0.77	2.31	0.46	1.88	0.89
2022	13.51	6.95	1.22	1.26	0.75	2.24	0.43	1.78	0.88

Gambar 2. 88 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu, sementara laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi

Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan (assessment) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi erja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan pengembangan wilayah. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai.

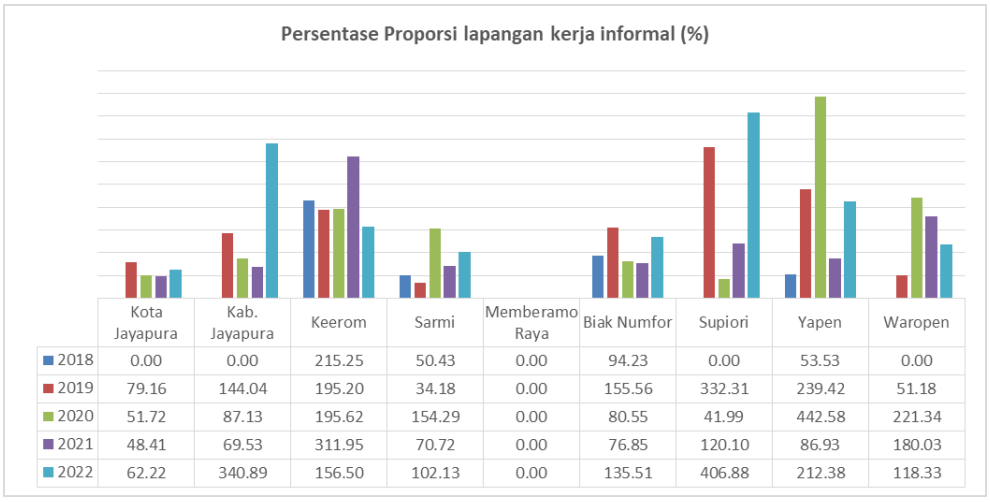

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	0.00	0.00	215.25	50.43	0.00	94.23	0.00	53.53	0.00
2019	79.16	144.04	195.20	34.18	0.00	155.56	332.31	239.42	51.18
2020	51.72	87.13	195.62	154.29	0.00	80.55	41.99	442.58	221.34
2021	48.41	69.53	311.95	70.72	0.00	76.85	120.10	86.93	180.03
2022	62.22	340.89	156.50	102.13	0.00	135.51	406.88	212.38	118.33

Gambar 2. 89 Proporsi lapangan kerja informal

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Pekerjaan tetap, produktif dan layak

Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian target 8.5 terkait target mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, antara lain indikator 8.5.1* - Upah rata-rata per jam pekerja, indikator 8.5.2* - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dan indikator 8.5.2.(a) - Persentase setengah pengangguran.

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

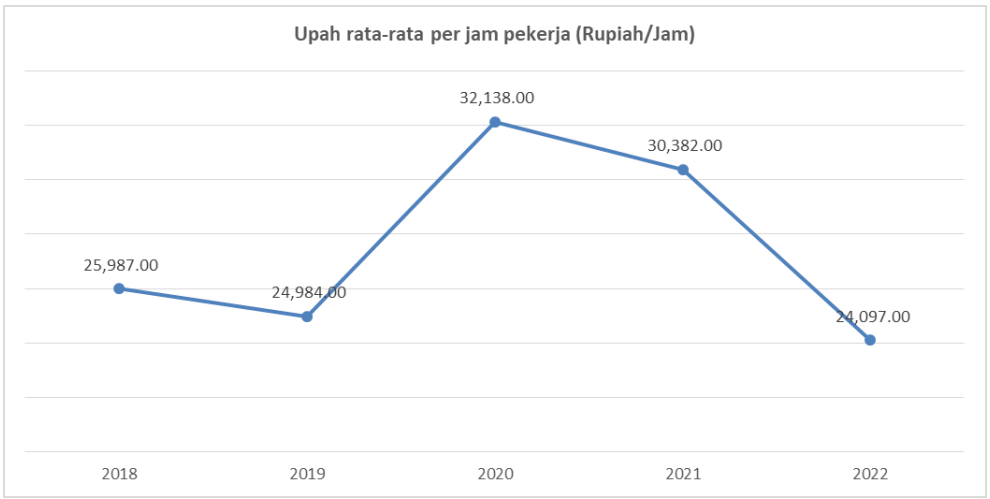

Gambar 2. 90 Upah rata-rata per jam pekerja

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.

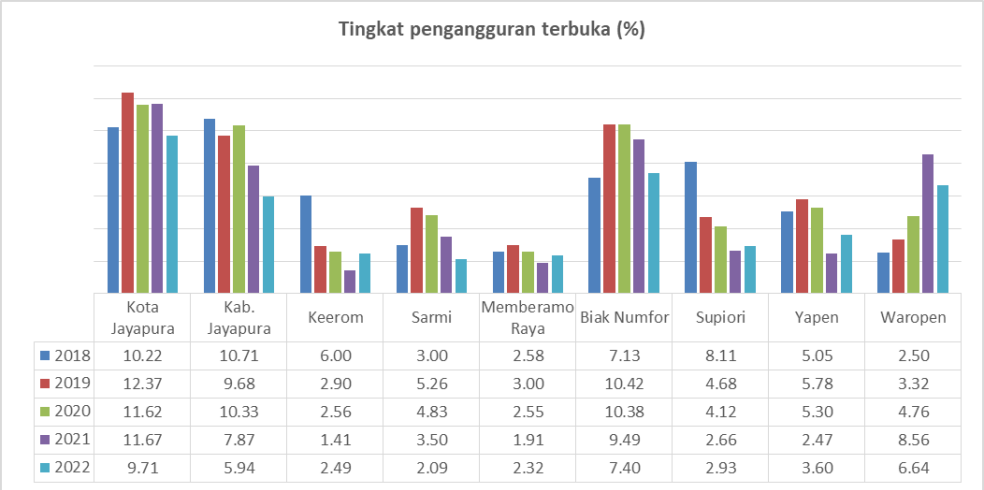

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	10.22	10.71	6.00	3.00	2.58	7.13	8.11	5.05	2.50
2019	12.37	9.68	2.90	5.26	3.00	10.42	4.68	5.78	3.32
2020	11.62	10.33	2.56	4.83	2.55	10.38	4.12	5.30	4.76
2021	11.67	7.87	1.41	3.50	1.91	9.49	2.66	2.47	8.56
2022	9.71	5.94	2.49	2.09	2.32	7.40	2.93	3.60	6.64

Gambar 2. 91 Presentase Tingkat pengangguran terbuka

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Pekerja setengah pengangguran

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

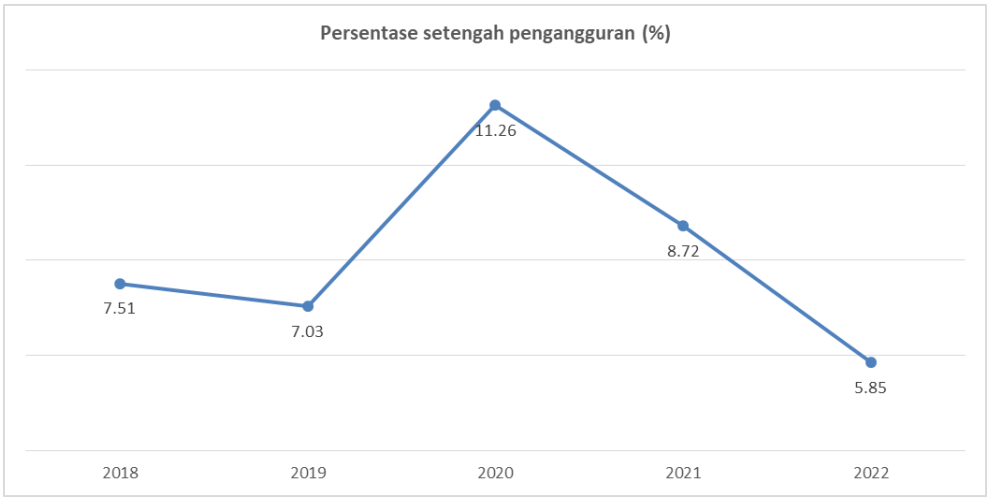

Gambar 2. 92 Presentase setengah pengangguran

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (discouraged worker) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.

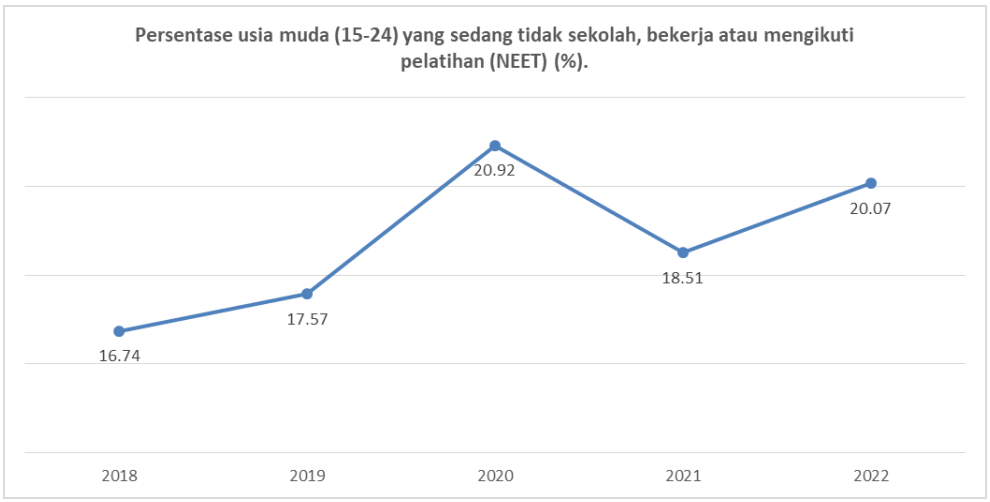

Gambar 2. 93 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja

Pekerja anak didefinisikan sebagai semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama angka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: 1). Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak; 2). Pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; dan 3). Pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya (International Conference of Labour Statisticians/ICLS articles 18).

Karena saat ini Indonesia belum memiliki data yang representatif untuk menunjukkan persentase "pekerja anak" sesuai kategori tersebut dan ketersediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), maka indikator ini menghitung persentase "anak yang bekerja" dengan usia 10-17 tahun berdasarkan kriteria jam kerja dan kelompok umur sebagai berikut: a). Anak yang bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batas minimum jam kerja; b). Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu; dan c). Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.

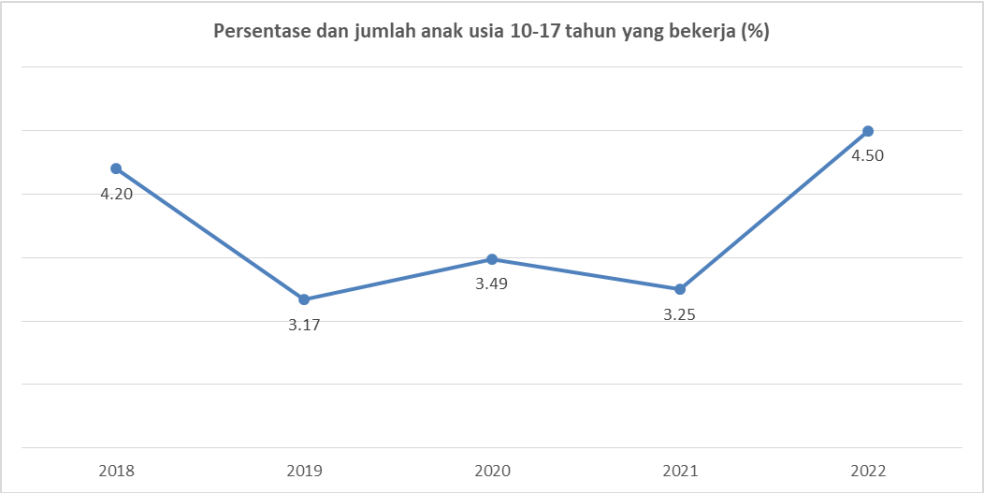

Gambar 2. 94 Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Indikator ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah

atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur preferensi wisatawan domestik terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia; dan menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

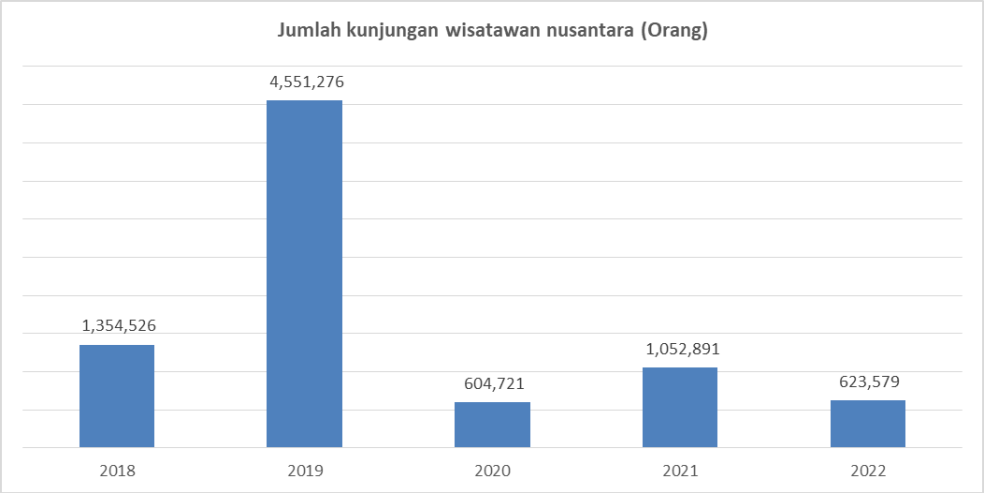

Gambar 2. 95 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

B. Tantangan

Pemulihan ekonomi Provinsi Papua diprakirakan berlanjut pada tahun 2022, ditunjukkan oleh masih tingginya pertumbuhan ekonomi provinsi papua. Pemulihan ekonomi ditopang oleh kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta didukung oleh proses pemulihan ekonomi pada sektor nontambang. Sektor nontambang seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran diprakirakan tumbuh positif. Berdasarkan sisi permintaan, pertumbuhan diprakirakan terutama berasal dari ekspor luar negeri yang tumbuh seiring peningkatan produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta kenaikan harga komoditas, maupun dukungan konsumsi rumah tangga yang tumbuh seiring prakiraan meningkatnya aktivitas ekonomi,

optimisme konsumen serta mobilitas seiring peningkatan cakupan vaksinasi dan terkendalinya kasus COVID-19. Perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 9,24 – 9,64% (yoy). Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021, pertumbuhan ini berada di atas prakiraan pertumbuhan Nasional.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, PDRB per kapita pun kembali mengalami pertumbuhan. PDRB ADHK per kapita pada triwulan I 2022 adalah sebesar Rp 3,25 juta perbulan, lebih tinggi dibanding triwulan I 2022 yang sebesar Rp 2,86 juta perbulan. Pertumbuhan tersebut sama dengan pertumbuhan PDRB sebesar 13,33% (yoy). Secara umum, perkembangan kondisi kesejahteraan pada September 2021 cenderung mengalami peningkatan. Secara tahunan, Jumlah dan persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan sejak September 2019. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga memburuk menjadi 5,60 dan 2,05.

Proses pemulihan ekonomi Papua berlanjut pada triwulan I 2022, tercermin pada pertumbuhan ekonomi sebesar 13,33% (yoy). Meskipun pertumbuhan tersebut melambat disbanding pertumbuhan triwulan IV 2021 yang sebesar 17,16% (yoy), pertumbuhan tersebut tetap tergolong tinggi dan jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01% (yoy). Kontributor utama pendorong pertumbuhan pada triwulan I 2022 adalah (LU) pertambangan dan penggalian yang tumbuh 25,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi seiring perkembangan produksi tembaga dan emas di tambang bawah tanah. Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh ekspor luar negeri yang tumbuh 115,89% (yoy). Pertumbuhan ekspor luar negeri juga didorong oleh perkembangan produksi tembaga dan emas di saat smelter tembaga masih dalam proses pembangunan, sehingga produksi tersebut perlu di ekspor ke luar negeri. Meskipun tumbuh tinggi, pertumbuhan pada triwulan I 2022 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh LU pertambangan dan penggalian maupun LU nontambang yang tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan LU nontambang disebabkan oleh LU perdagangan besar dan eceran serta LU transportasi dan pergudangan. Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan berasal dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB).

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tengguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Tujuan TPB 9 memiliki peran penting mengingat infrastruktur konektivitas dalam menunjang industrialisasi sebagai mesin pendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Ketersedian infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh mendorong pembangunan sektor industri yang kuat dalam rangka peningkatan produktivitas, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan menaikkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya.

A. Status Capaian

Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah

Indikator dalam mengukur pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan handal dalam TPB 9 ini meliputi indikator 9.1.1.(a) - Kondisi mantap jalan nasional, indikator 9.1.2* - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi, indikator 9.1.2.(a) - Jumlah bandara, Indikator 9.1.2.(b) - Jumlah pelabuhan penyeberangan dan indikator 9.1.2.(c) - Jumlah pelabuhan strategis.

Kondisi mantap jalan nasional (%) merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kondisi mantap jalan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pergerakan orang dan distribusi barang.

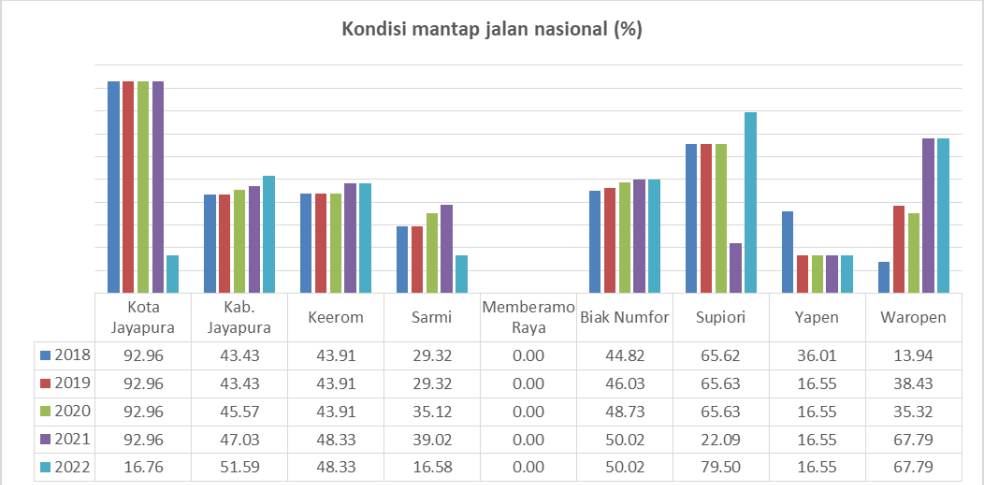

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	92.96	43.43	43.91	29.32	0.00	44.82	65.62	36.01	13.94
2019	92.96	43.43	43.91	29.32	0.00	46.03	65.63	16.55	38.43
2020	92.96	45.57	43.91	35.12	0.00	48.73	65.63	16.55	35.32
2021	92.96	47.03	48.33	39.02	0.00	50.02	22.09	16.55	67.79
2022	16.76	51.59	48.33	16.58	0.00	50.02	79.50	16.55	67.79

Gambar 2. 96 Presentase Kondisi Mantap Jalan Nasional

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Selain indikator panjang jalan, indikator jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi juga digunakan untuk mengukur capaian pembangunan infrastruktur trasnportasi dan mobilitas penumpang dan barang. Ketersediaan bandara (bandar udara) juga merupakan salah satu kategori mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas suatu daerah.

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	-	987,480	-	67	-	209,803	-	24,887	-
2019	-	-	-	-	-	132,546	-		-
2020	-	-	-	-	-	61,213			-
2021	-	-	-	-	-	72,664	-		-
2022	-	-	-	438	-	-	-		-

Gambar 2. 97 Jumlah penumpang dan barang dengan pesawat terbang

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

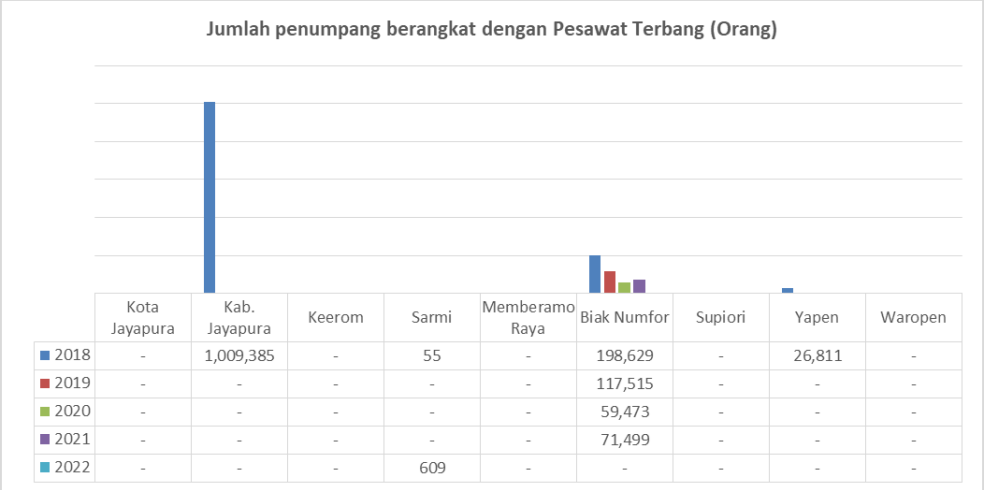

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	-	1,009,385	-	55	-	198,629	-	26,811	-
2019	-	-	-	-	-	117,515	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	59,473	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	71,499	-	-	-
2022	-	-	-	609	-	-	-	-	-

Gambar 2. 98 Jumlah penumpang berangkat dengan pesawat terbang

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Nilai Tambah Industri Manufaktur

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah),

atau metode penjualan (grosir atau eceran). Sementara, Nilai tambah industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan

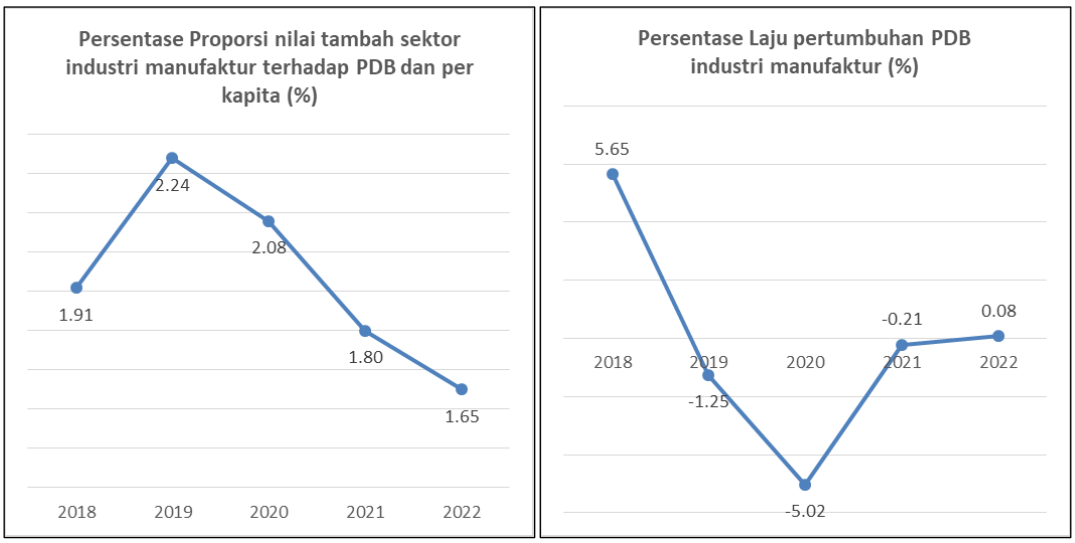

Gambar 2. 99 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Tabel 2. 4 Daftar perusahaan industri besar/sedang di Papua tahun 2021

No	KBLI	Deskripsi	Jumlah Perusahaan
1.	10	Industri Makanan	19
2.	11	Industri Minuman	10
3.	13	Industri Textil	1
4.	14	Industri Pakaian Jadi	1
5.	16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	6
6.	23	Industri barang galian bukan logam	2
7.	28	Mesin dan Perlengkapan ytdi	1
8.	31	Industri furnitur	4

Sumber: Direktori Perusahaan Manufaktur Besar dan Sedang di Papua - BPS Tahun 2021

B. Tantangan

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur jalan yang tangguh di Papua adalah kondisi geografis daerah yang beragam antara pengunungan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang tersebar. Pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan industrialisasi yang berkelanjutan di Provinsi Papua yang belum signifikan dipengaruhi oleh rendahnya kinerja infrastruktur. Konektivitas wilayah di Papua juga masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya pertambahan panjang jalan di Provinsi Papua serta banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar kampung dan distrik

akibatnya rendah, karena minimnya pengembangan jalan yang menghubungkan akses mereka untuk bermobilisasi. Selain itu, permasalahan konektivitas juga di pengaruhi oleh keadaan geografis yang ekstrim, sehingga moda angkutan umum di Provinsi Papua sangat terbatas. Belum memadainya kualitas infrastruktur jaringan transportasi (yaitu jalan, dan jembatan) menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun daerah, karena jalan dan jembatan merupakan prasarana primer dalam memfasilitasi mobilitas penduduk, termasuk mobilitas ke akses-akses pelayanan dan sebagai faktor penentu berkembangnya perkembangan industrisasi di Papua.

Kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua juga terlihat belum maksimal dan masih cenderung fluktuatif menurun disebabkan karna beberapa faktor antara lain perkembangan jumlah perusahaan industri besar dan sedang dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami kenaikan sebagai akibat dari berkembangnya dan surutnya usaha industri kecil menjadi besar/sedang, munculnya perusahaan baru, atau adanya perusahaan yang di tutup

Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya dalam mengurangi jumlah daerah (kabupaten) dan desa tertinggal, Indonesia fokus pada pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Rangkaian kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik dibangkitkan di berbagai titik seantero negeri. Pembangunan ini diharapkan dapat menjangkau pula ribuan desa untuk membuat desa tertinggal menjadi desa mandiri, dan desa mandiri menjadi lebih maju lagi.

A. Status Capaian

Gini Rasio

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

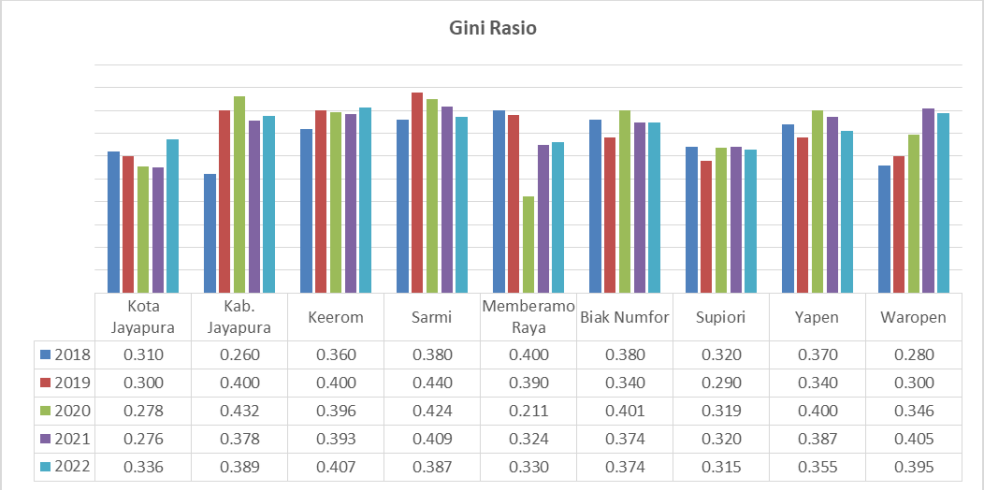

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	0.310	0.260	0.360	0.380	0.400	0.380	0.320	0.370	0.280
2019	0.300	0.400	0.400	0.440	0.390	0.340	0.290	0.340	0.300
2020	0.278	0.432	0.396	0.424	0.211	0.401	0.319	0.400	0.346
2021	0.276	0.378	0.393	0.409	0.324	0.374	0.320	0.387	0.405
2022	0.336	0.389	0.407	0.387	0.330	0.374	0.315	0.355	0.395

Gambar 2. 100 Gini Rasio Kab/Kota di Provinsi Papua

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Presentase Penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur ini akan digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

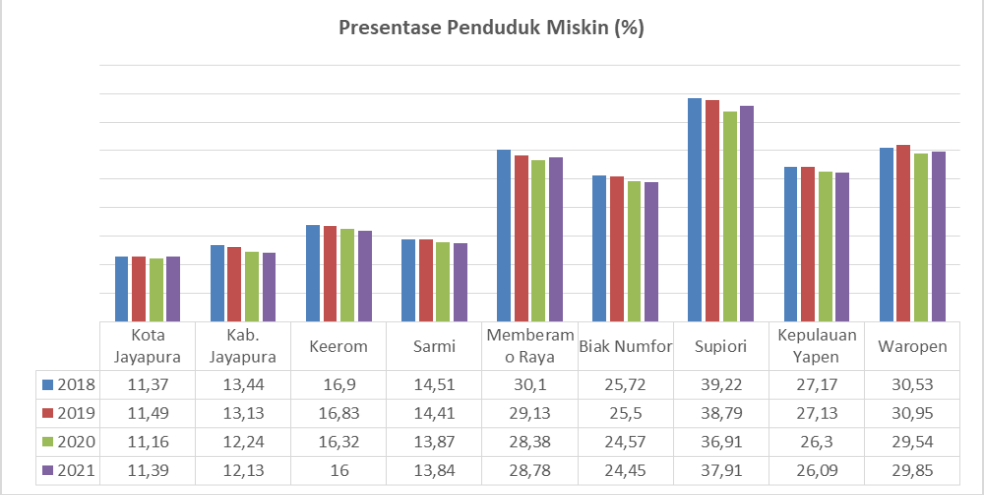

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Kepulauan Yapen	Waropen
2018	11,37	13,44	16,9	14,51	30,1	25,72	39,22	27,17	30,53
2019	11,49	13,13	16,83	14,41	29,13	25,5	38,79	27,13	30,95
2020	11,16	12,24	16,32	13,87	28,38	24,57	36,91	26,3	29,54
2021	11,39	12,13	16	13,84	28,78	24,45	37,91	26,09	29,85

Gambar 2. 101 Presentase Penduduk Miskin

Sumber: BPS Tahun 2019 – 2022

Desa Tertinggal dan Desa Mandiri

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan merupakan paradigma baru pembangunan yang terfokus pada masyarakat dan institusi lokal daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangunan (IDM). IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Papua berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam lima status sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 2.33. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya

fasilitasi pemajuan kampung di Papua menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel 2. 5 Klasifikasi kampung berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi Kampung	Rentang Nilai IDM
1.	Mandiri	0,815 < IDM ≤ 0,920
2.	Maju	0,707 < IDM ≤ 0,815
3.	Berkembang	0,599 < IDM ≤ 0,707
4.	Tertinggal	0,491 < IDM ≤ 0,599
5.	Sangat Tertinggal	0,270 ≤ IDM ≤ 0,491

Sumber: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Terdapat 2 indikator desa membangun dalam upaya pencapaian TPB 10 yaitu indikator 10.1.1.(b) – Jumlah desa tertinggal dan indikator 10.1.1.(c) – jumlah desa mandiri. Yang dimaksudkan dengan desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Sementara, yang dimaksudkan dengan desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

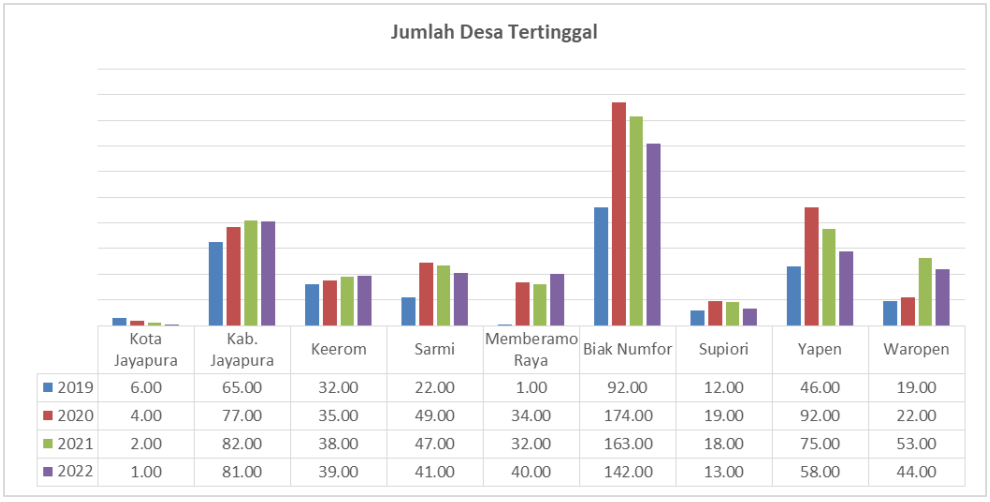

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2019	6.00	65.00	32.00	22.00	1.00	92.00	12.00	46.00	19.00
2020	4.00	77.00	35.00	49.00	34.00	174.00	19.00	92.00	22.00
2021	2.00	82.00	38.00	47.00	32.00	163.00	18.00	75.00	53.00
2022	1.00	81.00	39.00	41.00	40.00	142.00	13.00	58.00	44.00

Gambar 2. 102 Jumlah Desa Tertinggal

Sumber: Indeks Desa Membangun 2019 – 2022

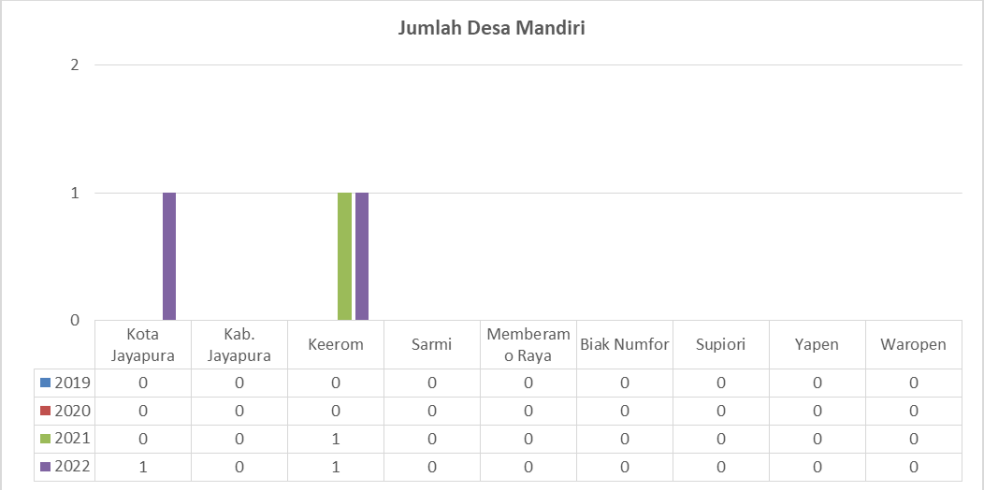

Gambar 2. 103 Jumlah Desa Mandiri

Sumber: Indeks Desa Membangun 2019 – 2022

Selain indikator jumlah desa mandiri dan jumlah desa tertinggal, terdapat indikator 10.1.1.(d) yaitu jumlah daerah tertinggal yang menjadi salah satu indikator untuk mengukur pencapaian target dari TPB 10 ini. Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut 1). Perekonomian masyarakat; 2). Sumber daya manusia; 3). Sarana dan prasarana; 4). Kemampuan keuangan daerah, 5). Aksesibilitas; dan 6). Karakteristik daerah.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan

Indikator ini merupakan ukuran yang dipakai sebagai ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.

Indeks Kebebasan

Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Indeks kebebasan ini dapat digunakan untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

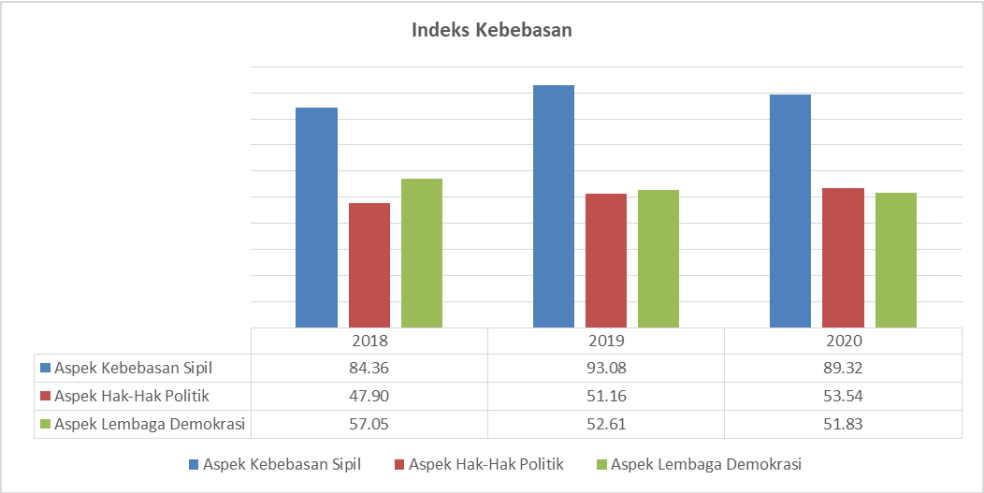

Gambar 2. 104 Indeks Kebebasan

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2020

Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Indikator 10.4.1.(b) terkait proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

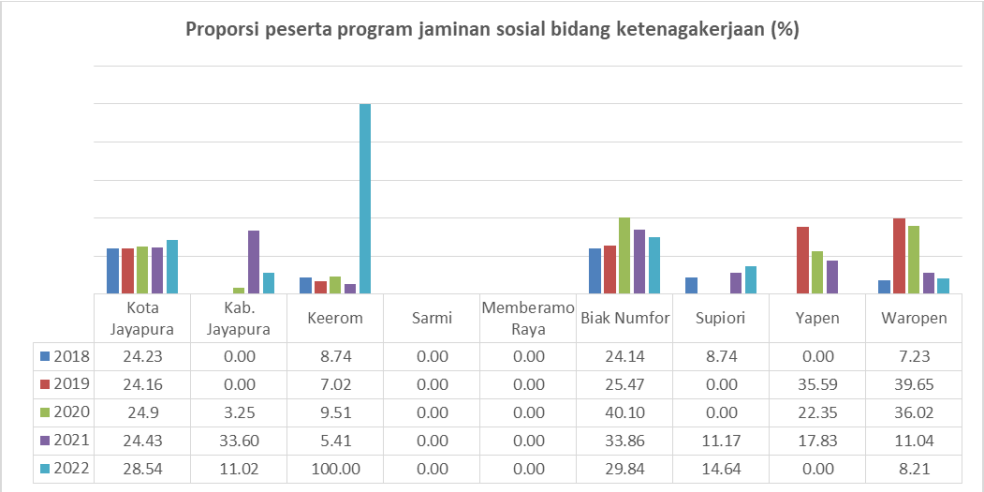

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	24.23	0.00	8.74	0.00	0.00	24.14	8.74	0.00	7.23
2019	24.16	0.00	7.02	0.00	0.00	25.47	0.00	35.59	39.65
2020	24.9	3.25	9.51	0.00	0.00	40.10	0.00	22.35	36.02
2021	24.43	33.60	5.41	0.00	0.00	33.86	11.17	17.83	11.04
2022	28.54	11.02	100.00	0.00	0.00	29.84	14.64	0.00	8.21

Gambar 2. 105 Proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2020

B. Tantangan

Upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di Papua telah dilakukan secara serentak antar Pemerintah Pusat dan Daerah, namun pencapaian ini masih belum terlaksana maksimal karna kondisi pandemic yang sangat mempengaruhi kemampuan mengkases dan daya beli masyarakat. Kondisi geografis, minimnya akses pelayanan dasar dan faktor kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Selain itu, diversifikasi pangan lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar makanan juga belum terlaksana dengan maksimal, sehingga ketergantungan masyarakt lokal terhadap pangan import masih cukup tinggi.

Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Tujuan dari TPB 11 meliputi target yang ingin dicapai untuk mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030 dan mencakup perbaikan dari sisi kelayakhunian dan keberlanjutan kota yaitu dari sisi perumahan dan permukiman, transportasi publik, efisiensi penggunaan lahan, ketangguhan terhadap bencana, kualitas lingkungan, ketersediaan RTH, penguatan perencanaan dan juga kebijakan terkait bangunan dan gedung. Pelaksanaan Tujuan 11 berkaitan erat dengan berbagai kegiatan dari institusi lintas sektor yang terlibat dalam pembangunan perkotaan seperti Kementerian/Lembaga diantaranya Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, pelaku usaha dan filantropi, serta lembaga nonpemerintah.

A. Tantangan

Tantangan dalam peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau oleh masyarakat di Papua adalah Keterbatasan akses pembiayaan perumahan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta berpenghasilan tidak tetap. Sementara tantangan untuk akses yang nyaman dan terlayani pada transportasi publik antara lain; 1.) Manajemen lahan untuk perumahan yang belum efektif serta terintegrasi dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar pemukiman; dan 2). Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, keterbatasan jumlah sarana transportasi publik, tingginya biaya transport dan ketersediaan prasarana pendukung seperti terminal atau halte juga turut mempengaruhi pemanfaatan masyarakat terhadap transportasi umum.

Tantangan yang dihadapi dalam sistem pengelolaan sampah antara lain 1). Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; 2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian besar masih dioperasikan dengan sistem open dumping, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem sanitary landfill; dan 4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M).

B. Status Capaian

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space), akses air minum (access to improved water), akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of tenure).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat a). Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng; b). Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu; dan c). Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: 1). Keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; dan 2). Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa, sementara untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

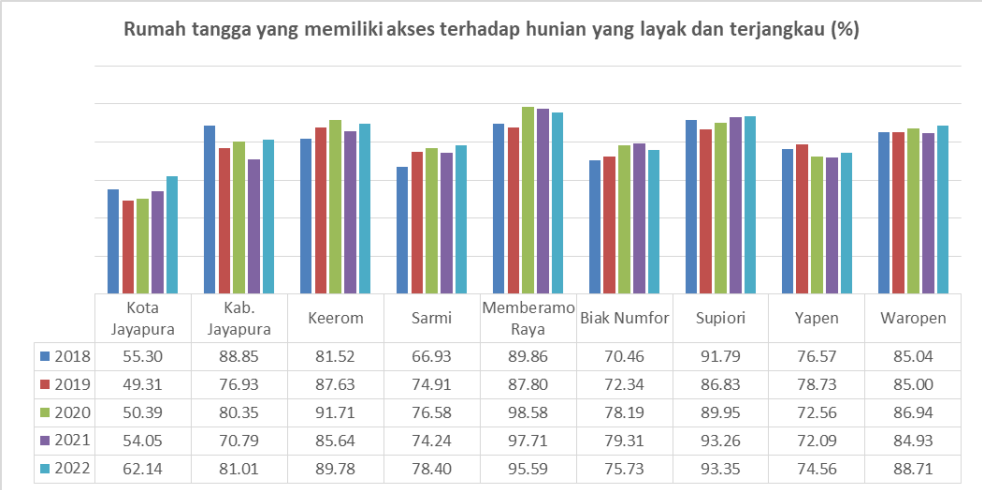

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	55.30	88.85	81.52	66.93	89.86	70.46	91.79	76.57	85.04
2019	49.31	76.93	87.63	74.91	87.80	72.34	86.83	78.73	85.00
2020	50.39	80.35	91.71	76.58	98.58	78.19	89.95	72.56	86.94
2021	54.05	70.79	85.64	74.24	97.71	79.31	93.26	72.09	84.93
2022	62.14	81.01	89.78	78.40	95.59	75.73	93.35	74.56	88.71

Gambar 2. 106 Presentase Rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2020

Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman dan terlayani pada transportasi publik

Untuk memastikan ketersediaan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, maka terdapat 2 indikator yang akan dipakai untuk mengukur pencapaian target ini, antara lain : indikator 11.2.1.(a) – Proporsi populasi yang mendapat akses nyaman pada transportasi publik dan indikator 11.2.1.(b) – Presentase penduduk terlayani transportasi umum. Yang dimaksudkan dengan persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan persentase penduduk terlayani transportasi umum adalah perbandingan jumlah penduduk yang menggunaan transportasi umum dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut. Kedua indikator ini dapat dimanfaatkan untuk

melakukan pemantauan penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum yang nyaman serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi.

Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Lahan terbangun adalah area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Lahan terbangun terdiri atas permukiman, jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut (SNI 7645:2010 tentang Klasifikasi penutupan lahan). Laju perluasan lahan terbangun adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen yang bersifat kedap air. Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.

Kerugian akibat bencana

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total pendapatan domestic bruto (PDB).

Berikut ini adalah damak terhadap kondisi sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan dari berbagai kejadian bencana di Provinsi Papua Tahun 2021

Tabel 2. 6 Dampak Multi Bencana Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	-	-	313,031.00	-	-	2,771,466.00	-	-	1,889,000.00	-	33,740.00	-
Jayapura	-	83.00	171,582.00	-	333.00	1,761,719.00	-	967.00	3,060,066.00	-	564,335.00	5,749.00
Biak Numfor	284.00	6,283.00	139,485.00	-	20,838.00	1,607,129.00	-	63,391.00	907,447.00	-	120,948.00	3,321.00
Keerom	-	165.00	64,215.00	-	164.00	703,182.00	-	3,721.00	919,520.00	-	443,678.00	3,760.00
Kepulauan Yapen	59.00	6,432.00	106,562.00	-	18,999.00	1,162,824.00	-	46,639.00	954,635.00	-	85,113.00	1,503.00
Mamberamo Raya	-	5,663.00	27,411.00	-	15,363.00	408,182.00	-	53,555.00	242,161.00	-	1,194,635.00	95,325.00
Sarmi	-	-	40,840.00	-	-	469,400.00	-	-	926,000.00	-	776,039.00	517.00
Supiori	114.00	394.00	24,211.00	-	1,994.00	321,279.00	-	-	289,000.00	-	38,927.00	31.00
Waropen	187.00	5,638.00	30,480.00	-	42,624.00	367,025.00	-	35,574.00	478,482.00	-	373,505.00	89,571.00
Jumlah	**644.00**	**24,658.00**	**917,817.00**	**0.00**	**100,315.00**	**9,572,206.00**	**0.00**	**203,847.00**	**9,666,311.00**	**0.00**	**3,630,920.00**	**199,777.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 7 Dampak Bencana Gempa Bumi Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	-	-	313,031	-	-	2,771,466	-	-	1,889,000	-	-	-
Jayapura	17	89	171,559	-	339	1,761,547	-	1,178	3,059,583	-	-	-
Biak Numfor	732	12,395	132,925	-	29,524	1,552,313	-	71,619	873,515	-	-	-
Keerom	-	1,414	62,966	-	6,416	683,795	-	28,717	862,544	-	-	-
Kepulauan Yapen	195	9,182	103,676	-	23,089	1,136,637	-	71,254	904,282	-	-	-
Mamberamo Raya	1,023	14,229	17,822	-	52,529	269,868	-	86,153	170,111	-	-	-
Sarmi	7	-	40,833	-	-	469,347	-	-	926,000	-	-	-
Supiori	383	597	23,739	-	2,197	317,744	-	141	288,719	-	-	-
Waropen	921	17,564	17,820	-	68,897	224,793	-	93,010	360,552	-	-	-
Jumlah	**3,278.00**	**55,470.00**	**884,371.00**	**0.00**	**182,991.00**	**9,187,510.00**	**0.00**	**352,072.00**	**9,334,306.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 8 Dampak Bencana Tsunami Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	3274	3164	22637		4414	185084		5412	39056			
Jayapura	47	30	3947		30	33599		30	9668		0.1	28
Biak Numfor	614	840	14960		2701	161406		128	12014		10	282
Kepulauan Yapen	1538	10418	5069		13404	41371		19217	28329		39	147
Mamberamo Raya	163	103	789		103	5919					23	104
Sarmi	1443	1311	8983		4761	73871		2092	62623		0.4	53
Supiori	216	291	6350		541	76322		211	22653		1	63
Waropen	197	2514			19734			1251			4	96
Jumlah	**7,492.00**	**18,671.00**	**62,735.00**	**0.00**	**45,688.00**	**577,572.00**	**0.00**	**28,341.00**	**174,343.00**	**0.00**	**77.50**	**773.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 9 Bencana Banjir Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	670	22,203	43,527	-	38,473	376,193	-	148,835	351,939	-	377	183
Jayapura	41	12,184	51,371	-	28,661	482,426	-	204,971	574,125	-	19,467	11,833
Biak Numfor	49	7,847	27,760	-	15,178	328,703	-	19,682	209,153	-	1,817	1,341
Keerom	149	12,353	22,899	-	29,458	240,886	-	102,447	190,010	-	12,883	7,137
Kepulauan Yapen	514	32,246	10,056	-	66,027	86,573	-	57,954	56,572	-	577	287
Mamberamo Raya	54	4,884	8,821	-	17,734	118,959	-	35,393	51,759	-	125,473	75,246
Sarmi	226	7,086	12,641	-	14,937	135,410	-	108,080	146,099	-	46,592	28,769
Supiori	-	706	909	-	706	17,020	-	7,950	7,316	-	223	147
Waropen	74	5,674	13,801	-	21,306	130,347	-	84,997	106,165	-	23,353	13,970
Jumlah	**1,777.00**	**105,183.00**	**191,785.00**	**0.00**	**232,480.00**	**1,916,517.00**	**0.00**	**770,309.00**	**1,693,138.00**	**0.00**	**230,762.00**	**138,913.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 10 Dampak Bencana Banjir Bandang Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	670	3,494	20,667	-	6,115	182,802	-	4,388	12,433	-	0	1
Jayapura	1934	8,786	16,920	-	9,826	197,366	-	22,026	102,123	-	103	399
Keerom	98	786	1,947	-	1,785	28,669	-	6,116	27,038	-	69	282
Kepulauan Yapen	260	4,441	11,227	-	6,301	93,766	-	8,637	46,294	-	10	32
Mamberamo Raya	391	1,300	2,802	-	2,901	21,513	-	6,054	15,767	-	100	374
Sarmi	66	254	800	-	1,255	9,000	-	5,113	21,118	-	213	715
Supiori	-	22	114	-	22	856	-	-	-	-	-	-
Waropen	188	688	1,975	-	687	14,808	-	4,725	14,266	-	71	277
Jumlah	**3,607.00**	**19,771.00**	**56,452.00**	**0.00**	**28,892.00**	**548,780.00**	**0.00**	**57,059.00**	**239,039.00**	**0.00**	**566.00**	**2,080.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 11 Dampak Bencana Tanah Longsor Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	22,364	31,568	94,234	-	40,782	845,868	-	24,282	785,791	-	49	48
Jayapura	4,989	3,423	12,579	-	21,664	197,329	-	53,086	561,012	-	27,247	24,880
Biak Numfor	2,614	2,934	314	-	15,190	6,517	-	44,013	60,867	-	7,639	1,083
Keerom	508	392	4,016	-	2,394	59,408	-	3,339	88,422	-	4,192	4,055
Kepulauan Yapen	7,642	10,909	7,866	-	54,260	197,146	-	111,675	277,762	-	15,404	9,644
Mamberamo Raya	547	859	7,535	-	16,058	120,821	-	2,728	75,575	-	93,581	64,986
Sarmi	580	178	2,325	-	1,178	39,635	-	7,106	26,099	-	40,444	14,448
Supiori	972	718	2,769	-	12,918	55,575	-	13,929	20,120	-	6,400	3,795
Waropen	1,555	1,991	1,383	-	19,672	59,973	-	8,477	8,801	-	63,762	43,182
Jumlah	**41,771.00**	**52,972.00**	**133,021.00**	**0.00**	**184,116.00**	**1,582,272.00**	**0.00**	**268,635.00**	**1,904,449.00**	**0.00**	**258,718.00**	**166,121.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 12 Dampak Bencana Kekeringan Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	-	-	313,031	-	-	-	-	- -	1888415	-		36,722
Jayapura	-	-	171,665	-	-	-	-	- -	3061940	-		721,016
Biak Numfor	-	133,364	12,688	-	-	-	-	419,456	197586	-	60,152	18,642
Keerom	-	-	64,380	-	-	-	-	- -	927000	-		488,429
Kepulauan Yapen	-	109,236	3,817	-	-	-	-	478,915	81878	-	78,248	5,355
Mamberamo Raya	-	20,750	12,324	-	-	-	-	67,226	216548	-	556,474	580,579
Sarmi	-	-	40,840	-	-	-	-	-	925469	-		795,938
Supiori	-	24,354	365	-	-	-	-	143,937	-	-	26,642	228
Waropen	-	36,305	-	-	-	-	-	274,954	-	-	273,154	
Jumlah	**0.00**	**324,009.00**	**619,110.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,384,488.00**	**7,298,836.00**	**0.00**	**994,670.00**	**2,646,909.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 13 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	595,633	53,683	-	1,815	27
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	1,077,761	246,243	-	19,034	458
Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	-	376,897	160	-	9,946	169
Keerom	-	-	-	-	-	-	-	231,798	273,356	-	10,151	914
Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	-	-	158,357	-	-	2,749	-
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	13,139	-	-	58,656	5,794
Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	239,502	-	-	34,536	1,832
Supiori	-	-	-	-	-	-	-	13,929	-	-	126	-
Waropen	-	-	-	-	-	-	-	121,543	-	-	30,873	1,881
Jumlah	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,828,559.00**	**573,442.00**	**0.00**	**167,886.00**	**11,075.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 14 Dampak Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	82,957	32,915	71,507	-	52,679	622,066	-	146,422	512,695	-	-	-
Jayapura	11,917	14,848	44,218	-	37,891	445,145	-	463,935	91,548	-	-	-
Biak Numfor	10,852	23,028	96,130	-	67,465	956,046	-	144,707	80,453	-	-	-
Keerom	7,319	9,340	42,030	-	31,925	412,414	-	218,956	133,339	-	-	-
Kepulauan Yapen	20,562	16,833	39,154	-	32,668	334,166	-	80,884	53,462	-	-	-
Mamberamo Raya	8,644	8,360	6,520	-	30,011	82,506	-	48,765	37,455	-	-	-
Sarmi	4,723	5,836	20,274	-	9,086	194,357	-	213,271	236,613	-	-	-
Supiori	5,329	6,933	5,459	-	22,084	58,344	-	40,452	41,929	-	-	-
Waropen	6,266	8,578	18,904	-	27,860	164,414	-	91,806	246,699	-	-	-
Jumlah	**158,569.00**	**126,671.00**	**344,196.00**	**0.00**	**311,669.00**	**3,269,458.00**	**0.00**	**1,449,198.00**	**1,434,193.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 15 Dampak Bencana Gelombang Ekstrem Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	20,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	3,159	41	100	-	40	750	-	302	363	-	5	
Biak Numfor	15,858	1,362	1,712	-	2,365	22,035	-	607	831	-	390	26
Keerom	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Yapen	22,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Raya	1,093	152	-	-	152	-	-	-	-	-	89	1
Sarmi	196	234	6,715	-	235	50,852	-	73,913	74,079	-	353	274
Supiori	6,221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waropen	271	186	3,881	-	17,407	29,109	-	2,779	3,335	-	173	37
Jumlah	**70,475.00**	**1,975.00**	**12,408.00**	**0.00**	**20,199.00**	**102,746.00**	**0.00**	**77,601.00**	**78,608.00**	**0.00**	**1,010.00**	**338.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Tabel 2. 16 Dampak Bencana Likuefaksi Tahun 2021

Kab / Kota	Sosial (Jiwa)			Fisik (Juta Rupiah)			Ekonomi (Juta Rupiah)			Lingkungan (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Kota Jayapura	8,986	6,578	315,001	-	21,649	2,793,209	-	130,843	2,013,627	-	34,255	252
Jayapura	93	4,081	172,588	-	13,131	1,773,291	-	190,378	3,233,192	-	590,836	17,022
Biak Numfor	654	20,114	156,047	-	48,923	1,776,119	-	69,845	914,508	-	121,671	3,421
Keerom	1,684	1,612	114,927	-	4,912	1,223,105	-	38,401	1,572,725	-	450,486	6,239
Kepulauan Yapen	131	38,883	143,690	-	79,895	1,497,629	-	149,030	1,050,073	-	86,865	2,158
Mamberamo Raya	5,359	11,007	28,765	-	38,756	429,351	-	99,126	245,886	-	1,376,213	134,370
Sarmi	164	8,312	43,249	-	22,263	487,468	-	47,781	1,018,507	-	833,939	15,789
Supiori	606	3,547	32,523	-	14,248	408,921	-	20,191	358,084	-	39,529	329
Waropen	17,438	11,032	30,519	-	57,716	367,315	-	104,219	478,482	-	414,951	89,895
Jumlah	**35,115.00**	**105,166.00**	**1,037,309.00**	**0.00**	**301,493.00**	**10,756,408.00**	**0.00**	**849,814.00**	**10,885,084.00**	**0.00**	**3,948,745.00**	**269,475.00**

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021

Mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan

Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan maka terdapat 4 indikator yang menjadi kewenangan provinsi antara lain indikator 11.6.1.(a) - Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya; indikator 11.6.1.(b) - Persentase sampah nasional yang terkelola; indikator 11.6.2.(a) - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10; dan indikator 11.6.2.(b) - Indeks Kualitas Udara.

Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah adalah jumlah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah

dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

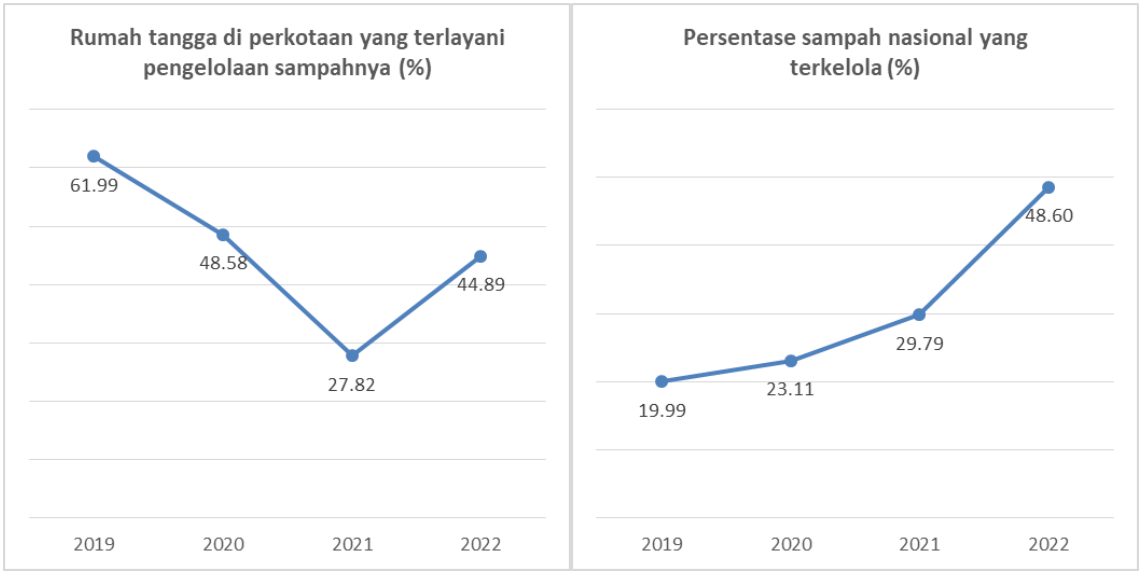

Gambar 2. 107 Pengelolaan Sampah

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022

Indeks Kualitas Udara dan Pemantauan konsentrasi Partikulat halus (SPM)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM2,5.

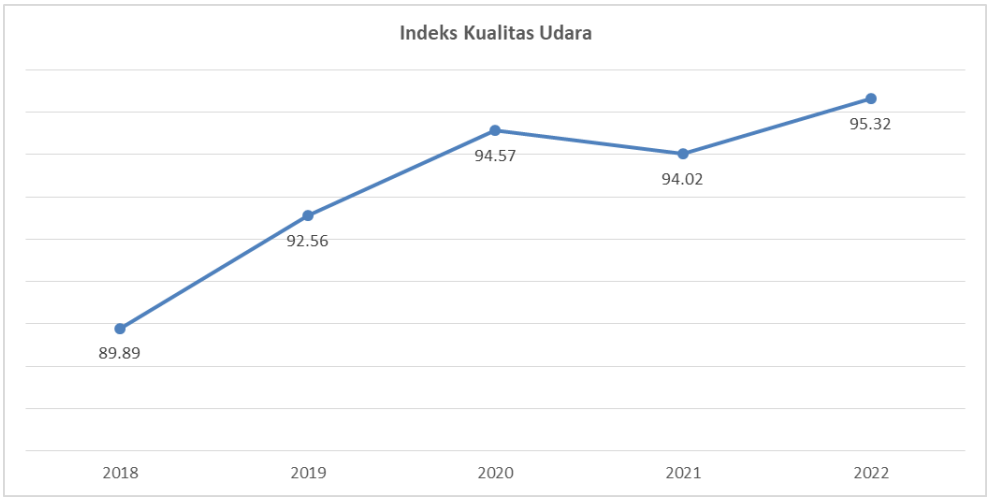

Gambar 2. 108 Indeks Kualitas Udara Provinsi Papua

Sumber: Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Pemantauan Suspended Particulated Matter (SPM) dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di 37 stasiun di Indonesia. Pemantauan SPM dilakukan dengan metode sampling menggunakan, *High Volume Sampler (HVS)*, sedangkan untuk analisis laboratorium menggunakan *Neraca Analitik (Analytical Balance)*.

Tabel 2. 17 Konsentrasi Partikulat halus (SPM) Provinsi Papua

Stasiun	SPM 2019			SPM 2020			SPM 2021			SPM 2022		
	Min	Rata-Rata	Max	Min	Rata-Rata	Max	Min	Rata-Rata	Max	Min	Rata-Rata	Max
Mokmer	30.64	36.61	46.84	32.44	42.57	55.94	28.34	38.76	48.34	25.54	41.57	55.34
Angkasa Pura	16.34	23.26	32.94	14.74	25.26	55.84	11.54	20.3	32.84	15.14	17.77	24.54

Sumber: Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022

Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Sehingga, cakupan korban kejahatan kekerasan adalah penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual. Penghitungan proporsi jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100 persen.

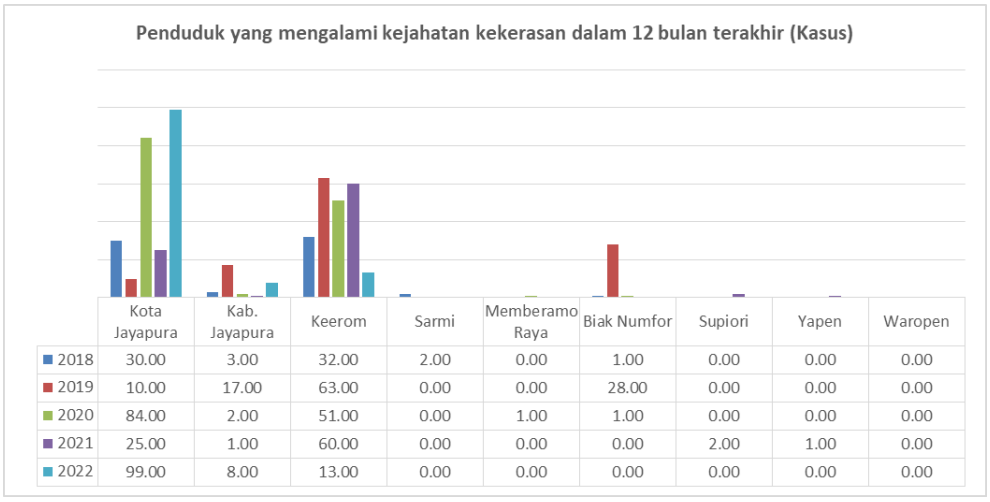

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	30.00	3.00	32.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019	10.00	17.00	63.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2020	84.00	2.00	51.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2021	25.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00
2022	99.00	8.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 2. 109 Penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Sumber: Simfoni PPA Tahun 2019 – 2022

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan atau *Sustainable Consumption and Production* (SCP) merupakan salah satu subtema aksi menuju perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yakni adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berkesinambungan. Dalam principle ke-8 Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan pada tahun 1992, disebutkan bahwa "... untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup lebih baik bagi semua orang, negara-negara harus mengurangi dan menghapus pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai."

A. Status Capaian

Dalam upaya untuk mencapai target 12.3 mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen, maka terdapat 1 indikator yang menjadi kewenangan provinsi yaitu indikator 12.3.1.(a) – Presentase sisa makanan. Konsep Makanan adalah segala zat, apakah diproses, setengah diproses, atau mentah – yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia; termasuk minuman dan zat apa pun yang telah digunakan dalam pembuatan.

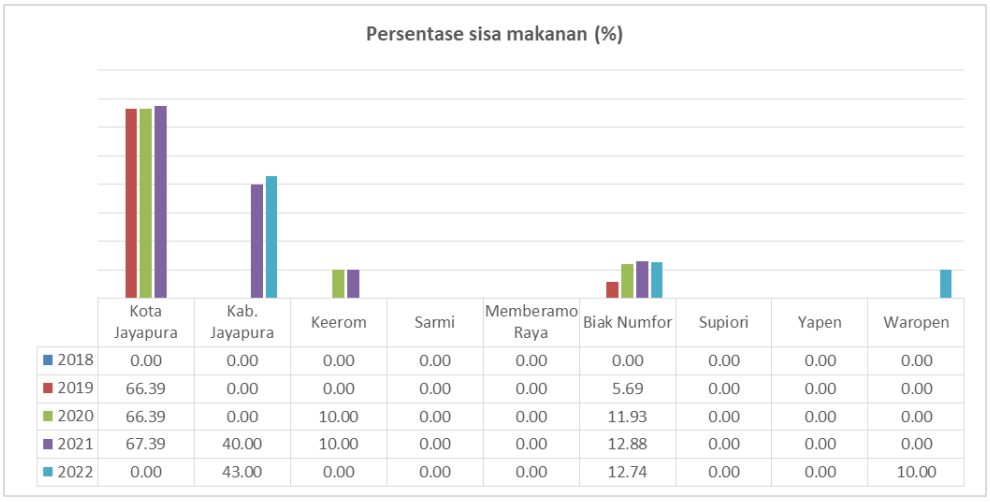

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2020	66.39	0.00	10.00	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2021	67.39	40.00	10.00	0.00	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	12.74	0.00	0.00	10.00

Gambar 2. 110 Presentase Sisa Makanan

Sumber: SIPSN MenLHK 2019 – 2022

Makanan juga termasuk bahan yang telah rusak dan karenanya tidak lagi layak untuk dikonsumsi manusia, tetapi, TIDAK termasuk kosmetik, tembakau, atau zat yang hanya digunakan sebagai obat. Itu tidak termasuk agen pengolahan yang digunakan sepanjang rantai pasokan makanan, misalnya, air untuk membersihkan atau memasak bahan baku di pabrik atau di rumah. Bagian yang tidak dapat dimakan (atau tidak dapat dimakan) adalah Komponen yang terkait dengan makanan yang, dalam rantai pasokan makanan tertentu, tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia, contohnya: tulang, Tidak termasuk kemasan. Sekitar sepertiga dari semua makanan hilang atau terbuang (FAO, 2011) sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi dan meningkatnya tekanan pada sistem pangan.

B. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam sistem pengelolaan sampah antara lain 1). Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; 2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian besar masih dioperasikan dengan sistem open dumping, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem sanitary landfill; dan 4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M).

Terdapat beberapa data capaian yang belum tersedia terkait dengan target pencapaian tujuan TPB 12 ini, antara lain:

2 Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.

3 Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.

4 Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.

5 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

6 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.

7 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

8 Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

9 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

10 Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan akan lebih besar lagi dampaknya di masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

Emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global menurut IPCC (2018) sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan global. Aktivitas manusia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 1,0°C pemanasan global diatas tingkat praindustri, dengan kisarannya antara 0.8° C hingga 1.2°C. Namun, pemanasan global kemungkinan besar akan mencapai 1,5° C antara tahun 2030 dan 2052 jika suhu terus meningkat dengan laju seperti saat ini. Suhu rata-rata akan terus meningkat sebesar 3-5°C ada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. Untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C diperlukan koordinasi semua pihak untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Upaya bersama tersebut juga memerlukan berbagai perubahan, termasuk teknologi, kelembagaan dan perilaku. Indonesia telah mengadopsi kesepakatan bersama, yaitu Paris Climate Agreement yang tujuannya untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan cara menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2,0° C dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mengupayakan untuk membatasi peningkatan temperatur hingga setidaknya 1,5° C. Hal ini karena dipahami bahwa pembatasan ini akan dapat mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Penanganan perubahan iklim dalam bentuk pembangunan yang rendah karbon untuk menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pembangunan yang berketahanan iklim untuk peningkatan ketangguhan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan sektor akibat dampak negatif perubahan iklim perlu disinergikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan instrumen penting dalam upaya transformasi pembangunan hijau menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

A. Status Capaian

Ketahanan masyarakat mIskin dari bencana alam.

Risiko perubahan iklim dan bencana merupakan ancaman serius pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia dan dapat mengganggu perolehan pendapatan negara yang saat ini juga sudah cukup sulit. Berbagai risiko tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dengan adanya perubahan iklim, dengan dampak yang meluas pada empat sektor prioritas dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045. Guncangan dan tekanan iklim juga akan memaksa penduduk yang hampir miskin masuk ke dalam kategori miskin, oleh karena itu diperlukan hubungan yang lebih erat antara upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan iklim sehingga pencapaian keduanya dapat berkelanjutan. Intervensi pengentasan kemiskinan, termasuk penurunan beban ekonomi, penanganan isolasi spasial, dan peningkatan kapasitas ekonomi, perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko iklim saat ini dan masa depan. Aksi iklim perlu direncanakan dengan seksama sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat miskin dan hampir miskin serta mencegah meningkatnya kerentanan dan ketidaksetaraan

Tabel 2. 18 Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Papua

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Jayapura	144.79	143.94	143.94	128.86	114.40
Kab. Jayapura	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20
Keerom	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20
Sarmi	166.98	166.98	166.98	166.98	169.00
Memberamo Raya	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60
Biak Numfor	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40
Supiori	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40
Yapen	83.65	83.48	83.48	83.48	93.60
Waropen	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00

Sumber: Indeks Resiko Bencana – BNPB 2018-2022

Keterangan

TINGGI

SEDANG

Emisi GRK Papua

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO2), belerang dioksida (SO2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), gas metana (CH4), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu

bara, dan bahan bakar organik lain. Gas karbon itu terakumulasi di lapisan atmosfer karena tak terserap tumbuhan atau kawasan hutan di darat dan padang lamun serta rumput laut di perairan yang luasannya menciut. Sementara paparan panas matahari, terutama radiasi inframerah, tak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah kaca (GRK) yang menebal di lapisan udara atas. Itu menyebabkan suhu Bumi terus naik.

Tabel 2. 19 Emisi GRK per Sektor Provinsi Papua

TAHUN	ENERGI	IPPU	PERTANIAN	KEHUTANAN	LIMBAH	TOTAL
2000	238.03	0.00	347.48	0.00	139.11	724,61
2001	268.94	0.00	323.96	-133,821.85	229.10	-132.999,84
2002	296.66	0.00	327.81	-127,764.51	221.33	-126.918,71
2003	329.12	0.00	268.53	-131,573.40	181.89	-130.793,86
2004	1,867.79	0.00	243.63	-104,904.95	198.93	-102.594,60
2005	356.31	0.00	190.23	-114,787.19	186.92	-114.053,73
2006	409.35	0.00	320.67	-103,131.55	199.95	-102.201,58
2007	1,298.48	0.00	355.61	-119,914.64	226.00	-118.034,55
2008	1,541.75	0.00	383.84	-122,290.62	236.01	-120.129,02
2009	1,296.10	0.00	387.15	-115,067.10	249.58	-113.134,27
2010	1,356.84	0.00	390.85	-124,940.10	355.80	-122.836,61
2011	1,373.54	0.00	2,662.69	-122,562.82	341.82	-118.184,77
2012	1,631.27	0.00	456.34	-121,361.40	374.36	-118.899,43
2013	1,709.34	0.00	538.48	-125,182.53	396.91	-122.537,80
2014	2,822.76	0.00	488.35	-108,915.32	416.52	-105.187,70
2015	2,422.73	0.00	505.93	-76,906.84	428.82	-73.549,35
2016	2,185.89	0.00	528.07	-115,209.82	255.39	-112.240,48
2017	2,191.29	0.00	785.72	-104,427.47	610.06	-100.840,39
2018	2,107.91	0.00	723.32	2,353.18	671.22	5.855,63
2019	2,107.91	0.00	790.28	0.00	738.85	3.637,04
2020	2,107.91	0.00	936.93	0.00	787.38	3.832,22
2021	2,107.91	0.00	991.59	0.00	988.23	4.087,72
2022	2,107.91	0.00	318.85	0.00	1,083.40	3.510,16

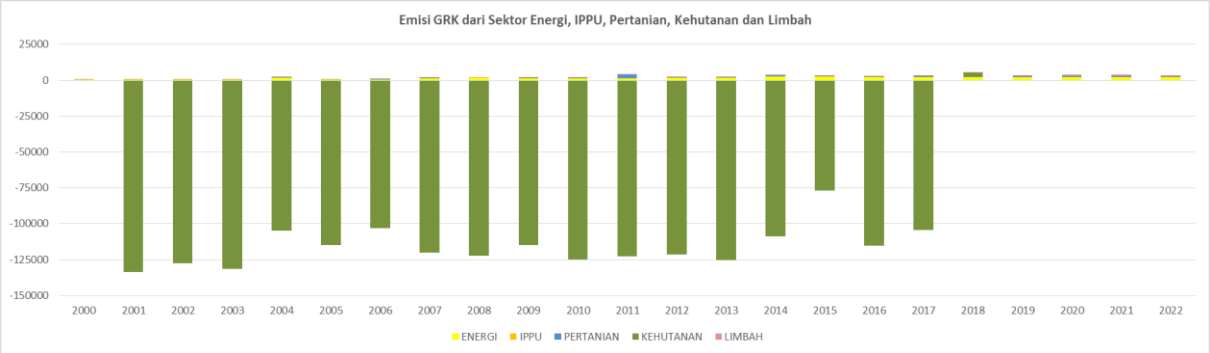

Sumber: Sign-Smart KLHK Tahun 2023

Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat.

- Jumlah pendidikan formal peduli lingkungan
- Jumlah komunitas masyarakat peduli lingkungan

B. Tantangan

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana di Papua antara lain:

1. Meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi;
2. Kapasitas dan kesadaran para pihak terhadap bencana yang masih rendah; dan
3. Tata kelola kelembagaan termasuk rotasi personel dan konvergensi pembangunan berketahanan bencana dan iklim masih perlu ditingkatkan.

Penanganan perubahan iklim telah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan telah memberikan hasil yang baik, namun masih diperlukan upaya untuk menanggulangi tantangan dinamika pembangunan masa depan. Tantangan strategis yang masih dihadapi dalam penanganan perubahan iklim, khususnya pembangunan rendah karbon diantaranya (KemenPPN/Bappenas, 2020) adalah:

1. Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam program pembangunan:
    a. Untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK pada tahun 2030 memerlukan penerapan pembangunan rendah karbon yang bersifat holistik dalam penanganan perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional,
    b. Pertumbuhan ekonomi dan sosial perlu dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan yang rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan melalui pembangunan rendah karbon,
    c. Penurunan emisi GRK dan intensitas emisi sangat tergantung dari efektifitas implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian serta pesisir dan kelautan.

2. Pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak:
    a. Komitmen penerapan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat di tingkat subnasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah,
    b. Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan rendah karbon perlu ditingkatkan, khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah dan pelaksanaan berbagai aksi pembangunan rendah karbon secara terintegrasi,
    c. Keterlibatan dan dukungan aktor non-pemerintah, seperti peneliti, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan,
    d. Komunikasi dan penjangkauan terhadap berbagai pihak, khususnya aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan.
3. Upaya peningkatan teknologi rendah emisi perlu terus didorong:
    a. Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi,
    b. Ketersediaan teknologi rendah karbon perlu diupayakan agar dapat terjangkau dan memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan,
    c. Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien,
    d. Inovasi usaha ramah lingkungan masih perlu dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang ramah lingkungan, Potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu dioptimalkan

Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Perairan Laut Provinsi Papua masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 717 dengan potensi sumberdaya kelautan yang besar baik untuk sektor perikanan, minyak dan gas, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Dengan potensi sumberdaya kelautan yang tinggi meliputi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga di masa mendatang, melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, kebutuhan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPRI 717 berdasarkan KEPMEN KP 19 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 20 Estimasi Potensi Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPRI 717

Estimasi Potensi	Cumi-Cumi	Ikan Dimersal	Ikan Karang	Ikan Pelagis Besar	Ikab Pelagis Kecil	Kepiting	Lobster	Rajungan	Udang Penaeid
JTB (Ton)	1,278	48,447	9,907	132,803	121,626	491	515	146	6,681
Potensi (Ton)	1,826	69,210	19,814	189,718	135,140	545	736	291	7,423
Tingkat Pemanfaatan (Ton)	0.60	0.50	1.20	0.90	0.30	0.20	0.80	1.50	0.50

Sumber: Statistik KKP Tahun 2023

Dalam TPB 14 ini terdapat 6 target dan 7 indikator yang merupakan kewenangan provinsi dalam pencapaian Tujuan Ekosistem Laut, dan ke-7 indikator tersebut dapat dimanfaatkan untuk memastikan setiap usaha dan upaya dalam melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan samudera secara berkelanjutan dapat terlaksana.

A. Status Capaian

Presentase sampah terbuang ke laut

Salah satu masalah yang saat ini dihadapi di Indonesia terkait menjaga kelestarian keanekaragaman hayaitu laut adalah adalah masalah pencemaran laut yang berasal dari sampah hasil aktivitas masyarakat. Pencemaran sampah dapat berasal dari sampah seperti sampah plastik, sampah kayu, sampah logam, sampah dari bahan organik yang dihasilkan oleh manusia yang dibuang ke sungai yang

selanjutnya mengalir akan bermuara ke laut atau aktivitas manusia yang secara langsung membuang sampah ke laut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 wilayah lautan Indonesia diperkirakan sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi (g/m^2), dengan komposisi bobot dan jenisnya terlihat pada gambar berikut ini.

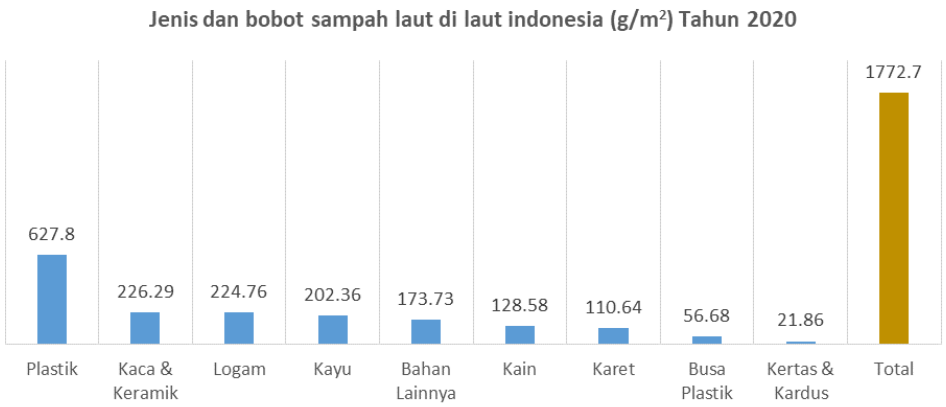

Gambar 2. 111 Bobot sampah di laut Indonesia berdasarkan jenisnya tahun 2020

Sumber: KLHK Tahun 2021

Dengan total bobot sampah sekitar 1.772,7 gr/m^2 ini maka diperkirakan jumlah sampah di laut Indonesia yang memiliki total luas sebesar 3,2 juta km^2 adalah sebanyak 5,75 juta ton. Provinsi Papua memiliki luas wilayah pesisir (hingga jarak 12 mil) kurang lebih sebesar 247.678 ha atau sekitar 2.476,78 km^2, maka diperkirakan sampah laut yang berada pada wilayah pesisir Provinsi Papua berjumlah 4.390,58 ribu ton sampah laut di tahun 2020.

Kebijakan Pengelolaan Areal Lautan

Dalam upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara keseluruhan secara berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Papua saat ini telah mengitegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) kedalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Tahun 2023 – 2043.

Pengintegrasian dokumen RZWP3K dengan RTRW ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, diantaranya Pasal 17 Angka 2 Pasal 6 Ayat (6), menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan dan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A Ayat (1) Huruf (a) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 245 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam RTRWP.

Selanjutnya Pasal 13 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir mengakibatkan Perda tersebut perlu diubah lagi paling lambat dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan.

Kawasan Konservasi Perairan Laut

Dalam rangka perlindungan terhadap sumberdaya perairan, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan beberapa kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Papua. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan perubahannnya pada Undang-undang 45 Tahun 2009, serta Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan perubahannya pada Undang-undang No. 1 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Provinsi Papua memiliki banyak kawasan konservasi yang berada di kawasan pesisir atau berbatasan dengan pantai. Sebaran lokasi kawasan konservasi di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut ini.

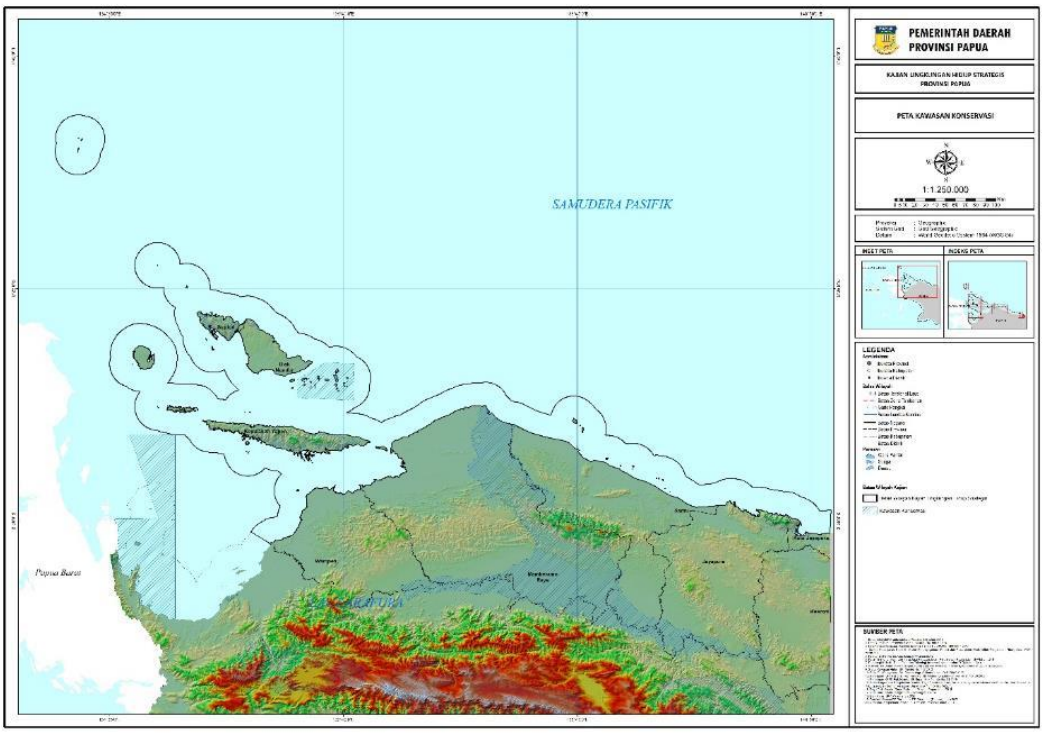

Gambar 2. 112 Peta Kawasan Konservasi

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2043

Beberapa kawasan konservasi yang berada dalam wilayah WP3K Provinsi Papua, antara lain

1. **Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Biak Numfor.** Memiliki luas kawasan 24.910 ha dan terletak di Kabupaten Biak Numfor yang mempunyai kondisi terumbu karang yang rata-rata kurang bagus. Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI tahun 2006, rataan terumbu karang di Kecamatan Biak Timur diperkirakan 797 ha, sedangkan di Pulau Padaido rataan terumbu karang lebih luas dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Biak Timur, yaitu sekitar 6.274 ha. Sementara itu, di Kecamatan Biak Numfor persentase tutupan tertinggi didominasi oleh karang mati yang tertutup alga dengan persentase 10-89,1%, dan persentase tutupan karang hidup sebesar 2,9%. Dan hasil survey di Kecamatan Padaido didapatkan bahwa persentase karang hidup tertinggi tercatat di Pulau Owi dengan persentase sekitar 1 - 74,1%, sementara untuk karang *Acropora* tutupannya bervariasi antara 1,9% - 64,8%, karang lunak sekitar 1,04% - 42,86%. Hasil sensus visual ikan menunjukkan bahwa jumlah jenis ikan karang bervariasi antara 12 sampai 61 jenis dengan kelimpahan ikan karang berkisar 2.880 - 59.080 ekor/ha. Adapun beberapa ikan target yang ditemukan antara lain *Plectropomus areolatus, Gracila albomarginata, Variola louti* (*Serranidae*), *Caranx ignobilis, Elagatis bipinnulata* (*Carangidae*), *Aprion virescens* (*Lutjanidae*), *Sphyraena barracuda* (*Sphyraenidae*), *dan Cheilinus undulatus* (Labridae). Selain terumbu karang, hasil survei di sepanjang pesisir Biak Timur dan Oridek ditemukan ada 4 jenis lamun, yaitu *Thallasia hemprichii, Cymodocea rotundata, Syringodium isoetifolium* dan *Enhalus acoroides*. Adapun rata-rata persentase penutupan berkisar 14,17% yang ditemukan di Yenusi dan 71,67% yang ditemukan di Woniki.
2. **Taman Wisata Perairan Pulau Padaido/Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido, Kabupaten Biak Numfor.** Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido beserta Laut di sekitarnya seluas lebih kurang 183.000 hektar, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua. Kepulauan Padaido merupakan salah satu tempat yang memilliki keragaman hayati ekosistem koral terbesar di dunia. Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido memiliki pusat rehabilitasi terumbu karang sehingga potensi wisata bahari yang ada di kepulauan tersebut dapat tertata dengan baik. Di kepulauan ini terdapat 95 spesies koral, 155 spesies ikan seperti berbagai jenis hiu karang dan gurita serta berbagai kekayaan maritim lainnya.
3. **Taman Wisata Alam Teluk Youtefa.** Teluk Youtefa pertama kali ditunjuk sebagai Taman Wisata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/1978 tanggal 9 Juni 1978 dengan luas areal 1.650 ha. Teluk Youtefa kemudian ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 714/Kpts-II/1996 tanggal 11

November 1996 dengan luas areal 1.675 ha (BKSDA, 2007). Pesisir pantai Teluk Youtefa umumnya memiliki tebing yang terjal, sedangkan sepanjang Tanjung Marine, Tanjung Kaswari sampai pesisir pantai Teluk Yos Sudarso hampir seluruhnya memiliki hamparan yang landai dan berpasir putih yang ditumbuhi oleh pohon kelapa dan pohon bakau.

Ekosistem dan sumberdaya alam pesisir merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati dan nirhayati, yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Di dalam suatu ekosistem pesisir terjadi transformasi energi yang berlangsung diantara kedua komponen dalam sistem tersebut maupun dengan komponen-komponen dari sistem lainnya. Kelangsungan fungsi ekosistem sangat menentukan kelestarian sumberdaya alam sebagai komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. Karena itu untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam, perlu diperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung di antara komponen-komponen sumberdaya alam yang menyusun suatu sistem.

Kepatuhan Pelaku Usaha

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan indikator proxy dari indikator global: tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing). Indikator tersebut pada hakikatnya mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Rumusan indikator ini merupakan representasi kinerja nasional dalam upaya pemberantasan praktik-praktik Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing karena dengan meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan maka secara tidak langsung praktik-praktik para pelaku usaha kelautan dan perikanan bergeser menjadi Legal, Regulated, and Reported Fishing serta memperhatikan keseimbangan ekologi untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang selaras dengan konsep ekonomi biru.

Penyediaan akses untuk nelayan

a. Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

Pengakuan dan perlindungan hak akses perikanan skala kecil telah diatur dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk: (1) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (6) Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Selanjutnya, implementasi dari UU No. 7/2016 adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan Menteri ini merupakan dasar dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pengaturan partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk: (1) Menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (2) Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (3) Mewujudkan penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan (4) Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Tabel 2. 21 Jumlah Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya Provinsi Papua

Provinsi Papua	2018	2019	2020	2021	2022
Nelayan Tangkap	62,506	74,005	56,169	57,634	33,857
Nelayan Budidaya Air Laut	1,920	810	810	875	410
Nelayan Budidaya Air Tawar	16,506	9,647	9,753	21,564	22,864
Nelayan Budidaya Air Payau	396	211	222	1,221	1,221

Sumber: Statistik KKP Tahun 2023

b. Akses pendanaan usaha nelayan

Kondisi usaha penangkapan ikan saat ini rata-rata masih belum bankable sehingga menjadi hambatan dalam mengakses sumber permodalan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan dalam rangka peningkatan pengembangan diversifikasi usaha melalui Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT). Kegiatan ini dimaksudkan untuk

memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan atau perbankan sehingga nelayan dapat mengembangkan usahanya ataupun dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif (diversifikasi usaha).

Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertipikasi memberikan beberapa manfaat bagi nelayan: (1) mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan, (2) dengan tanah yang dimiliki maka nelayan dapat membangun tempat tinggal menetap permanen, layak dan sehat, (3) tanah juga merupakan aset yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan/bank, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan usaha nelayan yaitu permodalan. Dengan tersedianya modal usaha, diharapkan akan mendorong pengembangan dan penciptaan usaha-usaha ekonomi produktif oleh nelayan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kantor Wilayah BPN Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota dan Kantor Pertanahan Kab/Kota.

c. Nelayan yang terlindungi

Perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan BPAN adalah: (1) memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan datang, (2) menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya berasuransi, (3) membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri, (4) memberikan bantuan bagi ahli waris, dan (5) memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak asuransi. Sasaran BPAN Tahun 2019 adalah nelayan kecil dan nelayan tradisonal sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2016. Resiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Indikator keberhasilan kegiatan asuransi nelayan adalah tersalurkannya BPAN yang tepat sasaran dan terlaksananya kepastian manfaat asuransi bagi nelayan. Bentuk BPAN berupa bantuan pembayaran premi yang diberikan dalam bentuk uang untuk pembayaran premi dengan jangka waktu pertanggungan asuransi 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak Polis Realisasi Asuransi diterbitkan oleh Penanggung.

B. Tantangan

Tantangan dalam upaya penurunan sampah yang terbuang ke laut antara lain adalah pola pikir, perilaku, dan pengetahuan masyarakat terkait lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik

yang masih terbatas; sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penanganan sampah plastik; jumlah sampah plastik yang terlalu banyak; dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam penanganan sampah plastik. Tantangan lainnya adalah terkait pemutakhiran data sampah laut Nasional yang dapat digunakan sebagai data sampah laut provinsi untuk digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program dan kegiatan pengelolan sampah laut di Paua Barat, terutama sampah plastik yang terapung. Saat ini, pengembangan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh melalui teknologi penerbangan dan antariksa (earth observation) diharapkan dapat menambah dan meningkatkan akurasi data sebaran sampah laut dan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak, serta meningkatkan efektifitas pendataannya.

Tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan laut adalah terkait peningkatkan efektivitas pengelolaannya. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, kawasan konservasi juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara sosial ekonomi. Utamanya bagi masyarakat di kawasan konservasi yang berada pada wilayah terpencil, sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mendukung linearitas manfaat konservasi dari aspek ekologi dan sosial ekonomi.

Beberapa tantangan dalam peningkatan akses pendanaan usaha nelayan antara lain adalah masih perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil, pengaturan dan pengelolaan wilayah tangkap, sehingga dapat menjamin terwujudnya model pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Tantangan dalam peningkatan jumlah nelayan yang terlindungi adalah masih perlu ditingkatkan sinergitas komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi keikutsertaan nelayan setempat pada asuransi nelayan, baik yang dibiayai melalui APBD maupun secara mandiri. Tujuan dari fasilitasi perlindungan nelayan (skema asuransi nelayan mandiri) adalah untuk menjamin keberlangsungan perlindungan nelayan melalui program asuransi bagi nelayan yang masa premi BPAN-nya telah berakhir serta diperuntukkan bagi nelayan lain yang belum mendapatkan program asuransi BPAN

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Pengguruan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

TPB 15 tentang Ekosistem Daratan, mempunyai tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Pencapaian Tujuan 15 berdasarkan wilayah administrasi Provinsi akan dicapai melalui 4 target dengan 6 indikator. Isu utama dalam Tujuan 15, meliputi: tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum.

A. Status Capaian

Luas dan distribusi kawasan hutan menurut fungsi menunjukan bahwa kawasan hutan di Provinsi Papua, masing-masing didominasi oleh fungsi hutan produksi (HPT, HP dan HPK) yaitu seluas ± 3.942.297 hektar atau sebesar 51,37%, selanjutnya fungsi hutan konservasi dan hutan lindung dengan luasan yang hampir sama. Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pengembangan investasi pemanfaatan kawasan maka telah dialokasikan hutan produksi konversi seluas 608.412 hektar atau sebesar 7,33% dari luas kawasan hutan di Provinsi Papua.

Tabel 2. 22 Luas Kawasan Hutan Provinsi Papua

No	Fungsi Hutan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Konservasi	1.694.155,56	22,32%
2.	Hutan Lindung	1.898.249,57	22,66%
3.	Hutan Produksi Tetap	1.384.041,99	15,56%
4.	Hutan Produksi Terbatas	2.077.684,06	24,62%
5.	Hutan Produksi Konversi	606.039,57	7,33%
	Total Kawasan Hutan	**7.660.170,75**	**92,50%**
6.	Areal Penggunaan Lain	611.123,99	7,37%
7.	Perairan	10.764,79	0,13%
	Total Kawasan Non Hutan	**621.888,78**	**7.50%**
	Jumlah	**8.282.059,53**	**100,00%**

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021

Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua sebagaimana terlampir pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

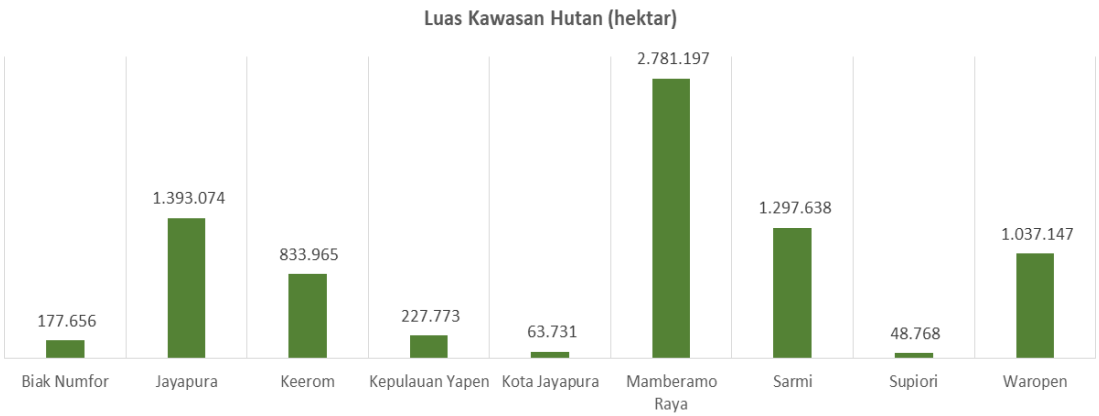

Gambar 2. 113 Luas Kawasan Hutan pe Kabupaten/Kota

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang memiliki ekosistem atau flora fauna atau habitat atau lansekap atau situs sejarah yang menjadi prioritas di dalam pengelolaannya. Data statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2021 menunjukan bahwa terdapat beberapa kawasan konservasi berupa cagar alam, suaka margastwa, taman wisata alam dan suaka alam, yang tersebar di beberapa kabupaten di provinsi Papua. Perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2. 23 Perkembangan Status Kawasan Konservasi di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Pengesahan Kawasan		Status SK
			Pengesahan oleh:	Tanggal	
Cagar Alam					
1.	CA. Peg. Cycloops – Kab. Jayapura	28.758,46	Dirjen KSDAE	30 Nov 2016	Penetapan blok Perlindungan
2.	CA. Biak Utara – Kab. Biak Numfor	5.404,22	Dirjen KSDAE	29 Mei 2020	Penetapan
3.	CA. Pulau Supiori – Kab. Supiori	40.787,25	Dirjen KSDAE	Agustus 2017	Penetapan blok Perlindungan
4.	CA. Peg. Yapen Tengah – Kab. Kep Yapen	110.962,56	Dirjen KSDAE	Agustus 2017	Penetapan blok Perlindungan
Suaka Margasatwa					
1.	SM. Mamberamo Foja – Kab. Mamberamo Raya	1.224.791,53	Dirjen KSDEA	Okt 2021	Penetapan
Taman Wisata Alam					
1.	TWA. Teluk Yotefa – Kota Jayapura	294,36	DIRJEN PHKA SK. 157/IV-SET/2015	1 Juni 2015	Penetapan blok Perlindungan

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua Tahun 2022

Pemanfaatan hutan juga dilakukan dalam Kawasan Konservasi. Pemanfaatan tersebut diatur berdasarkan pembagian Blok Kawasan yang telah disusun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE Kementrian Lingkungan Hiudap dan Kehutanan. Perkembangan pemanfaatan hutan dalam kawasan konservasi hingga dengan Desember 2022 sebagaimana terlampir pada tabel di bawah.

Tabel 2. 24 Perkembangan Penataan Blok/Zona Pada Hutan Konservasi s/d Desember 2022

Blok pada Hutan Konservasi	Blok / Zona (hektar)					
	Khusus	Rehabilitasi	Pemanfaatan	Religi Budaya dan Sejarah	Tradisional	Grand Total
CA Pegunungan Cycloops	109,96	2.611,47				2.271,43
CA Biak Utara	21,71	712,11				733,82
CA Pulau Supiori	210	992,75				1.202,75
CA Yapen Tengah	193,41	1.249,61		330,92		1.773,94
TWA Supiori			15			15
TWA Teluk Youtefa	38,51		1.392,10	5,63	78,61	1.514,85
Grand Total	**573,59**	**5.565,94**	**1.407,1**	**336,55**	**78,61**	**7.961,79**

Sumber: Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua Tahun 2022

Keterangan: (Sumber: PERMEN LHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015)

- *Zona/Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.*
- *Zona/Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.*
- *Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.*
- *Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.*
- *Zona/Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.*

Dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Papua, terdapat beberapa beberapa wilayah kawasan konservasi yang disetujui pinjam pakai dengan SK Menhut untuk kepentingan umum dan pertahanan wilayah. Kawasan konservasi yang wilayahnya telah disetujui Kerjasama kemitraan dan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25 Perkembangan Status Kerjasama (PKS) Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2021

No	Kawasan Konservasi	Persetujuan Kerjasama			Pemohon	Peruntukan
		SK	Tanggal	Luas (Ha)		
1	Cagar Alam Pegunungan Cycloops	436/Menhut-VII/1995	5 Januari 1995	0,06	PDAM Jayapura	Intake dan pipa air bersih
		081/Menhut-IV/1984	17 Februari 1984	3,50	TNI AL	Pemancar radio
		257/Menhut-II/1996	30 Juni 1996	1,35	PLN Jayapura	Jaringan listrik
		592.8/2695Q(Rekom Gubernur	-	20	Kodam XVII Cenderawasih	Kantor Makodam
2	Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah	122/Menhut-VII/1992	14 juli 1992	32.000	Pemda Kabupaten Yapen	Jalan Raya
3	Cagar Alam Biak Utara	718/Menhut-II/1992	14 Juli 1992	8.800	Pemda Kabupaten Biak Numfor	Jalan Raya
4	Taman Wisata Alam Teluk Youtefa	1285/Menhut-IV/1984	2 September 1984	426	Kanwil PU Provinsi Papua	Jalan Raya
		171/Menhut-IV/2000	8 Maret 2000	0,80	Yayasan Cinta Tanah Air	Saluran Drainase

Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021

Terdapat berbagai macam habitat flora dan fauna yang hidup dalam kawasan konservasi dan masuk dalam tumbuhan dan satwa lindung di Provinsi Papua. Ada 8 jenis anggrek dan 1 jenis kantung semar dari kelompok tumbuhan, dan terdapat beberapa jenis dari tumbuhan tersebut telah masuk dalam Permen LHK No 106/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Selain itu terdapat 8 jenis mamalia, 17 jenis burung, 17 jenis reptilian, 2 jenis insect, 2 jenis pisces dan 2 jenis anthozoa yang masuk dalam kategori fauna dilindungi (Statistik Kehutanan Provinsi Papua, 2021). Jenis-jenis endemik ini semata-mata hanya terdapat di Papua dan tidak terdapat di daerah lain. Berdasarkan penelitian untuk mengungkap jenis-jenis keanekaragaman hayati saat ini sedang dilaksanakan oleh lembaga konservasi internasional, Papua dianggap merupakan salah satu dari beberapa tempat di dunia ini yang masih lengkap keanekaragaman hayatinya. Disamping nilai-nilai ilmu pengetahuan dan untuk keperluan penelitian, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Papua juga merupakan komoditi untuk mendukung *ecoturisme* di Papua.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi di Papua juga didukung dengan dikembangkannya Balai Taman Burung dan Taman Anggrek Papua di Kabupaten biak pada tahun 1984. Awalnya tempat ini adalah kawasan wisata, dan selanjutnya berkembang menjadi tempat konservasi, pendidikan dan penelitian. Saat ini, terdapat kurang lebih 19 jenis burung dengan jumlah 63 ekor, 79 jenis anggrek dengan jumlah 2.023 anggrek. Selain itu, terdapat Balai Kebun Raya Koya Koso yang terletak di kota Jayapura yang saat ini menampung berbagai 1.859 jenis pohon kayu (Statistik Kehutanan Provinsi Papua, 2021).

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)

Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan mengandung nilai-nilai penting untuk lingkungan hidup, kehidupan sosial dan ekonomi. Nilai penting itu, di antaranya kawasan bernilai konservasi tinggi yang mempunyai habitat satwa liar endemik (spesies kunci/mega fauna), daerah perlindungan resapan air dan merupakan situs arkeologi (kebudayaan). Nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi merupakan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH merupakan bagian dari sistem pengurusan hutan nasional. Seluruh kawasan hutan terbagi habis ke dalam wilayah KPH. Berdasarkan luas dominan fungsi kawasan hutan, KPH terbagi menjadi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Organisasi KPHL dan KPHP berada dibawah pemerintah provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Terdapat 7 KPH yang saat ini di Provinsi Papua yang terdiri dari 5 KPH Produksi (KPHP) dan 2 KPH Lindung (KPHL), seperti di tampilkan pada tabel berikut ini.

Gambar 2. 114 Sebaran Unit KPHP dan Unit KPHL di Provinsi Papua

Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021

Tabel 2. 26 KPHP dan KPHL Provinsi Papua

NO	KPHP_KPHL	Wilayah	Luas_ha
1	KPHP Unit XXVIII	Kota Jayapura	84,909.40
2	KPHP Unit XXIII	Bonggo_Sarmi	224,207.00
3	KPHP Unit XVII	Waropen	605,740.00
4	KPHP Unit XIX	Yapen	243,480.00
5	KPHP Unit XXIX	Keerom	174,363.00
6	KPHL Unit XXI	Lintas Sarmi - Mamberamo Raya	256,634.00
7	KPHL Unit XX	Biak Numfor	294,102.00

Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021

Degradasi lahan

Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan. Sektor pertanian mendefinisikan degradasi lahan sebagai proses penurunan produktivitas lahan bersifat sementara maupun tetap, sementara sektor kehutanan mendefinisikan degradasi lahan sebagai lahan yang tidak berfungsi sesuai kegunaannya untuk media produksi dan tata air.

Degradasi Lahan di Provinsi Papua dapat di lihat dari luasan perubahan tutupan lahan sejak tahun 2012 hingga tahun 2021. Pengurangan luas tutupan hutan paling luas terjadi pada kategori hutan primer dimana terlihat bahwa terjadi pengurangan luas tutupan dari tahun 2012 ke 2021 mencapai 159.851,05 hektar. Beberapa kegiatan yang teridentifikasi sebagai penyebab perubahan luas tutupan hutan antara lain disebabkan oleh kegiatan HPH/PBPH, kebakaran hutan, perluasan areal pertanian dan perkebunan dan perluasan areal pemukiman.

Tabel 2. 27 Perubahan luas tutupan lahan tahun 2012 – 2021 di Provinsi Papua

No	Kelas Penutupan Hutan	Luas Penutupan Lahan (Ha)		Selisih Tutupan 2012 - 2021
		Tahun 2012	Tahun 2021	
A.	**Hutan**			
1.	Hutan Primer	5.274.179,89	5.114.328,84	(159.851,05)
2.	Hutan Sekunder	950.975,69	1.072.071,61	121.095,92
3.	Hutan Rawa Primer	110.458,50	101.142,39	(9.316,11)
4.	Hutan Rawa Sekunder	34.078,31	51.706,65	17.628,34
5.	Hutan Mangrove Primer	1.129.377,84	1.103.698,40	(25.679,44)
6.	Hutan Mangrove Sekunder	248.378,16	270.089,39	21.711,23
7.	Hutan Tanaman	51,47	51,47	(0,00)
	Jumlah A	**7.747.499,87**	**7.713.088,75**	**(34.411,12)**
B.	**Non Hutan**			
1.	Semak Belukar	83.781,20	66.329,32	(17.451,88)
2.	Semak Belukar Rawa	111.985,53	110.604,16	(1.381,37)
3.	Savana	3.754,90	12.289,08	8.534,17
4.	Perkebunan	31.453,30	45.416,21	13.962,91
5.	Pertanian	25.376,68	25.331,50	(45,18)
6.	Pertanian Campuran	88.222,86	116.060,70	27.837,84
7.	Transmigrasi	18.139,97	15.040,68	(3.099,29)
8.	Sawah	1.318,19	4.816,91	3.498,72
9.	Tambak	433,10	9,50	(423,60)
10.	Terbuka	27.498,45	10.551,52	(16.946,93)

No	Kelas Penutupan Hutan	Luas Penutupan Lahan (Ha)		Selisih Tutupan 2012 - 2021
		Tahun 2012	Tahun 2021	
11.	Pertambangan		4,12	4,12
12.	Pemukiman	8.743,35	24.654,90	15.911,55
13.	Rawa	7.922,28	7.667,48	(254,80)
14.	Bandara/Pelabuhan	266,48	558,18	291,70
15.	Tubuh Air	125.663,38	129.630,88	3.967,50
	Jumlah B	**534.559,67**	**568.965,12**	**34.405,45**
	Jumlah Total	**8.282.059,53**	**8.282.059,53**	

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023

Indeks tutupan hijau pegunungan

Indeks Tutup Hijau Pegunungan (*Mountain Green Cover Index/MGCI*) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, savanna/padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indeks akan memberikan informasi tentang perubahan tutupan vegetasi dan akan membantu mengidentifikasi status konservasi lingkungan pegunungan. Indikator ini memastikan bahwa gunung dikelola secara efisien, dan keseimbangan yang lebih baik tercapai antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalnya, pengurangannya umumnya dapat dikaitkan dengan penggembalaan yang berlebihan, pembukaan lahan, urbanisasi, eksploitasi hutan, ekstraksi kayu, pengumpulan kayu bakar, kebakaran. Peningkatannya disebabkan oleh pertumbuhan vegetasi yang mungkin terkait dengan restorasi lahan, reboisasi, atau program aforestasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2021 dan pemekaran wilayah Provinsi Papua. Luas kawasan hutan di Provinsi Papua ± 7.660.170,75 Hektar atau sekitar 92,50% dari luas daratan Papua.

Tabel 2. 28 Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2021

No	Fungsi Hutan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Konservasi	1.694.155,56	22,32%
2.	Hutan Lindung	1.898.249,57	22,66%
3.	Hutan Produksi Tetap	1.384.041,99	15,56%
4.	Hutan Produksi Terbatas	2.077.684,06	24,62%
5.	Hutan Produksi Konversi	606.039,57	7,33%
	Total Kawasan Hutan	**7.660.170,75**	**92,50%**

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023

B. Tantangan

Tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah inventarisasi yang hanya berfokus kepada kawasan konservasi seluas 1,6 juta hektar atau sekitar 22,32% dari total luas Kawasan Hutan di Papua, sedangkan pada kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan APL yang mungkin memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, belum dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan maksimal. Inventarisasi dan verifikasi juga perlu dilakukan pada kawasan konservasi, ini bertujuan untuk mengetahui mana saja kawasan konservasi yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Manfaat lain dari identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi adalah dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan seperti: 1). Perlindungan sistem penopang kehidupan (*maintance of essential ecological processes and life-support system*); 2). Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (*preservation of genetic diversity*); dan 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (*sustainable utilization of species and ecosystem*), sehingga mampu mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi dan ekosistemnya secara menyeluruh di masa yang akan datang.

Tantangan pengelolaan KPH saat ini adalah semua bentuk pemanfaatan hutan pada KPH melalui perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. KPH tidak lagi menjadi subjek hukum dalam pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. UUCK yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) ikut mengatur perubahan peran organisasi KPH yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkannya.

Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan

Tujuan TPB 16 merupakan indikator yang menjadi landasan atau pondasi dan menentukan keberhasilan pencapaian Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs atau disebut sebagai enabler goal. Dalam kerangka pembangunan nasional, Tujuan 16 memfokuskan pada upaya untuk memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, usaha untuk menciptakan akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun suatu kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Tujuan 16 berdasarkan disagregasi wilayah provinsi terdiri dari 9 target dan 31 indikator berdasarkan pada Metadata Edisi II.

A. Status Capaian

Mengurangi segala bentuk Kejahatan kekerasan dan tingkat kematian dimanapun

Pada target ini, terdapat 4 indikator yang merupakan indikator proksi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Indikator tersebut antara lain 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir; 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk; 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir; dan 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Tabel berikut ini menujukan kondisi ke-4 indikator tersebut pada periode tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan data Statistik Kriminal.

Tabel 2. 29 Bentuk Kekerasan dan Tingkat Kematian tahun 2018 - 2022

Indikator		Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kejadian	43	52	27	31	40
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	%	8.05	NA	NA	2.52	NA
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	NA	0.12	0.11	0.07	0.06
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	NA	NA	70.09	NA	NA

Sumber: Statistik Kriminal Tahun 2018 - 2022

Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak

Upaya menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaaan terhadap anak memperlihatkan tren yang dinamis di dua indikator utama disegregasi wilayah administrasi provinsi yaitu indikator 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir, 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dan 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

Tabel 2. 30 Bentuk Kekerasan terhadap anak tahun 2018 - 2022

Indikator		Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Anak	72	94	151	66	119
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Anak	9	40	40	35	34
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Angka Korban	1	1	0	0	0

Sumber: Kementrian PPA (Simfoni PPA)

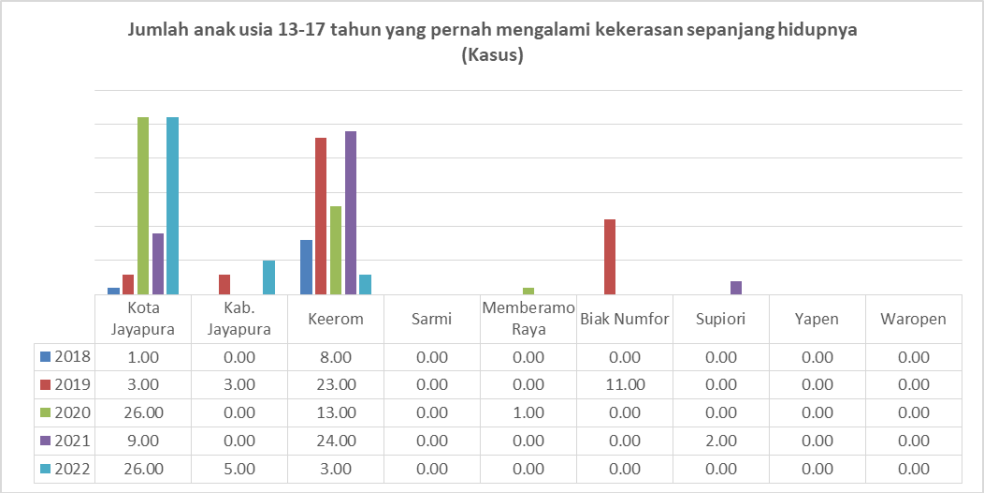

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	3.00	3.00	23.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2020	26.00	0.00	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	9.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2022	26.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 2. 115 Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan

Sumber: Kementrian PPA (Simfoni PPA)

Menegakan hukum dan menjamin akses keadilan yang sama bagi semua

Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah terus berusaha melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Tabel 2. 31 Penegakan hukum dan akses keadilan

Indikator		Satuan	2018	2019	2020	2021	202
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	%	NA	NA	55.31	32.49	73.04
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	%					
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	%					
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	%					

Sumber: Statistik Kriminal Tahun 2018 - 2022

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Indikator pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya diukur dengan indikator 16.5.1 (a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman bertujuan untuk melihat perilaku antikorupsi dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

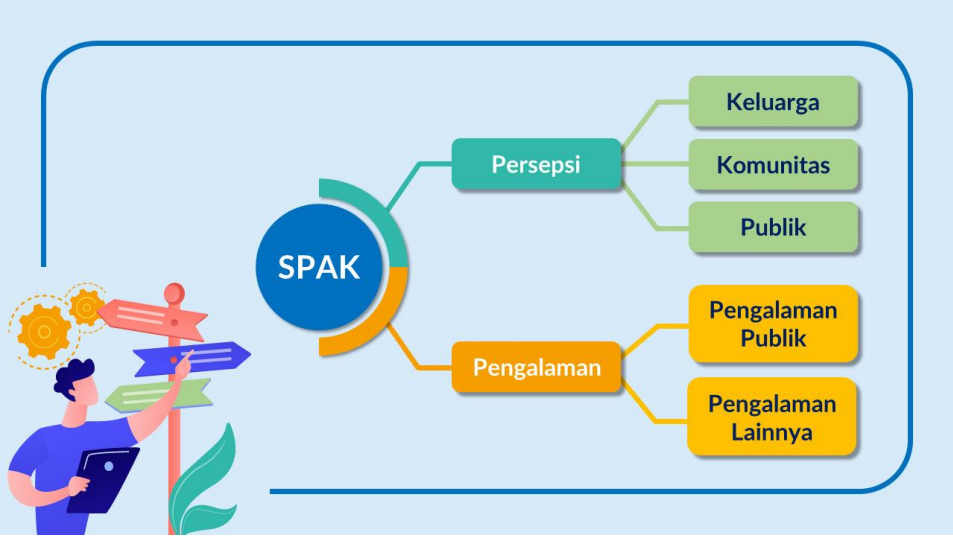

Gambar 2. 116 Alur Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)

Sumber: BPS, SPAK 2022

Tujuan SPAK adalah untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (bribery), gratifikasi (graft/gratuities), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan 9 (sembilan) nilai antikorupsi.

Gambar 2. 117 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia

Sumber: BPS, SPAK 2022

Tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang diukur melalui IPAK menunjukkan tren yang cenderung berfluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu 2012-2013, IPAK mengalami kenaikan dari 3,55 pada 2012 menjadi 3,63 pada tahun 2013. Namun setelah itu, IPAK

terus turun hingga tahun 2015 menjadi 3,59. Pada tahun 2017 IPAK kembali meningkat menjadi 3,71. Kenaikan tersebut tidak bertahan lama, dimana pada tahun 2018 IPAK kembali mengalami penurunan menjadi 3,66. Periode peningkatan IPAK dimulai pada tahun 2019. Di tahun tersebut, IPAK terus meningkat dari 3,70 (tahun 2017), 3,84 (tahun 2020), hingga 3,93 (tahun 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun angka IPAK berfluktuasi, tetapi secara umum terlihat bahwa IPAK menunjukkan tren meningkat.

Kegiatan SPAK 2022 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 171 kabupaten/kota dan di 34 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.040 rumah tangga. Responden terpilih untuk SPAK 2022 adalah anggota rumah tangga yang berumur antara 18-65 tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa orang yang berumur 18 tahun sudah dianggap dewasa dan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan akses terhadap pelayanan publik. Sementara umur 65 tahun diambil dari rata-rata angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2002 (individu yang pada tahun 2020 berumur 18 tahun). Dengan demikian, diharapkan responden terpilih dapat memberikan jawaban yang lebih relevan terkait muatan pertanyaan dalam SPAK 2022. Kegiatan SPAK di Provinsi Papua terlihat fluktuatiff sejak tahun 2019 dengan responden sebanyak 94,44%, menurun menjadi 76,67% di Tahun 2020, dan terus menurun di tahun 2021 menjadi 51,11%, namun kemudian meningkat kembali menjadi 100% di Tahun 2022

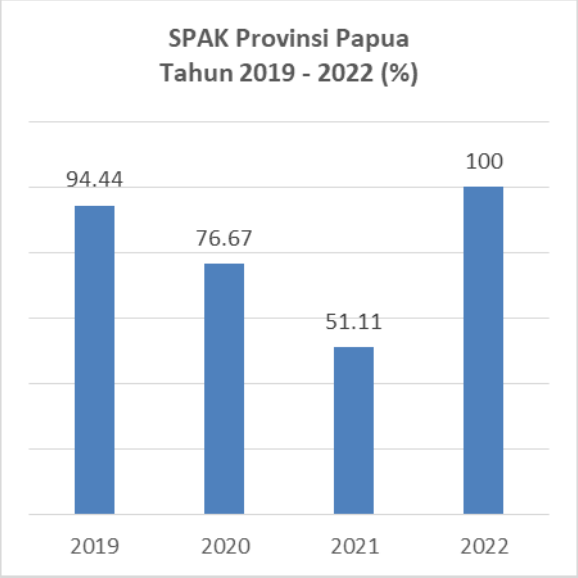

Membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan

Reformasi birokrasi dan tata kelola terus dilakukan dengan meningkatkan persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain: 1). Peningkatan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2). Peningkatan kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi; 3). Peningkatan kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; 4). peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif

Indikator dari target ini menampilkan tentang Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

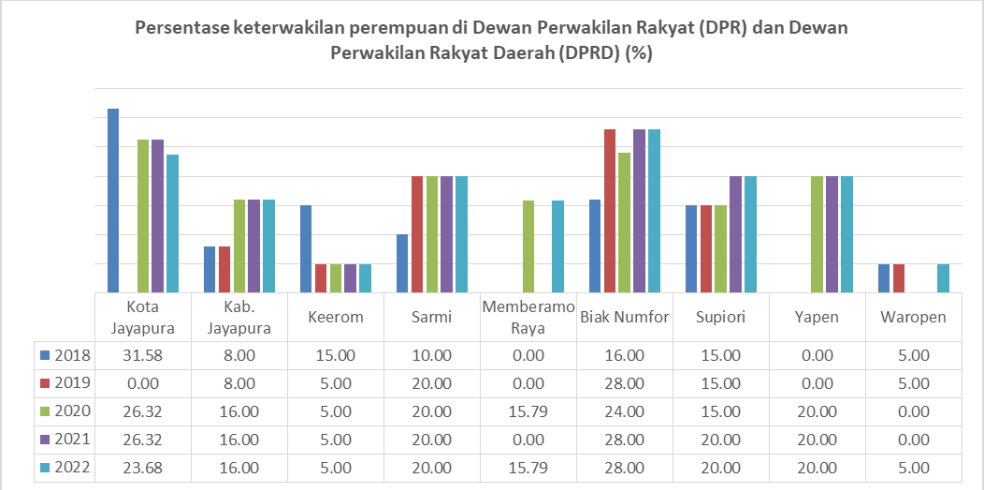

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	31.58	8.00	15.00	10.00	0.00	16.00	15.00	0.00	5.00
2019	0.00	8.00	5.00	20.00	0.00	28.00	15.00	0.00	5.00
2020	26.32	16.00	5.00	20.00	15.79	24.00	15.00	20.00	0.00
2021	26.32	16.00	5.00	20.00	0.00	28.00	20.00	20.00	0.00
2022	23.68	16.00	5.00	20.00	15.79	28.00	20.00	20.00	5.00

Gambar 2. 118 Presentase Keterwakilan Perempuan di DPRRI dan DPRD

Sumber: BPS Tahun 2018-2022

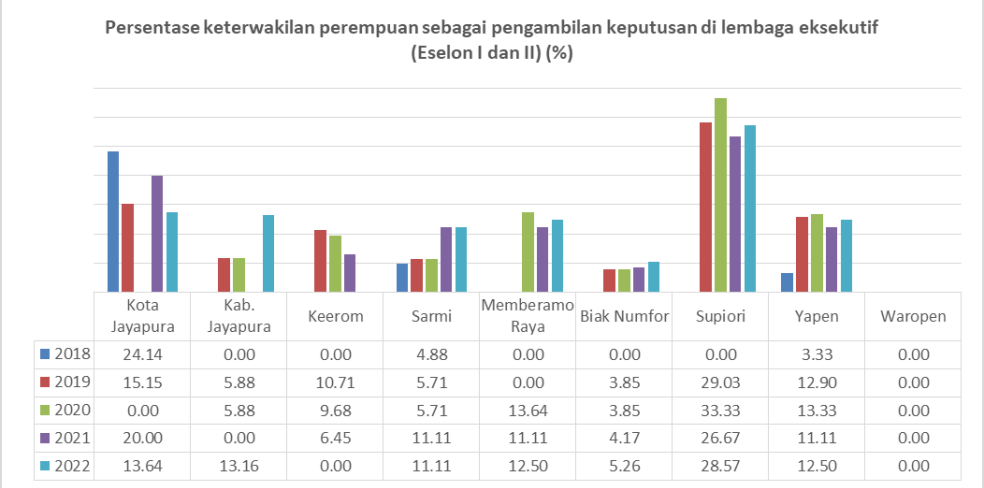

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	24.14	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00
2019	15.15	5.88	10.71	5.71	0.00	3.85	29.03	12.90	0.00
2020	0.00	5.88	9.68	5.71	13.64	3.85	33.33	13.33	0.00
2021	20.00	0.00	6.45	11.11	11.11	4.17	26.67	11.11	0.00
2022	13.64	13.16	0.00	11.11	12.50	5.26	28.57	12.50	0.00

Gambar 2. 119 Presentase Keterwakilan Perempuan di Esalon I dan Esalon II

Sumber: BPS Tahun 2018-2022

Kepemilikan indentitas yang sah

Lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

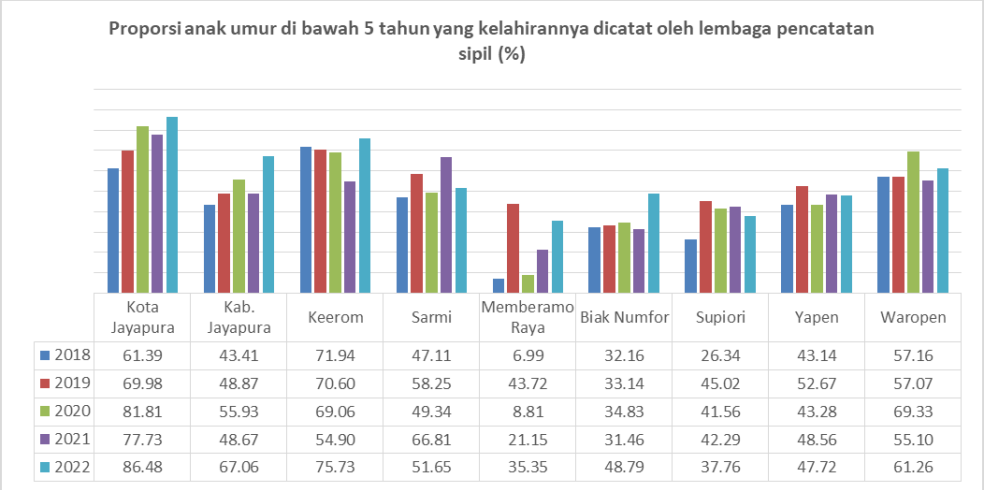

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	61.39	43.41	71.94	47.11	6.99	32.16	26.34	43.14	57.16
2019	69.98	48.87	70.60	58.25	43.72	33.14	45.02	52.67	57.07
2020	81.81	55.93	69.06	49.34	8.81	34.83	41.56	43.28	69.33
2021	77.73	48.67	54.90	66.81	21.15	31.46	42.29	48.56	55.10
2022	86.48	67.06	75.73	51.65	35.35	48.79	37.76	47.72	61.26

Gambar 2. 120 Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran

Sumber: BPS Tahun 2018-2022

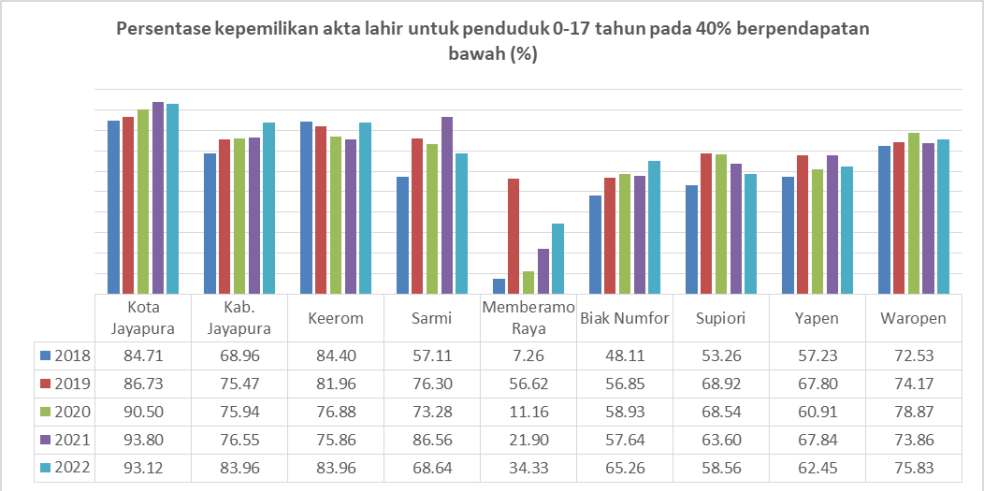

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	84.71	68.96	84.40	57.11	7.26	48.11	53.26	57.23	72.53
2019	86.73	75.47	81.96	76.30	56.62	56.85	68.92	67.80	74.17
2020	90.50	75.94	76.88	73.28	11.16	58.93	68.54	60.91	78.87
2021	93.80	76.55	75.86	86.56	21.90	57.64	63.60	67.84	73.86
2022	93.12	83.96	83.96	68.64	34.33	65.26	58.56	62.45	75.83

Gambar 2. 121 Proporsi anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran

Sumber: BPS Tahun 2018-2022

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Adapun metode baru dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun, yaitu:

1. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi;

2. Indeks Aspek Kebebasan; dan
3. Indeks Kesetaraan

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifiansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksitransaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis.
2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifiansi dari indikator ini adalah jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik dan perilaku hakim.
3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaran pemilu. Signifiansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang professional, mandiri, imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis.
4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifiansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokoratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan.
5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifiansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi

masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan.

6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signfiansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat.
7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signfiansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.

Indeks Aspek Kebebasan.

Indeks Aspek Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifiansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh waga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.
2. Terbebas dari Ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifiansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat indidivu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifiansi dari indikator ini

terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketengakerjaan.

5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikasi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.
6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifi ansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat indidivu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Indeks Kesetaraan

Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu.

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifiansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus

pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan.

2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik.
3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok.
4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyaraka yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi.
5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khsusunya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/ atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujud dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan.
6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT.
7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.

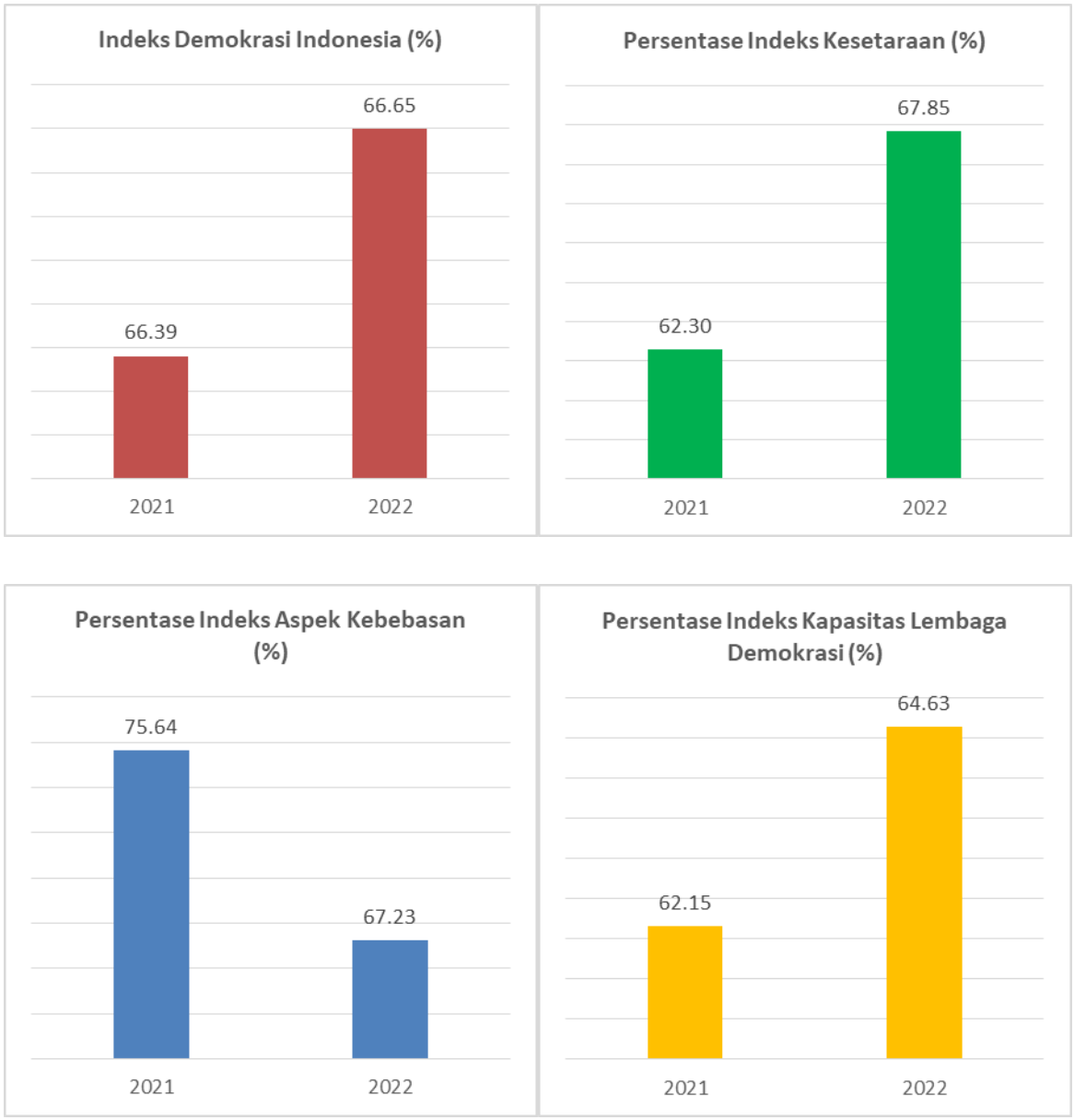

Gambar 2. 122 Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

B. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penghentian berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak antara lain:

1. Masih sulitnya mendapatkan informasi dan ilustrasi yang menyeluruh tentang insiden kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia karena terbatasnya ketersediaan data. Meskipun berbagai layanan yang terkait isu kekerasan perempuan dan anak telah tersedia namun ditengarai masih belum semua bentuk layanan tersebut beroperasi secara baik akibat belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) layanan dan rujukan secara merata,

terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan layanan yang belum mampu menjangkau penanganan kasus hingga ke tingkat komunitas.

2. Upaya pencegahan dan penangangan kekerasan yang dicanangkan belum secara intensif menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan seperti anak dan perempuan yang hidup dalam lingkungan rumah tangga tradisional (Bappenas, 2020).
3. Tantangan yang dihadapi di tengah masa pandemi khususnya bagi anak dan perempuan yang merupakan kelompok yang paling rentan dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan.
4. Pengadaan pelayanan dan pendamping di masa pandemi antara lain waktu layanan yang lebih Panjang akibat adanya perubahan waktu dan cara kerja lembaga layanan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengalihan layanan langsung (offline) menjadi layanan daring/online sehingga berdampak pada kualitas layanan (UNWomen, 2020; Komnas Perempuan, 2020).

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan akses keadilan selama ini masih bertumpu pada isu pemantauan dan perbaikan kualitas pendampingan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Salah satu aspek penting dari isu tersebut adalah ketersediaan data berdasarkan persebaran wilayah, jenis kasus, usia tersangka, dan hasil pendampingan yang lebih lengkap dan detil. Perlunya memahami konteks berbagai kasus dari data pendampingan dan kebutuhan hukum di tingkat masyarakat yang tersedia secara berkala, dapat meningkatkan kemampuan analisis yang lebih baik tentang kesesuaian dan efektivitas bantuan hukum yang disediakan pemerintah Indonesia. Selain itu, tantangan dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat yaitu persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau secara optimal seluruh pelosok wilayah Kabupaten/Kota

Tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua terutama pada aspek hambatan pencatatan kelahiran yang masih dialami anak-anak di rumah tangga termiskin. Beberapa kajian menemukan beberapa aspek yang membatasi akses masyarakat pada akta kelahiran meliputi layanan yang sulit dijangkau, biaya yang muncul dalam proses permohonan serta prosedur yang dianggap rumit (Duff, Kusumaningrum, dan Stark, 2016; Sumner dan Kusumaningrum, 2014) dan juga tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dalam pendaftarkan anaknya setelah kelahiran.

Tantangan yang dihadapi terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif yaitu terkait pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang belum optimal. Sebagai contoh, indikator yang mengukur kinerja

lembaga demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) idealnya digunakan untuk dapat menggambarkan kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas berbasis bukti. Namun, pemanfaatan indikator ini belum secara penuh terjadi di daerah khususnya saat pemerintah daerah melakukan pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing. Selain itu, IDI juga dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Oleh karena itu, strategi pemerintah terkait indikator ini adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yaitu memastikan semua aturan dan kebijakan yang implementasinya bersifat nondiskriminatif serta memberikan akses yang sama pada keadilan dan layanan dasar bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah masih perlu memperhatikan pelaksanaan peraturan yang ada apabila masih mengandung unsur-unsur yang mengecualikan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Komnas Perempuan, masih ditemukan adanya 438 peraturan baik di tingkat nasional maupun di daerah yang terindikasi memuat aturan diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal di tahun 2019. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), telah terlihat adanya upaya perbaikan dalam penanganan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana mereka melakukan klarifikasi, memfasilitasi mediasi, dan memberhentikan laporan dalam beberapa kasus (YLBHI, 2020). Namun, secara umum masih terdapat beberapa tantangan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan solusi dan perlindungan yang adil

Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Covid pandemic 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia termasuk di 5 dari 9 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua. Kondisi pandemic ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan kinerja pada sebagian besar lapangan usaha seperti sektor utama minyak dan gas bumi serta pertambangan dan penggalian. Dari 5 kabupaten/kota tersebut, terlihat pertumbuhan ekonomi di kabupaten biak yang berdampak cukup besar baik pertumbuhan ekonomi dengan tambang yaitu sebesar minus 4,78 maupun tanpa tambang yaitu sebesar minus 4,79. Perekonomian di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen juga terlihat menurun di tahun 2020, mencapai minus 2,48 untuk perekonomian dengan tambang di Kabupaten Jayapura dan minus 2,36 untuk untuk perekonomian dengan tambang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi Perekonomian di Kabupaten Keerom, Sarmi, Supiori dan Mamberamo Raya juga terlihat mengalami penurunan, tapi tidak sampai mencapai angka di bawah nol. Gambar berikut ini menunjukan grafik perekonomian dengan tambang dan tanpa tambang pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

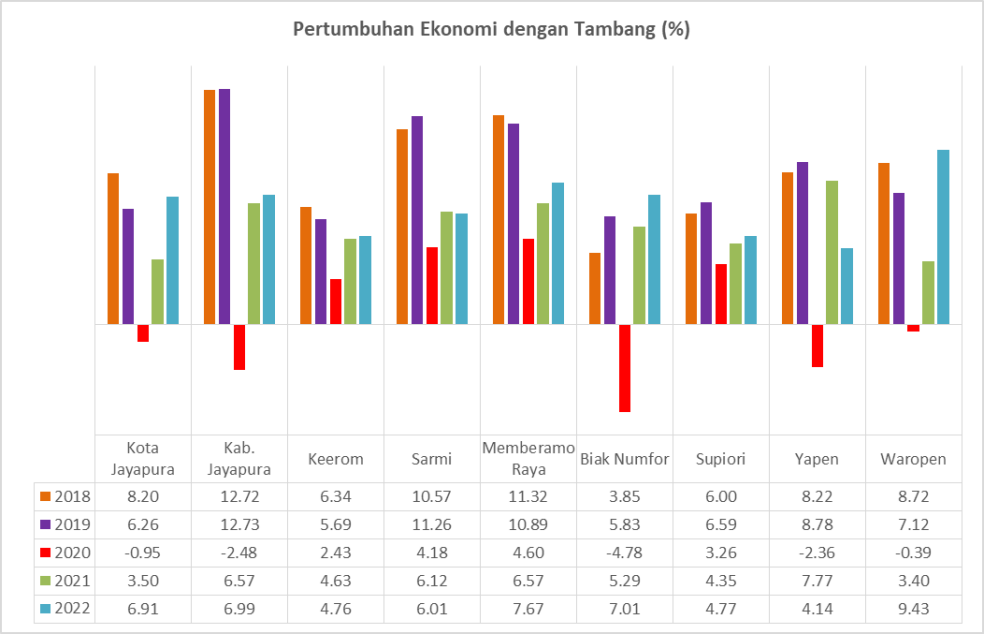

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	8.20	12.72	6.34	10.57	11.32	3.85	6.00	8.22	8.72
2019	6.26	12.73	5.69	11.26	10.89	5.83	6.59	8.78	7.12
2020	-0.95	-2.48	2.43	4.18	4.60	-4.78	3.26	-2.36	-0.39
2021	3.50	6.57	4.63	6.12	6.57	5.29	4.35	7.77	3.40
2022	6.91	6.99	4.76	6.01	7.67	7.01	4.77	4.14	9.43

Gambar 2. 123 Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

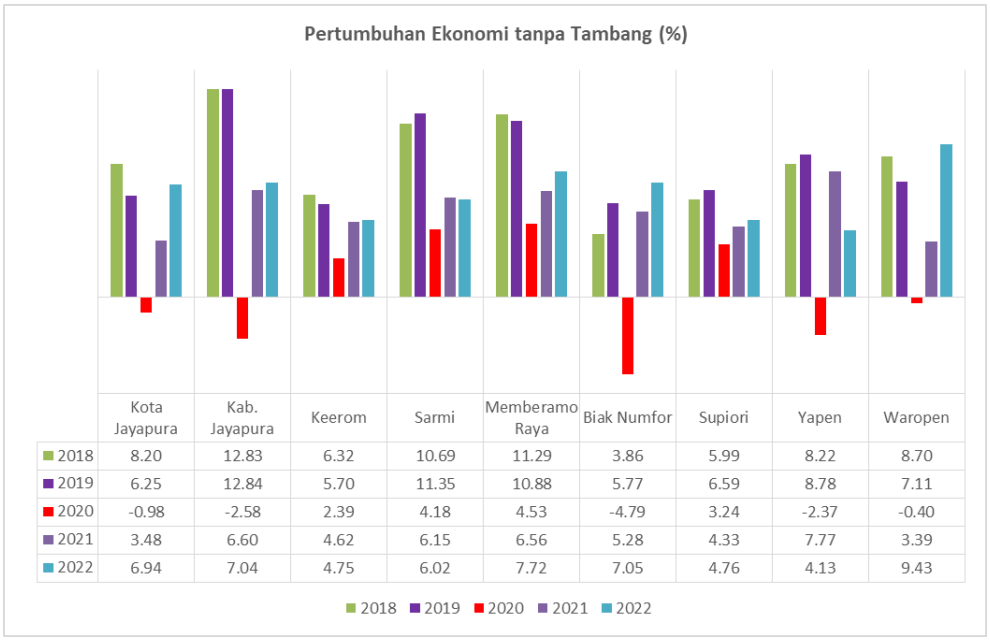

Gambar 2. 124 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

A. Status Capaian

Pendapatan Daerah

Dalam menghitung capaian Indikator 17.1.1* untuk Provinsi Papua, dilihat dari presentase pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB. Perhitungan pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ini adalah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Presentase Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut ini.

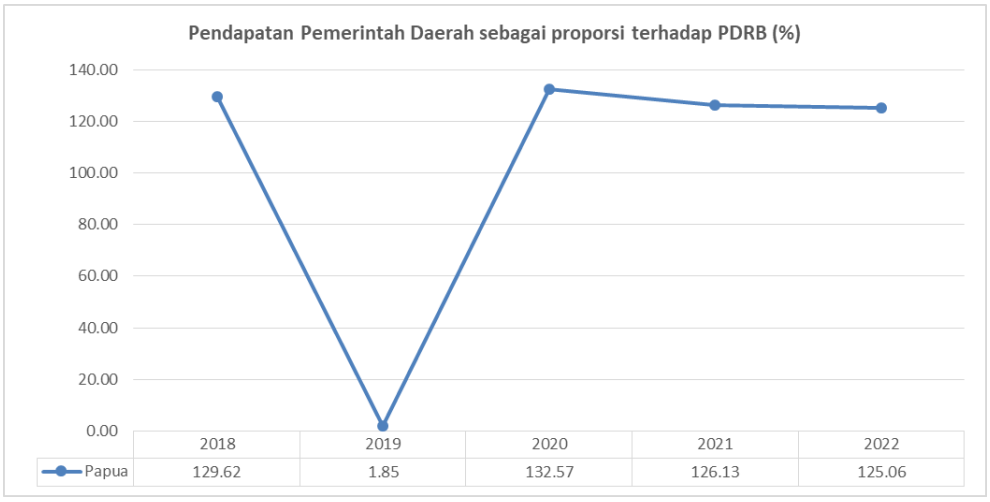

Gambar 2. 125 Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

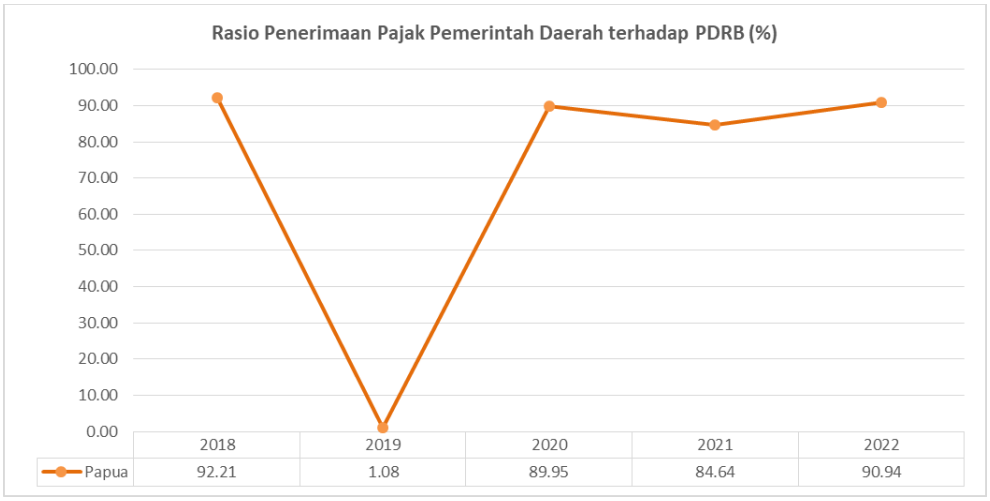

Gambar 2. 126 Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

Gambar ini menunjukan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Provinsi Papua Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Provinsi berdasarkan UU No 28 antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah, dihitung dengan cara Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%. Untuk tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah didapat dari sumber daerah lainnya yang sah, yang bukan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

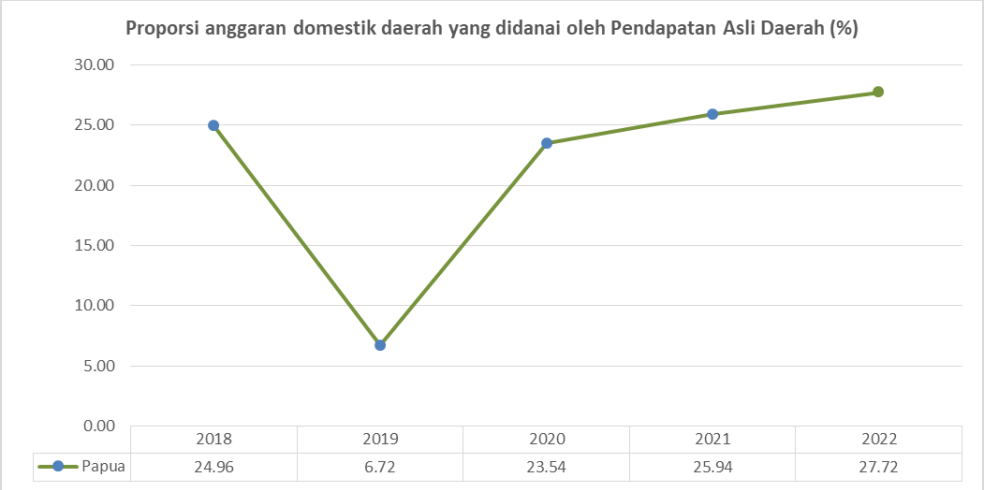

Gambar 2. 127 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh PAD

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

Presentase Pengguna Internet

Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Akses dapat melalui suatu jaringan tetap maupun bergerak. Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan komunikasi di daerah.

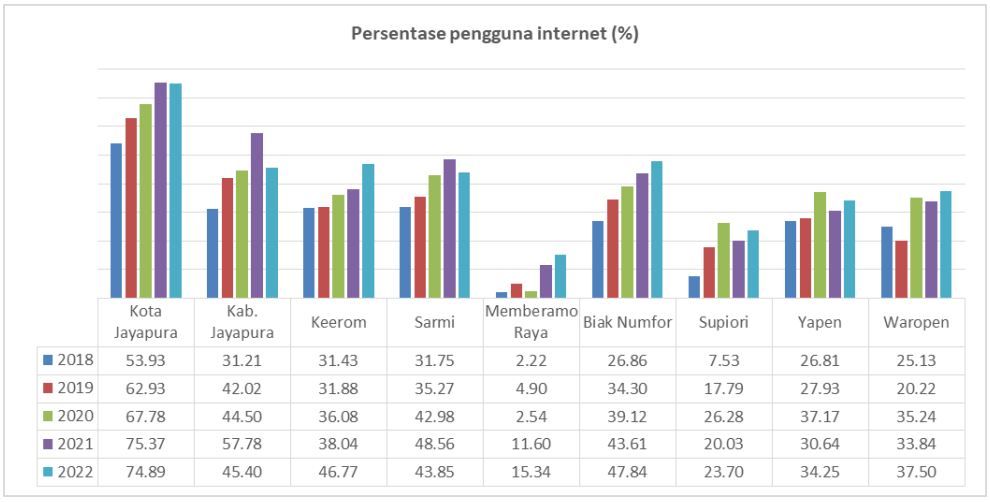

	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Keerom	Sarmi	Memberamo Raya	Biak Numfor	Supiori	Yapen	Waropen
2018	53.93	31.21	31.43	31.75	2.22	26.86	7.53	26.81	25.13
2019	62.93	42.02	31.88	35.27	4.90	34.30	17.79	27.93	20.22
2020	67.78	44.50	36.08	42.98	2.54	39.12	26.28	37.17	35.24
2021	75.37	57.78	38.04	48.56	11.60	43.61	20.03	30.64	33.84
2022	74.89	45.40	46.77	43.85	15.34	47.84	23.70	34.25	37.50

Gambar 2. 128 Proporsi penduduk pengguna internet

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022

B. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain perlu adanya penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah, belum optimalnya kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah, masih kurangnya pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak dan belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan potensi pendapatan daerah. Selain itu, penerimaaan dalam rangka otonomi khusus Papua dikelola secara efisien, efektif, transparan, taat pada peraturan perundang undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan pada OAP dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.

Tantangan terkait akses terhadap telepon genggam sangat dipengaruhi oleh cakupan area signal dan jaringan telepon selular hingga signal internet dan kapasitas daya beli perangkat telepon oleh masyarakat dan keterjangkauan harga perangkat telpon. Selain itu, wilayah cakupan jaringan telepon dan signal internet di Papua masih sangat terbatas terutama pada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan karakteristik Provinsi Papua dan konektivitas yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah di daerah pegunungan dan pinggiran pantai. Investasi yang dibutuhkan untuk menyediaakan jaringan signal terutama jaringan internet sangat besar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar/jarang

BAB III
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Dalam Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, terdapat 5 target dan 11 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua. Target-target tersebut antara lain pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanaan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

Gambar 3. 1 Target Pencapaian TPB 1.

Keterkaitan berbagai dimensi selain faktor kurangnya pendapatan masyarakat miskin menjadi target dalam menurunkan angka kemiskinan, yang kemudian dijabarkan dalam 3 dimensi kemiskinan yaitu dimensi kesehatan dan gizi, dimensi pendidikan dan dimensi standart hidup.

Dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan multidimensi tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-1 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 1 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran sebagai berikut:

- Pembangunan kampung mandiri ekonomi
- Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan

Tujuan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 1 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi sebagai berikut :
   a. Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi, dengan prioritas sebagai berikut :
      1) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine dan pembangunan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas dengan fokus :
         - Pembangunan puskesmas di seluruh distrik tanpa puskesmas
         - Kelanjutan telemedicine
         - Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine
         - Penjaminan pasokan listrik, air bersih, dan internet yang memadai
      2) Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk *fying healthcare* (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses, dengan fokus :
         - Penguatan pelayanan kaki telanjang dan pelayanan kesehatan bergerak
         - Pemantapan pelaksanaan flaing healthcare terintegrasi (pelayanan kesehatan bergerak dan kaki telanjang) termasuk potensi skema baru.
2. Arah kebijakan meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi sebagai berikut :
   a. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, dengan prioritas :
      1) Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan, kompetensi, dan keahlian, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP), dengan fokus :
         - Pemberian bantuan sertifikasi profesi bagi peserta didik pendidikan dan pelatihan vokasi
         - Pelaksanaan kartu pra-kerja
   b. Mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center, dengan prioritas :

1) Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja balai latihan kerja, dengan fokus :
    - Penyiapan lahan, sarana dan prasarana, dan SDM pelatih untuk pusat keahlian ketenagakerjaan dalam rangka penyiapan pemuda yang produktif dan inovatif

c. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua, dengan prioritas :
    1) Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula, dengan fokus :
        - Perluasan konsultasi bisnis bagi wirausaha untuk meningkatkan skala usahanya
        - Inkubasi usaha bagi start-up atau wirausaha baru
    2) Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua, dengan fokus :
        - Pelatihan dan pendampingan keterampilan wirausaha
    3) Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya Orang Asli Papua (OAP) , dengan fokus:
        - Pemetaan potensi pasar dan analisis kebutuhan tenaga kerja (market demand analisis dan kebutuhan pelatihan (training needs analisis)
        - Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi
    4) Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha muda yang produktif dan inovatif, dengan fokus :
        - Pelatihan literasi digital bagi wirausaha baru
        - Perluasan akses pasar digital bagi wirausaha
    5) Perluasan skema permodalan bagi wirausaha, dengan fokus :
        - Pendampingan wirausaha untuk mengakses pembiayaan

3. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi sebagai berikut :
    a. Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua, dengan prioritas :
        1) Penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perlindungan social, dengan fokus :

- Peningkatan jangkauan pendataan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP)
- Pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui sistem informasi mencapai 6O persen
- Pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui sistem informasi mencapai 100 persen
- Pemanfaatan data untuk mendukung verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan social
- Pemanfaatan data dalam perencanaan dan penargetan program penanggulangan kemiskinan (perlindungan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat)

b. Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan prioritas :

1) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 1 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun											
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	10.00	8.93	7.38	5.83	4.28	2.73	1.18	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi	BPS	%	21.04	20.68	20.31	19.95	19.59	19.22	18.86	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Penduduk Miskin	BPS	ribu jiwa	16.58	16.46	16.35	16.23	16.12	16.00	15.89	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase Penduduk Miskin	BPS	%	21.04	20.68	20.31	19.95	19.59	19.22	18.86	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Garis Kemiskinan	BPS	Rp/Kapita /Bulan	780,353.03	809,917.88	839,482.72	869,047.57	898,612.42	928,177.27	957,742.12	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	BPS	%	4.09	3.98	3.86	3.75	3.63	3.52	3.40	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
											dan Pencatatan Sipil
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	BPS	%	1.20	1.15	1.11	1.06	1.01	0.97	0.92	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										BAPPERINDA
	Imunisasi Dasar; Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.	BPS	%	57.92	61.23	64.53	67.84	71.14	74.45	77.75	Dinas Kesehatan
	Gizi; Prevalensi of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah	BPS	%	5.00	4.69	4.34	3.98	3.63	3.27	2.92	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	tangga yang kekurangan gizi.										
	Morbilitas; Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	BPS	%	10.00	8.58	7.39	6.20	5.01	3.82	2.63	Dinas Kesehatan
	Lama Sekolah; Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun	BPS	%	9.52	9.64	9.75	9.87	9.99	10.11	10.23	Dinas Pendidikan
	Partisipasi Sekolah; Persentase anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS	%	90.78	91.10	91.43	91.76	92.08	92.41	92.74	Dinas Pendidikan
	Listrik; Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan	BPS	%	87.54	88.93	90.31	91.70	93.09	94.47	95.86	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik										Penanaman Modal dan PTSP
	Air Minum Layak; Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	BPS	%	59.52	66.49	73.45	80.42	87.39	94.35	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sanitasi Layak; Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	BPS	%	27.85	31.44	35.03	38.62	42.21	45.80	49.40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Lantai; Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2,	BPS	%	1.07	0.96	0.89	0.84	0.80	0.76	0.73	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m										
	Bahan Bakar Memasak; Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg	BPS	%	2.64	2.96	3.28	3.60	3.92	4.24	4.56	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
	Aset; Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil	BPS	%	27.45	27.37	27.35	27.31	27.28	27.26	27.24	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Akte Kelahiran; Persentase penduduk yang	BPS	%	26.51	24.28	22.05	19.82	17.58	15.35	13.12	Dinas Sosial, Kependudukan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran										dan Pencatatan Sipil
	Akses Internet; Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet	BPS	%	61.30	63.32	65.12	66.79	68.36	69.84	71.27	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pekerjaan; Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu	BPS	%	67.73	66.70	68.17	67.13	68.60	67.57	69.04	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BPS	%	36.00	38.85	41.70	44.55	47.40	50.26	53.11	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS	%	93.71	93.45	93.75	94.15	94.50	94.84	94.39	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS	%	22.38	24.52	26.67	28.81	30.96	33.10	35.25	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
	Indeks pelayanan Dasar (IPD)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Akses pada layanan Air Minum (IPAM)	BPS	%	83.44	86.19	88.94	91.70	94.45	97.20	99.95	100.00
	Akses pasa layanan sanitasi Dasar (IPSD)	BPS	%	41.38	42.00	42.63	43.25	43.88	44.50	45.13	45.75
	Akses pada mobilitas dasar rural (IPDM Rural)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses pada mobilitas dasar urban (IPDM Urban)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses Pada Mobilitas Dasar (IPDM)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar (IFPD)	BPS	%	41.86	43.25	44.60	45.99	47.35	48.74	50.09	51.48
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.										
	Hak Milik	BPS	%	69.44	75.52	81.60	87.68	93.76	99.84	100.00	100.00
	Sewa Kontrak	BPS	%	14.91	14.82	14.74	14.65	14.56	14.48	14.39	14.31
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak	BPBD	Jiwa								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	bencana per 100.000 orang.										
1.5.2.*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	BPBD	Rupiah								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BPBD	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2 Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Dalam Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, terdapat 7 target dan 13 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua. Gambar berikut ini menunjukan daftar target pencapaian indikator TPB 2.

Gambar 3. 2 Target Pencapaian TPB 2

TPB 2 dapat dicapai apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Dalam upaya untuk menurunkan angka tanpa kelaparan tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencapaian TPB-2 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 2 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :**

Tujuan 1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung**,** dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan

.

II. **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 2 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :**

1. Arah Kebijakan mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi, melalui strategi:
   Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru dengan prioritas:
   1) Kawasan pengembangan ekonomi Tabi berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa, dengan focus:
      - Penyiapan lahan dan regulasi
      - Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan
      - Pengembangan industri berbasis perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 2 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 2 Target dan Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan											
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Badan Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan	%	9.43	8.06	6.79	5.59	4.36	3.19	2.01	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Badan Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	5.78	4.81	3.84	2.88	1.91	0.95	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula											
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SSGI Tahun 2021	%	13.74	7.85	4.80	3.22	2.35	1.86	1.56	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SSGI Tahun 2021	%	11.08	10.68	10.28	9.88	9.48	9.08	8.68	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh	Evaluasi RPJMD	%	90.00	90.40	90.80	91.20	91.60	92.00	92.40	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	skor Pola Pangan Harapan (PPH).										
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Riskesdas	%	13.90	13.32	12.73	12.14	11.55	10.96	10.38	Dinas Kesehatan
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Evaluasi RPJMD									Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	BPS	Rupiah/ Tenaga Kerja								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memper- kuat kapasitas adaptasi ter- hadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Tanaman Pangan	Hektar								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Dinas Tanaman Pangan	Volume								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Dinas Tanaman Pangan	%								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.5 Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Dinas Tanaman Pangan									Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan

3.3 Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan TPB 3 adalah Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Penguatan sistem kesehatan merupakan hal utama dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan. Sistem kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pemenuhan tenaga kesehatan serta farmasi dan alat kesehatan, penguatan tata kelola, pemberdayaan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan. Pencapaian sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, serta mitra pembangunan.

Gambar 3. 3 Target Pencapaian TPB 3

Dalam Tujuan 3, terdapat 10 target dan 26 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua, dan di dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2023 – 2026. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-3 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 2 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :**

Tujuan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 3 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui strategi:
   a. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan prioritas:
      1) Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB) dengan fokus :
         - Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih
         - Perluasan capaian imunisasi dasar lengkap
      2) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus:
         - Penguatan pendidikan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga
      3) Mempercepat Pengendalian penyakit menular dan factor resiko penyakit tidak menular di Papua, dengan focus:
         - Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan meningkatkan pelibatan sektor nonpemerintah
         - Pengendalian vektor penyakit menular di Papua seperti malaria, filariasis,demam berdarah, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya
         - Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk fying healthcare (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses
         - Peningkatan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penerapan standar pelayanan kefarmasian dan system logistik elektronik
      4) Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan OAP, dengan focus:
         - Penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan

- Peningkatan kualitas tenaga kesehatan prioritas melalui pendidikan dan pelatihan

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 3 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 3 Target dan Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia											
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Profil Kesehatan Indonesia	Angka	13.00	12.00	11.50	11.25	11.13	11.06	11.03	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
	Tenaga Kesehatan Terlatih	BPS	%	79.32	80.05	80.48	80.66	81.34	81.74	82.08	Dinas Kesehatan
	Fasilitas Kesehatan	BPS	%	66.69	66.82	66.95	67.08	67.21	67.34	67.47	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.										
	Angka Kematian Balita	Profil Kesehatan Indonesia	Balita								Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	Profil Kesehatan Indonesia	Bayi								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Profil Kesehatan Indonesia	Neonatal	23.01	22.68	22.35	22.02	21.69	21.36	21.03	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Profil Kesehatan Indonesia	Orang	104,925	98,856	92,786	86,717	80,647	74,578	68,509	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Profil Kesehatan Indonesia	Kab/Kota								Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Profil Kesehatan Indonesia	%	6.47	5.79	5.32	5.15	5.07	5.04	5.03	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
	Filariasis	Profil Kesehatan Indonesia	Kasus	11.44	11.11	10.83	10.55	10.27	9.98	9.70	Dinas Kesehatan
	Kusta	Profil Kesehatan Indonesia	Kasus	896	811	726	641	556	471	386	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Profil Kesehatan Indonesia	Jumlah Kab/Kota								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Profil Kesehatan Indonesia	Jumlah Kab/Kota	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	BPS	%	17.48	17.19	16.89	16.60	16.30	16.01	15.71	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	BPS	%	8.05	7.70	7.62	7.60	7.58	7.58	7.58	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	BPS	%								Dinas Kesehatan
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.											
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Badan Narkotika Nasional	Kasus								Dinas Kesehatan
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	BPS	%	97.81	98.40	99.00	99.59	99.98	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di	BPS	%								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	kelompok umur yang sama.										
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BPS	%	10.97	7.10	5.27	4.32	3.92	3.75	3.69	Dinas Kesehatan
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
	Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita										
	Keluarga berencana: persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang pernah kawin atau hidup bersama kebutuhan keluarga berencana terpenuhi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Indikator SDG 3.7.1);	BPS	%	97.81	98.40	99.00	99.59	99.98	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
	Perawatan kehamilan: persentase perempuan usia 15-49 tahun yang memiliki anak lahir hidup dalam periode waktu tertentu dan memperoleh	Riskesdas 2018 dan Dinkes 2019-2022	%	29.29	31.01	32.73	34.44	36.16	37.88	39.60	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	pelayanan antenatal 4 kali atau lebih;										
	Imunisasi anak: persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheria-tetanus-pertussis;	BPS	%	48.11	50.87	55.60	62.58	66.79	70.54	73.91	Dinas Kesehatan
	Perawatan balita: Persentase anak dibawah usia lima tahun yang diduga mengalami pneumonia (batuk dan sulit bernapas bukan karena permasalah pada hidung dan dada) dalam kurun waktu dua minggu sebelum survei dan dibawa ke tenaga atau fasilitas kesehatan.	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Penyakit menular.										
	Tuberkulosis: Persentase insiden TB yang terdeteksi dan berhasil diobati;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	HIV/AIDS: Persentase penduduk yang	BPS	%								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	hidup dengan HIV dan saat ini mendapatkan terapi antiretroviral;										
	Malaria: persentase populasi di wilayah endemis malaria yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Air dan sanitasi: persentase Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi improved.	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Penyakit tidak menular.	BPS	%								
	Hipertensi: Age-standardized prevalensi tekanan darah tidak meningkat (tekanan darah sistolik <140 mmHg atau tekanan darah diastolik <90 mmHg) pada penduduk usia ≥18 tahun;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Diabetes: Age-standardized rata-	BPS	%								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	rata gula darah puasa (mmol/L) pada penduduk usia ≥25 tahun ;										
	Merokok: Age-standardized prevalensi penduduk usia ≥15 tahun yang tidak merokok dalam kurun waktu 30 hari sebelum survei (indikator SDG 3.a.1).	BPS	%	17.48	17.19	16.89	16.60	16.30	16.01	15.71	Dinas Kesehatan
	Kapasitas dan akses pelayanan.										
	Akses ke Rumah sakit: Tempat tidur rumah sakit per kapita, relatif terhadap ambang batas maksimum 18 per 10.000 penduduk;	BPS	%								Rumah Sakit Umum Daerah
	Kepadatan tenaga kesehatan: tenaga kesehatan per kapita (dokter, psikiater, dan ahli bedah), relatif terhadap ambang batas maksimum untuk setiap kader (bagian dari indikator 3.c.1);	BPS	%								Rumah Sakit Umum Daerah

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Keamanan kesehatan: indeks kapasitas utama regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations/IHR) yang diperoleh dari 13 indikator kapasitas yang dicapai (Indikator 3.d.1).	BPS	%								Rumah Sakit Umum Daerah
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	BPS	%	1.95	1.73	1.50	1.27	1.04	0.82	0.59	Rumah Sakit Umum Daerah
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	%								Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPS	%	90.00	90.21	90.72	91.23	91.75	92.26	92.78	Dinas Kesehatan
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	15.00	12.25	9.50	6.75	4.00	1.25	0.00	Dinas Kesehatan
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.										
	DPT	Profil Kesehatan Indonesia	%	71.82	72.15	72.48	72.81	73.14	73.47	73.80	Dinas Kesehatan
	CAMPAK	Profil Kesehatan Indonesia	%	94.38	94.04	94.09	94.14	94.18	94.21	94.24	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Profil Kesehatan Indonesia	%								Dinas Kesehatan
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
	Dokter	BPS	Orang	317	380	444	508	572	635	699	Dinas Kesehatan
	Perawat	BPS	Orang	3,929	4,595	5,262	5,929	6,596	7,262	7,929	Dinas Kesehatan
	Bidan	BPS	Orang	1,527	1,801	2,075	2,348	2,622	2,895	3,169	Dinas Kesehatan
	Tenaga Farmasi	BPS	Orang	460	517	575	633	691	749	807	Dinas Kesehatan
	Ahli Gizi	BPS	Orang	307	362	418	473	529	584	640	Dinas Kesehatan

3.4 Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebekerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 8 target, 13 indikator yang diantaranya adalah target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan membutuhkan solusi yang sistematis.

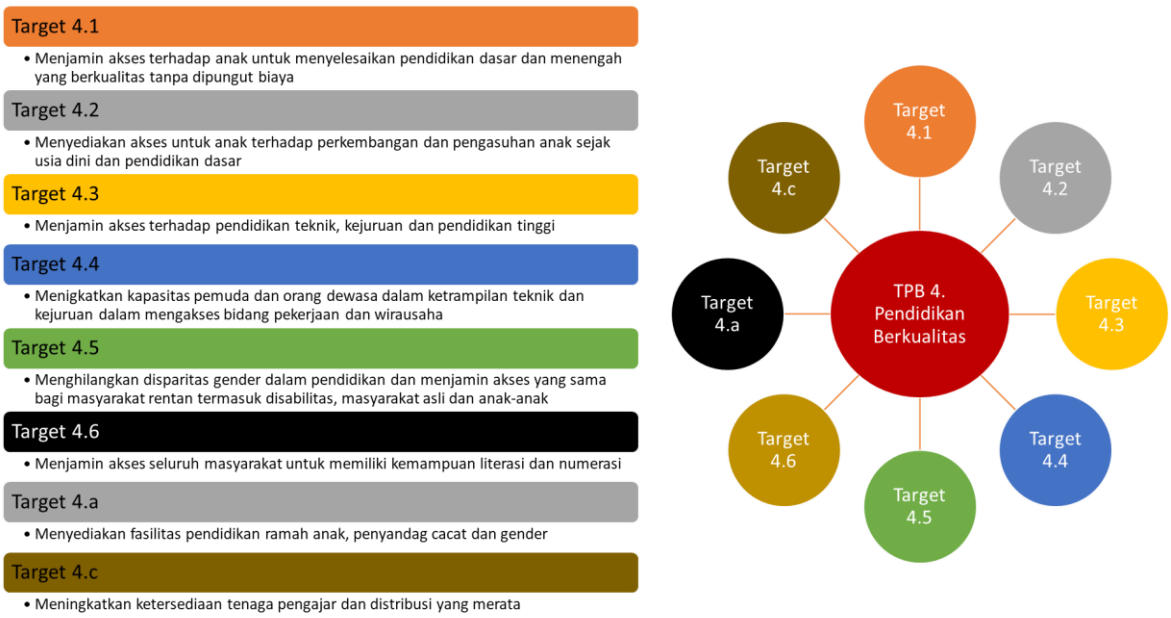

Gambar 3. 4 Target Pencapaian TPB 4

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-4 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 4 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :**

Tujuan 3. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing**, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

II. **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 4 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :**

1. Arah kebijakan menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata, melalui strategi:

   (a) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dengan prioritas:

      1) Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21, dengan focus:

         - Peningkatan kemampuan dan kreativitas Pendidik dalam memanfaatkan beragam dengan bahan ajar berkualitas dan memanfaatkan platform digital
         - Penguatan kualitas pendidikan karakter, pendidikan agama, dan kewargaan
         - Perluasan identifikasi minat dan bakat untuk mendapatkan potensi keunggulan talenta Papua
         - Penguatan program pengembangan talenta melalui ekstrakurikuler melalui bantuan operasional sekolah (BOS) kinerja untuk sekolah berprestasi
         - Pengembangan prestasi talenta peserta didik dan satuan pendidikan Penguatan pembelajaran berfokus pada penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skils*) di semua jenjang pendidikan
         - Penguatan penguasaan soft skills, termasuk keterampilan digital melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
         - Peningkatan layanan pendidikan untuk pengembangan talenta bidang sains, olahraga, dan seni budaya
         - Peningkatan kemampuan dan keaktifan siswa dalam memanfaatkan bahan belajar digital
         - Peningkatan pembelajaran praktik dan kewirausahaan di pendidikan menengah

      2) Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata, dengan focus:

         - Penguatan kualitas guru melalui pelatihan sesuai mata pelajaran yang diampu, forum kelompok kerja guru untuk jenjang pendidikandasar, forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk jenjang pendidikan menengah, dan gugus pelatihan guru oleh instruktur profesional
         - Pengembangan model kurikulum dan pembelajaran berkontekstual Papua
         - Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum

- Pemenuhan sarana dan prasarana esensial penunjang pembelajaran yang berkualitas berbasis digital sesuai dengan kebutuhan konteks Papua
- Perluasan dan penguatan sekolah penggerak
- Penerapan kurikulum merdeka dan peninjauan kurikulum kontekstual Papua
- Persiapan/perencanaan pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berkualitas kontekstual Papua
- Penguatan kompetensi guru terkait pendidikan inklusif melalui platform digital
- Penguatan *parenting education* untuk meningkatkan peran orang tua dan keluarga dalam kualitas pembelajaran dan karakter positif pada anak
- Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berkualitas kontekstual Papua
- Perluasan penerapan literasi kelas awal dengan penggunaan bahasa ibu dan bahan bacaan kontekstual Papua
- Peningkatan penguasaan bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan
- Peningkatan akses kepada bahan bacaan yang mendukung pembelajaran untuk seluruh jenjang
- Penguatan akses kepada bahan bacaan yang mendukung pembelajaran melalui platform digital untuk seluruh jenjang

3) Pengembangan pendidikan tinggi berkualitas dan berdaya saing global

- Penguatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dalam pengajaran dan pembelajaran
- Pemenuhan sarana dan prasarana esensial perguruan tinggi negeri (PTN) penunjang pembelajaran berkualitas yang mendukung ketercapaian standar kompetensi lulusan
- Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran PTN yang mendukung ketercapaian daya saing lulusan
- Peningkatan kemampuan dan keaktifan mahasiswa dalam memanfaatkan bahan belajar digital
- Peningkatan pembelajaran praktik dan kewirausahaan di pendidikan tinggi

(b) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun, dengan prioritas:

1) Penyediaan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (dikdas), dan pendidikan menengah (dikmen) berkualitas dan merata di Papua, dengan fokus:
   - Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
   - Peningkatan akses layanan pendidikan khusus penyediaan layanan 1 tahun pra-sekolah, antara lain dengan mendorong 1 desa 1 PAUD, dan pengembangan anak usia dini holistic integratif (PAUD-HI)
   - Penyediaan satuan pendidikan untuk wilayah yang belum terlayani, serta revitalisasi, rehabilitasi, dan renovasi sarana-prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
   - Bantuan afirmasi pendidikan menengah (ADEM), khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP)
   - Penguatan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai kontekstual Papua
   - Bantuan kepada sekolah terbuka dan sekolah satu atap (SATAP) untuk perluasan akses pendidikan kontekstual Papua
   - Pembinaan peserta didik berprestasi calon penerima beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) berprestasi
   - Peningkatan kualitas perencanaan intenrensi akses pendidikan berbasis asesmen kebutuhan kontekstual Papua
   - Penyediaan layanan 1 tahun pra-sekolah, dengan memastikan penyediaan PAUD berbasis prioritas wilayah
   - Penerapan model layanan kontekstual Papua, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/ SATAP), sekolah alam, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama
   - Pengembangan satuan pendidikan unggulan
2) Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua, dengan focus:
   - Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga tidak mampu dan Orang Asli Papua (OAP), termasuk bantuan bagi peserta didik pendidikan menengah serta lulusan yang berprestasi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi
   - Bantuan afirmasi pendidikan tinggi (ADIK), khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP)

- Penyediaan program beasiswa peminatan untuk program studi prioritas di perguruan tinggi Papua bagi Orang Asli Papua (OAP) berprestasi
- Pemerataan akses perguruan tinggi pada program studi prioritas melalui pengembangan program studi di luar kampus utama (PSDKU) dengan memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan
- Penyediaan program beasiswa peminatan untuk program studi prioritas di perguruan tinggi Papua bagi Orang Asli Papua (OAP) dan membuka kesempatan bagi masyarakat berprestasi di luar Papua untuk berkuliah di perguruan tinggi Papua

3) Peningkatan budaya belajar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat, dengan focus:
   - Peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat

(c) Menjamin penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (lifeskills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat,dan lembaga sosial lainnya), dengan prioritas:

1) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keterampilan, kecakapan hidup, dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, Orang Asli Papua (OAP), dan perempuan, dengan focus:
   - Penyelenggaraan pelatihan keterampilan berbasis keunggulan local dan kecakapan hidup (*life skills*)
   - Peningkatan literasi dan budaya kegemaran membaca, termasuk pengayaan. bahan bacaan digital, serta pengembangan perpustakaan kampung dan taman bacaan masyarakat
   - Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan penguatan pendidikan kecakapan hidup
   - Pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha peningkatan kualitas tutor/pelatih dan sarana-prasarana pendukung pembelajaran pada pelatihan keterampilan
   - Peningkatan layanan pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan pada kelompok usia prioritas dan Orang Asli Papua (OAP)
   - Pemetaan kapasitas lembaga berbasis komunitas dalam memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat dan life skills

- Peningkatan layanan pendidikan keaksaraan dengan fokus pada kelompok usia prioritas, Orang Asli Papua (OAP), dan perempuan
- Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan, termasuk untuk pemuda dan orang dewasa
- Peningkatan kerja sama dan pembinaan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri
- Penguatan minat masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan bacaan digital untuk penguatan kualitas hidup dan kesejahteraan
- Penguatan pembelajaran pada pelatihan keterampilan yang berorientasi pada ekonomi digital

(d) Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan prioritas:

1) Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP), dengan focus:
   - Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP)
   - Pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan guru non-PNS di wilayah afirmasi
   - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja
   - Pelaksanaan rekrutmen guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
   - Pemberian bantuan sertifikasi guru
   - Perhitungan kebutuhan formasi untuk pemenuhan kebutuhan guru dengan PPPK dan PNS, dengan mendorong Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat direkrut menjadi guru dalam jumlah yang cukup
   - Asesmen kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Pemenuhan guru berkualitas di Papua dari lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Papua

2) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik, dengan focus:
   - Peningkatan kualitas pendidik melalui penerapan guru penggerak Asesmen kebutuhan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

- Penguatan kolese pendidikan guru (KPG) melalui kerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ILPTK setempat
- Pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S-1/D-IV), termasuk memberikan afirmasi kepada guru-guru lulusan KPG untuk melanjutkan studi S- 1 / D-IV
- Pengembangan sarana dan prasarana minimal penunjang LPTK
- Pendampingan kerja sama LPTK dengan sekolah mitra Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru (PPG)
- Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan Penerapan sistem rekrutmen gunr sesuai standar kualifikasi dan sertifikasi
- Peningkatan lmalitas dan lanantitas dosen LPTK Peningkatan jumlah lulusan FKIP dan latau LPTK yang berasal dari KPG serta mengikuti PPG

(e) Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi, dengan prioritas:

1) Pengembangan perguman tinggi sebagai produsen iptek dan inovasi serta sebagai pusat keunggulan
   - Peningkatan kapasitas dan kualitas dosen dalam menghasilkan riset dan inovasi yang berkualitas
   - Penguatan kerangka kelembagaan riset di PTN dengan desain proses bisnis yang sesuai dengan kontekstual Papua
   - Pemenuhan dukungan sarana prasarana pada PTN untuk peningkatan kualitas penelitian
   - Peningkatan kualitas perguman tinggi Papua sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) di Indonesia Timur
2) Pengembangan ekosistem riset, penguatan riset, dan inovasi berkelanjutan, dengan focus:
   - Peningkatan kinerja riset dan inovasi dosen yang sesuai kebutuhan industri dan pembangunan Papua
   - Pengembangan jaringan intralembaga litbang, dan antarlembaga litbang dan pemanfaat hasil riset dan inovasi yang berada di Papua
   - Pengembangan pembiayaan kegiatan litbang melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk blended finance untuk meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan litbang di Papua
   - Pengembangan kerja sama riset dan inovasi dengan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi di tingkat nasional

- Peningkatan pemanfatan hasil riset dan inovasi dosen oleh industri dan masyarakat
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi yang kokoh melalui penguatan kerja sama *triple helix*

3) Penguatan konsorsium riset perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur, dan peningkatan kuantitas dan kualitas hasil riset dan inovasi yang dihasilkan dari konsorsium riset perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur, dengan focus:
   - Hilirisasi hasil riset dan inovasi kebudayaan, antropologi, keanekaragaman hayati, dan komoditas unggulan
   - Pemetaan fokus riset di bidang komoditas unggulan di Papua Pemetaan fokus riset di bidang kebudayaan, antropologi, dan keanekaragaman hayati di Papua
   - Peningkatan hilirisasi hasil riset dan inovasi di Papua Pengembangan sarana prasarana pada PTN untuk mendukung daya saing dan hilirisasi hasil penelitian

(f) Meningkatkan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan, dengan prioritas:

1) Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan, dengan focus;
   - Pemenuhan anggaran pendidikan sesuai ketentuoD, peningkatan sinkronisasi, dan efektivitas pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber pendanaan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan
   - Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pemenuhan kualitas layanan pendidikan

2) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis asesmen dan system akuntabilitas, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan, dengan focus:
   - Peningkatan kualitas perencanaan pendidikan berbasis data dan kondisi wilayah, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan
   - Penguatan kapasitas SDM dinas pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pendidikan
   - Pengembangan prosedur dan tata kelola di Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)

3) Peningkatan budaya mutu baik pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan kementerian/lembaga pengampu pendidikan, dengan focus:

- Peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pemenuhan kualitas layanan pendidikan
- Peningkatan kualitas perencanaan berbasis asesmen dan system akuntabilitas, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan
- Peningkatan kualitas perencanaan pendidikan berbasis data dan kondisi wilayah, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan
- Penguatan kapasitas SDM dinas pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pendidikan
- Pengembangan prosedur dan tata kelola di Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
- Peningkatan budaya mutu baik pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan kementerian/lembaga pengampu pendidikan
- Peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 4 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 4 Target dan Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua											
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif											
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
	a. Kelas 5	Angka Kompetensi Minimum/AKM	%								Dinas Pendidikan
	b. Kelas 8	Angka Kompetensi Minimum/AKM	%								Dinas Pendidikan
	c. Usia 15 Tahun	Angka Kompetensi Minimum/AKM	%								Dinas Pendidikan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	SD/Sederajatnya	BPS	%	88.35	89.96	91.49	92.95	94.36	95.74	97.08	Dinas Pendidikan
	SMP/Sederajatnya	BPS	%	47.00	49.18	50.76	52.29	53.78	55.24	56.67	Dinas Pendidikan
	SMA/Sederajatnya	BPS	%	37.25	39.01	40.26	42.26	43.79	45.26	46.27	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	3 - 6 Tahun	BPS	%	25.99	24.47	22.94	21.42	19.89	18.37	16.85	Dinas Pendidikan
	7 - 12 Tahun	BPS	%	39.91	38.44	36.97	35.50	34.04	32.57	31.10	Dinas Pendidikan
	13 - 15 Tahun	BPS	%	14.18	13.49	13.43	12.74	12.68	11.98	11.93	Dinas Pendidikan
	16 - 18 Tahun	BPS	%	11.21	9.52	7.77	5.98	4.14	2.27	0.36	Dinas Pendidikan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Riskesdas	%								Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
	Angka Partisipasi PAUD	BPS	%	82.30	83.17	84.03	84.90	85.77	86.64	87.51	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi SD/sederajatnya	BPS	%	83.43	82.77	86.49	85.83	89.54	88.88	92.60	Dinas Pendidikan
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
	Umur 16 - 18 Tahun	BPS	%	77.90	78.18	78.46	78.74	79.02	79.29	79.57	Dinas Pendidikan
	Umur 19 - 24 Tahun	BPS	%								Dinas Pendidikan
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	RPJMD	%	24.92	25.67	26.43	27.19	27.95	28.71	29.47	Dinas Pendidikan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi	BPS	%	10.31	11.60	12.90	14.19	15.48	16.77	18.06	Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan komunikasi (TIK).										
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.										
	Rasio APM SD antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	83.10	85.30	87.50	89.71	91.91	94.11	96.32	Dinas Pendidikan
	Rasio APK SMP/sederajatnya antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	93.83	94.85	95.87	96.897	97.92	98.94	99.97	Dinas Pendidikan
	Rasio APK SMA/sederajatnya antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	98.33	99.32	100.31	101.31	102.30	103.29	104.28	Dinas Pendidikan
	Rasio APK PT/sederajatnya antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	24.92	25.67	26.43	27.19	27.95	28.71	29.47	Dinas Pendidikan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	78.40	82.53	86.66	90.78	94.91	99.04	100.00	Dinas Pendidikan
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Listrik	Statistik Pendidikan	%	81.33	84.51	87.69	90.87	94.05	97.23	100.41	Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	57.54	64.80	72.06	79.32	86.58	93.84	101.10	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Komputer	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Air Minum Layak	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar	Statistik Pendidikan	%	18.05	20.41	22.63	24.68	26.55	28.22	29.66	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Faslitas Cuci Tangan	Statistik Pendidikan	%	39.63	42.47	45.31	48.15	50.99	53.83	56.67	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	57.54	64.80	72.06	79.32	86.58	93.84	100.00	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Listrik	Statistik Pendidikan	%	57.54	64.80	72.06	79.32	86.58	93.84	100.00	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	69.21	71.30	73.14	74.83	76.41	77.92	79.37	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dengan akses Komputer										
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Air Minum Layak	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar	Statistik Pendidikan	%	25.93	34.28	42.63	50.98	59.33	67.68	76.03	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Faslitas Cuci Tangan	Statistik Pendidikan	%	41.52	45.64	49.76	53.88	58.00	62.12	66.24	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	69.54	71.78	73.69	75.42	77.03	78.55	80.00	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Listrik	Statistik Pendidikan	%	89.35	89.81	90.27	90.73	91.19	91.65	92.11	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	80.64	80.96	81.28	81.60	81.92	82.24	82.56	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Komputer	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Air Minum Layak	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar	Statistik Pendidikan	%	26.73	32.35	37.97	43.59	49.21	54.83	60.45	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Faslitas Cuci Tangan	Statistik Pendidikan	%	44.20	47.70	51.20	54.70	58.20	61.70	65.20	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	80.64	80.96	81.28	81.60	81.92	82.24	82.56	Dinas Pendidikan
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Pendidikan									Dinas Pendidikan
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.										
	PAUD	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Neraca Pendidikan Daerah)	%	24.41	27.14	29.87	32.60	35.33	38.06	40.79	Dinas Pendidikan
	SD		%	69.21	72.97	76.74	80.508	84.275	88.04	91.81	Dinas Pendidikan
	SMP		%	74.23	75.54	76.85	78.162	79.473	80.78	82.10	Dinas Pendidikan
	SMA		%	76.152	76.496	76.84	77.18	77.53	77.872	78.216	Dinas Pendidikan
	SMK		%	72.38	72.86	73.34	73.818	74.299	74.78	75.26	Dinas Pendidikan
	SLB		%	36.00	39.07	42.15	45.218	48.291	51.36	54.44	Dinas Pendidikan

3.5 Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Tujuan TPB 5 adalah tentang mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Mendorong terwujudnya Tujuan 5 TPB/SDGs ini tidak hanya upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tapi juga merupakan landasan untuk menciptakan bangsa yang lebih sejahtera. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara bermakna dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan dari TPB/SDGs untuk memastikan bahwa jalan menuju kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan.

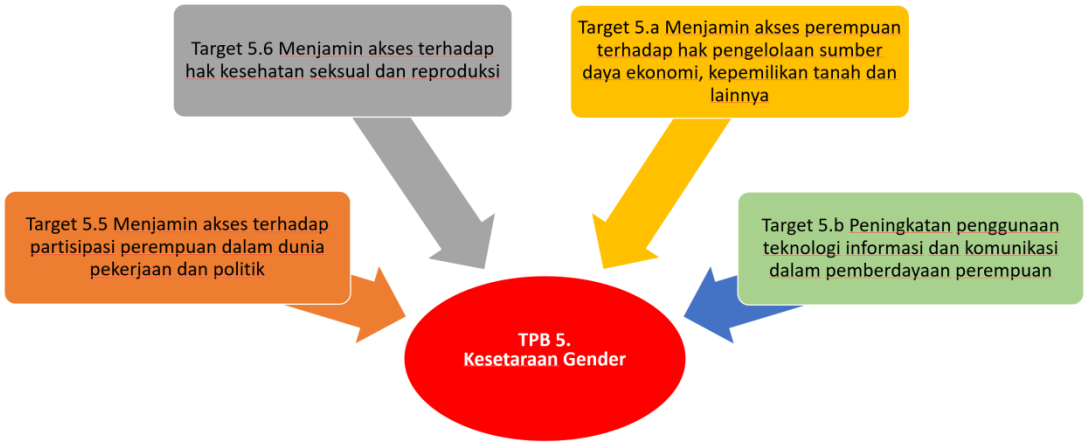

Gambar 3. 5 Target Pencapaian TPB 5

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-5 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 5 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :**

Tujuan 3. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing**, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

II. **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 5 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :**

1. Arah kebijakan kesetaraan gender, perempuan, perlindungan anak, dan kualitas pemuda, melalui strategi:

(a) Strategi meniagkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan, dengan prioritas:

(i) Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), dengan focus:

- Penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG
- Penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
- Penguatan lingkungan pendukung

(ii) Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua, dengan focus:

- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan
- Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan

(iii) Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan, dengan focus:

- Penguatan kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan
- Peningkatan akses pasar dan peluang pemasaran, termasuk bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) dan pemuda perempuan
- Penguatan ketersediaan dan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP)
- Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui advokasi, promosi, dan sosialisasi kewirausahaan pemuda
- Penguatan tata kelola kelembagaan kewirausahaan di daerah dan penciptaan iklim usaha yang produktif

- Peningkatan pelibatan pihak swasta, inkubator, akademisi, media massa, dan komunitas pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 5 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 5 Target dan Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan											
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	DRPD	%	15.67	16.41	17.14	17.87	18.61	19.34	20.07	Sekretariat DPRP
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD	%	33.29	35.26	37.23	39.20	41.17	43.14	45.11	Badan Kepegawaian Daerah
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	BPS	%	67.68	69.47	71.26	73.05	74.84	76.63	78.43	Dinas Kesehatan
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait	BPS	%	83.58	86.45	89.32	92.19	95.06	97.93	100.00	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	kesehatan seksual dan reproduksi.										
Target 5.a. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.											
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.										
	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	Dinas Pertaninan	%								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
	(Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Dinas Pertaninan	%								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	67.68	69.47	71.26	73.05	74.84	76.63	78.43	Dinas Komunikasi dan Informatika

3.6 Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan TPB 6 adalah memastikan pada tahun 2030, seluruh masyarakat Indonesia dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua dan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. Selain itu, menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Dalam mendukung pencapaian TPB 6 di Papua, maka diperlukan berbagai upaya antara lain meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global, Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air, dan menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.

Gambar 3. 6 Target Pencapaian TPB 6

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-6 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 6 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :**

Tujuan 2. Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 6 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan mempercepat pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, melalui strategi:
   (a) Menyediakan den mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan prioritas:
      1) Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah, dengan focus:
         - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan
         - Pengembangan SPAM berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan peri-urban
         - Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan di daerah yang belum terlayani SPAM jaringan perpipaan
         - Optimalisasi infrastruktur SPAM terbangun
         - Pengelolaan infrastruktur SPAM terbangun (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan)
         - Pengembangan teknologi air minum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah
      2) Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah, dengan focus:
         - Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu secara kewilayahan antara sistem terpusat dan sistem setempat sesuai kebutuhan daerah
         - Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan persampahan dengan prinsip ekonomi sirkular sesuai karakteristik sampah dan kondisi daerah

- Optimalisasi infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) terbangun
- Pengelolaan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan)

3) Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan, dengan focus:
   - Penyusunan dokumen kebijakan dan rencana penyelenggaraan SPAM
   - Penyiapan pelaksana penyelenggaraan SPAM
   - Peningkatan kapasitas pelaksana penyelenggaraan SPAM Penyusunan dokumen perencanaan dan strategi kebijakan tingkat daerah untuk sanitasi
   - Penyiapan enabling enuironment tingkat daerah terkait pengelolaan sanitasi
   - Peningkatan kapasitas institusi penyelenggara sanitasi di daerah
4) Pemberian edukasi serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan sanitasi), dengan focus:
   - Pemberian edukasi dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap akses air minum aman
   - Pemicuan perubahan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di masyarakat untuk meningkatkan pcrmintaan layanan sanitasi
   - Pemberian edukasi dan kampanye pemilahan sampah di sumber kepada masyarakat

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 6 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 6 Target dan Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan											
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	BPS	%	83.58	86.45	89.32	92.19	95.06	97.93	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
	Akses terhadap fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	41.49	42.29	43.09	43.88	44.68	45.48	46.28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses terhadap sanitasi layak	BPS	%	43.41	44.98	46.56	48.13	49.70	51.27	52.84	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	BPS	%	26.18	27.36	28.54	29.72	30.90	32.08	33.26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	Dinas PUPR	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.											
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	BPS	%	8.33	9.24	10.14	11.05	11.96	12.87	13.77	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya.	Dinas PUPR	%	17.14	17.28	17.42	17.56	17.70	17.84	17.98	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Dinas PUPR	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.5. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Statistik	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3.7 Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Sebagai daerah yang memiliki potensi energi dan Sumber daya mineral yang sangat besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal, maka Pemerintah Provinsi Papua perlu untuk segera melaksanaan perencanaan pembangunan sektor energi dan pemanfaatan sumber daya mineal yang efisiensi dan efektifitas dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pencapaian tujuan TPB 7 terkait sektor energi dan sumber daya mineral yang merupakan sektor strategis dan menjadi andalan dengan memastikan tersedianya akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

Gambar 3. 7 Target Pencapaian TPB 7

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-5 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 7 kedalam Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

- Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 7 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan mendorong peningkatan akses dan pemenuhan Infrastruktur energi listrik yang berkelanjutan dan terjangkau bersumber dari energi baru dan terbarukan, melalui strategi:

   (a) Strategi mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri, dengan prioritas:

i) Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, dengan focus:

- Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya lokal
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energy (energy storage system)

(ii) Pengembangan renewable energi based industrial development (REBID) dan renewable energi bosed economic development (REBED).

(b) Strategi memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan, dengan prioritas :

(i) Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik, dengan focus:

- Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi
- Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, serta pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada bidang energi dan ketenagalistrikan
- Pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kawasan

(ii) Pengembangan smart mini/ micro grid; dan

(iii) Perluasan pelayanan tenaga listrik, dengan focus:

- Instalasi listrik rumah tangga
- Program listrik perdesaan
- Pemberian bantuan pasang baru listrik
- Penguatan dukungan penyediaan energi primer untuk listrik

(c) Strategi mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, seta pembiayaan energi dan tenaga listrik, dengan prioritas penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD), dengan fokus:

- Penyusunan RUED dan RUKD provinsi

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 7 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 7 Target dan Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Statistik PLN	%	91.38	93.29	95.04	96.68	98.24	99.74	100.00	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Statistik PLN	GWH	1397.16	1487.87	1578.58	1669.29	1760.00	1850.71	1941.42	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	BPS	Rumah Tangga								Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	29.24	31.49	33.74	35.98	38.23	40.47	42.72	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP

3.8 Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Tujuan 8, terdapat 8 target dan 11 indikator yang terkait dengan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua dapat sejalan dengan peningkatan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan, adalah capaian dari TPB 8 yang perlu menjadi perhatiaan Pemerintah Provinsi Papua dalam memastikan terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua

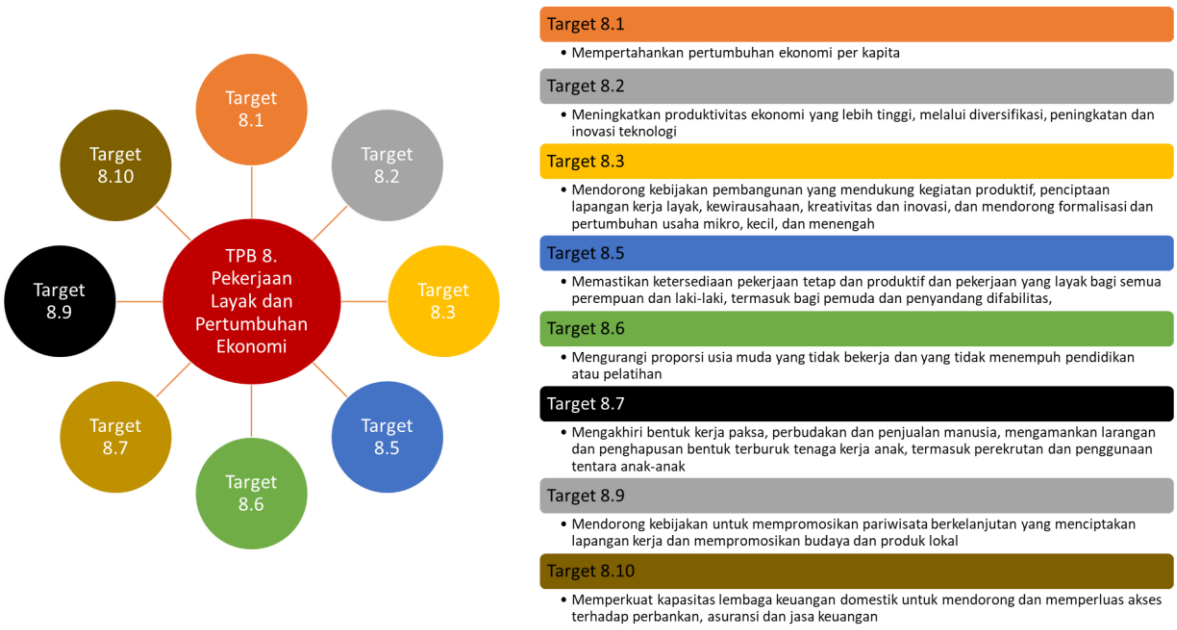

Gambar 3. 8 Target Pencapaian TPB 8

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-8 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 8 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :**

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Pembangunan kampung mandiri ekonomi
- Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
- Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
- Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
- Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
- Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
- Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 8 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, melalui strategi:

   (a) Strategi menperkuat penyelenggaraan peadtdikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, dengan prioritas:

   (i) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dengan focus:

   - Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi
   - Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi

   (II) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas, dengan focus:

   - Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan instruktur vokasi yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP)

   (iii) Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan kompetensi dan keahlian, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP), dengan focus:

- Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja, termasuk identifikasi menyeluruh atas skema sertifikasi kompetensi sesuai potensi daerah bagi Orang Asli Papua (OAP)

2. Arah kebijakan meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan realisasl investasi pada sektor-sektor unggulan daerah, melalui strategi:

(a) Strategi menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha, dengan prioritas:

(i) Pengelolaan terpadu UMKM melalui skema kemitraan usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan, dengan focus:

- Pengelolaan terpadu UMKM berbasis komoditas unggulan daerah

(ii) Digitalisasi UMKM untuk perluasan akses pasar, pembiayaan, serta manajemen usaha hingga tingkat kampong, dengan focus:

- Penyiapan infrastruktur internet dan ekosistem digital lainnya

(iii) Pendampingan dan pembentukan koperasi di setiap wilayah adat, dengan focus:

- Penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi

(iv) Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi, dengan focus:

- Penguatan permodalan UMKM dan koperasi

(v) Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP).

- Pengembangan dan penguatan sentra IKM

3. Arah kebijakan mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi, melalui strategi:

(b) Strategi membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif, dengan prioritas:

(i) Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan, dengan focus:

- Pengembangan industri berbasis pariwisata

(ii) Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata, dengan focus:

- Peningkatan SDM pariwisata terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan dan pelatihan

(iii) Peningkatan daya tarik dan standar kualitas destinasi pariwisata.

- Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas
- Penyelenggaraan event rutin dan atraksi pariwisata

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 8 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2023 – 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2022.

Tabel 3. 8 Target dan Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	%	29.45	29.68	29.91	30.15	30.38	30.62	30.85	BAPPERINDA
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Baseline : BPS Proyeksi : RPD	Ribu Rupiah	595,388.00	619,127.50	642,867.00	666,606.50	690,346.00	714,085.50	737,825.00	BAPPERINDA
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	8.00	BAPPERINDA
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%	84.33	85.65	86.97	88.29	89.61	90.92	92.24	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS	Rupiah/Jam	28,003	28,165	28,327	28,488	28,650	28,812	28,974	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	BPS	%	36.37	29.71	23.04	16.38	9.71	3.05	2.62	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	kelamin dan kelompok umur.										
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	4.74	3.22	1.99	0.67	0.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	19.22	18.37	17.52	16.67	15.82	14.97	14.12	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.7 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	3.71	2.83	1.78	0.66	0.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS	Orang	642,437	661,295	680,153	699,011	717,869	736,727	755,585	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.										
	Jumlah kantor bank	OJK	%								BAPPERINDA
	Jumlah ATM	OJK	%								BAPPERINDA

3.9 Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Dalam Tujuan 8, terdapat 3 target dan 8 indikator yang terkait pembangunan infrastruktur konektivitas dalam menunjang industrialisasi sebagai mesin pendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. ke-3 target tersebut dalam upaya pencapaian Ketersedian infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh mendorong pembangunan sektor industri yang kuat dalam rangka peningkatan produktivitas, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan menaikkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya.

Gambar 3. 9 Target Pencapaian TPB 9

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-9 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 9 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Pembangunan kampung mandiri ekonomi
- Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan

- Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, melalui sasaran:

- Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
- Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
- Peningkatan aksesbilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
- Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 9 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan meningkatkan daya saing industri, perdagangan dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah, melalui strategi:

   (a) Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha, dengan prioritas:

   (i) Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan focus:

   - Pengembangan dan penguatan sentra IKM

   (b) Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah, dengan prioritas:

   (i) Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan daerah

   - Penerapan standar mutu komoditas unggulan daerah untuk kebutuhan industri dan ekspor
   - Pengembangan kemitraan rantai pasok komoditas unggulan dengan industri pengguna dan eksportir

   (ii) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah

- Penarikan investasi berbasis pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan daerah
- Pengembangan kawasan industri untuk anglomerasi pengolahan komoditas unggulan daerah

(iii) Peningkatan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah

- Peningkatan inovasi produk olahan berupa komoditas unggulan daerah berbasis kearifan lokal, riset, dan kreativitas

(iv) Peningkatan sistem pendukung rantai pasok pengolahan komoditas unggulan daerah

- Peningkatan akses ke hasil-hasil riset terapan yang sesuai dengan potensi komoditas unggulan daerah
- Pengembangan sarana dan prasarana uji standar komoditas dan produk olahannya (laboratorium, lembaga penguji, dan lain-lain)

2. Arah kebijakan mempercepat penlngkatan konektivttas antar wilayah dari dan ke pusat penggerak ekonomi dan pusat pelayanan dasar, melalui strategi:

(a) Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi, dengan prioritas :

(i) Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan, dengan fokus :

- Pembangunan backbone/koridor utama jalan nasional Trans Papua
- Pemantapan koridor utama jalan nasional Trans Papua
- Pembangunan jalan paralel perbatasan

(ii) Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, dengan fokus :

- Pembangunan jalan koridor pantai utara

(iii) Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)

(iv) Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) , dengan fokus :

- Pembangunan dan peningkatan jalan yang terintegrasi dengan simpul transportasi, pusat permukiman, pusat ekonomi, dan fasilitas layanan dasar
- Percepatan jalan mantap dan fungsional

(b) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, dengan prioritas :

(i) Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan dan kawasan perbatasan, dengan fokus :

- Pembangunan dan peningkatan terminal
- Penguatan konektivitas antarmoda
- Penyediaan sistem angkutan umum massal di perkotaan yang dikembangkan

(ii) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan

(iii) Penyediaan armada penyeberangan terjadwal yang aman

(iv) Penyediaan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara, dengan fokus :

- Penyediaan sarana dan prasarana angkutan jalan
- Penyediaan layanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara
- Penyediaan sarana dan prasarana serta layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara

(v) Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan

(vi) Perluasan jangkauan BBM dengan harga terjangkau

(c) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, dengan prioritas :

(i) Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang yang menjangkau daerah pedalaman, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut, serta mendukung pengembangan ekonomi berorientasi ekspor, dengan fokus :

- Pembangunan dan peningkatan pelabuhan
- Pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan terbangun untuk pengembangan ekonomi

(ii) Penguatan mekanisme distribusi logistik

(d) Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, dengan prioritas :

(i) Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul dan pengumpan/*airstrip*, dengan fokus :

- Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul/hub
- Peningkatan bandar udara pengumpul/hub
- Pembangunan dan peningkatan bandara spoke (pengumpan/airstnp) terintegrasi dengan bandara hub
- Peningkatan bandara spoke (pengurnpan/airstip) terintegrasi dengan bandara hub

(ii) Peningkatan kualitas bandar udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, dengan fokus :

- Penyediaan SDM, fasilitas, sarana dan prasarana keselamatan penerbangan

(iii) Penyediaan rute subsidi angkutan udara yang menjangkau daerah pedalaman, dengan fokus :

- Penguatan backbone rute penerbangan perintis terutama di daerah Pegunungan Tengah
- Penyediaan rute dan subsidi keperintisan angkutan udara

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 9 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 9 Target dan Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi											
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional. (kategori Baik dan Sedang)	BPS	%	43.38	44.15	44.91	45.68	46.44	47.21	47.97	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.										
	Jumlah penumpang datang dengan pesawat terbang	BPS	Orang	95,566	107,017	118,468	129,919	141,370	152,821	164,272	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang berangkat dengan pesawat terbang	BPS	Orang	95,551	107,577	119,603	131,629	143,655	155,681	167,707	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang datang dengan Kapal Laut	BPS	Orang	121,378	154,901	188,424	221,947	255,470	288,993	322,516	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang berangkat dengan Kapal Laut	BPS	Orang	121,318	151,922	182,526	213,130	243,734	274,338	304,942	Dinas Perhubungan
	Jumlah barang masuk dengan kapal laut	BPS	Ton	3,000,000	3,867,795	4,547,989	5,228,182	5,908,375	6,588,569	7,268,762	Dinas Perhubungan
	Jumlah barang keluar dengan kapal laut	BPS	Ton	15,000	159,812	167,037	174,263	181,488	188,714	195,939	Dinas Perhubungan
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.										
	Jumlah bandara terbangun	Dinas Perhubungan	Unit								Dinas Perhubungan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah bandara beroperasional	Dinas Perhubungan	Unit								Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	Unit	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Dinas Perhubungan
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang,											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS	%	1.80	2.00	2.17	2.34	2.52	2.69	2.87	BAPPERINDA
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	%	0.15	0.22	0.29	0.36	0.43	0.5	0.57	BAPPERINDA
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.											
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	BPS	0								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3.10 Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, maka amanah Tujuan 10 adalah memastikan berkurangnya jumlah daerah dan desa yang tertinggal, dengan berfokus pada pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Rangkaian kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik perlu dibangkitkan di berbagai titik wilayah yang masuk dalam kategori tertinggal di Papua, dengan tujuan untuk membuat desa tertinggal menjadi desa mandiri, dan desa mandiri menjadi lebih maju lagi.

Gambar 3. 10 Target Pencapaian TPB 10

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-10 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 10 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:**

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Pembangunan kampung mandiri ekonomi

- Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
- Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, melalui sasaran:

- Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 10 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, melalui strategi:

   (a) Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam pen)rusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua, dengan prioritas:

   (i) Penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial, dengan focus:

   - Pemanfaatan data untuk mendukung verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan social
   - Pemanfaatan data dalam perencanaan dan penargetan program penanggulangan kemiskinan (perlindungan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat).

   (ii) Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya;

   (iii) Meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan social

   - Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) penyandang disabilitas di tingkat provinsi untuk memenuhi pembangunan inklusif disabilitas di seluruh bidang, termasuk pendataan, penyediaan layanan dan

fasilitas publik (infrastruktur dan transportasi), politik dan keadilan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi inklusif, pendidikan, dan kesehatan

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 10 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 10 Target dan Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara											
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Rasio Gini.	BPS	0	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	BAPPERINDA
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Orang	22.20	22.17	22.14	22.10	22.07	22.03	22.00	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Indeks Desa Membangun	Desa	505	503	500	498	495	493	490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Indeks Desa Membangun	Desa	1	1	2	2	2	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Indeks Desa Membangun	Kab/Kota	100	98	96	94	92	90	88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median	BPS	%	11.91	10.52	9.13	7.74	6.35	4.96	3.58	BAPPERINDA

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.										
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.										
	Aspek Kebebasan Sipil	Indeks Demokrasi Indonesia	%	90	90.68	91.36	92.04	92.72	93.40	94.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Aspek Hak-Hak Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	%	55.00	57.07	58.99	60.91	62.83	64.75	66.67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Aspek Lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	%	52.00	53.00	55.00	55.59	56.64	57.69	58.74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	KOMNAS HAM - Data Aduan	Volume								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS	%	23.03	25.74	28.45	31.16	33.87	36.58	39.29	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.11 Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Target capaian Tujuan 11 antara lain mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan dari sisi perumahan dan permukiman, transportasi publik, efisiensi penggunaan lahan, ketangguhan terhadap bencana, kualitas lingkungan, ketersediaan RTH, penguatan perencanaan dan juga kebijakan terkait bangunan dan gedung.

Gambar 3. 11 Target Pencapaian TPB 11

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-11 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 11 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, melalui sasaran:

- Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
- Peningkatan aksesbilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah

- Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 11 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Mengembangkan pemerataan kawasau ekonoml, melalui strategi:

   (a) Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi, dengan prioritas:

      (i) Pengembangan sistem perkotaan yang berkelanjutan, dengan focus:

         - Penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan
         - Pengembangan sistem integrasi angkutan perkotaan yang menjangkau pusat pertumbuhan, pemukiman, pemasaran, dan ibu kota kabupaten/distrik/kampung
         - Pengembangan fungsi kota melalui konsep *green belts/ green boundaries*

2. Arak kebijakan mengurangi resiko kebencanaan lingkungaa berkelanjutan, melalui strategi:

   (a) Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana, dengan prioritas :

      (i) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana

         - Penguatan industri kebencanaan yang berdaya saing global yang melibatkan masyarakat adat
         - Peningkatan pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan

      (ii) Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana

      (iii) Pembangunan sistem peringatan dini learlg warning system) kebencanaan

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 11 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 11 Target dan Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	82.22	83.09	83.96	84.83	85.70	86.57	87.45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	BPS	%								Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	BPS	%								Dinas Perhubungan
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	KLHK	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang	Statistik Ditjen	Rp/Kapita								Dinas Kehutanan dan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).	KSDAE KLHK									Lingkungan Hidup
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPS	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	BPS	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Dinas Lingkungan Hidup	%	50.00	55.11	60.22	65.33	70.44	75.55	80.66	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola.	SIPSN KLHK	%	53.00	57.40	61.80	66.20	70.60	75.00	79.40	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10.	KLHK	(µg/m3)								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	IKLH KLHK	%	95.00	95.43	95.86	96.29	96.72	97.15	97.58	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau teruta ma untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Kriminal	%	10.00	9.89	7.63	5.91	4.19	2.47	0.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.											
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.	Dinas Lingkungan Hidup	Kab/Kota								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.											
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional	BPBD	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	penanggulangan bencana.										
Target 11.b. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	BAPPENAS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.12 Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, terdapat 6 target dan 10 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua. Target-target tersebut antara lain mengurangi limbah pangan; mencapai pengelolaan bahan kimia dn limbah yang ramah lingkungan; mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali; menjamin ketersediaan informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras dengan alam; dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja dan promosi budaya dan produk lokal.

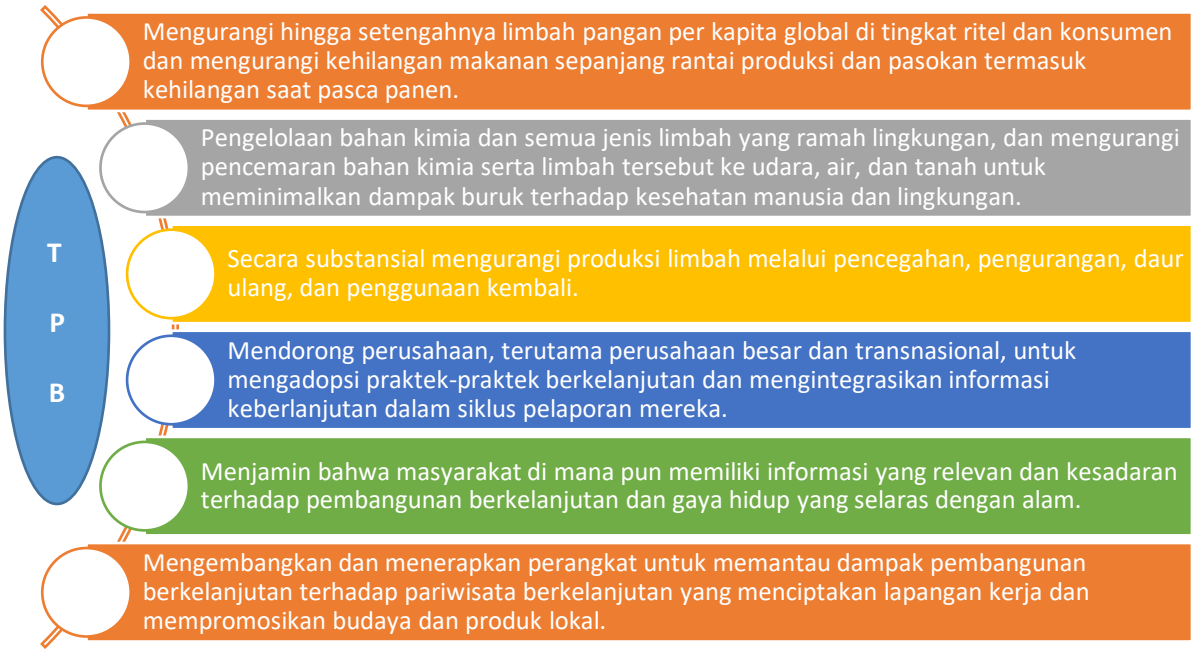

Gambar 3. 12 Target Pencapaian TPB 12

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-12 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 12 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
- Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, melalui sasaran:

- Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 12 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan mendorong kegiatan dan usaha yang mendukung perlindungan dan peagelolaan lingkungan, melalui strategi:
   (a) Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah, dengan prioritas :
      (i) Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, dengan fokus :
         - Pelibatan materi wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah
         - Sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan
         - Penerapan wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari
         - Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan pengrusakan lingkungan
         - Penyusunan baseline sarana prasarana pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah
         - Penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir

- Pemilihan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal
- Implementasi pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir.

(b) Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular, dengan prioritas:

(i) Penerapan program ekonomi sirkular melalui prinsip 9R (*refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacfure, repurpose, recycle, dan recover*) dengan focus:

- Identifikasi sektor prioritas dan peluang penerapan ekonomi sirkular
- Peningkatan kapasitas dalam penerapan ekonomi sirkular
- Peningkatan kapasitas dalam penerapan ekonomi sirkular
- Sosialisasi dan pelibatan semua stakeholder dalam penerapan ekonomi sirkular

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 12 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 12 Target dan Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan											
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.											
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.	SIPSN KLHK	%	7.00	6.43	5.92	5.42	4.91	4.41	3.90	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	SIPSN KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari *baseline*.	SIPSN KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.										
	Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola per tahun	SIPSN KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	sektor agroindustri yang dikelola										
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	ton								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.											
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.											
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan berbudaya lingkungan hidup.										
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.13 Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

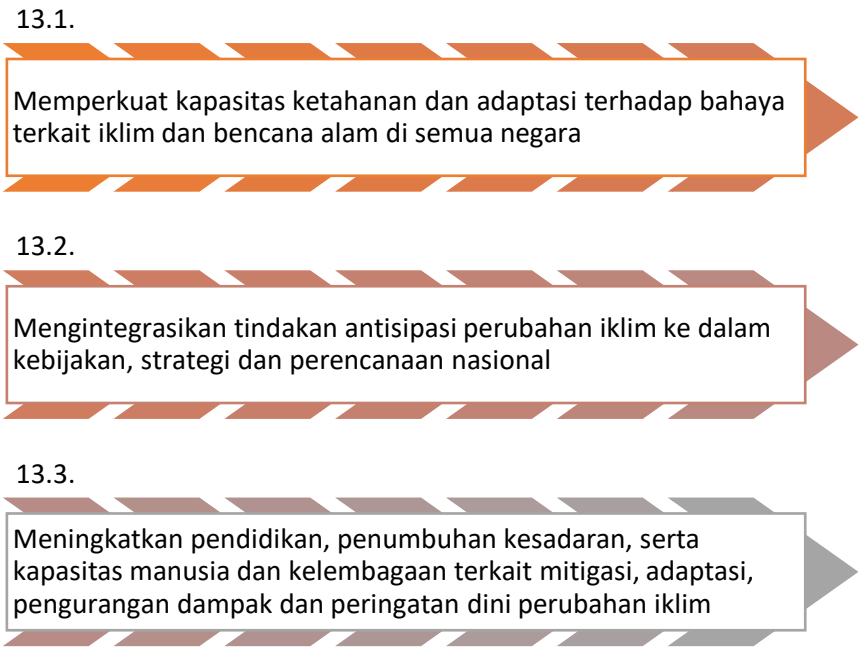

Gambar 3. 13 Target Pencapaian TPB 13

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-13 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 13 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim

Tujuan 2 : Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, melalui sasaran:

- Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 13 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan meningkatkan upaya pembaagunan rendah karbon dan ketahanan terhadap danpak penubahan iklIm, melalui strategi:
   (a) Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim, dengan prioritas :
      (i) Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan, dengan fokus :
         - Implementasi aksi ketahanan iklim melalui pendekatan infrastruktur dan teknologi pada lokasi prioritas
         - Peningkatan kapasitas, tata kelola, dan pendanaan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berketahanan iklim

      (ii) Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim, dengan fokus :
         - Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan iklim

   (b) Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon, dengan prioritas :
      (i) Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir, dengan prioritas :
         - Penyusunan model sistem dinamik dan skenario kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PRK)
         - Pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas
         - Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembangunan rendah karbon
         - Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam pelaporan aksi pembangunan rendah karbon

- Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk mendukung pencapaian *net zero emission*

(ii) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam men)rusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon, dengan prioritas :

- Identifikasi potensi teknologi dalam mendukung penerapan pembangunan rendah karbon
- Pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon
- Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon
- Pemetaan potensi pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon
- Pemanfaatan *blended* dan *innovative financing* untuk pembangunan rendah karbon

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 13 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 13 Target dan Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya											
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.										
	Korban meninggal	BPBD									BPBD
	Korban hilang										BPBD
	Terkena dampak langsung										BPBD
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	BNPB; BPBD	%								BPBD
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.	KLHK - Laporan Inventarisasi GRK dan MPV tahun 2020	ton CO2eq								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	BAPPENAS Aksara Online	ton CO2eq								Dinas Kehutanan dan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	(Emisi Baseline - Emisi Proyek)										Lingkungan Hidup
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). (Total Emisi GRK di Tahun berjalan dibagi dengan GDP di tahun berjalan)	BAPPENAS Aksara Online	ton CO2eq								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3.14 Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Dalam Tujuan 14, terdapat 5 target dan 7 indikator yang merupakan kewenangan provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan setiap usaha dan upaya dalam melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan samudera secara berkelanjutan dapat terlaksana. Terdapat 3 target yang berhubungan langsung dengan pelestarian lingkungan perairan antara lain 1). Upaya untuk mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah; 2). Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif; dan 3). Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut. Selain itu, upaya untuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan penerapan kebijakan dalam upaya melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil, peningkatan akses usaha nelayan dan perlindungan terhadap nelayan juga menjadi target dalam Tujuan 14 ini.

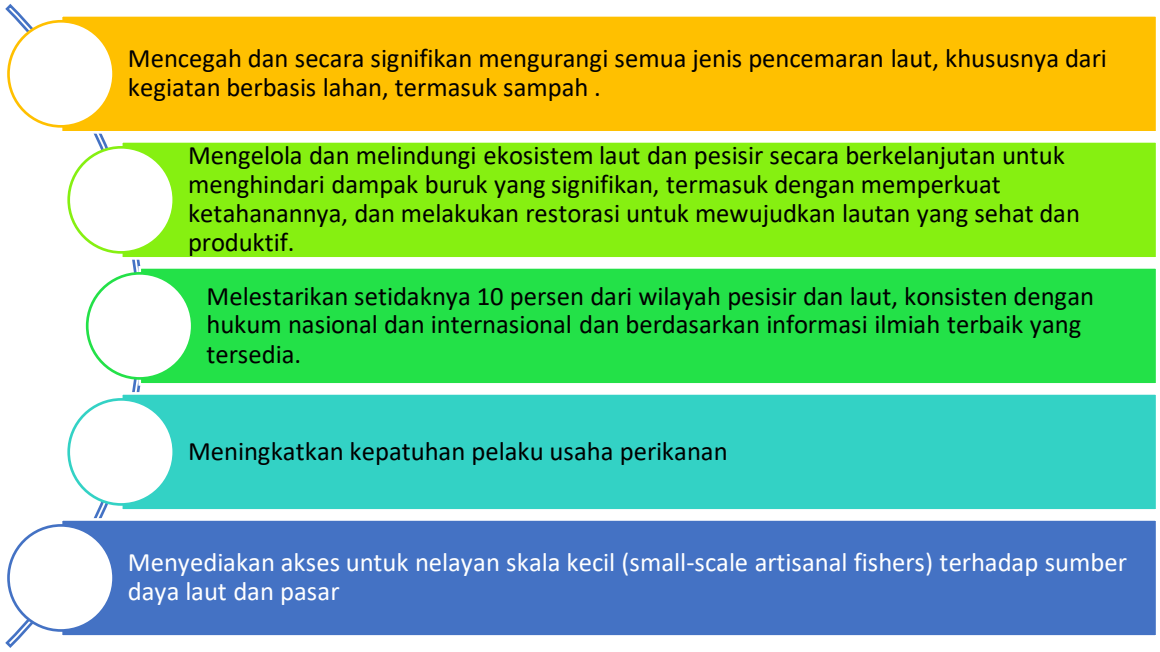

Gambar 3. 14 Target Pencapaian TPB 14

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-14 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 14 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
- Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 14 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecll secara berkelanjutan, melalui strategi:
   (a) Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, dengan prioritas:
      (i) Penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan, dengan fokus :
         - Perhitungan daya dukung lingkungan untuk menjadi panduan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan
         - Penetapan kawasan konservasi perairan pada dokumen perencanaan tingkat pusat dan daerah
         - Penyediaan infrastruktur dasar baik di darat maupun laut untuk mendukung kegiatan
         - Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan SDM pengawas kawasan konservasi perairan
         - Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi perairan
         - Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan
         - Peningkatan partisipasi masyarakat adat kawasan konservasi perairan dalam penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan
      (ii) Penguatan basis data keanekaragaman hayati pesisir dan laut, dengan fokus :
         - Penyusunan database biodiversitas pesisir dan laut

- Pembaruan database kawasan dilindungi dan spesies pesisir dan laut
- Perlindungan spesies kunci pada ekosistem pesisir dan laut
- Inventarisasi spesies asli dan endemik pada ekosistem pesisir dan laut

(iii) Pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut, dengan fokus :

- Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut
- Pengawasan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut
- Perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, alga, terumbu karang, dan lainnya
- Perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan

(b) Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan, melalui prioritas :

(i) Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan fokus :

- Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembatasan biologis yang aman
- Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kearifan lokal, seperti praktik Sasi di perairan bagian utara Papua

(ii) Perlindungan pemanfaatan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, dengan fokus :

- Pencegahan dan pengurangan polusi kelautan, baik akibat aktivitas di daratan maupun di lautan
- Perlindungan kawasan ekowisata bahari pada kawasan konservasi dan taman nasional

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 12 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 14 Target dan Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan											
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi											
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.	KLHK	ribu ton								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen								Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	RPD	Ha								Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%								Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka	Dinas Kelautan	%								Dinas Kelautan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	hukum/regulasi/kebijakan/kelem bagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	dan Perikanan									dan Perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%								Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Statistik KKP	Nelayan								Dinas Kelautan dan Perikanan

3.15 Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Pencapaian Tujuan 15 berdasarkan wilayah administrasi Provinsi akan dicapai melalui 4 target dengan 6 indikator. Isu utama dalam Tujuan 15, meliputi: tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum. TPB 15 berfokus pada tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

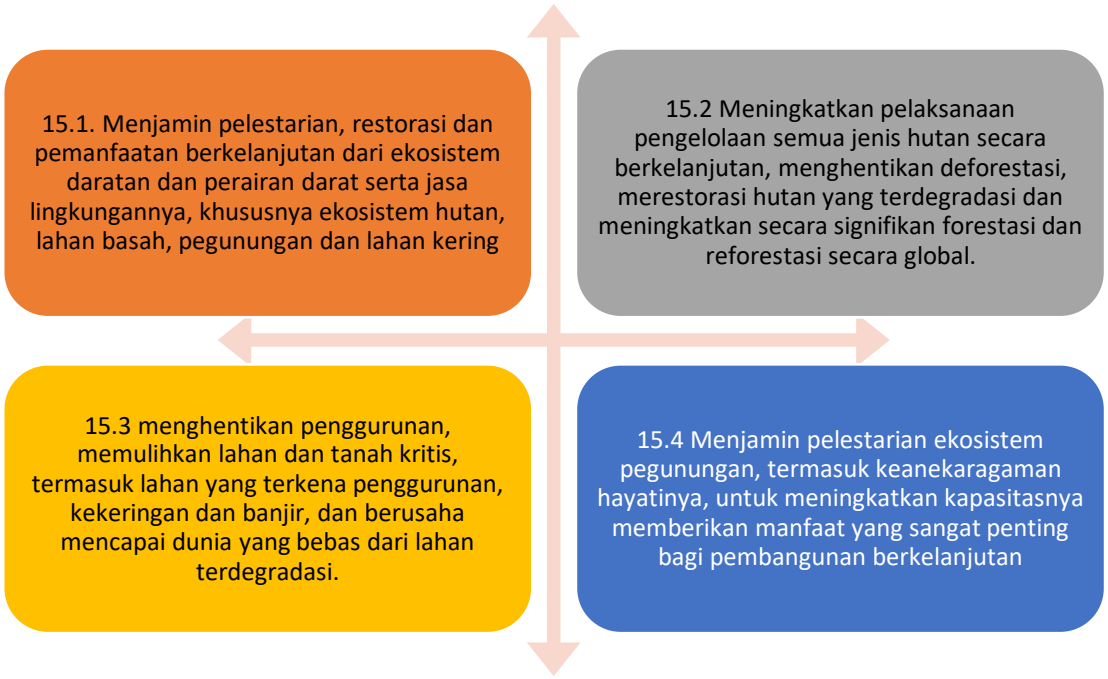

Gambar 3. 15 Target Pencapaian TPB 15

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-15 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 15 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:**

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, melalui sasaran:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan

- Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2 : Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, melalui sasaran :

- Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 15 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan mengoptimalkan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya lahan berkelanjutan, melalui strategi:
   (a) Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan, dengan prioritas:
      (i) Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat, dengan fokus :
         - Pelibatan masyarakat adat dalam konservasi hutan
      (ii) Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan, dengan fokus :
         - Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di desa rawan karhutla
         - Operasi peredaran hasil hutan illegal
         - Penataan ulang kontrak kerja sama pemanfaatan lahan
         - Operasi pengamanan kawasan hutan melibatkan masyarakat adat
      (iii) Penataan ruang berbasis konservasi, dengan fokus :
         - Pengimplementasian prinsip konservasi dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan
         - Integrasi penataan ruang darat dan laut
         - Integrasi penataan ruang dan permukiman serta perencanaarl pengembangan wilayah yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan pembangunan berketahanan iklim.
   (b) Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan, dengan prioritas:
      (i) Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan, dengan fokus :
         - Penyusunan roadmap provinsi berkelanjutan

- Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai prioritas
- Pemanfaatan hasil hutan kayu dengan tebang pilih

(ii) Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat setempat, dengan fokus :

- Kajian pengelolaan ekosistem darat berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat adat
- Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem hutan dan lahan

(iii) Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial, dengan fokus :

(c) Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua, dengan prioritas:

(i) Perlindungan dan rehabilitasi cagar alam, kawasan konservasi, dan kawasan lindung, dengan fokus :

- Pelestarian kawasan lindung/ konseniasi pada ekosistem darat
- Perlindungan kawasan ekowisata

(ii) Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian spesies yang dilindungi, dengan fokus :

- Inventarisasi dan kajian terhadap keanekaragaman hayati, termasuk spesies kunci, asli, dan endemik pada ekosistem darat

(iii) Penentuan prioritas konservasi, dengan fokus :

- Analisis dan pemetaan keanekaragaman hayati
- Identifikasi sasaran konseruasi
- Kajian kawasan lindung dalam penentuan kawasan lindung tambahan.

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 15 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 15 Target dan Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati											
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Statistik KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	BBKSDA	Hektar								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju.	Dinas Kehutanan	KPH								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Statistik KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman	Statistik Ditjen	Unit								Dinas Kehutanan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.	KSDAE KLHK									dan Lingkungan Hidup
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Dinas Kehutanan	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3.16 Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 berfokus pada upaya untuk memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, usaha untuk menciptakan akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun suatu kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

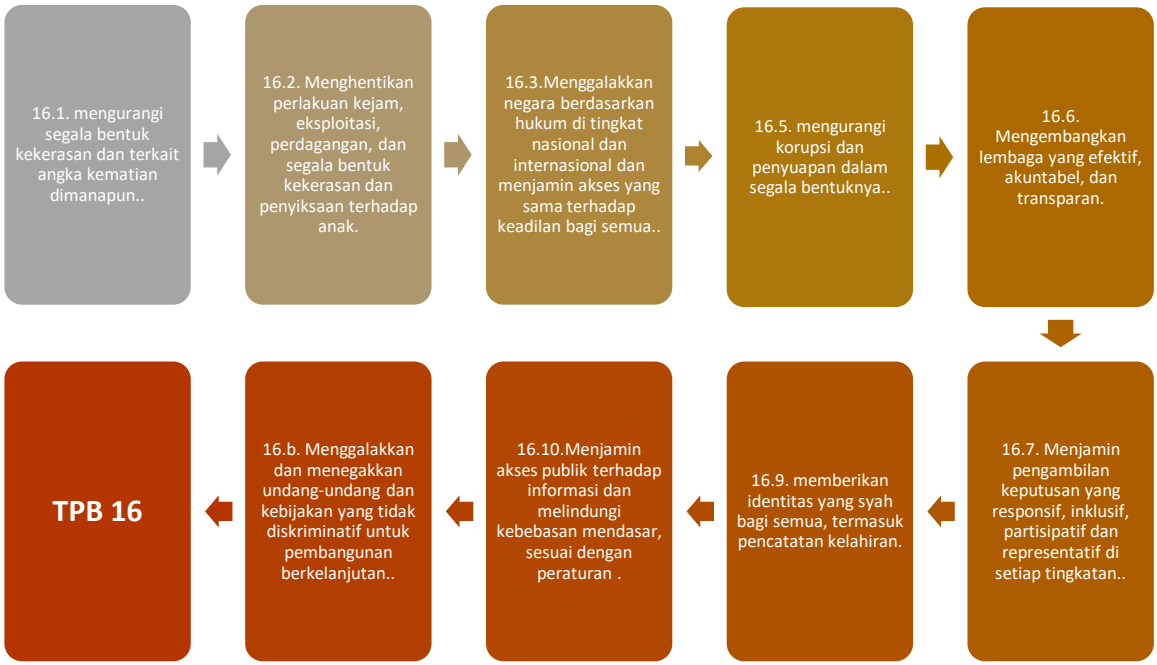

Gambar 3. 16 Target Pencapaian TPB 16

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-16 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 16 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:**

Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui sasaran:

- Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
- Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

II. **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 16 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :**

1. Arah kebijakan membangun kelembagaan birokrasi yang efektlf dan inklusif, melalui strategi:
   (a) Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus, dengan prioritas:
      (i) Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan, dengan fokus :
         - Pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan potensi daerah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, tidak terbatas dengan pelaksanaan diklat pendidikan maupun pemagangan ASN Papua di kementerian/lembaga
         - Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh Pemerintah Daerah
         - Peningkatan kapasitas dalam pencapaian akuntabilitas melalui pendampingan dan pemanfaatan SPBE
         - Pemetaan kebutuhan dan kompetensi SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik
         - Percepatan pemerataan SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik
   (b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good gouernance) , dengan prioritas:
      (i) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi, dengan fokus :
         - Peningkatan sinergitas antarunit kerja dan antarinstansi
         - Percepatan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
         - Perluasan implementasi sistem integritas
         - Perbaikan proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional
         - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah
         - Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
   (c) Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, dengan prioritas:
2. Arah kebijakan menyediakan akses keadilan yang merata, melalui strategi:
   (a) Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif, dengan prioritas :

(i) Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di Papua, dengan fokus :

- Pengembangan sistem mekanisme pengelolaan pendanaan pembangunan
- Penguatan mekanisme pengelolaan pendanaan pembangunan
- Pengembangan tata cara pemisahan dana otonomi khusus dalam struktur APBD
- Implementasi tata cara pemisahan dana otonomi khusus dari struktur APBD

(b) Meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas :

(i) Peningkatan kesadaran hukum, HAM, dan antikorupsi di masyarakat Papua, dengan fokus

- Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum, HAM, dan antikorupsi
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta mudah diakses masyarakat umum

3. Arah kebijakan meningkatkan partlsipasi dan kontrlbusl masyarakat dalam berdemokrasi, melalui strategi:

(a) Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan, dengan prioritas :

(i) Pelaksanaan forum dialog pembangunan Papua di tingkat nasional dan internasional, dengan fokus :

- Penyusunan dan linalisasi strategi komunikasi Papua
- Pembentukan forlm dialog antarsektor dan daerah
- Pelaksanaan forum dialog antarsektor dan daerah
- Pelaksanaan dan sinergitas forum dialog antarsektor dan daerah
- Efektivitas forum dialog antarsektor dan daerah
- Optimalisasi forum dialog antarsektor dan daerah
- Pelaksanaan surei kepuasan dan kepercayaan
- Peningkatan pelibatan pemangku kepentingan dalam forum dialog antarsektor yang efektif dan terorganisir
- Peningkatan kapasitas pemerintah dan publik dalam komunikasi publik yang selaras dengan agenda nasional

(b) Meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial, dengan prioritas :

(i) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, dengan fokus :

- Penguatan kelompok kerja indeks demokrasi Indonesia
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
- Penguatan OMS di ruang sipil dan optimalisasi peran bagi masyarakat
- Peningkatan partisipasi kelembagaan demokrasi lokal dalam pembangunan demokrasi

(ii) Peningkatan pemahaman politik, hak-hek, dan wawasan kebangsaan, dengan fokus :

- Penguatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih
- Pemantapan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan
- Peningkatan implementasi Pancasila di daerah
- Penguatan kesetaraan dan kebebasan

(iii) Penerapan gerakan revolusi mental untuk membangun karakter masyarakat Papua, dengan fokus :

- Peningkatan pelaksanaan gerakan revolusi mental

4. Arah kebijakan meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partislpasi masyarakat dalam pembangunan, melalui strategi:

(a) Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik, dengan prioritas :

(i) Peningkatan diseminasi informasi pembangunan Papua, dengan fokus :

- Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional melalui mitra strategis
- Peningkatan pengetahuan badan publik dan masyarakat untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi
- Peningkatan pengetahuan badan publik dan masyarakat untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi

(ii) Peningkatan kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik, dengan fokus :

- Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang dan komunikasi public
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang informasi dan komunikasi public
- Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di bidang informasi dan komunikasi public

- Peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang informasi dan komunikasi publik secara berkelanjutan
- Peningkatan kualitas jurnalis berdasarkan standar kompetensi wartawan
- Peningkatan kualitas produksi informasi jurnalis sesuai dengan standar kompetensi wartawan
- Peningkatan kredibilitas media lokal Papua
- Terciptanya masyarakat informasi Papua

(b) Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP), dengan prioritas :

(I) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan fokus :

- Peningkatan ketersediaan data administrasi kependudukan
- Penguatan akses sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan
- Penguatan kebijakan perlindungan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependuduk€rn agar tetap mendapat jaminan sosial

(II) Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung, dengan fokus :

- Pemetaan daerah yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan
- Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

(c) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu, dengan prioritas :

(i) Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) , dengan fokus:

- Penataan kelembagaan pelayanan publik
- Peningkatan kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Peningkatan pelayanan publik yang integrative
- Pengembangan penyederhanaan prosedur pelayanan public
- Peningkatan kualitas pelayanan public
- Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik
- Peningkatan sarana prasarana pelayanan public
- Pengembangan replikasi inovasi pelayanan public

- Peningkatan inovasi pelayanan publik oleh instansi Pemerintah Daerah

(ii) Penguatan Open Government Indonesla (OGI) di Papua, dengan fokus :

- Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan public
- Pengembangan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal
- Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi public
- Percepatan terwujudnya keterbukaan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang optimal
- Peningkatan sinergitas pengawasan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah

(iii) Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan public.

5. Arah kebijakan meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam mendorong pembangunan kesejahteraan soslal, melalui strategi:

(a) Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan prioritas :

(i) Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agarna, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis, dengan fokus :

- Pelaksanaan pemetaan status dan kondisi sosial masyarakat

(ii) Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua, dengan fokus :

- Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas

(b) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan prioritas :

(i) Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan, dengan fokus :

- Penyusunan kajian, inventarisasi, dan identifikasi wilayah rawan
- Pelatihan kepada personel yang akan melaksanakan tugas keamanan di Papua
- Pemberdayaan masyarakat dalam pertahanan keamanan
- Penguatan satuan organik yang proporsional dan adaptif

(c) Mendorong proses pembangunan perdamaian (*peace building*) yang berkelanjutan, dengan prioritas :

(i) Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk.

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 16 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 16 Target dan Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan											
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Statistik Kriminal	Kejadian								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	BPS	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Kementrian PPA (Simfoni PPA)	Anak								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Kementrian PPA (Simfoni PPA)	Anak	30	27	24	21	18	15	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Statistik Kriminal	Angka Korban								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Statistik Kriminal	% SPAK								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKP	%								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	BPKP	Opini								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	BPKP	%	65.00	65.75	66.28	66.82	67.35	67.89	68.42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	BPKP	%								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	BPKP	%								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPR	%	18.95	20.72	22.50	24.28	26.06	27.84	29.61	Sekretariat DPRP
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	11.16	11.67	12.18	12.68	13.19	13.70	14.21	Badan Kepegawaian Daerah
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	%	67.11	69.59	72.07	74.55	77.03	79.51	81.99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70	72.77	75.54	78.31	81.08	83.85	86.62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70.00	72.15	74.30	76.45	78.60	80.75	82.90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	60.00	65.87	71.06	76.24	81.43	86.61	91.80	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk	BPS	%	71.56	73.29	75.02	76.75	78.48	80.21	81.94	Dinas Sosial, Kependudukan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.										dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	71.56	73.29	75.02	76.75	78.48	80.21	81.94	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	KOMNAS Perempuan	Kasus								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Komisi Informasi Pusat (KIP) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik								BAPPERINDA
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Sengketa								Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	KOMNAS HAM - Data Aduan	Kebijakan								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.17 Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Dalam Tujuan 17, terdapat 6 target dan 11 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua. TTPB 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan proses revitalisasi kemitraan global dalam mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan untuk mewujudkan tujuan 17 ini, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan strategi dan mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta dalam rangka untuk memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dan membangun kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

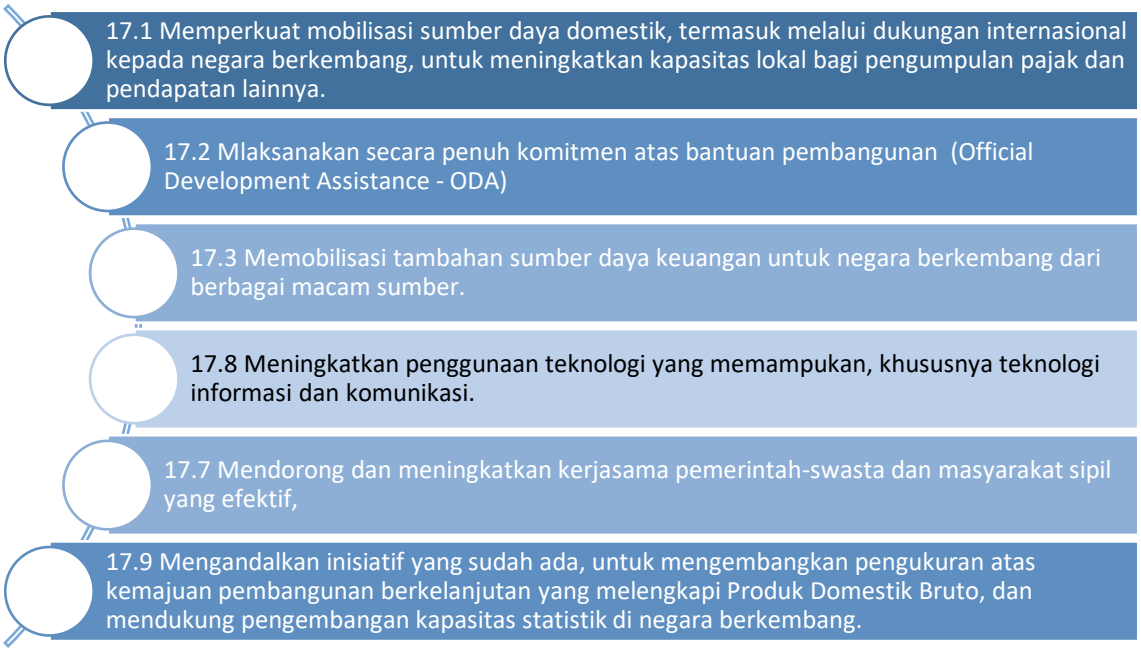

Gambar 3. 17 Target Pencapaian TPB 17

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-17 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041.

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 17 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 2 : Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, melalui sasaran :

- Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui sasaran :

- Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 17 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan pembaaguaan Infrastruktur teknologl Informasl dan komunikasi (TIK) yang berkelanjutan, melalui strategi :
   (a) Mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua, dengan prioritas:
      (i) Penciptaan permintaan (demandl atas layanan telekomunikasi
         - Peningkatan kerja sama penyelenggara telekomunikasi dengan BUMKam di wilayah adat untuk peningkatan permintaan (demanQ telekomunikasi serta penJrusunan regulasi pendukung untuk inisiatif penciptaan permintaan (demand)

      (ii) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung, dengan prioritas:
         - Perluasan jaringan backbone menjangkau ibu kota kabupaten/kota
         - Perluasan jaringan middle mile menjangkau ibu kota distrik
         - Perluasan jaringan /ast mile menjangkau titik layanan akhir
         - Pengoptimalan kualitas jaringan intemet melalui peningkatan kapasitas bandutidth untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan public
         - Penyediaan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, fasyankes, kantor pemerintahan)
         - Pengoperasian, pemeliharadfl, dan perawatan infrastruktur TIK
2. Mendorong terwujudnya penataan daerah, dengan strategi :
   (a) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan prioritas :
      (i) Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah, dengan fokus :

- Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah

(ii) Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien, dengan fokus :

- Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan
- Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah

(b) Menyusun desain besar penataan daerah, dengan prioritas :

(i) Penyusunan payung hukum penataan daerah, dengan fokus :

- Perumusan kerangka pendanaan
- Perumusan kerangka pelayanan dan investasi

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 17 berdasarkan kewenangan Provinsi Papua tahun 2024 – 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di Papua hingga tahun 2023.

Tabel 3. 17 Target dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan											
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%								BAPPERINDA
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPS	%								BAPPERINDA
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPS	%								BAPPERINDA
Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.											
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah: Negara Donor	%								BAPPERINDA
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); Bank	%								BAPPERINDA

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Indonesia; BPS									
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.											
17.8.1*	Persentase pengguna internet	BPS	%	50.00	52.11	56.16	60.22	64.28	68.33	72.39	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BKAD	Dokumen								BAPPERINDA
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BKAD	Proyek								BAPPERINDA
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	BKAD	Rp/Kapita								BAPPERINDA
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Kejadian								Dinas Komunikasi dan Informatika
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	Dukcapil	Sistem								Dinas Komunikasi dan Informatika

1 MENGAKHIRI KEMISKINAN
2 MENGAKHIRI KELAPARAN
3 KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS
5 KESETARAAN JENDER
6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI
10 MENGURANGI KETIMPANGAN
11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT
15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT
16 PERDAMAIAN
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB baik di tingkat nasional maupun daerah dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPD Provinsi Papua 2023-2026. Rincian target dan indikator pada 4 (empat) Pilar Pembangunan Berkelanjutan yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs 2022-2026, (lihat gambar 4.1) Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs 2022-2026 yang dibiayai yang bersumber dari APBD dan non-pemerintah.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 5 PERPRES Nomor 111 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, Gubernur Wkil Pemerintah Provinsi (GWPP) menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan (Ormas), filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya GWPP melakukan fasilitasi, supervise dan sinkronisasi penyusunan RAD TPB dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

4.1.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs oleh Pemerintah Daerah

Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi dalam bentuk pelaporan dan umpan balik pelaksanaan RAD TPB/SDGs di tingkat Provinsi mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam PERPRES 111 Tahun 2022. Diagram berikut ini menggambarkan alur Pelaporan dan umpan balik untuk lingkup Pemerintah Provinsi.

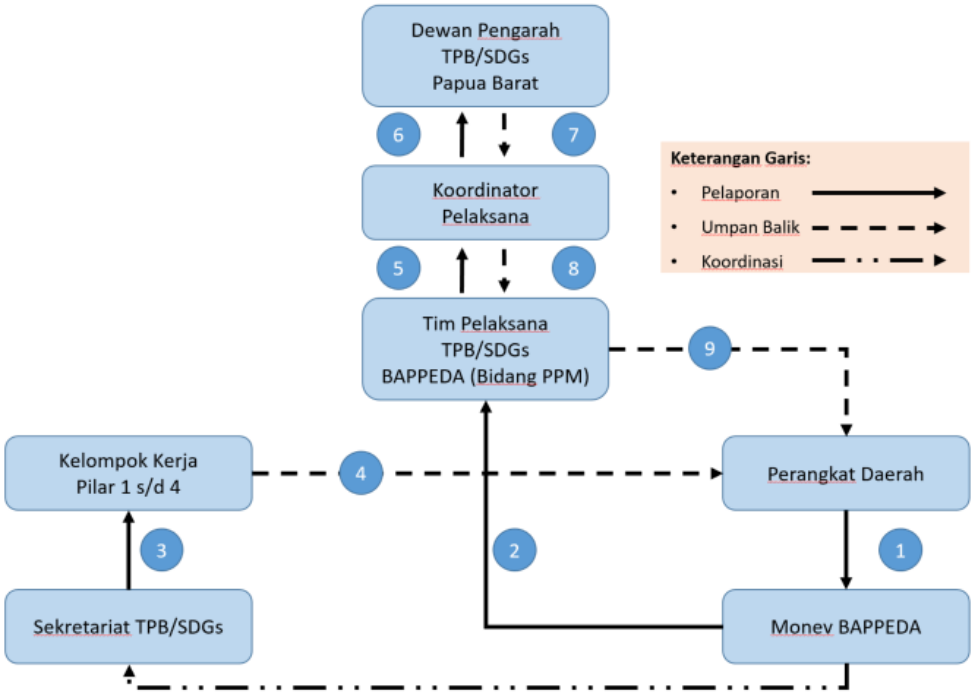

Gambar 4. 1 Alur Pelaporan dan Umpan Balik

Sumber: Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs Edisi II (PPN/BAPPENAS)

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah tahapan alur pelaporan dan umpan balik seperti terlihat pada gambar 4.1 sebagai berikut.

Langkah ke-1. Perangkat daerah menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format sesuai pedoman Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan oleh PPN/BAPPENAS kepada kepala seksi Monev BAPPEDA Provinsi Papua

Langkah ke-2. Seksi Monev melaporkan laporan kemajuan dari perangkat daerah kepada Bidang PPM BAPPEDA Papua dan berkoordinasi dengan Sekretariat TPB/SDGs terkait laporan dari perangkat daerah yang telah diterima

Langkah ke-3. Sekretariat TPB/SDGs memberikan laporan perangkat daerah kepada kelompok kerja Pilar Pembangunan (1 s/d 4) untuk kemudian dikaji dan mengvalidasi laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

Langkah ke-4. Kelompok Kerja memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada perangkat daerah jika terdapat kekurang lengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data

Langkah ke-5. Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan selanjutnya menyampaikannya kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Kepala Bappeda Provinsi Papua

Langkah ke-6. Koordinator Pelaksana melaporkan capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Papua kepada Dewan Pengarah TPB/SDGs Provinsi Papua

Langkah ke-7. Umpan balik dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya.

Langkah ke-8. Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Pokja terkait pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.

Langkah ke-9. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RKA perangkat Daerah di tahun berikutnya.

4.1.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs oleh Pemerintah Pusat

Alur pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs oleh Pemerintah Pusat mengikuti langkah-langkah seperti terlihat pada gambar berikut ini.

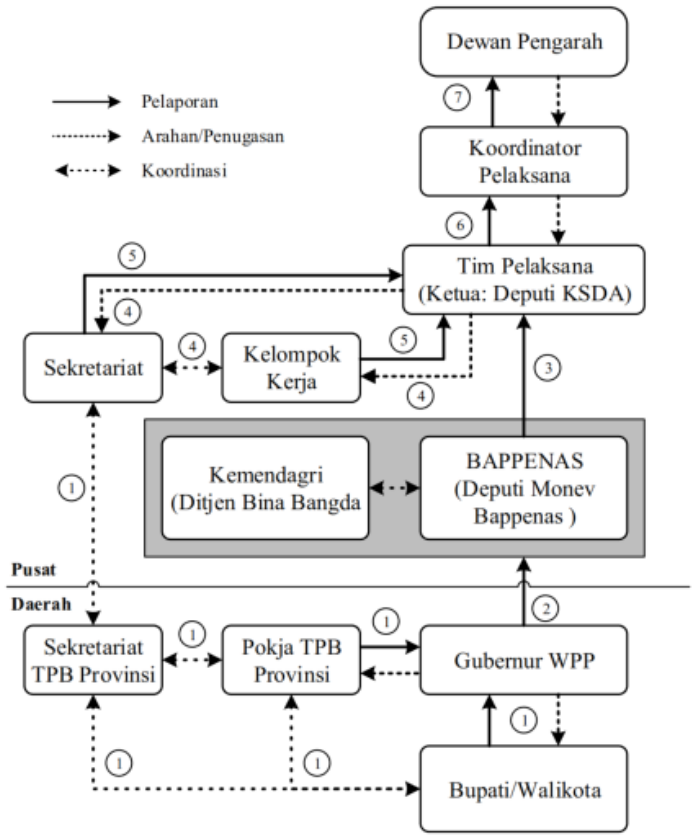

Gambar 4. 2 Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs

Sumber: Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs Edisi II (PPN/BAPPENAS)

Penjelasan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi dalam gambar 4.2 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai berikut.

Langkah ke-1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan non-pemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs.

Langkah ke-2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Langkah ke-3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas.

Langkah ke-4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs.

Langkah ke-5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Langkah ke-6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional.

Langkah ke-7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

4.1.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Non-Pemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja pihak non-pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme "penilaian diri sukarela" (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk organisasi non-pemerintah dapat dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak non-pemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah ke-1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool,* lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masingmasing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi non-pemerintah dengan format yang ditetapkan.

Langkah ke-2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana.

Langkah ke-3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana.

Langkah ke-4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

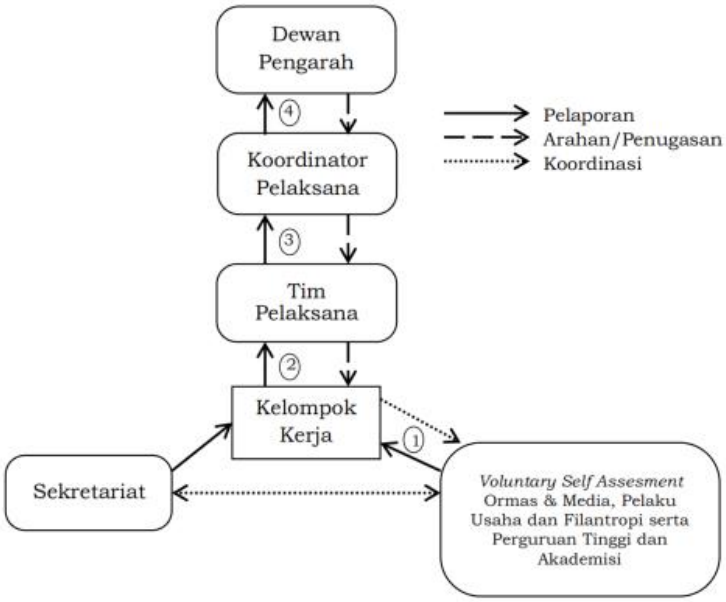

Gambar …… Pemantauan Organisasi Non-Pemeritah

Sumber: Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs Edisi II (PPN/BAPPENAS)

4.1.4 Alat Pemantauan Dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs Papua akan menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs sesuai pedoman teknis Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Edisi II yang dikeluarkan oleh Kementrian PPN/BAPPENAS Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut.

a. Form 1. Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs

Nama Tujuan SDGs (1)							
Nama Target SDGs (2)							
Kode Indikator (3)	**Nama Indikator SDGs (4)**	**Sumber data (5)**	**Satuan (6)**	**Angka Dasar (*Baseline*) (7)**	**Target SDGs Tahun Berjalan (8)**	**Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)**	**Status (10)**

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

- Nomor (1): diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global
- Nomor (2): diisi dengan nama target TPB/SDGs global
- Nomor (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs global
- Nomor (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
- Nomor (5): diisi dengan nama survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan data realisasi indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional;

- Nomor (6): diisi dengan satuan dari indikator TPB/SDGs seperti persen, jumlah absolut, indeks, dll.
- Nomor (7): diisi dengan penetapan angka capaian pada tahun dasar untuk setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Nomor (8): diisi dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan yang diambil dari tabel Bab III tiap indikator SDGs pada Dokumen Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2020-2024;
- Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Nomor (10): diisi dengan simbol yang menunjukan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Simbol	Keterangan
● : Tercapai *(achieved)*	Target tahun berjalan dapat tercapai.
▶ : Akan tercapai/membaik *(positive change)*	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼ : Perlu perhatian khusus *(negative change)*	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

b. Form 2b. Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah Daerah

Nama Tujuan SDGs														
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (1)				**Satuan (2)**	**Target tahun (n) (3)**	**Realiasasi Target tahun (n) (4)**		**Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)**	**Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)**		**Sumber Pendana -an (7)**	**Lokasi Aktual Pelaksanan Kegiatan (8)**	**Instansi Pelaksa-na (9)**
						Sem I	**Sem II**		**Sem I**	**Sem II**			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan nama indikator TPB/SDGs **(10)**:													
Kode dan Nama Program **(11)**:													
Kode Kegiatan **(12)**	Nama Kegiatan **(13)**	Kode Sub Kegiatan **(14)**	Nama Sub Kegiatan **(15)**										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan dengan acuan RAD TPB/SGDs;

- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (3): diisi dengan target capaian untuk setiap sub kegiatan. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi sub kegiatan pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat sub kegiatan. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap sub kegiatan;
- Nomor (7): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Nomor (8): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi pada sub kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat;
- Nomor (9): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut;
- Nomor (10): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (11): diisi dengan kode dan nama program yang terdapat dalam Renja OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (12): diisi dengan kode kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (13): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (14): diisi dengan kode sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019; dan
- Nomor (15): diisi dengan nama sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019.

c. ***Form 3.*** ***Formulir Self Assessments rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program*** nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi dan akademia

Nama Tujuan SDGs												
Program/Kegiatan/ *Output* Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target tahun (n) (3)	Realiasasi Target tahun (n) (4)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (6)		Sumber Pendana-an (7)	Lokasi Aktual Pelaksanan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan nama indikator TPB/SDGs **(10)**:											
Nama Program 1 **(11)**:											
Nama Kegiatan 1 **(12)**	1.1. *Output* Kegiatan **(13)**										
	1.2. *Output* Kegiatan										
Nama Kegiatan 2	2.1. *Output* Kegiatan										
	2.2. *Output* Kegiatan										

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, *output* kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non-pemerintah;
- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (3): diisi dengan target capaian untuk setiap *output* kegiatan pada tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi *output* kegiatan pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap *output* kegiatan. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non-pemerintah;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap *output* kegiatan;
- Nomor (7): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan tersebut pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (8): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan *output* kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Nomor (9): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.
- Nomor (10): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (11): diisi dengan nama program yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non-pemerintah;

- Nomor (12): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non-pemerintah; dan
- • Nomor (13): diisi dengan nama *output* kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

d. Form 4. Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Nama Perusahaan

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi target	
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2)	Kode Indikator SDGs (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (5)	Kegiatan/ proyek/ Progam (6)	Indika-tor Capaian (7)	Satuan (8)	Waktu (tahun) (9)	Target (10)	Capaian (11)

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Nama Perusahaan: diisi dengan nama perusahaan yang menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi TPB/SDGs
- Nomor (1): diisi dengan kode yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017;
- Nomor (2): diisi dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL;
- Nomor (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs;
- Nomor (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional;
- Nomor (5): diisi dengan nomor urut kegiatan/proyek/program;
- Nomor (6): diisi dengan nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- Nomor (7): diisi dengan nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- Nomor (8): diisi dengan satuan untuk mengukur indikator capaian (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (9): diisi dengan jangka waktu (durasi) pelaksanaan usaha sampai mencapai target yang ditetapkan dalam satuan tahun;
- Nomor (10): diisi dengan angka target yang akan dicapai dengan memasukan angka target dari dokumen usaha; dan

- Nomor (11): diisi dengan angka capaian target dengan memasukan angka capaian dari dokumen termutakhir.

e. Form 5. Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana TIndak Lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya ...			

Cara Pengisian Laporan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- Nomor (1): diisi dengan nomor Tujuan dan nama serta target TPB/SDGs;
- Nomor (2): diisi dengan kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah:
    a. Sumber Daya Manusia
    b. Kelembagaan
    c. Keuangan
    d. Regulasi
    e. Operasional
    f. Politik
    g. Lainnya (...) (mohon diisi sesuai identifikasi masalah yang disampaikan);
- Nomor (3): diisi dengan deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing tujuan dan target SDGs sesuai dengan kategori masalah;
- Nomor (4): diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah baik untuk pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga atau Lembaga Non-Pemerintah; dan

- Nomor (5): diisi dengan nama K/L dan OPD atau Lembaga Non-Pemerintah yang mempunyai masalah tersebut.

f. Form 6. Pelaporan Pembelajaran TPB/SDGs

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs dimaksudkan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan non-pemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain.

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.

4.1.5 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi antara lain:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2020 – 2024;
2. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Papua 2024 - 2030;
3. Data program dan kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs;
4. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
5. Dokumen pencapaian kinerja non-pemerintah.

4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi berdasarkan amanat PERPRES Nomor 59 Tahun 2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Papua Tahun 2024 – 2030 setidaknya harus dapat disetujui dan disahkan oleh Gubernur Papua melalui Peraturan Gubernur, yaitu bulan Oktober 2022.
2. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Papua Tahun 2024 – 2030 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu bulan Januari 2023.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAD TPB/SDGs Papua akan dilakukan mulai bulan Januari 2025 bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan Agenda Pembangun Daerah. Laporan pemantauan dari Gubernur akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri dalam kurun waktu 15 hari setelah proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi dilakukan.

4.3 Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi Form 1 sampai dengan Form 6.

Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs
   (Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1)
3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
   a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
   b. Tantangan dan pembelajaran
   c. Kebijakan dan strategi
   d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup

4.3 Publikasi Hasil Pemantauan

Publikasi capaian TPB/SDGs Papua akan mengacu kepada Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan

dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB/SDGs Papua

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan "*no one left behind*" (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Papua. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

1. **Perluasan Penggunaan Teknologi**. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.
2. **Kemitraan Multipihak**. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Papua. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah

(TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. **Penguatan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs. Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non-pemerintah. Untuk aspek kelembagaan, perlu ditetapkan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs di tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Papua, yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.
4. **Peningkatan Kapasitas.** Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi non-pemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.
5. **Penghargaan Kepada Para Pihak.** Penghargaan diberikan kepada OPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan

tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi.

6. **Strategi Komunikasi.** Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional. Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidaklangsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan

TERIMA KASIH

BAPPEDA PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN 1 - MATRIKS 1. TARGET CAPAIAN PROVINSI

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun											
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	10.00	8.93	7.38	5.83	4.28	2.73	1.18	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi	BPS	%	21.04	20.68	20.31	19.95	19.59	19.22	18.86	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Penduduk Miskin	BPS	ribu jiwa	16.58	16.46	16.35	16.23	16.12	16.00	15.89	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase Penduduk Miskin	BPS	%	21.04	20.68	20.31	19.95	19.59	19.22	18.86	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Garis Kemiskinan	BPS	Rp/Kapita/Bulan	780,353.03	809,917.88	839,482.72	869,047.57	898,612.42	928,177.27	957,742.12	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	BPS	%	4.09	3.98	3.86	3.75	3.63	3.52	3.40	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	BPS	%	1.20	1.15	1.11	1.06	1.01	0.97	0.92	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										BAPPERINDA
	Imunisasi Dasar; Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.	BPS	%	57.92	61.23	64.53	67.84	71.14	74.45	77.75	Dinas Kesehatan
	Gizi; Prevalensi of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi.	BPS	%	5.00	4.69	4.34	3.98	3.63	3.27	2.92	Dinas Kesehatan
	Morbilitas; Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	BPS	%	10.00	8.58	7.39	6.20	5.01	3.82	2.63	Dinas Kesehatan
	Lama Sekolah; Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun	BPS	%	9.52	9.64	9.75	9.87	9.99	10.11	10.23	Dinas Pendidikan
	Partisipasi Sekolah; Persentase anak usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak	BPS	%	90.78	91.10	91.43	91.76	92.08	92.41	92.74	Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak/belum bersekolah										
	Listrik; Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	BPS	%	87.54	88.93	90.31	91.70	93.09	94.47	95.86	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
	Air Minum Layak; Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	BPS	%	59.52	66.49	73.45	80.42	87.39	94.35	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sanitasi Layak; Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	BPS	%	27.85	31.44	35.03	38.62	42.21	45.80	49.40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Lantai; Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m	BPS	%	1.07	0.96	0.89	0.84	0.80	0.76	0.73	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Bahan Bakar Memasak; Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi	BPS	%	2.64	2.96	3.28	3.60	3.92	4.24	4.56	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg										
	Aset; Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil	BPS	%	27.45	27.37	27.35	27.31	27.28	27.26	27.24	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Akte Kelahiran; Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	BPS	%	26.51	24.28	22.05	19.82	17.58	15.35	13.12	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Akses Internet; Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet	BPS	%	61.30	63.32	65.12	66.79	68.36	69.84	71.27	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pekerjaan; Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu	BPS	%	67.73	66.70	68.17	67.13	68.60	67.57	69.04	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BPS	%	36.00	38.85	41.70	44.55	47.40	50.26	53.11	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS	%	93.71	93.45	93.75	94.15	94.50	94.84	94.39	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS	%	22.38	24.52	26.67	28.81	30.96	33.10	35.25	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
	Indeks pelayanan Dasar (IPD)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses pada layanan Air Minum (IPAM)	BPS	%	83.44	86.19	88.94	91.70	94.45	97.20	99.95	100.00
	Akses pasa layanan sanitasi Dasar (IPSD)	BPS	%	41.38	42.00	42.63	43.25	43.88	44.50	45.13	45.75
	Akses pada mobilitas dasar rural (IPDM Rural)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
											Kawasan Permukiman
	Akses pada mobilitas dasar urban (IPDM Urban)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses Pada Mobilitas Dasar (IPDM)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar (IFPD)	BPS	%	41.86	43.25	44.60	45.99	47.35	48.74	50.09	51.48
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.										
	Hak Milik	BPS	%	69.44	75.52	81.60	87.68	93.76	99.84	100.00	100.00
	Sewa Kontrak	BPS	%	14.91	14.82	14.74	14.65	14.56	14.48	14.39	14.31
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	BPBD	Rupiah								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi	BPBD	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	nasional pengurangan risiko bencana										
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan											
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Badan Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan	%	9.43	8.06	6.79	5.59	4.36	3.19	2.01	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Badan Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	5.78	4.81	3.84	2.88	1.91	0.95	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula											
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SSGI Tahun 2021	%	13.74	7.85	4.80	3.22	2.35	1.86	1.56	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SSGI Tahun 2021	%	11.08	10.68	10.28	9.88	9.48	9.08	8.68	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Evaluasi RPJMD	%	90.00	90.40	90.80	91.20	91.60	92.00	92.40	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Riskesdas	%	13.90	13.32	12.73	12.14	11.55	10.96	10.38	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Evaluasi RPJMD									Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	BPS	Rupiah/ Tenaga Kerja								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memper- kuat kapasitas adaptasi ter- hadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Tanaman Pangan	Hektar								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Dinas Tanaman Pangan	Volume								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Dinas Tanaman Pangan	%								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 2.5 Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Dinas Tanaman Pangan									Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia											
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Profil Kesehatan Indonesia	Angka	13.00	12.00	11.50	11.25	11.13	11.06	11.03	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
	Tenaga Kesehatan Terlatih	BPS	%	79.32	80.05	80.48	80.66	81.34	81.74	82.08	Dinas Kesehatan
	Fasilitas Kesehatan	BPS	%	66.69	66.82	66.95	67.08	67.21	67.34	67.47	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.										
	Angka Kematian Balita	Profil Kesehatan Indonesia	Balita								Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	Profil Kesehatan Indonesia	Bayi								Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Profil Kesehatan Indonesia	Neonatal	23.01	22.68	22.35	22.02	21.69	21.36	21.03	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Profil Kesehatan Indonesia	Orang	104,925	98,856	92,786	86,717	80,647	74,578	68,509	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Profil Kesehatan Indonesia	Kab/Kota								Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Profil Kesehatan Indonesia	%	6.47	5.79	5.32	5.15	5.07	5.04	5.03	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
	Filariasis	Profil Kesehatan Indonesia	Kasus	11.44	11.11	10.83	10.55	10.27	9.98	9.70	Dinas Kesehatan
	Kusta	Profil Kesehatan Indonesia	Kasus	896	811	726	641	556	471	386	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Profil Kesehatan Indonesia	Jumlah Kab/Kota								Dinas Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Profil Kesehatan Indonesia	Jumlah Kab/Kota	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	BPS	%	17.48	17.19	16.89	16.60	16.30	16.01	15.71	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	BPS	%	8.05	7.70	7.62	7.60	7.58	7.58	7.58	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	BPS	%								Dinas Kesehatan
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.											
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Badan Narkotika Nasional	Kasus								Dinas Kesehatan
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	BPS	%	97.81	98.40	99.00	99.59	99.98	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	BPS	%								Dinas Kesehatan
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BPS	%	10.97	7.10	5.27	4.32	3.92	3.75	3.69	Dinas Kesehatan
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
	Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita										
	Keluarga berencana: persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang pernah kawin atau hidup bersama kebutuhan keluarga berencana terpenuhi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Indikator SDG 3.7.1);	BPS	%	97.81	98.40	99.00	99.59	99.98	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
	Perawatan kehamilan: persentase perempuan usia 15-49 tahun yang memiliki anak lahir hidup dalam periode waktu tertentu dan memperoleh pelayanan antenatal 4 kali atau lebih;	Riskesdas 2018 dan Dinkes 2019-2022	%	29.29	31.01	32.73	34.44	36.16	37.88	39.60	Dinas Kesehatan
	Imunisasi anak: persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheria-tetanus-pertussis;	BPS	%	48.11	50.87	55.60	62.58	66.79	70.54	73.91	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perawatan balita: Persentase anak dibawah usia lima tahun yang diduga mengalami pneumonia (batuk dan sulit bernapas bukan karena permasalah pada hidung dan dada) dalam kurun waktu dua minggu sebelum survei dan dibawa ke tenaga atau fasilitas kesehatan.	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Penyakit menular.										
	Tuberkulosis: Persentase insiden TB yang terdeteksi dan berhasil diobati;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	HIV/AIDS: Persentase penduduk yang hidup dengan HIV dan saat ini mendapatkan terapi antiretroviral;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Malaria: persentase populasi di wilayah endemis malaria yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Air dan sanitasi: persentase Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi improved.	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Penyakit tidak menular.	BPS	%								
	Hipertensi: Age-standardized prevalensi tekanan darah tidak meningkat (tekanan darah sistolik <140 mmHg atau tekanan darah diastolik <90 mmHg) pada penduduk usia ≥18 tahun;	BPS	%								Dinas Kesehatan
	Diabetes: Age-standardized rata-rata gula darah puasa	BPS	%								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	(mmol/L) pada penduduk usia ≥25 tahun ;										
	Merokok: Age-standardized prevalensi penduduk usia ≥15 tahun yang tidak merokok dalam kurun waktu 30 hari sebelum survei (indikator SDG 3.a.1).	BPS	%	17.48	17.19	16.89	16.60	16.30	16.01	15.71	Dinas Kesehatan
	Kapasitas dan akses pelayanan.										
	Akses ke Rumah sakit: Tempat tidur rumah sakit per kapita, relatif terhadap ambang batas maksimum 18 per 10.000 penduduk;	BPS	%								Rumah Sakit Umum Daerah
	Kepadatan tenaga kesehatan: tenaga kesehatan per kapita (dokter, psikiater, dan ahli bedah), relatif terhadap ambang batas maksimum untuk setiap kader (bagian dari indikator 3.c.1);	BPS	%								Rumah Sakit Umum Daerah
	Keamanan kesehatan: indeks kapasitas utama regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations/IHR) yang diperoleh dari 13 indikator kapasitas yang dicapai (Indikator 3.d.1).	BPS	%								Rumah Sakit Umum Daerah
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	BPS	%	1.95	1.73	1.50	1.27	1.04	0.82	0.59	Rumah Sakit Umum Daerah
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total	BPS	%								Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.										
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPS	%	90.00	90.21	90.72	91.23	91.75	92.26	92.78	Dinas Kesehatan
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	15.00	12.25	9.50	6.75	4.00	1.25	0.00	Dinas Kesehatan
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.										
	DPT	Profil Kesehatan Indonesia	%	71.82	72.15	72.48	72.81	73.14	73.47	73.80	Dinas Kesehatan
	CAMPAK	Profil Kesehatan Indonesia	%	94.38	94.04	94.09	94.14	94.18	94.21	94.24	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Profil Kesehatan Indonesia	%								Dinas Kesehatan
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
	Dokter	BPS	Orang	317	380	444	508	572	635	699	Dinas Kesehatan
	Perawat	BPS	Orang	3,929	4,595	5,262	5,929	6,596	7,262	7,929	Dinas Kesehatan
	Bidan	BPS	Orang	1,527	1,801	2,075	2,348	2,622	2,895	3,169	Dinas Kesehatan
	Tenaga Farmasi	BPS	Orang	460	517	575	633	691	749	807	Dinas Kesehatan
	Ahli Gizi	BPS	Orang	307	362	418	473	529	584	640	Dinas Kesehatan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua											
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif											
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Kementrian Pendidikan (Angka Kompetensi Minimum/AKM)									
	a. Kelas 5										Dinas Pendidikan
	b. Kelas 8										Dinas Pendidikan
	c. Usia 15 Tahun										Dinas Pendidikan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	SD/Sederajatnya	BPS	%	88.35	89.96	91.49	92.95	94.36	95.74	97.08	Dinas Pendidikan
	SMP/Sederajatnya	BPS	%	47.00	49.18	50.76	52.29	53.78	55.24	56.67	Dinas Pendidikan
	SMA/Sederajatnya	BPS	%	37.25	39.01	40.26	42.26	43.79	45.26	46.27	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	3 - 6 Tahun	BPS	%	25.99	24.47	22.94	21.42	19.89	18.37	16.85	Dinas Pendidikan
	7 - 12 Tahun	BPS	%	39.91	38.44	36.97	35.50	34.04	32.57	31.10	Dinas Pendidikan
	13 - 15 Tahun	BPS	%	14.18	13.49	13.43	12.74	12.68	11.98	11.93	Dinas Pendidikan
	16 - 18 Tahun	BPS	%	11.21	9.52	7.77	5.98	4.14	2.27	0.36	Dinas Pendidikan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Riskesdas	%								Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
	Angka Partisipasi PAUD	BPS	%	82.30	83.17	84.03	84.90	85.77	86.64	87.51	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi SD/sederajatnya	BPS	%	83.43	82.77	86.49	85.83	89.54	88.88	92.60	Dinas Pendidikan
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
	Umur 16 - 18 Tahun	BPS	%	77.90	78.18	78.46	78.74	79.02	79.29	79.57	Dinas Pendidikan
	Umur 19 - 24 Tahun	BPS	%								Dinas Pendidikan
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	RPJMD	%	24.92	25.67	26.43	27.19	27.95	28.71	29.47	Dinas Pendidikan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	%	10.31	11.60	12.90	14.19	15.48	16.77	18.06	Dinas Pendidikan
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.										
	Rasio APM SD antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	83.10	85.30	87.50	89.71	91.91	94.11	96.32	Dinas Pendidikan
	Rasio APK SMP/sederajatnya antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	93.83	94.85	95.87	96.897	97.92	98.94	99.97	Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rasio APK SMA/sederajatnya antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	98.33	99.32	100.31	101.31	102.30	103.29	104.28	Dinas Pendidikan
	Rasio APK PT/sederajatnya antara Perempuan dan Laki-Laki	BPS	%	24.92	25.67	26.43	27.19	27.95	28.71	29.47	Dinas Pendidikan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	78.40	82.53	86.66	90.78	94.91	99.04	100.00	Dinas Pendidikan
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Listrik	Statistik Pendidikan	%	81.33	84.51	87.69	90.87	94.05	97.23	100.41	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	57.54	64.80	72.06	79.32	86.58	93.84	101.10	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Komputer	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Air Minum Layak	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar	Statistik Pendidikan	%	18.05	20.41	22.63	24.68	26.55	28.22	29.66	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Faslitas Cuci Tangan	Statistik Pendidikan	%	39.63	42.47	45.31	48.15	50.99	53.83	56.67	Dinas Pendidikan
	Proporsi SD/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	57.54	64.80	72.06	79.32	86.58	93.84	100.00	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Listrik	Statistik Pendidikan	%	57.54	64.80	72.06	79.32	86.58	93.84	100.00	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	69.21	71.30	73.14	74.83	76.41	77.92	79.37	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Komputer	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Air Minum Layak	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar	Statistik Pendidikan	%	25.93	34.28	42.63	50.98	59.33	67.68	76.03	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Faslitas Cuci Tangan	Statistik Pendidikan	%	41.52	45.64	49.76	53.88	58.00	62.12	66.24	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMP/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	69.54	71.78	73.69	75.42	77.03	78.55	80.00	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Listrik	Statistik Pendidikan	%	89.35	89.81	90.27	90.73	91.19	91.65	92.11	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	80.64	80.96	81.28	81.60	81.92	82.24	82.56	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Komputer	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Air Minum Layak	Statistik Pendidikan	%								Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar	Statistik Pendidikan	%	26.73	32.35	37.97	43.59	49.21	54.83	60.45	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Faslitas Cuci Tangan	Statistik Pendidikan	%	44.20	47.70	51.20	54.70	58.20	61.70	65.20	Dinas Pendidikan
	Proporsi SMA/sederajatnya dengan akses Internet	Statistik Pendidikan	%	80.64	80.96	81.28	81.60	81.92	82.24	82.56	Dinas Pendidikan
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Pendidikan									Dinas Pendidikan
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.										
	PAUD	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Neraca Pendidikan Daerah)	%	24.41	27.14	29.87	32.60	35.33	38.06	40.79	Dinas Pendidikan
	SD		%	69.21	72.97	76.74	80.508	84.275	88.04	91.81	Dinas Pendidikan
	SMP		%	74.23	75.54	76.85	78.162	79.473	80.78	82.10	Dinas Pendidikan
	SMA		%	76.152	76.496	76.84	77.18	77.53	77.872	78.216	Dinas Pendidikan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	SMK		%	72.38	72.86	73.34	73.818	74.299	74.78	75.26	Dinas Pendidikan
	SLB		%	36.00	39.07	42.15	45.218	48.291	51.36	54.44	Dinas Pendidikan
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan											
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	DRPD	%	15.67	16.41	17.14	17.87	18.61	19.34	20.07	Sekretariat DPRP
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD	%	33.29	35.26	37.23	39.20	41.17	43.14	45.11	Badan Kepegawaian Daerah
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	BPS	%	67.68	69.47	71.26	73.05	74.84	76.63	78.43	Dinas Kesehatan
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	BPS	%	83.58	86.45	89.32	92.19	95.06	97.93	100.00	Dinas Kesehatan
Target 5.a. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.											
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.										
	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	Dinas Pertaninan	%								Dinas Tanaman Pangan,

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
											Holtikultura dan Pangan
	(Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Dinas Pertaninan	%								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	67.68	69.47	71.26	73.05	74.84	76.63	78.43	Dinas Komunikasi dan Informatika
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan											
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	BPS	%	83.58	86.45	89.32	92.19	95.06	97.93	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
	Akses terhadap fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	41.49	42.29	43.09	43.88	44.68	45.48	46.28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses terhadap sanitasi layak	BPS	%	43.41	44.98	46.56	48.13	49.70	51.27	52.84	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	BPS	%	26.18	27.36	28.54	29.72	30.90	32.08	33.26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T)	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	BPS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	Dinas PUPR	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.											
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	BPS	%	8.33	9.24	10.14	11.05	11.96	12.87	13.77	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya.	Dinas PUPR	%	17.14	17.28	17.42	17.56	17.70	17.84	17.98	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Dinas PUPR	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.5. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Statistik	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Statistik PLN	%	91.38	93.29	95.04	96.68	98.24	99.74	100.00	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Statistik PLN	GWH	1397.16	1487.87	1578.58	1669.29	1760.00	1850.71	1941.42	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	BPS	Rumah Tangga								Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	29.24	31.49	33.74	35.98	38.23	40.47	42.72	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Penanaman Modal dan PTSP
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	%	29.45	29.68	29.91	30.15	30.38	30.62	30.85	BAPPERINDA
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Baseline : BPS Proyeksi : RPD	Ribu Rupiah	595,388.00	619,127.50	642,867.00	666,606.50	690,346.00	714,085.50	737,825.00	BAPPERINDA
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	8.00	BAPPERINDA
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%	84.33	85.65	86.97	88.29	89.61	90.92	92.24	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS	Rupiah/Jam	28,003	28,165	28,327	28,488	28,650	28,812	28,974	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	36.37	29.71	23.04	16.38	9.71	3.05	2.62	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	4.74	3.22	1.99	0.67	0.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	19.22	18.37	17.52	16.67	15.82	14.97	14.12	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.7 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	3.71	2.83	1.78	0.66	0.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS	Orang	642,437	661,295	680,153	699,011	717,869	736,727	755,585	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.										

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah kantor bank	OJK	%								BAPPERINDA
	Jumlah ATM	OJK	%								BAPPERINDA
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi											
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional. (kategori Baik dan Sedang)	BPS	%	43.38	44.15	44.91	45.68	46.44	47.21	47.97	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.										
	Jumlah penumpang datang dengan pesawat terbang	BPS	Orang	95,566	107,017	118,468	129,919	141,370	152,821	164,272	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang berangkat dengan pesawat terbang	BPS	Orang	95,551	107,577	119,603	131,629	143,655	155,681	167,707	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang datang dengan Kapal Laut	BPS	Orang	121,378	154,901	188,424	221,947	255,470	288,993	322,516	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang berangkat dengan Kapal Laut	BPS	Orang	121,318	151,922	182,526	213,130	243,734	274,338	304,942	Dinas Perhubungan
	Jumlah barang masuk dengan kapal laut	BPS	Ton	3,000,000	3,867,795	4,547,989	5,228,182	5,908,375	6,588,569	7,268,762	Dinas Perhubungan
	Jumlah barang keluar dengan kapal laut	BPS	Ton	150,000	159,812	167,037	174,263	181,488	188,714	195,939	Dinas Perhubungan
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.										
	Jumlah bandara terbangun	Dinas Perhubungan	Unit								Dinas Perhubungan
	Jumlah bandara beroperasional	Dinas Perhubungan	Unit								Dinas Perhubungan

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	Unit	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Dinas Perhubungan
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang,											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS	%	1.80	2.00	2.17	2.34	2.52	2.69	2.87	BAPPERINDA
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	%	0.15	0.22	0.29	0.36	0.43	0.5	0.57	BAPPERINDA
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.											
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	BPS	0								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara											
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Rasio Gini.	BPS	0	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	BAPPERINDA
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Orang	22.20	22.17	22.14	22.10	22.07	22.03	22.00	BAPPERINDA Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Indeks Desa Membangun	Desa	505	503	500	498	495	493	490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Indeks Desa Membangun	Desa	1	1	2	2	2	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Indeks Desa Membangun	Kab/Kota	100	98	96	94	92	90	88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	%	11.91	10.52	9.13	7.74	6.35	4.96	3.58	BAPPERINDA
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.										
	Aspek Kebebasan Sipil	Indeks Demokrasi Indonesia	%	90	90.68	91.36	92.04	92.72	93.40	94.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Aspek Hak-Hak Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	%	55.00	57.07	58.99	60.91	62.83	64.75	66.67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Aspek Lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	%	52.00	53.00	55.00	55.59	56.64	57.69	58.74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	KOMNAS HAM - Data Aduan	Volume								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS	%	23.03	25.74	28.45	31.16	33.87	36.58	39.29	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	82.22	83.09	83.96	84.83	85.70	86.57	87.45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	BPS	%								Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	BPS	%								Dinas Perhubungan
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	KLHK	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan,	Statistik Ditjen KSDAE KLHK	Rp/Kapita								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).										
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPS	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	BPS	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Dinas Lingkungan Hidup	%	50.00	55.11	60.22	65.33	70.44	75.55	80.66	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola.	SIPSN KLHK	%	53.00	57.40	61.80	66.20	70.60	75.00	79.40	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10.	KLHK	(µg/m3)								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	IKLH KLHK	%	95.00	95.43	95.86	96.29	96.72	97.15	97.58	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Kriminal	%	10.00	9.89	7.63	5.91	4.19	2.47	0.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS.	Dinas Lingkungan Hidup	Kab/Kota								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.											
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	BPBD	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.b. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal.	BAPPENAS	%								Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan											
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.											
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan.	SIPSN KLHK	%	7.00	6.43	5.92	5.42	4.91	4.41	3.90	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	SIPSN KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari *baseline*.	SIPSN KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.										
	Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola per tahun	SIPSN KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola		%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	ton								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.											
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya											
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.										
	Korban meninggal	BPBD									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Korban hilang										Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terkena dampak langsung										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	BNPB; BPBD	%								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.	KLHK - Laporan Inventarisasi GRK dan MPV tahun 2020	ton CO2eq	3,329.74	3,135.44	2,926.19	2,700.85	2,458.18	2,196.84	1,915.39	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). (Emisi Baseline - Emisi Proyek)	BAPPENAS Aksara Online	ton CO2eq								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). (Total Emisi GRK di Tahun berjalan dibagi dengan GDP di tahun berjalan)	BAPPENAS Aksara Online	ton CO2eq								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan											
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.	KLHK	ribu ton								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen								Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	RPD	Ha								Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%								Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelem bagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	%								Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%								Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Statistik KKP	Nelayan								Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	Statistik KLHK	%	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	BBKSDA	Hektar								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju.	Dinas Kehutanan	KPH								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Statistik KLHK	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.	Statistik Ditjen KSDAE KLHK	Unit								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Dinas Kehutanan	%								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan											
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Statistik Kriminal	Kejadian	40	35	30	25	20	15	10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	BPS	%	2	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Kriminal	%	0.055	0.051	0.050	0.049	0.048	0.048	0.048	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Kementrian PPA (Simfoni PPA)	Anak	100	80	60	40	20	5	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.	Kementrian PPA (Simfoni PPA)	Anak	30.33	27.33	24.33	21.33	18.33	15.33	12.33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Statistik Kriminal	Angka Korban	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Statistik Kriminal	%	70	66.96	63.92	60.88	57.84	54.8	51.76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Statistik Kriminal	%								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Statistik Kriminal	% SPAK								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKP	%								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	BPKP	Opini								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	BPKP	%	65.00	65.75	66.28	66.82	67.35	67.89	68.42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	BPKP	%								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	BPKP	%								Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPR	%	18.95	20.72	22.50	24.28	26.06	27.84	29.61	Sekretariat DPRP
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	11.16	11.67	12.18	12.68	13.19	13.70	14.21	Badan Kepegawaian Daerah
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	%	67.11	69.59	72.07	74.55	77.03	79.51	81.99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70	72.77	75.54	78.31	81.08	83.85	86.62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70.00	72.15	74.30	76.45	78.60	80.75	82.90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	60.00	65.87	71.06	76.24	81.43	86.61	91.80	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	71.56	73.29	75.02	76.75	78.48	80.21	81.94	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	71.56	73.29	75.02	76.75	78.48	80.21	81.94	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama	KOMNAS Perempuan	Kasus								Dinas Pemberdayaan Perempuan,

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	kekerasan terhadap perempuan.										Perlindungan Anak dan KB
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Komisi Informasi Pusat (KIP) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik								BAPPERINDA
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Sengketa								Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	KOMNAS HAM - Data Aduan	Kebijakan								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE INDIKATOR	**TARGET/INDIKATOR**	**SUMBER DATA**	**SATUAN**	**Baseline 2023**	**Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029**						**Instansi Pelaksana**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan											
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	125	126.47	127.69	127.38	126.91	126.72	126.67	BAPPERINDA
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPS	%	91	91.38	91.67	92.01	92.42	92.92	93.51	BAPPERINDA
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPS	%	28	29.56	30.77	32.22	33.95	36.04	38.54	BAPPERINDA

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.											
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah: Negara Donor	%								BAPPERINDA
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); Bank Indonesia; BPS	%								BAPPERINDA
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.											
17.8.1*	Persentase pengguna internet	BPS	%	50.00	52.11	56.16	60.22	64.28	68.33	72.39	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BKAD	Dokumen								BAPPERINDA
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BKAD	Proyek								BAPPERINDA
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	BKAD	Rp/Kapita								BAPPERINDA
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline 2023	Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Kejadian								Dinas Komunikasi dan Informatika
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	Dukcapil	Sistem								Dinas Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN 2 - MATRIKS 2b. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun												
INDIKATOR SDGs: 1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrem												
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang										
	Sub Kegiatan :Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok										
	Sub Kegiatan: Penyiapan Perhutanan Sosial											
	1.3 Indikator Output : Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha										
	1.4 Indikator Output : Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha										
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment); 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawananan pangan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN												
Kegiatan 1 : Penyediaan Infrastruktur dan	Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya											DINAS PERTANIAN &

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	*1.2 Indikator Output : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia*	Unit										TANAMAN PANGAN
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Unit										
PROGRAM 2: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.4 Indikator Output : Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi											
	1.5 Indikator Output : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
	1.7 Indikator Output : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen										
Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton										
	Sub Kegiatan : Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
	2.4 Indikator Output : Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton										
	2.5 Indikator Output : Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi											
	2.6 Indikator Output : Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi											
	2.7 Indikator Output : Kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi											
	2.8 Indikator Output : Jumlah Dokumen Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi											
	2.9 Indikator Output : Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Disusun											
	Sub Kegiatan : Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi											
	2.10 Indikator Output : Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Disusun	Dokumen										
Kegiatan 3 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan : Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Ditetapkan											
	Sub Kegiatan : Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
Kegiatan 1 : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi											
	3.3 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen										
PROGRAM 4: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PANGAN												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sub Kegiatan : Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawananan pangan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Sub Kegiatan : Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi											DINAS PERTANIAN
	1.1 Indikator Output : Kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												
Kegiatan 1: Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Sub Kegiatan : Pengembangan Lumbung Mataraman											DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
	1.2 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; 2.2.2* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; 3.4.1.[c] Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											DINAS KESEHATAN
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dokumen										
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN												
Kegiatan 2: Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan										
INDIKATOR SDGs:2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1: Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Sub Kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan										
INDIKATOR SDGs:2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												
Kegiatan 1 : Pengembangan	Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional											DINAS PERTANIA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional*	Dokumen										N & TANAMAN PANGAN
PROGRAM 2: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan											
	1.3 Indikator Output Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebuna13/03/2024 Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura											
	1.4 Indikator Output : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura											
	1.5 Indikator Output : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.6 Indikator Output : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan										
PROGRAM 3: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Penataan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
PROGRAM 4: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
Kegiatan 1: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha										
	Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.2 Indikator Output : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha										
	Sub Kegiatan : Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha										
	Sub Kegiatan : Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan											
	1.4 Indikator Output : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan											
	1.5 Indikator Output : Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan										
PROGRAM 5: PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit										
PROGRAM 6: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit										
PROGRAM 7: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING												
Kegiatan 1 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Sub Kegiatan : Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi											
	1.4 Indikator Output : Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
Kegiatan 1: Pengembangan dan	Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan											DINAS PUPR

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*1.1 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun*											
	Sub Kegiatan : Pembangunan Bendung Irigasi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa											
	1.3 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak											
	1.4 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.5 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan											
	1.6 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Bendung Irigasi											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa											
	1.8 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak											
	1.9 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.10 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											
	1.11 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Bendung Irigasi											
	1.12 Indikator Output : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa											
	1.13 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak											
	1.14 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.15 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM										
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
	1.16 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi											
	1.17 Indikator Output : Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung										
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa											
	1.18 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM										
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak											
	1.19 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM										
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.20 Indikator Output : Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM										
	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi											
	1.21 Indikator Output : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.22 Indikator Output : Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM										
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.23 Indikator Output : Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM										
	Sub Kegiatan : Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi											
	1.24 Indikator Output : Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.25 Indikator Output : Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah											
	1.26 Indikator Output : Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi											
	1.27 Indikator Output : Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	DI										
PROGRAM 2: PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI												
Kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat											DINAS ESDM
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	*berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan*											
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 2.4.1* Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kegiatan 1: Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian											
Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan										
Kegiatan 3 : Penataan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	3.1 Indikator Output : Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha										
	Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi											
	3.2 Indikator Output : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi											
	3.3 Indikator Output : Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	3.4 Indikator Output : Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi											
	3.5 Indikator Output : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian											
	1.3 Indikator Output : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
INDIKATOR SDGs:												
PROGRAM 1:												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)										
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penilaian rumpun SDG Hewan											
	1.4 Indikator Output : Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai	Rumpun										
	Sub Kegiatan : Penilaian galur SDG Hewan											
	1.5 Indikator Output : Jumlah galur SDG hewan yang dinilai	Galur										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih	Sub Kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 2.c.1* Indikator anomali harga pangan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan										
	Sub Kegiatan : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan										
Kegiatan 2 : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur Yang Ditetapkan	Dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang											
	1.3 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang	Batang										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh											
	1.4 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata	Mata										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek											
	1.5 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek											
	1.6 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji											
	1.7 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang											
	1.8 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih											
	1.9 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton										
	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi											
	1.10 Indikator Output : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton										
Kegiatan 2 : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kewenangan Provinsi	*Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*											
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi											
	2.2 Indikator Output : Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang										
Kegiatan 3 : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak											
	3.2 Indikator Output : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan	Laporan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	ternak yang tersedia dan yang diproduksi											
	Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan											
	3.3 Indikator Output : Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar											
Kegiatan 4 : Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan											
	4.2 Indikator Output : Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus										
Kegiatan 5 : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Sub Kegiatan : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	5.1 Indikator Output : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain											
	5.2 Indikator Output : Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi	Dosis										
	5.3 Indikator Output : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
PROGRAM 3: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Penataan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.6 Indikator Output : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura											
	1.7 Indikator Output : Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet											
	1.8 Indikator Output : Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan											
	1.9 Indikator Output : Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)											
	1.10 Indikator Output : Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan											
	1.11 Indikator Output : Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan											
	1.12 Indikator Output : Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan											
	1.13 Indikator Output : Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit										
PROGRAM 4: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
Kegiatan 1 : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit										
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.2 Indikator Output : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang										
Kegiatan 2 : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 2.c.1* Indikator anomali harga pangan												
PROGRAM 1: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING												
Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota											DINAS PERINDAG
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan										
	Sub Kegiatan : Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.2 Indikator Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan										
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia												
INDIKATOR SDGs: 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS											
	1.2 Indikator Output : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS											
	1.8 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS											
	1.9 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS											
INDIKATOR SDGs: 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 3.4.1.(a) Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar											
PROGRAM 1:												
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
INDIKATOR SDGs: 3.4.1.[c] Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN												
Kegiatan 1 : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota											
	1.23Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 3.5.1* Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang										
PROGRAM 2: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kegiatan 1 : Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Sub Kegiatan : Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.											DINAS SOSIAL
	1.1 Indikator Output : Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang										
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.1 Indikator Output : Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang										
PROGRAM 3: PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN												
Kegiatan 1 : Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	Sub Kegiatan : Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi											BIRO KESRA
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi											
PROGRAM 4: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											BADAN KESBANGPOL
	1.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
INDIKATOR SDGs: 3.5.2.(a) Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir												
PROGRAM 1: PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
Kegiatan 1 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											DINAS PERINDAG
	1.1 Indikator Output : Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
	1.4 Indikator Output : Jumlah SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
	1.4 Indikator Output : Jumlah SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 3.6.1* Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Kegiatan 1 : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Sub Kegiatan : Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen										
Kegiatan 2 : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Sub Kegiatan : Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan											
	2.1 Indikator Output : Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)											
	2.2 Indikator Output : Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat	Unit										
	Sub Kegiatan : Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)											
	2.3 Indikator Output : Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)											
	2.4 Indikator Output : Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan / Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2.5 Indikator Output : Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan											
	2.6 Indikator Output : Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit										
	Sub Kegiatan : Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum											
	2.7 Indikator Output : Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B											
	2.8 Indikator Output : Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.; 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan.												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit										
Sub Kegiatan : Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)											
1.4 Indikator Output : Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan										
Sub Kegiatan : Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center											
1.5 Indikator Output : Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
1.6 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
1.7 Indikator Output : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
1.8 Indikator Output : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit										
Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											
1.9 Indikator Output : Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit										
Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit											
1.10 Indikator Output : Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit										
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
1.11 Indikator Output : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit										
Sub Kegiatan : Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
1.12 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Sub Kegiatan : Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center											
1.13 Indikator Output : Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Unit										
Sub Kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
1.14 Indikator Output : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen										
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.											
1.15 Indikator Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil	Kabupaten/ Kota										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.											
	Sub Kegiatan : Mendukung Pembangunan Puskesmas											
	1.16 Indikator Output : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun	Unit										
Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan											DINAS KESEHATAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem	Unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
Sub Kegiatan : Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik											
2.5 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen										
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)											
2.6 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/ Fasyankes										
Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)											
2.7 Indikator Output : Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit										
Sub Kegiatan : Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi											
2.8 Indikator Output : Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen										
Sub Kegiatan : Dukungan pelayanan kesehatan lainnya											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2.9 Indikator Output : Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen										
Kegiatan 3 : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan											DINAS KESEHATAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit										
Kegiatan 4 : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM											DINAS KESEHATAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen										
Kegiatan 5 : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan											DINAS KESEHATAN
	5.1 Indikator Output : Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan											DINAS KESEHATAN
	6.1 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Unit										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)											
	6.2 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)											
	6.3 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	6.4 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi											
Kegiatan 7 : Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional											DINAS KESEHATAN
	7.1 Indikator Output : Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit										
INDIKATOR SDGs: 3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Sub Kegiatan : Pengelolaan Manfaat JaminanKesehatan Papua yang terintegrasidengan Program JKN											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang										
INDIKATOR SDGs: 3.9.3.(a) Angka kematian akibat keracunan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
INDIKATOR SDGs: 3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket										
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Kegiatan 1 : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang										
	Sub Kegiatan : Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang										
Kegiatan 2 : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan											DINAS KESEHATAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang										
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	Unit										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua											
	2.5 Indikator Output : Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik											
	2.6 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Dokumen										
Kegiatan 3 : Pendayagunaan tenaga kesehatan	Sub Kegiatan : Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat											DINAS KESEHATAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar											
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Orang										
Kegiatan 4 : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP	Sub Kegiatan : Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP											DINAS KESEHATAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen										
Kegiatan 5 : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan											DINAS KESEHATAN
	5.1 Indikator Output : Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan											
	5.2 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	Unit										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua											
	5.3 Indikator Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik											
	5.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Dokumen										
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik	Sub Kegiatan : Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia											DINAS KESEHATAN
	6.1 Indikator Output : Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang										
INDIKATOR SDGs: 3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana											DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1.1 Indikator Output : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar*	Orang										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket										
	Sub Kegiatan : Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
Kegiatan 1: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Sub Kegiatan : Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis	Wilayah										
	Sub Kegiatan : Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis											
	1.4 Indikator Output : Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.5 Indikator Output : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan											
	1.6 Indikator Output : Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis											
	1.7 Indikator Output : Jumlah kader zoonosis	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 2 : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan										
	Sub Kegiatan : Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya											
	2.2 Indikator Output : Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Produk Hewan											
	2.3 Indikator Output : Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)											
	2.4 Indikator Output : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan										
Kegiatan 3 : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Komparteme	Sub Kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit											DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Laporan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
n Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi*											
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan											
	3.3 Indikator Output : Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner											
	3.4 Indikator Output : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan											
	3.5 Indikator Output : Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan											
	3.6 Indikator Output : Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina	Unit Usaha										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi											
	Sub Kegiatan : Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan											
	3.7 Indikator Output : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha										
	Sub Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan											
	3.8 Indikator Output : Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang										
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua												
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan :Pembangunan Perpustakaan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.3 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan :Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
	1.8 Indikator Output : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
	1.9 Indikator Output : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
	1.10 Indikator Output : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta	Buku										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium											
	1.11 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium											
	1.12 Indikator Output : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang										
	Sub Kegiatan : Penataan Ruang/Sudut Baca											
	1.13 Indikator Output : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
	1.14 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Praktik Siswa											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Laboratorium											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
	2.5 Indikator Output : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa											
	2.6 Indikator Output : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
	2.7 Indikator Output : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital										
	Sub Kegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
	2.8 Indikator Output : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik											
	2.9 Indikator Output : Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang										
	Sub Kegiatan : Penataan Ruang/Sudut Baca											
	2.10 Indikator Output : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang										
	Sub Kegiatan : Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2.11 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah											
	2.12 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang										
Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Laboratorium											
	3.3 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
	3.4 Indikator Output : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa											
	3.5 Indikator Output : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
	3.6 Indikator Output : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Penataan Ruang/Sudut Baca											
	3.7 Indikator Output : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik											
	3.8 Indikator Output : Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
	3.9 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah											
	3.10 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
Kegiatan 1 : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Menengah yang Meningkat Kompetensinya											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah											
	1.4 Indikator Output : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Buku										
	Sub Kegiatan : Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah											
	1.5 Indikator Output : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
	1.8 Indikator Output : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.9 Indikator Output : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah											
	1.10 Indikator Output : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Buku										
	Sub Kegiatan : Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah											
	1.11 Indikator Output : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah											
	1.12 Indikator Output : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen										
Kegiatan 2 : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
	2.1 Indikator Output : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen										DINAS PENDIDIKAN
	Sub Kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus											
	2.4 Indikator Output : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Buku										
	Sub Kegiatan : Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus											
	2.5 Indikator Output : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus											
	2.6 Indikator Output : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA												
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi									Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus										
	Sub Kegiatan : Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan	Bahasa										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi*											
	Sub Kegiatan : Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi										
	Sub Kegiatan : Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah	Peserta Didik										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen										
PROGRAM 4: PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi									Perpustakaan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.5 Indikator Output : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar										
	Sub Kegiatan : Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat											
	1.7 Indikator Output : Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokuman										
	Sub Kegiatan : Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi											
	1.8 Indikator Output : Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Nilai										
	Sub Kegiatan : Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi											
	1.9 Indikator Output : Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks										
	Sub Kegiatan : Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi											
	1.10 Indikator Output : Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.11 Indikator Output : Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan										
Kegiatan 1 : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus										
	Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan										
	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
	1.3 Indikator Output : Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan										
	Sub Kegiatan : Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya											
Kegiatan 2 : Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Sub Kegiatan : Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	Indeks										
INDIKATOR SDGs: 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia											
	1.5 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA											
	1.8 Indikator Output : Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah											
	1.9 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas											
	1.10 Indikator Output : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas											
	1.11 Indikator Output : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel											
	1.12 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
	1.13 Indikator Output : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah											
	1.14 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium											
	1.15 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium											
	1.16 Indikator Output : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru											
	1.17 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
	1.18 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.2 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah											
2.3 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket										
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan											
2.4 Indikator Output : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik										
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan											
2.5 Indikator Output : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan										
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel											
2.6 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit										
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru											
2.7 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah											
2.8 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah											
2.9 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik											
	2.10 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
Kegiatan 3: Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											DINAS PENDIDIKAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah											
	3.3 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus											
	3.4 Indikator Output : Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus											
	3.5 Indikator Output : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel											
	3.6 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru											
	3.7 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah											
	3.8 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah											
	3.9 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang										
Kegiatan 4 : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar											DINAS PENDIDIKAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama											
	4.2 Indikator Output : Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas											
	4.3 Indikator Output : Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan											
	4.4 Indikator Output : Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										
PROGRAM 2 : PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen										
Kegiatan 2 : Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
	2.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.18 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI												
Kegiatan 1 : Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.5 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer											
	1.7 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa											
	1.8 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA											
	1.9 Indikator Output : Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah											
	1.10 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas											
	1.11 Indikator Output : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas											
	1.12 Indikator Output : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel											
	1.13 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
	1.14 Indikator Output : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah											
	1.15 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium											
	1.16 Indikator Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium											
	1.17 Indikator Output : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru											
	1.18 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.19 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan											
	2.5 Indikator Output : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel											
	2.6 Indikator Output : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru											
	2.7 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2.8 Indikator Output : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah											
	2.9 Indikator Output : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit										
	Sub Kegiatan : Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik											
	2.10 Indikator Output : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan										
Kegiatan 3: Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											DINAS PENDIDIKAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit										
INDIKATOR SDGs: 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1 : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										
INDIKATOR SDGs: 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									BKD, BPSDA		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
	2.2 Indikator Output : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2.3 Indikator Output : Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang										
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
	3.2 Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus											
	3.3 Indikator Output : Jumlah Data Peserta Didik BagiSatuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang										
	Sub Kegiatan : Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus											
	3.4 Indikator Output : Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga										
Kegiatan 4 : Pengelolaan Akademi Komunitas	Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung Akademi Komunitas											DINAS PENDIDIKAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas											
	4.2 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas											
	4.3 Indikator Output : Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	ruang										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas											
	4.4 Indikator Output : Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas											
	4.5 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas											
	4.6 Indikator Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas											
	4.7 Indikator Output : Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/Akademi Yang Dipelihara	unit										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas											
	4.8 Indikator Output : Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas											
	4.9 Indikator Output : Jumlah Gedung Serba Guna Yang Dipelihara	Unit										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas											
	4.10 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas											
	4.11 Indikator Output : Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/Akademi yang direhabilitasi	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas											
	4.12 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas											
	4.13 Indikator Output : Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.14 Indikator Output : Jumlah Gedung Serba Guna yang direhabilitasi	Unit										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas											
4.16 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas											
4.17 Indikator Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit										
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Akademi Komunitas											
4.18 Indikator Output : Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit										
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas											
4.19 Indikator Output : Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit										
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas											
4.20 Indikator Output : Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik										
Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i											
4.21 Indikator Output : Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket										
Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas											
4.22 Indikator Output : Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas											
	4.23 Indikator Output : Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja											
	4.24 Indikator Output : Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas											
	4.25 Indikator Output : Jumlah Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas yang tersedia	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
	4.26 Indikator Output : Jumlah Izin Akademi Komunitas yangDiselenggarakan oleh Masyarakat yang diterbitkan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas											
	4.27 Indikator Output : Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	4.28 Indikator Output : Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Orang										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas											
	4.29 Indikator Output : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas											
	4.30 Indikator Output : Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas											
	4.31 Indikator Output : Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya											
	4.32 Indikator Output : Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya										
Kegiatan 5 : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa											DINAS PENDIDIKAN
	5.1 Indikator Output : Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi											
	5.2 Indikator Output : Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang										
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan											DINAS PENDIDIKAN
	6.1 Indikator Output : Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
Kegiatan 1 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sub Kegiatan : Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal									BKKBN		DINAS SOSIAL & KEPENDUDUKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.5 Indikator Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan										
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha									Dispora		DISORDA
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan											
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)											DISORDA
	2.1 Indikator Output : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)											
PROGRAM 4: PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi									Perpustakaan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
PROGRAM 5: PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI												
Kegiatan 1 : Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi									Arsip		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertifikasi	Orang										
INDIKATOR SDGs: 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer									Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan :Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
	1.3 Indikator Output : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
	1.4 Indikator Output : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Penyediaan infrastruktur TIK											
	1.5 Indikator Output : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang										
	Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
	2.2 Indikator Output : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
	2.3 Indikator Output : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas										
	Sub Kegiatan : Penyediaan infrastruktur TIK											
	2.5 Indikator Output : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket										
Kegiatan 3 : Pengelolaan Akademi Komunitas	Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Digital										
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa									Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang										
	Sub Kegiatan : Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku										
	Sub Kegiatan : Penataan Ruang/Sudut Baca											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang										
	Sub Kegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
	2.2 Indikator Output : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku										
	Sub Kegiatan : Penataan Ruang/Sudut Baca											
	2.3 Indikator Output : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah											
	2.4 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang										
INDIKATOR SDGs: 4.7.1* Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
	1.2 Indikator Output : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen										
Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan											DINAS PENDIDIKAN
	2.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
	2.2 Indikator Output : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen										
Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus											DINAS PENDIDIKAN
	3.1 Indikator Output : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan	Satuan Pendidikan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen											
	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
	3.2 Indikator Output : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen										
Kegiatan 4 : Pengelolaan Akademi Komunitas	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas											DINAS PENDIDIKAN
	4.1 Indikator Output : Jumlah Akademi KomunitasDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan	Pendidikan										
	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas											
	4.2 Indikator Output : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
Kegiatan 1 : Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus	Sub Kegiatan : Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal											DINAS PENDIDIKAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Sub Kegiatan : Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila											BADAN KESBANGPOL & SATPOL PP
	1.1 Indikator Output : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan : Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka											
	1.2 Indikator Output : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan tugas Paskibraka											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila											
	1.4 Indikator Output : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila											
	1.5 Indikator Output : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembentukan Paskibraka											
	1.6 Indikator Output : Jumlah Paskibraka	Orang										
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan												
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin												
PROGRAM 1:PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
Kegiatan 1 : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											DINAS PPA
	1.1 Indikator Output : Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi											
	1.4 Indikator Output : Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang										
	Sub Kegiatan :											
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA												
Kegiatan 2 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir;												
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
Kegiatan 1 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi											DINAS PPA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*1.1 Indikator Output : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik*	Orang										
PROGRAM 2 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												
Kegiatan 1 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											DINAS PPA
	1.1 Indikator Output : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang										
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen										
PROGRAM 3 : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak											DINAS PPA
	1.1 Indikator Output : Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang										
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah; 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
Kegiatan 1: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											DINAS PPA
	1.1 Indikator Output : Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Orang										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Unit										
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA												
Kegiatan 1 : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Papua											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Laporan										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
PROGRAM 3: PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA												
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Sub Kegiatan : Monitoring Pemberdayaan Perempuan											MRP
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.3 Indikator Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan										
	Sub Kegiatan : Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota											
	1.4 Indikator Output : Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek	Berita Acara										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota											
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA												
Kegiatan 1 ; Pemberdayaan Orang Asli Papua di wilayah adat	Sub Kegiatan : Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Dokumen										
PROGRAM 3: PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA												
Kegiatan 1 : Pemberdayaan Orang Asli Papua	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Orang Asli Papua											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Dokumen										
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs: 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman; 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											DINAS KESEHATAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
Kegiatan 1 : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air	Lembaga										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Daerah Kabupaten/Kota	*Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi*											
INDIKATOR SDGs: 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi											
	1.2 Indikator Output : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun											
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi											
	2.18 Indikator Output : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga										
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
Kegiatan 1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul Sungai											DINASPUPR
	1.1 Indikator Output : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM										
	1.3 Indikator Output											
	Sub Kegiatan :											
	1.18 Indikator Output :											
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1 : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pembangunan Bendungan											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan										
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua												
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio Elektrifikasi												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
Kegiatan 1 : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi											DINAS ESDM
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga;												
PROGRAM 2: PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI												
Kegiatan 1: Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Sub Kegiatan : Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi											DINAS ESDM
	1.1 Indikator Output : Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1: Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga	Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun											DINAS ESDM
	1.1 Indikator Output : Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 7.3.1* Intensitas Energi Primer												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA												
Kegiatan 1: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil											DINAS ESDM
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen										
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua												
INDIKATOR SDGs: 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita; 8.1.1.(a) PDB per kapita												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL												
Kegiatan 1 : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual											DINAS PARIWISATA
	1.1 Indikator Output : Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 2 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar											DINAS PARIWISATA
	2.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan										
PROGRAM 2: PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro											BIRO PEREKONIMIAN & ADM PEMBANGUNAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun												
PROGRAM 1: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Kegiatan 1: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Sub Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)											DINAS TENAGA KERJA
	1.1 Indikator Output : Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan										
PROGRAM 2: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1: Penerbitan Izin Lembaga	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi											DINAS TENAGA KERJA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*1.1 Indikator Output : Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi*	Lembaga										
	Sub Kegiatan 2 : Pengawasan dan Pengendalian LPTKS											
	2.1 Indikator Output : Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga										
Kegiatan 2: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Sub Kegiatan 1 : Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan											DINAS TENAGA KERJA
	1.1 Indikator Output : Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Lembaga										
PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan 1 : Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan											DINAS KOPERASI & UMKM
	1.1 Indikator Output : Wirausaha yang Difasilitasi	Orang										
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil											
	2.1 Indikator Output : Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Unit usaha										
	Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang											
	3.1 Indikator Output : Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga										
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
Kegiatan 1: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Sub Kegiatan 1 : Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan											DISORDA
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan 2 : Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi											
	2.1 Indikator Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit usaha										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA												
Kegiatan 1: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Sub Kegiatan : Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	orang										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
PROGRAM 1: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM												
Kegiatan 1: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											DINAS KOPERASI & UMKM
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit usaha										
Kegiatan 2: Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah											DINAS KOPERASI & UMKM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit usaha										
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											DINAS KOPERASI & UMKM
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit usaha										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit usaha										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya											
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.1 Indikator Output : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya											
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi												
INDIKATOR SDGs: 9.1.1* Kondisi mantap jalan provinsi												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Terbangunnya Jalan	Km										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan											
	1.1 Indikator Output : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan											
	1.1 Indikator Output : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan											
	1.1 Indikator Output : Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km										
INDIKATOR SDGs: 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Kegiatan 1: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	dokumen										
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	dokumen										
Kegiatan 2: Penyediaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda											DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Prasarana Transportasi Jalan	1.1 Indikator Output : Jumlah Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang Tersedia	Unit										
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.[a] Jumlah bandara												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN												
Kegiatan 1: Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Sub Kegiatan : Pengelolaan Bandara											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Terkelolanya Bandar Udara	Unit										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit										
Kegiatan 2: Pembangunan Bandar Udara	Sub Kegiatan : Pembangunan Bandar Udara											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara											
	1.1 Indikator Output : Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	unit/paket										
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.[b] Jumlah pelabuhan penyeberangan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN												
Kegiatan 1: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Sub Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit										
	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 2: Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 9.2.1.[a] Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur												
PROGRAM 1: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Kegiatan 1: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Sub Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional											DINASPERIDAG
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen										
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara												
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal												
PROGRAM 1: PROGRAM PENATAAN DESA												
Kegiatan 1 : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan	Sub Kegiatan : Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan	dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kepala Desa dan Desa Adat	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan											
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	dokumen										
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa											DPMK
	1.1 Indikator Output : jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	dokumen										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri												
PROGRAM 1:												
Kegiatan 1 : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Sub Kegiatan : Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	dokumen										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	dokumen										
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa											DPMK
	1.1 Indikator Output : jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	dokumen										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen										
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
Kegiatan 1 : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sub Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah										
Kegiatan 2 : Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan										
Kegiatan 3 : Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											DINAS PUPR

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.1 Indikator Output : Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	rumah tangga										
INDIKATOR SDGs: 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Kegiatan 1: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang											
	1.1 Indikator Output : Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	unit										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	unit										
Kegiatan 2: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											DINAS PERHUBUNGAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	unit										
INDIKATOR SDGs: 11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
PROGRAM 1: PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan 1: Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Sub Kegiatan : Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen										
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari										
	Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari										
	Sub Kegiatan : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari										
TUJUAN 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.[a] Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri; 12.4.1.[b] Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut											DINAS KLH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1.1 Indikator Output : Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan										
INDIKATOR SDGs: 12.7.1 (a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah												
PROGRAM 1: PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA												
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan										
TUJUAN 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya												
INDIKATOR SDGs: 12.8.1.[a] Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
Kegiatan 1 : Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	dokumen										
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output :Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	orang										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat											
	1.1 Indikator Output : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
Kegiatan 1 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	entitas										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH											
INDIKATOR SDGs: 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim											
TUJUAN 14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs: 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
Kegiatan 1 : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan Breakwater											DINAS PUPR
	1.1 Indikator Output : Panjang Breakwater yang Ditingkatkan	km										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Breakwater											
	1.1 Indikator Output : Panjang Breakwater yang Dibangun	km										
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Breakwater											
	1.1 Indikator Output : Panjang Breakwater yang Direhabilitasi	km										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN												
Kegiatan 1 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil											DINAS KELAUTAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil											
INDIKATOR SDGs: 14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Kegiatan 1: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											DINAS KELAUTAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	dokumen										
Kegiatan 2: Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Sub Kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											DINAS KELAUTAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	rekomendasi										
	Sub Kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	rekomendasi										
INDIKATOR SDGs: 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
Kegiatan 1: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											DINAS KELAUTAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	dokumen										
Kegiatan 2: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil											DINAS KELAUTAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	dokumen										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	dokumen										
TUJUAN 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati												
INDIKATOR SDGs: 15.1.1* Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan												
PROGRAM 1: PROGRAM PERENCANAAN HUTAN												
Kegiatan 1 : Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	dokumen										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan											
	1.1 Indikator Output : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan	dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan 1 : Perbenihan Tanaman Hutan	Sub Kegiatan : Sertifikasi Mutu Benih											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	sertifikat										
	Sub Kegiatan :Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sumber Benih											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.1 Indikator Output : Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha										
INDIKATOR SDGs: 15.3.1* Proporsi lahan terdegradasi terhadap luas daratan keseluruhan												
PROGRAM 1: PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
Kegiatan 1: Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Sub Kegiatan :Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha										
	Sub Kegiatan :Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa										
INDIKATOR SDGs: 15.1.2* Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan 1: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	dokumen										
PROGRAM 1: PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
Kegiatan 1: Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Sub Kegiatan : Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha										
INDIKATOR SDGs: 15.2.1* Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari												
PROGRAM 1: PROGRAM PERENCANAAN HUTAN												
Kegiatan 1: Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS											DINAS KLH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS	dokumen										
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan : Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan											DINAS KLH
	1.1 Indikator Output : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	dokumen										
	Sub Kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	unit										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	dokumen										
	Sub Kegiatan : Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	dokumen										
INDIKATOR SDGs: 15.5.1* Indeks Daftar Merah Keanekaragaman hayati; 15.6.1												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
Kegiatan 1: Pengelolaan	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS											DINAS KLH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS	dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang										
	Sub Kegiatan : Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua											
	1.1 Indikator Output : Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	dokumen										
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan												
INDIKATOR SDGs: 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.												
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA												
Kegiatan 1 : Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Sub Kegiatan : Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung											DPMK
	1.1 Indikator Output : Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	dokumen										
PROGRAM 2: PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA												
Kegiatan 1 : Pemberdayaan Orang Asli Papua	Sub Kegiatan : Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat											DPMK
	1.1 Indikator Output : Terlaksananya Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	dokumen										
INDIKATOR SDGs: 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Kegiatan 1: Pembentukan	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi											BADAN KESBANGP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Satgas daerah di wilayah provinsi	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi											OL & SATPOL PP
	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi											
	1.1 Indikator Output :Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi											
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya												
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Kegiatan 1: Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi											BADAN KESBANGPOL & SATPOL PP
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi											
	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi											
	1.1 Indikator Output :Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi											
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.[a] Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
Kegiatan 1: Kegiatan 1: Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	Sub Kegiatan : Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah											DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.1 Indikator Output :Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen										
	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik											
	1.1 Indikator Output :Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen										
	Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah											
	1.1 Indikator Output :Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen										
TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan												
INDIKATOR SDGs: 17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga; 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif); 17.8.1* Persentase pengguna internet												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
Kegiatan 1 : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah											DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen										
	Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah											
	1.1 Indikator Output : Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	unit										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio Penerimaan pajak terhadap PDB												
PROGRAM 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
Kegiatan 1: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah											BAPENDA
	1.1 Indikator Output : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	dokumen										
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	dokumen										
INDIKATOR SDGs: 17.10.1.(a) Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati ; 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk nonmigas												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Internasional/Nasional											DINAS PERINDAG
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha										
	Sub Kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha										
	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	produk										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
INDIKATOR SDGs: 17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ; 17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani												
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
Kegiatan 1: Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan : Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam											BPTSP
	1.1 Indikator Output : Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	badan usaha										
INDIKATOR SDGs: 17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional; 17 18 1 (b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional; 17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi; 17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan; 17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik; 17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar												
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik SektoralAlam											DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
	1.1 Indikator Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral											
	Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang										

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2021)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Sub Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur											
	1.1 Indikator Output : Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	unit										

LAMPIRAN 3 - MATRIKS 3. PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

1. UNICEF

Catatan:

- *Target dan capaian yg bisa disampaikan hanya untuk tahun 2023 karena penyusunan target berdasarkan diskusi AWP (annual Work Plan) yang dilakukan bersama Bappenas dan Kemendagri di awal tahun berjalan*
- *Alokasi anggaran UNICEF yg tercantum dalam AWP (Annual Workplan) 2023 untuk wilayah Papua secara keseluruhan Data alokasi anggaran juga dilaporkan secara nasional melalui UNICEF Indonesia*

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
TUJUAN 1. menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.													
INDIKATOR SDGs: **1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.** **2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**												
PROGRAM 1: Penurunan stunting.													
Penurunan stunting.	Diseminasi rencana aksi daerah pangan dan gizi	Rencana aksi daerah pangan dan gizi telah menjadi produk hukum pemerintah provinsi, dan telah di sosialisasikan ke beberapa kabupaten termasuk di Papua.	2	-	-	-	-	-	-	312	UNICEF dan Donor	Kota Jayapura, Kab Nabire	YP2KP, Bappeda Provinsi dan UNCEN.

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Penurunan stunting.	Pembuatan kajian pembiayaan daerah untuk program stunting dalam kaitan perbaikan perencanaan dan supervisi program.	Tersedianya kajian awal dan kegiatan diseminasi telah dilakukan	Tersedia	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	YP2KP, Bappeda Provinsi dan UNCEN.
Penurunan stunting.	Pendampingan program konseling pemberian makan bayi dan anak serta pembuatan pedoman praktis.	Kegiatan pendampingan atau coaching clinic telah dilakukan di 3 kab/kota, dan pedoman praktis telah tersedia.	3	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	YP2KP, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota dan PERSAGI/Poltekkes.
Penurunan stunting.	Perbaikan sistem informasi dan manajemen data gizi.	Dashboard visualisasi surveillans gizi (ePPGBM) telah tersedia,	Tersedia	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Provinsi	YP2KP, Dinkes Provinsi, dan BPS.
Penurunan stunting.	Kampanye perubahan perilaku dan mobilisasi masyarakat	kegiatan kampanye untuk perubahan perilaku telah	10,000	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Provinsi	YP2KP, PGGP, PKK, IAM

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		dilakukan seperti talkshow, pemutaran dan pembuatan video, pembuatan buku resep dan khutbah terkait menyusui.											
PROGRAM 2:													
Pengelolaan gizi buruk terintegrasi atau integrated management of acute malnutrition (IMAM).	Mengintegrasikan penapisan dini dan rujukan balita beresiko wasting di tingkat Posyandu.	Sejumlah 8 Kab/Kota di Provinsi Papua, telah mengintegrasikan kegiatan penapisan dini dengan pita LiLA di Posyandu secara rutin tiap bulan.	8	-	-	-	-	-	-	1,402	UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, Kota Jayapura, Kab Keerom, Kab Sarmi, Kab Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Kepulauan Yapen, Kab Waropen	YP2KP dan Dinkes
Pengelolaan gizi buruk terintegrasi atau	Mengintegrasikan kegiatan pencatatan pelaporan anak	Sejumlah 8 Kab/Kota di Provinsi Papua, telah mengintegras	8	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, Kota Jayapura, Kab	YP2KP dan Dinkes

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
integrated management of acute malnutrition (IMAM).	gizi buruk melalui ePPGBM	ikan pencatatan pelaporan melalui ePPGBM										Keerom, Kab Sarmi, Kab Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Kepulauan Yapen, Kab Waropen	
Pengelolaan gizi buruk terintegrasi atau integrated management of acute malnutrition (IMAM).	Memastikan puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk	Sejumlah 8 Kab/Kota sudah terlatih tatalaksana gizi buruk dan di dampingi dalam pembuatan SOP.	8	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, Kota Jayapura, Kab Keerom, Kab Sarmi, Kab Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Kepulauan Yapen, Kab Waropen	YP2KP dan Dinkes
Pengelolaan gizi buruk terintegrasi atau integrated manage	Memperluas kegiatan penapisan dini dan rujukan balita beresiko masalah gizi buruk di tingkat	Sejumlah 8 Kab/Kota sudah memperluas kegiatan penapisan dini dan rujukan balita	8	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, Kota Jayapura, Kab Keerom, Kab Sarmi, Kab Biak	YP2KP dan Dinkes

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
ment of acute malnutrition (IMAM).	keluarga dan satuan PAUD.	gizi buruk di tingkat keluarga dan satuan PAUD.										Numfor, Kab Supiori, Kab Kepulauan Yapen, Kab Waropen	
PROGRAM 3:													
Program gizi ibu dan gizi remaja.	Melakukan peningkatan kapasitas kepada guru dalam mengimplementasikan program gizi remaja/aksi bergizi.	Sejumlah 5 kab/kota telah mendapatkan pelatihan untuk program aksi bergizi.	5	-	-	-	-	-	-	1,869	UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, Kota Jayapura, Kab Keerom, Kab Biak Numfor dan Kab Supiori	YP2KP, Dinkes, Disdik, Kemenag, Biro Kesra/Bappeda
Program gizi ibu dan gizi remaja.	Melakukan kegiatan joint monitoring untuk program gizi remaja/aksi bergizi	Sejumlah 1 kab/kota telah melakukan joint monitoring program aksi bergizi.	1	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kota Jayapura	YP2KP, Dinkes, Disdik, Kemenag, Biro Kesra/Bappeda
Program gizi ibu dan gizi remaja.	Memastikan sekolah melakukan kegiatan aksi bergizi yang meliputi sarapan pagi bersama,	Sejumlah 50 sekolah telah mengimplementasikan program aksi bergizi.	50	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, Kota Jayapura, Kab Keerom, Kab Biak	YP2KP, Dinkes, Disdik, Kemenag, Biro Kesra/Bappeda

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	pendidikan gizi dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.											Numfor dan Kab Supiori	
	Melakukan pemodelan penggunaan KIE gizi pada kelas ibu hamil.	Sejumlah 2 kab/kota telah melakukan pemodelan kelas ibu hamil.	2	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kab Jayapura, dan Kota Jayapura.	YP2KP, Dinkes
Program gizi ibu dan gizi remaja.	Melakukan pemodelan pemberian sarapan sehat sebagai bagian dari aksi bergizi untuk daerah dengan rawan pangan.	Sejumlah 13 sekolah telah menerapkan program sarapan sehat untuk daerah rawan pangan	3500	-	-	-	-	-	-		UNICEF dan Donor	Kota Jayapura	YP2KP, Dinkes, Disdik, Kemenag, Biro Kesra/Bappeda, PKK
TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak													
INDIKATOR SDGs: **6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.** **6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.** **6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.** **6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.** **6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.** **6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.**												

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang. 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.													
PROGRAM 1:													
Sanitasi yang dikelola aman	2.1.1.7 Dukungan kepada pemerintah daerah dalam melakukan advokasi dan penyadaran publik tentang pengelolaan yang aman, menyiapkan kebijakan dan peraturan yang diperlukan, mengembangkan peta jalan daerah dan memobilisasi opsi pembiayaan alternatif di Papua	Capaian hingga Oktober 2023 - Proses penyusunan Peta Jalan Sanitasi Provinsi Papua (konsultasi) - Proses penyusunan Policy Brief Air dan Sanitasi Berketahanan Iklim di Papua (konsultasi) - Pelibatan 200 anak muda dalam aksi memerangi perubahan iklim - Draft Peraturan Daerah	1	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kabupaten Biak Numfor	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Tentang Air Limbah Domestik diserahterimakan											
Sanitasi yang dikelola aman	2.1.2.8 Peningkatan kapasitas di Provinsi Papua ((memperkuat sistem pemantauan yang dikelola dengan aman, misalnya alat inspeksi untuk sanitasi di lokasi di Provinsi Papua)	Capaian hingga Oktober 2023 - Melalui Yayasan Rumsram, melakukan kunjungan Kaji Banding Pengelolaan Sanitasi Aman ke Kabupaten Lumajang yang diikuti oleh Kab. Biak Numfor dan Kab. Mimika - Melakukan uji coba 100 unit SATO untuk toilet berketahanan iklim di lokasi yang sulit air	1	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kabupaten Biak Numfor	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
PROGRAM 2:													
ODF, WASH in Schools, WASH in HCF and MHM	2.2.2.8 Advokasi dan dukungan teknis kepada pemerintah sub-nasional untuk menangani ODF sampai titik terakhir dan mempertahankan status ODF	Capaian hingga Oktober 2023 - Total 88,163 orang terjangkau oleh dukungan STBM UNICEF secara langsung dan 20,000 orang secara tidak langsung (RRI Biak Numfor dan Tribun Papua) - Kabupaten Biak Numfor telah mencapai 100% SBS Pada tanggal 13 Juli 2023 dengan mewujudkan seluruh 268 kampung mencapai SBS atau ada penambahan 174 kampung	5	-	-	-	-	-	-	1,558	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kab. Sarmi	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		baru dalam 1 tahun. - Dukungan advokasi UNICEF di berhasil meningkatkan 232 kampung SBS di 6 kabupaten/kota selama 1 tahun. Dengan rincian Kab. Biak Numfor 174 kampung, Kab. Jayapura 25 kampung, Kab. Keerom 13 kampung, Kab. Mamberamo Tengah 10 kampung, kota Jayapura 9 kampung dan Kab. Nabire tidak satupun kampung											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		- 108 peserta pelatihan STBM GEDSI - 231 staff pemerintah berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan koordinasi program Air dan Sanitasi - 625 orang staff pemerintah, masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat mendapatkan pelaithan STBM - Audiensi dan advokasi 13 orang pimpinan pemerintah daerah dan gereja (Wakil Bupati Biak Numfor, Bupati Sarmi, Sekda Kota											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Jayapura, Sekda Biak Numfor, Assisten 2 Sekda Prov Papua dan 10 pimpinan tertinggi gereja di Papua) - Buku Panduan Hidup Bersih dan Sehat Menurut Agama Kristen diluncurkan dan disosialisasikan											
ODF, WASH in Schools, WASH in HCF and MHM	2.2.3.10 Advokasi dan dukungan teknis untuk pelaksanaan Pedoman Sanitasi Sekolah WASH, termasuk meningkatkan pendidikan MHH dan penggunaan Oky App	Capaian hingga Oktober 2023 - SK TP UKS/M Kota Jayapura sudah ditandatangani - SK TP UKS/M Kab.	5	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kab. Sarmi	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Jayapura sudah ditandatangani - SK TP UKS/M Kab. Keerom sudah ditandatangani - Inisiatif sistem informasi sanitasi sekolah terintegrasi diujicobakan/ pilot di Kab. Jayapura, Kota Jayapura dan Kab. Mamberamo Tengah - 1,111 peserta didik memperoleh informasi tentang sanitasi sekolah dan kebersihan menstruasi											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		- kolaboasi dengan komunitas-komunitas generasi muda dalam pelaksanaan kampanye MKM di sekolah dan di komunitas											
ODF, WASH in Schools, WASH in HCF and MHM	2.2.4.7 Advokasi dan dukungan teknis untuk meningkatkan implementasi WASH FIT	Capaian hingga Oktober 2023 - Kegiatan Pelatihan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Puskesmas terintegrasi dengan WASH FIt di Kab. Biak Numfor. Hasil akan disosialisasikan pada Bulan November 2023	2	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kota Jayapura dan Kab. Biak Numfor	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
ODF, WASH in Schools, WASH in HCF and MHM	2.2.5.8 Mendukung implementasi peta jalan kebersihan tangan nasional, peningkatan kapasitas, intervensi perubahan perilaku dan memperkuat kolaborasi sektor swasta	Capaian hingga Oktober 2023 - Belum ada kegiatan spesfik untuk CSR/Pihak Swasta	1	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kota Jayapura	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai
PROGRAM 2:													
Air yang dikelola aman	2.3.3.2 Memprakarsai berbagai kajian dan aksi untuk mengatasi masalah kelangkaan air di tingkat provinsi	Capaian hingga Oktober 2023 - Belum ada kegiatan spesfik untuk isu kelangkaan air di Papua	n/a	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Tidak terdapat di Provinsi Papua	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai
PROGRAM 4:													
Berketahanan Iklim	2.4.1.8 Advokasi dan kemitraan di Provinsi Papua (termasuk pengarusutamaa	Upaya integrasi isu ketangguhan sarana air dan sanitasi	1	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kota Jayapura	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	n ketahanan iklim WASH dalam perencanaan WASH, sinkronisasi data WASH & iklim untuk perencanaan WASH, kolaborasi multipihak)	menghadapi perubahan iklim - Pelibatan generasi muda dalam isu perubahan iklim di Papua - Kolaborasi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Jayapura dengan IUWASH melalui pemenamba han isu GEDSI dan ketahanan iklim											Umum, Yayasan Rumsram, Yayasan Gapai
PROGRAM 5:													
WASH dalam kedarura tan	2.5.2.7 Peningkatan kapasitas di kabupaten terpilih di provinsi yang didukung UNICEF seperti di atas	Capaian hingga Oktober 2023 - Penyusunan SK GerduPKDan a (draft di	1	-	-	-	-	-	-	156	UNICEF dan Donor	Provinsi Papua: Kota Jayapura	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Yayasan Rumsram,

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Bagian Hukum)											Yayasan Gapai
TUJUAN 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia													
INDIKATOR SDGs: 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.													
PROGRAM 1:													
Kesehatan Ibu dan Anak	Act 3.1.2.10 Bantuan teknis dalam meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi baru lahir dan penguatan penyediaan layanan bagi bayi kecil dan rentan	Pemerintah provinsi meningkat kapasitasnya dalam memfasilitasi fasilitas kesehatan primer dan sekunder di kabupaten terpilih untuk memperkuat peningkatan kualitas layanan bayi baru lahir, sistem rujukan dan pelaksanaan AMPSR. - Jumlah faskes intervensi telah difasilitasi	9 40% 75%	-	-	-	-	-	-	6,152	UNICEF dan Donor	Biak, Jayapura, Keerom, Yapen	YGHP, Dinkes Kab dan Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		untuk menyelesaikan setidaknya 2 siklus QI untuk ibu dan bayi baru lahir - % bayi BBLR yg stabil saat dirawat di PKM dan RS - % rekomendasi dari audit kematian dilaksanakan melalui intervensi nyata di kabupaten intervensi											
Kesehatan Ibu dan Anak	Act 3.2.1.10 Bantuan teknis dalam penguatan pelaksanaan program KIA yang berdampak kepada penurunan pneumonia dan diare pada anak di provinsi Papua	Fasilitas kesehatan primer intervensi meningkat kapasitasnya dalam menurunkan dan mencegah kesakitan pada anak	- 50% -20%	-	-	-	-	-	-	4,306	UNICEF dan Donor	Biak Numfor Jayapura Keerom Yapen	YGHP, Dinkes Kab dan Dinkes Provinsi

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		- % PKM intervensi di kab terpilih melaksanakan MTBS berkualitas sebagai follow up dari kalakarya - % Kabupaten/Kota dengan semua Puskesmas yang mengimplementasikan pendekatan MTBS											
Kesehatan Ibu dan Anak	Activity 3.5.2.8 Koordinasi dan peningkatan kapasitas dalam mempertahankan akses ke layanan kesehatan esensial untuk anak dan perempuan selama krisis kesehatan	Fasilitas kesehatan primer intervensi meningkat kapasitasnya dalam menurunkan dan mencegah kesakitan pada anak - % PKM intervensi di	- 50% -20%	-	-	-	-	-	-	779	UNICEF dan Donor	Biak Numfor Jayapura Keerom Yapen	YGHP, Dinkes Kab dan Dinkes Provinsi, BPBD Provinsi dan Kabupaten

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		kab terpilih melaksanakan MTBS berkualitas sebagai follow up dari kalakarya - % Kabupaten/Kota dengan semua Puskesmas yang mengimplementasikan pendekatan MTBS											
INDIKATOR SDGs: **3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**													
PROGRAM 2:													
Malaria	3.2.2.5 Bantuan teknis untuk percepatan penurunan kasus dan eliminasi malaria di Provinsi Papua	# Kabupaten/Kota yang disertifikasi bebas malaria (diantara Kabupaten/Kota prioritas yang diidentifikasi)	9	-	-	-	-	-	-	7,788	UNICEF dan Donor	Kab Jayapura Kota Jayapura Sarmi Keerom Yapen Sarmi Mamberamo Raya Biak	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		# Kabupaten/Kota dengan insiden parasit tahunan > 5 (diantara Kabupaten/Kota prioritas yang diidentifikasi)										Supiori Waropen	
INDIKATOR SDGs: **3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.** **3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.**												
PROGRAM 3:													
Imunisasi	3.2.3.9 Mendukung pencapaian cakupan dan pemerataan imunisasi nasional di tingkat daerah; implementasi rencana perbaikan Effective Vaccine Management (EVM), implementasi modul pelatihan	Pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki kapasitas untuk memberikan imunisasi rutin berkualitas tinggi dan Supplementary Immunization Activity (SIA) untuk	3	-	-	-	-	-	-	3,894	UNICEF dan Donor	Yapen Biak Sarmi	YGHP, Dinkes Kab dan Dinkes Provinsi, BPBD Provinsi dan Kabupaten

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	kader digital, skrining dan vaksinasi kejar, peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan, pemanfaatan alat bantu supervisi suportif (SS), dukungan teknis dan monev ke fasilitas layanan kesehatan swasta, penilaian Health Facility Solar Equipment (HFSE), dan pengenalan dan perluasan pemakaian vaksin baru.	mencapai cakupan yang ditargetkan Indikator kinerja: 1. Jumlah peserta workshop Imunisasi mengalami peningkatan kapasitas pengelolaan program imunisasi setelah workshop 2. Jumlah Dinkes Kabupaten dan fasilitas kesehatan yang melakukan imunisasi/ peningkatan Supply Chain Management (SCM) setelah pelatihan kerja dan											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		supervisi pendukung manajemen EVM dan imunisasi 3. Persentase rekomendasi dari rapat teknis untuk Dinkes Provinsi, Dinkes atau faskes yang ditindaklanjuti 4. Tersedianya dokumen strategi perbaikan data provinsi dan gudang vaksin Progress Q3 - 93% Puskesmas di Yapen, Biak, dan Sarmi telah menggunakan aplikasi ASIK untuk											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		pencatatan dan pelaporan. - 90% Puskesmas di Yapen, Biak, dan Sarmi telah menggunakan aplikasi SMILE untuk pencatatan dan pelaporan logistik imunisasi. - OJT dan supervisi suportif baik dari fasilitator provinsi ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Puskesmas telah dilakukan di tiga kabupaten dukungan UNICEF (Yapen, Biak,											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		dan Sarmi), skor supervisi suportif di 50% Puskesmas dukungan meningkat setelah dilakukan supervisi suportif. - Rapat teknis ditingkat provinsi telah dilakukan untuk penyusunan rencana kegiatan hingga bulan Desember 2023. - Perbaikan manajemen gudang vaksin provinsi Papua telah dilaksanakan. Penilaian Manajemen Vaksin Efektif yang											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		dilakukan oleh Kementerian Kesehatan memberikan nilai 78 untuk gudang vaksin Provinsi Papua. Nilai ini sesuai dengan rata-rata nasional.											
Imunisasi	3.2.4.9 Pengembangan rencana komunikasi spesifik lokal; pelibatan tokoh masyarakat & agama, perluasan pendekatan HCD, dan pendekatan berbasis bukti di Provinsi Papua	Pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki kapasitas untuk meningkatkan permintaan imunisasi termasuk pengenalan vaksin baru di Provinsi Papua Indikator kinerja: 1. Jumlah kumulatif kabupaten	3	-	-	-	-	-	-	3,894	UNICEF dan Donor	Yapen Biak Sarmi	YGHP, Dinkes Kab dan Dinkes Provinsi, BPBD Provinsi dan Kabupaten

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		yang menerapkan HCD dan IPC 2. Persentase rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti 3. Jumlah kegiatan pelibatan masyarakat dan media dalam mendukung penciptaan permintaan imunisasi 4. Jumlah kumulatif juara tingkat distrik diidentifikasi dan diberikan penghargaan 5. Jumlah desa/posyandu yang											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		melakukan kegiatan pelacakan mangkir termasuk pelaksanaan My Village My Home, kartu imunisasi dan screening status imunisasi berbasis PAUD Progress Q3 - 3 Petugas pendamping telah ditempatkan di 3 Kabupaten (Biak, Yapen, sarmi) untuk memperkuat program imunisasi. - HCD telah diterapkan di 1 Kabupaten (Biak), Pelatihan											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Komunikasi Antar Personal (KAP) telah dilaksanakan di 3 Kabupaten dukungan. - 25 kampung di Biak, Yapen, dan Sarmi telah menggunakan MVMH untuk pelacakan imunisasi.											
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua													
INDIKATOR SDGs: **4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif** **4.1.1 Proporsi anak dan orang muda yang (a) pada kelas 2/3; (b) akhir pendidikan dasar; dan (c) akhir pendidikan menengah pertama, memiliki kompetensi minimum di keterampilan (i) membaca dan (ii) matematika, berdasarkan jenis kelamin** **4.1.5 Rerata Anak Tidak Sekolah untuk (a) sekolah dasar (7-12 Tahun); (b) sekolah menengah pertama (13-15 Tahun); dan (c) sekolah menengah atas (16-18 tahun)**													
PROGRAM 1:													
Keterampilan Dasar (Foundational Skills)	4.3.2.3 Peningkatan kapasitas dan dukungan teknis untuk replikasi program keterampilan	# Kabupaten/Kota yang memiliki rencana dan anggaran dan mengimplementasikan	4	5	5	-	-	-	-	9,345	UNICEF dan Donor	Biak Numfor, Supiori, Sarmi, Kab Jayapura, Mamberamo Raya	Yayasan Rumsram, Yayasan Nusantara Sejati (YNS), Dinas Pendidikan, Badan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	dasar di tanah Papua	atau melakukan scale-up (penyebarluasan) intervensi untuk meningkatkan literasi dasar dan numerasi anak melalui lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif											Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Keterampilan Dasar (Foundational Skills)	4.3.2.3 Peningkatan kapasitas dan dukungan teknis untuk replikasi program keterampilan dasar di tanah Papua	Integrasi modul pelatihan guru ke dalam program pra-pelayanan (Preservice) maupun masa layanan (Inservice) (termasuk pencegahan kekerasan pada anak)	2 (STKIP Biak, BGP Papua)	1	1	-	-	-	-		UNICEF & Donor	STKIP Biak, BGP di Kabupaten dan Kota Jayapura	Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, LLDIKTI XIV
PROGRAM 2:													

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Penanganan Anak Tidak Sekolah	4.1.1.4. Dukungan Teknis untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperluas dan mengintegrasikan praktik-praktik baik serta strategi terkait penanganan Anak Tidak Sekolah ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran pemerintah, melalui pengalokasian sumber daya prioritas yang lebih luas demi memenuhi kebutuha Anak Tidak Sekolah, termasuk mereka yang terdampak dari Pandemi Covid19	# Kabupaten/Kota dengan rencana dan anggaran untuk mengimplementasikan dan melakukan scale-up strategi penanganan anak tidak/diluar sekolah (OOSC)	1	1	-	-	-	-	-	779	UNICEF & Donor	Kampung Nolokla dan Kampung Hawai, Sentani, Kab Jayapura	Yayasan Berkat Lestari (YBL), Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: **4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.**													

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
4.2.1 Proporsi anak usia 24–59 bulan yang perkembangannya sesuai di bidang kesehatan, pembelajaran, dan kesejahteraan psikososialnya, berdasarkan jenis kelamin **4.2.2 Angka partisipasi di kegiatan pembelajaran terorganisir (satu tahun sebelum usia resmi masuk sekolah dasar), berdasarkan jenis kelamin**													
PROGRAM 1:													
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	4.2.3.3. Dukungan teknis untuk melakukan replikasi dan peningkatan jangkauan layanan PAUD Holistik terIntegrasi di tingkat sub nasional, sebagai bagian dari penguatan sistem pendukung PAUD	# Kabupaten/Kota dengan rencana dan anggaran untuk mengimplementasikan atau melakukan scale-up layanan pembelajaran usia dini yang berkualitas	1 (Sarmi)	1	1	-	-	-	-	779	UNICEF & Donor	25 PAUD di Sarmi, Sarmi Timur dan Bonggo	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
TUJUAN 4. Pendidikan berkualitas													
INDIKATOR SDGs: **4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.** **4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.**												
PROGRAM 5:													
Perlindungan Anak: Roots	5.2 Partisipasi Anak 5.2.2.7 Scaling up ROOTS	Indicator Outcome: **5.2** - # Anak/Remaja yang telah	2,280	-	-	-	-	-	-	1,012	UNICEF, OPD, Sekolah (Dana Bos)	Kabupatan Sarmi	OPD: - Dinas Pendidikan - DP3A - Bappeda

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		dilatih sebagai agen untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk perkelahian fisik, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau sentuhan seksual yang tidak diinginkan (data akan disegregasi menurut jenis kelamin, usia, dan kelompok) - Proporsi anak dan remaja yang merasa tahu kemana harus melapor jika											Mitra Pelaksana: LPKIPI (Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia)

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		terluka/mendapatkan kekerasan/terdiskriminasi/mengalami perundungan											
Perlindungan Anak: Roots	5.3. Norma Sosial 5.3.5.3 Norma Sosial positif	5.3 - # Orang (pengasuh, guru, masyarakat) yang menerima informasi dan pendidikan terkait pemberantasan kekerasan terhadap anak, pernikahan anak, dan kehilangan/terpisah dari keluarga Indicator Output: - jumlah sekolah (SMP SMA) yang mengimplem	13 Sekolah (6 SMP, 2 SMK, 5 SMA)	-	-	-	-	-	-			Kabupaten Sarmi	OPD: - Dinas Pendidikan - DP3A - Bappeda Mitra Pelaksana: LPKIPI (Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia)

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		entasikan PKH, ROOTS, Dispo - jumlah sekolah (SMP SMA) yang mereplikasi PKH, ROOTS dan Dispo dengan dana mandiri											
TUJUAN 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh													
INDIKATOR SDGs: **16.2 Penghapusan perlakuan salah, eksploitasi, trafiking & semua bentuk kekerasan pada anak** **16.3 Keadlian untuk semua** **16.9 Identitas legal untuk semua termasuk pencatatan kelahiran**													
TUJUAN 5. Kesetaraan gender													
INDIKATOR SDGs: **5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.** **5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.** **5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.**													
TUJUAN 8. Pekerjaan layak & Pertumbuhan Ekonomi													
INDIKATOR SDGs: **8.7 Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak**													
PROGRAM 2:													
Perlindungan Anak: Penguatan	5.4. Layanan Perlindungan anak	Indicator Outcome: # Kabupaten/Kota dengan pelayanan	3	-	-	-	-	-	-	1,947	UNICEF, OPD	Papua	OPD: - Bappeda - DP3A - Dinsos - Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Layanan Perlindungan Anak Integratif		perlindungan anak yang mudah diakses, dengan manajemen kasus yang tersedia Indicator Output: - # kab memiliki strategi untuk mendukung penguatan dan keberlanjutan program ramah anak melalui Safe4c - jumlah kab/kota memiiki layanan perlindungan anak integratif yang sesuai dengan standar											- Dinkes - UPTD PPA Mitra: - Yayasan Berkat Lestari - Puskamuda UI (ended in August 2023)

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		minimum, termasuk layanan kesehatan mental dan psikososial											
Perlindungan Anak: Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif	5.4.2.8 Memperkuat lingkungan yang aman dan ramah bagi anak dan meningkatkan kulaitas layanan dan pelaporan 5.4.7.6 Meningkatkan kapasitas intervensi awal dan layanan kesehatan mental dan psikososial (MHPSS)	# kampung memiliki mekanisme berbasis masyarakat untuk pencegahan, deteksi dini, dan jalur rujukan layanan	9	-	-	-	-	-	-			Sarmi, Kab Jayapura, Biak, Supiori	
TUJUAN 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh													
INDIKATOR SDGs: **16.2 Penghapusan perlakuan salah, eksploitasi, trafiking & semua bentuk kekerasan pada anak** **16.3 Keadlian untuk semua** **16.9 Identitas legal untuk semua termasuk pencatatan kelahiran**													
PROGRAM 3:													
Perlindungan Anak:	5.4. Layanan Perlindungan anak	Indicator outcome: # Provinsi yang	1	-	-	-	-	-	-	779		Papua	OPD: - Dukcapil - Dinkes - Bappeda

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Mendukung percepatan cakupan akta kelahiran dan adminduk lainnya		mengimplementasikan strategi nasional pendataan sipil dan statistik vital (CRVS) (akta kelahiran, pencatatan pernikahan dan perceraian)											Mitra Pelaksana: - YP2KP: baru akan berjalan Nov 2023
Perlindungan Anak: Mendukung percepatan cakupan akta kelahiran dan adminduk lainnya	5.4.3.3 meningkatkan cakupan akta kelahiran dan adminduk lainnya	Indicator Output - # kab/kota mempunya komitmen untuk implementasi Strategi Nasional Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) - # kab/kota yang mempunyai	1	1	-	-	-	-	-		UNICEF, OPD	Jayapura	

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan		Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		inovasi dan model berbasil lokal untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran dan adminduk lainnya - #kab/kota yang melakukan integrasi layanan dasar kesehatan, pendidikan utk pencatatan kelahiran di kampung sampai kab/kota											

2. GGGI

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA											

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
INDIKATOR SDGs:												
Peningkatan Kapasitas ASN	Pelatihan dan Sertifikasi ASN (ESDM Papua) untuk asses pengembangan PLTS, PLMH, PLTA	jumlah orang	30	30	30				300.00	New Zealand - GGGI	Jayapura	ESDM
Re-aktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum Komunikasi Energi	Memfasilitasi Pembentukan dan Reaktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum komunikasi Energi untuk implementasi target RUED P	Jumlah kegiatan	2	1	1				250.00	New Zealand - GGGI	Jayapura	ESDM
Re-aktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum Komunikasi Energi	**Studi Kelayakan Pembentukan DED:** Melakukan studi kelayakan untuk menentukan kebutuhan dan manfaat pembentukan DED. Menganalisis potensi sumber daya energi di daerah tersebut. Menilai tantangan dan peluang dalam mengelola sektor energi daerah	jumlah Produk	1	1	1				500.00	New Zealand - GGGI	Papua	ESDM, PLN, Pertamina
Re-aktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum Komunikasi Energi	**Sosialisasi dan Konsultasi Publik:** Mengadakan pertemuan publik untuk menyampaikan informasi tentang pembentukan DED. Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan,	Jumlah kegiatan	2	1					900.00	New Zealand - GGGI	Jayapura	ESDM, PLN, Pertamina

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	dan pihak terkait lainnya. Mengumpulkan masukan dan umpan balik dari masyarakat untuk memasukkan ke dalam perencanaan DED											
Re-aktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum Komunikasi Energi	**Pembentukan Tim Kerja DED:** Membentuk tim kerja DED yang terdiri dari ahli energi, perwakilan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim	Jumlah lembaga	1						150.00	New Zealand - GGGI	Jayapura	ESDM/PLN/ Pertamina
Re-aktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum Komunikasi Energi	**Pengembangan Rencana Strategis:** Menyusun rencana Aksi Daerah untuk pengelolaan energi di tingkat daerah. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan sektor energi. Menentukan indikator kinerja dan langkah-langkah tindak lanjut	jumlah kegiatan	1						500.00	New Zealand - GGGI	Jayapura	ESDM
Re-aktivasi Dewan Energi Daerah atau Forum	**Pelatihan dan Kapasitasi:** Mengadakan pelatihan bagi anggota DED untuk	jumlah org	30	30					500.00	New Zealand - GGGI	Jayapura	ESDM

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Komunikasi Energi	meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek teknis, regulasi, dan manajemen energi. Mempersiapkan mereka dalam membuat keputusan yang berbasis pada data dan informasi yang akurat.											
Feasibility Study	Feasibility studi untuk pengembangan EBT dari Bio-Methane	kegiatan	1	1					700.00	GGGI	Papua, Papua Selatan, Papua Tengah	ESDM/PLN/ Pertamina
TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
INDIKATOR												**SDGs:**
INDIKATOR 8.3.1(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro & Peningkatan Kapasitas	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro: Mendukung pendirian dan pengembangan lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan layanan keuangan kepada UMKM. Menyediakan pelatihan kepada penyelenggara lembaga keuangan mikro untuk memastikan keberlanjutan dan profesionalisme.	jumlah lembaga keuangan Mikro	2	1	1				1,000.00	GGGI	Papua	Dinas Koperasi, Perbankan
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro &	Pendidikan Keuangan: Workshop dan seminar untuk meningkatkan	Jumlah orang	20	20	20				1,500.00	GGGI	Papua	Dinas Koperasi, Perbankan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Peningkatan Kapasitas	pemahaman UMKM tentang manajemen keuangan, pembukuan, dan pentingnya akses ke layanan keuangan. Pengembangan materi edukasi keuangan yang mudah dipahami dan relevan untuk UMKM.											
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro & Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Digital: Pelatihan untuk memperkenalkan UMKM pada solusi keuangan digital seperti aplikasi perbankan mobile, e-wallet, dan layanan keuangan berbasis teknologi. Subsidi atau dukungan teknis untuk mengadopsi teknologi keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi.	produk digital	1	2	2				1,000.00	GGGI	Papua	Dinas Koperasi, Perbankan
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro & Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Keterampilan Manajerial: Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen UMKM, termasuk perencanaan bisnis, pemasaran, dan manajemen persediaan. Kemitraan dengan institusi	Jumlah orang	20	20	20				500.00	GGGI	Papua	Dinas Koperasi, Perbankan

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	pendidikan atau pelatihan untuk menyediakan kursus khusus untuk UMKM.											
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro & Peningkatan Kapasitas	Kemitraan dengan Industri: Kerjasama dengan sektor perbankan, lembaga keuangan, dan fintech untuk menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Mendorong perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan UMKM sebagai mitra atau pemasok.	nilai pendanaan berkelanjutan yang dialokasi atas kerjasama	2M	3M	3M				1,000.00	GGGI	Papua	Dinas Koperasi, Perbankan

3. EKONUSA

Program/ Kegiatan/ Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2022-2023	2024	2025	2026	2027				
TUJUAN 1 Local communities make informed decisions about their natural resources and Papua Province Government fully complied with mandate from KPK-GNPSDA (the Corruption Eradication Commission on national movement to save natural resources) and Manokwari Declaration based on the results of the International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE- 2018)											
INDIKATOR SDGs:											
PROGRAM 1:											
School of Ecoinvolvement	Pelatihan sistem perencanaan kampung untuk 16 kampung di Kab Jayapura dan Keerom	Kabupaten							Norway - Ekonusa	Kabupaten Keerom dan Jayapura	Kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Prov Papua
School of Ecoinvolvement	Pelatihan budidaya Vanili	Kabupaten							Norway - Ekonusa	Kabupaten Keerom dan Jayapura	Kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Prov Papua
School of Ecoinvolvement	Pengembangan Vanili di 5 kampung	Kabupaten							Norway - Ekonusa	Kabupaten Keerom dan Jayapura	Kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Prov Papua
School of Ecoinvolvement	Perencanaan Tata Ruang Kampung di 5 kampung di Kab Jayapura	Kabupaten							Norway - Ekonusa	kab Jayapura	
School of Ecoinvolvement	Pengembangan Pil Albumin dari ikan Gastor	Kabupaten							Norway - Ekonusa	Kab Boven Digoel	DKLH Prop dan KPH Boven Digoel
PROGRAM 2 :											
Low-carbon development initiatives (LCDI) and protection of forest ecosystem is strengthened in national and sub-national policies	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah	Provinsi							Norway - Ekonusa	Prov Papua	Bappeda Papua

Program/ Kegiatan/ Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2022-2023	2024	2025	2026	2027				
Low-carbon development initiatives (LCDI) and protection of forest ecosystem is strengthened in national and sub-national policies	Launching Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah	Provinsi							Norway - Ekonusa	Prov Papua	Bappeda Papua
INDIKATOR SDGs:											
PROGRAM 3:											
Youth activists have received support and have capacity to utilize their natural resouces, advocate and campaign on forest and IP issues	School of Eco Diplomacy (Khusus untuk anak muda dengan rentang usia 18-30)	Provinsi							Norway - Ekonusa	Prov Papua	DKLH
Youth activists have received support and have capacity to utilize their natural resouces, advocate and campaign on forest and IP issues	Aksi Muda Jaga Iklim	Provinsi dan Kabupaten/ Kota							Norway/US - Ekonusa	Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura	DKLH dan DLHK Kota dan Kabupaten Jayapura
Youth activists have received support and have capacity to utilize their natural resouces, advocate and campaign on forest and IP issues	Aksi bersih pantai, pilah dan pilih sampah dan penanaman pohon serta mangrove	Kota dan Kabupaten Jayapura							Norway/US - Ekonusa	Kab Jayapura dan Kota Jayapura	DKLH dan DLHK Kota dan Kabupaten Jayapura
INDIKATOR SDGs:											
PROGRAM 4 :											
Area (hectare) of land concessions permits in Papua Province is under review by the Papua Province government	Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit	Provinsi dan Kabupaten							US - Ekonusa	Kabupaten Nabire, Keerom dan Sarmi	Dinas Pertanian dan Pangan Prov Papua, Bappeda Papua, DKLH, DPMPTSP, Inspektorat

Program/ Kegiatan/ Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2022-2023	2024	2025	2026	2027				
derrived from project activities											
Area (hectare) of land concessions permits in Papua Province is under review by the Papua Province government derrived from project activities	Pelatihan sertifikasi Personil Penilai Usaha Perkebunan	Provinsi							US - Ekonusa	Provinsi, Kabupaten Keerom, Jayapura, Boven Digoel	Dinas Pertanian dan Pangan Prov
Area (hectare) of land concessions permits in Papua Province is under review by the Papua Province government derrived from project activities	Penilaian Usaha Perkebunan ke 15 Perusahaan Kelapa Sawit	Kabupaten							US - Ekonusa	Provinsi, Kabupaten Keerom, Jayapura, Nabire	Dinas Pertanian dan Pangan Prov
Area (hectare) of land concessions permits in Papua Province is under review by the Papua Province government derrived from project activities	Tinjauan lapangan ke perusahaan perkebunan perkebunan kelapa sawit	Kabupaten							US - Ekonusa	Provinsi, Kabupaten Keerom, Jayapura, Nabire	Dinas Pertanian dan Pangan Prov

4. GIZ FORCLIME

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
		2024	2025	2026	2027	2028				
TUJUAN 1. Bentuk pengelolaan hutan di tingkat provinsi dan kabupaten di wilayah proyek terbangun										
INDIKATOR SDGs: **Indikator 01: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun atau end poverty in all its forms everywhere.** **Indikator 05: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.** **Indikator 08: mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.** **Indikator 13: mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.** **Indikator 15: melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.**										
PROGRAM 1: Rencana pengelolaan hutan berbasis ekosistem berspektif jangka panjang (10 tahun) disusun oleh KPH, disetujui oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua										
Budget in Total 2021 - 2024: Euro 10.000.000										
Kegiatan 2.1.1: Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan rencana pengelolaan kehutanan, rencana bisnis dan analisis pengembangan pasar untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Unit Pengelola Hutan (KPH), kawasan konservasi/Cagar Biosfer dan kelompok masyarakat	Mendukung Balai TN Wasur dalam menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem TN Wasur							APBN & GIZ FORCLIME (BMZ)	Merauke	Balai Taman Nasional Wasur

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 2.1.1: Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan rencana pengelolaan kehutanan, rencana bisnis dan analisis pengembangan pasar untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Unit Pengelola Hutan (KPH), kawasan konservasi/Cagar Biosfer dan kelompok masyarakat	Mendukung penyusunan RPHJP di KPH Sarmi dan KPH Lintas Sarmi Memberamo	Jumlah dokumen	2						APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)	Kabupaten Sarmi	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Jayapura; KPH Unit XXI Lintas Sarmi dan Mamberamo, KPH Unit XXIII Sarmi.
Kegiatan 2.1.1: Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan rencana pengelolaan kehutanan, rencana bisnis dan analisis pengembangan pasar untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Unit Pengelola Hutan (KPH), kawasan konservasi/Cagar Biosfer dan kelompok masyarakat	Mendukung Balai TN Wasur dalam menyusun RPJN di TN Wasur	jumlah Dokumen							ABPN & GIZ FORCLIME (BMZ)	Merauke	Balai Taman Nasional Wasur
Kegiatan 2.1.1: Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan rencana pengelolaan kehutanan, rencana bisnis dan analisis pengembangan pasar untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Unit Pengelola Hutan (KPH), kawasan konservasi/Cagar Biosfer dan kelompok masyarakat	Mendukung Universitas Ottow Geissler Papua menyusun RPJP Hutan Pendidikan								GIZ FORCLIME (BMZ)	Kota Jayapura & Kabupaten Jayapura	Universitas Ottow Geissler Papua

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 2.1.1: Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan rencana pengelolaan kehutanan, rencana bisnis dan analisis pengembangan pasar untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Unit Pengelola Hutan (KPH), kawasan konservasi/Cagar Biosfer dan kelompok masyarakat	Mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua menyusun Rencana Strategis Kehutanan								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)	9 Kabupaten/Kota (1 Kota & 8 Kabupaten)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
Kegiatan 2.1.1: Mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan rencana pengelolaan kehutanan, rencana bisnis dan analisis pengembangan pasar untuk menghasilkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Unit Pengelola Hutan (KPH), kawasan konservasi/Cagar Biosfer dan kelompok masyarakat	Mendukung BBKSDA Papua dalam penyusunan RKT Pemberdayaan masyarakat di CA Cycloop								APBN & GIZ FORCLIME (BMZ)	Kabupaten Jayapura	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua
Kegiatan 2.1.2: Mendukung pendekatan bottom-up terhadap perencanaan dan pengembangan penggunaan lahan hutan di unit Pengelola Hutan (KPH) dan kawasan lindung/ konservasi serta roadmap Cagar Biosfer dengan memperhitungkan masyarakat hukum adat	Mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, Kelompok tani hutan dan masyarakat adat dalam pengelohan hutan adat								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)	Kabupaten Jayapura	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 2.1.2: Mendukung pendekatan bottom-up terhadap perencanaan dan pengembangan penggunaan lahan hutan di unit Pengelola Hutan (KPH) dan kawasan lindung/ konservasi serta roadmap Cagar Biosfer dengan memperhitungkan masyarakat hukum adat	Mendukung POKJA Percepatan Perhutan Sosial (PPS) Provinsi Papua untuk mendukung kegiatan pasca ijin (persetujuan menteri)								APBD, APBN & GIZ FORCLIME (BMZ)	9 Kabupaten/Kota (1 Kota & 8 Kabupaten)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah III Maluku dan Papua
Kegiatan 2.1.3: Mendukung proses dialog antara masyarakat hukum adat dan KPH serta pelaksanaan Perhutanan Sosial, termasuk mendukung forum akademisi dan masyarakat sipil dalam pembangunan PHL berbasis masyarakat hukum adat	Memfasilitasi dialog tentang Hutan Adat dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Mitra pembangunan								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)	Kabupaten Jayapura	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
Kegiatan 2.1.4: Mendukung penguatan kelembagaan, mengembangkan kapasitas dan pendampingan kesiapan pemantauan dan evaluasi kawasan	Mendukung BBKSDA Papua untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan Management Effectiveness Tracking Tools (METT)								APBN & GIZ FORCLIME (BMZ)	9 Kawasan Konservasi (Cagar Alam (CA) Pegunungan Cycloop, Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa, Cagar Alam (CA) Biak Utara, Cagar Alam (CA) Enarotali, Cagar alam (CA) Enarotali, Cagar Alam (CA) Yapen Tengah, Suaka	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
										Margasatwa (SM) Pegunungan Jayawijaya, Suaka Margasatwa Pulau Dolok, Suaka Margasatwa Pulau Komolom, Suaka Margasatwa Pulau Sauan	
PROGRAM 2: Kelompok pengelola hutan terlatih sesuai dengan sistem klasifikasi kelompok tani hutan Indonesia (kelas pemula, madya dan utama)											
Kegiatan 2.2.1: Mendukung kelompok pengelola hutan dalam pengembangan Agroforestry, konservasi hutan dan praktik terbaik untuk pengelolaan lahan di lanskap hutan termasuk kelompok masyarakat adat	Mendukung KTH terpilih dalam pengembangan dan peningkatan HHBK yang menjanjikan								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Kampung Babrongko, Kampung Dosai, Kampung Tablasupa, Kampung Wasur, dan Kampung Yanggandur

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 2.2.2: Mendukung peningkatan kapasitas kelompok pengelola hutan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemasaran hasil hutan dan non-kayu (misalnya tumbuhan obat, sagu, rusa,kopi,kakao,ekowisata) untuk mempromosikan produksi dan konsumsi hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan	Mendukung Galeri KPH untuk mempromosikan dan memasarkan produk masyarakat (HHBK)								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
Kegiatan 2.2.2: Mendukung peningkatan kapasitas kelompok pengelola hutan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemasaran hasil hutan dan non-kayu (misalnya tumbuhan obat, sagu, rusa,kopi,kakao,ekowisata) untuk mempromosikan produksi dan konsumsi hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan	Mendukung KTH dan MHA dalam Peningkatan Kelas KTH								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Kampung Babrongko, Kampung Dosai, Kampung Tablasupa, Kampung Wasur, dan Kampung Yanggandur
Kegiatan 2.2.2: Mendukung peningkatan kapasitas kelompok pengelola hutan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemasaran hasil hutan dan non-kayu (misalnya tumbuhan obat, sagu, rusa,kopi,kakao,ekowisata) untuk mempromosikan produksi dan konsumsi hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan	Mendukung KTH untuk kegiatan pembinaan peningkatan kualitas HHBK usaha masyarakat								APBD & GIZ FORCLIME (BMZ)		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Kampung Babrongko, Kampung Dosai, Kampung Tablasupa, Kampung Wasur, dan Kampung Yanggandur

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 2.2.3: Mendukung penguatan kerjasama ilmiah dan teknis serta kemitraan pada isu-isu terkait hutan di semua tingkatan termasuk dengan meningkatkan mata pencaharian dan inovasi terkait etnologi atau antropologi untuk Adat atau bioekonomi atau pendapatan dasar.	Mendukung kegiatan publikasi ilmiah dan workhop terkait pengelolaan Hutan Lestari, Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perhutanan Sosial dan Pembangunan Hutan Adat								APBD,APBN & GIZ FORCLIME (BMZ)		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah III Maluku dan Papua & Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Jayapura; UNCEN, Universitas Ottow Geissler Papua
Kegiatan 2.2.4: Mendukung Universitas Ottow Geissler Papua untuk pengembangan COE GIS dan pemetaan, pengembangan hutan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan COE GIS dan pemetaan pengembangan hutan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat								GIZ FORCLIME (BMZ)		Universitas Ottow Geissler Papua

5. PtPPMA

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
TUJUAN 2. Tanpa kelaparan											
INDIKATOR SDGs:Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
PROGRAM 2: Tanpa kelaparan											
Meningkatkan pendampingan pengembangan ekonomi kepada kelompok usaha masyarakat.	Peningkatan kapasitas pengelolan sagu menjadi berbagai jenis pengelolaan	Kampung	*								PtPPMA
Memfasilitasi kelompok Masyarakat kampung benik dan Garusan dalam pemanfaatan lahan pekarang dan lahan produktif untuk taman Palawija dan holtikultura	Pendampingan kelompok Masyarakat kampung benik dan Garusan dalam pemanfaatan lahan pekarang dan lahan produktif untuk taman Palawija dan holtikultura	Kampung	*								PtPPMA
TUJUAN 15. Ekosistem daratan											
INDIKATOR SDGs: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi											
PROGRAM 15: Ekosistem daratan											
Kegiatan 1: Penguatan pengelolan hutan adat	Pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan	Kampung	*								PtPPMA
Kegiatan 2:pemetaan wilayah Kampung Benik dan Garusa	hasil pemetaan wilayah adat yang masuk dalam dokumen RPJMkam	Kampung	*								PtPPMA
Meningkatkan pendampingan pengembangan ekonomi kepada kelompok usaha masyarakat.	Peningkatan kapasitas pengelolan sagu menjadi berbagai jenis pengelolaan	Kampung	*								PtPPMA
Memfasilitasi kelompok Masyarakat kampung benik dan Garusan dalam pemanfaatan lahan	Pendampingan kelompok Masyarakat kampung benik dan Garusan dalam	Kampung	s								PtPPMA

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
pekarang dan lahan produktif untuk taman Palawija dan holtikultura	pemanfaatan lahan pekarang dan lahan produktif untuk taman Palawija dan holtikultura										

6. USAID IUWASH

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
		2024	2025	2026	2027	2028				
TUJUAN 6. Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua										
INDIKATOR SDGs: 1. Pada 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua **2.** Pada 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan										
PROGRAM 1: Memperkuat Tata kelola dan pembiayaan sektor air minum, sanitasi, perilaku higiene dan Pengelolaan Sumber Daya Air										
Kegiatan 1:	Pembuatan atau Pengembangan, Implementasi, monitoring dan Penerapan Kebijakan/Regulasi di Tingkat Nasional dan Daerah dalam pengelolaan Aman untuk air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA	Jumlah UU, kebijakan, peraturan, atau perjanjian baru dan/atau yang telah direvisi yang mendorong akses ke layanan air minum, sanitasi, perilaku higiene yang lebih baik (IT 1-1)	1	2	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Pokja PKP (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, PT Air Minum Jayapura, Dinas KOMINFO, Dinas P3AKB, BPBD)
Kegiatan 2:	Peningkatan Anggaran dan Biaya Pemerintah dan Swasta yang memprioritaskan keseimbangan atas responsive gender, ketahanan iklim dan berkelanjutan untuk layanan untuk air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA	Jumlah kemitraan publik-swasta yang dibentuk dengan dukungan USAID (IT 1-2)	1	1					USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas PUPR / UPTD PALD
		Nilai pendanaan baru yang dimobilisasi untuk sektor air dan sanitasi sebagai hasil dari bantuan USG (IT 1-4)	3 M	67 M	48 M				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Pokja PKP (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, PT Air Minum Jayapura, Dinas KOMINFO, Dinas P3AKB, BPBD)

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 3:	Peningkatan kapasitas institusi sector untuk air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA	Jumlah lembaga yang diperkuat untuk mengelola lingkungan perkotaan (IT 1-6)	2	3	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas PUPR, PT Air Minum Jayapura
Kegiatan 4:	Peningkatan Akuntabilitas (Accountability) dan inklusivitas dalam tata Kelola untuk air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA	Jumlah inklusi sosial dan langkah-langkah akuntabilitas publik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang didukung (IT 1-3)		1	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas KOMINFO, Dinas PUPR dan PT Air Minum Jayapura
		Perubahan alokasi anggaran secara keseluruhan untuk air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA oleh pemerintah daerah sasaran (IT 1-5)	5%	5%	10%				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Pokja PKP (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, PT Air Minum Jayapura, Dinas KOMINFO, Dinas P3AKB, BPBD)
PROGRAM 2: Meningkatkan akses ke layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman, inklusif dan berketahanan iklim											
Kegiatan 1:	Meningkatkan Kapasitas profesi air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA	Jumlah pekerja air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA yang meningkat keterampilan dan kompetensinya sebagai hasil dari bantuan USG (IT 2-1)	100	100	80				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Pokja PKP (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, PT Air Minum Jayapura, Dinas KOMINFO, Dinas P3AKB, BPBD)
		Jumlah perangkat keuangan/operasional dan manajemen baru yang		1	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
		dikembangkan oleh penyedia layanan sebagai hasil dari bantuan USG (IT 2-2)									
Kegiatan 2:	Meningkatkan kinerja penyelenggara layanan air minum dan sanitasi	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman sebagai hasil dari bantuan USG (IT 2-3)	1600	10000	4900				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura
		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman sebagai hasil dari bantuan USG. (IT 2-5)		15000	10000				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
		Jumlah kota/kabupaten yang menerapkan layanan lumpur tinja yang lebih baik (IT 2-6)		1	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
Kegiatan 3:	Meningkatkan kinerja penyelenggara layanan air minum dan sanitasi	Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas layanan dari layanan air minum dasar atau layanan air minum yang dikelola dengan aman sebagai hasil dari bantuan USG (IT 2-4)	1600	10000	4900				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura
Kegiatan 4:	Platform untuk monitoring, pembelajaran, dan inovasi dikembangkan dan diperkuat	Jumlah lembaga sektor layanan air dan sanitasi yang diperkuat untuk mengelola sumber daya air atau meningkatkan layanan air minum dan sanitasi sebagai hasil dari bantuan USG (IT 2-7)		2	2				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas PUPR, Bappeda dan PT Air Minum Jayapura
PROGRAM 3: Meingkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk mendukung layanan air minum yang tangguh											
Kegiatan 1:	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan keandalan air di daerah aliran sungai yang memasok air baku untuk layanan air minum	Jumlah laporan kajian kerentanan iklim yang dihasilkan untuk mendukung peningkatan sumber air baku PDAM dampingan (IT 3-3)	1	0	0	0	0		USAID - IUWASH	Kota Jayapura	PT Air Minum Jayapura

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
		Jumlah orang yang mendapat manfaat dari adopsi dan implementasi langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air sebagai hasil dari bantuan USG (IT 3-6)	5	10	5				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
		Jumlah orang yang dilatih dalam adaptasi perubahan iklim dan lanskap berkelanjutan yang didukung oleh bantuan USG (IT 3-7)	50	100	50				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
Kegiatan 2:	Peningkatan akuntabilitas & kesetaraan dalam PSDA dan pengaturan regulasi & manajemen air minum, sanitasi, perilaku higiene yang tahan iklim	Jumlah lembaga yang memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menilai/mengatasi risiko perubahan iklim dan/atau lanskap berkelanjutan yang didukung oleh bantuan USG (IT 3-5)	2	3	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
Kegiatan 3:	Memperluas informasi, analisis, & advokasi untuk pengambilan keputusan yang tangguh terhadap iklim dalam kebijakan, program, & operasi	Jumlah lembaga yang memiliki sistem informasi manajemen dan/atau perangkat manajemen data yang diadopsi sebagai hasil dari bantuan USG; b. Jumlah orang dari lembaga yang menggunakan informasi dan/atau perangkat manajemen data atau mengimplementasikan tindakan pengurangan risiko untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (IT 3-2)	1	1					USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
		Jumlah orang yang memiliki sistem informasi manajemen dan/atau perangkat manajemen data yang diadopsi sebagai hasil	15	15					USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
		dari bantuan USG; b. Jumlah orang dari lembaga yang menggunakan informasi dan/atau perangkat manajemen data atau mengimplementasikan tindakan pengurangan risiko untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (IT 3-2)									
Kegiatan 4:	Memperkuat kebijakan, panduan, dan program PSDA Pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung layanan air minum yang tangguh	Jumlah kebijakan, panduan, dan program PSDA untuk mendukung layanan air minum yang tangguh dan/atau menangani lanskap berkelanjutan (IT 3-1)	1	2	1				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Bappeda, PT Air Minum Jayapura dan Dinas PUPR
		Jumlah investasi yang dimobilisasi untuk adaptasi perubahan iklim dan/atau penanganan lanskap berkelanjutan yang didukung oleh bantuan USG (IT 3-4)	1 M	2 M	1 M				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Pokja PKP (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, PT Air Minum Jayapura, Dinas KOMINFO, Dinas P3AKB, BPBD)
PROGRAM 4: Meningkatkan adopsi perilaku dan peningkatan peran partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang berkontribusi pada peningkatan air minum, sanitasi, perilaku higiene dan PSDA											
Kegiatan 1:	Adopsi perilaku penggunaan dan perawatan toilet (termasuk IPAL Komunal, dll) termasuk penyedotan diadopsi dan menjadi norma sosial	Persentase rumah tangga yang memiliki sabun dan air di tempat cuci tangan di lokasi (IT 4-3)			30%				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2:	Pembayaran jasa air minum dan sanitasi yang layak dan akuntabel menjadi norma sosial	Jumlah orang yang dijangkau melalui kampanye SBC yang mempromosikan ketahanan WASH dan WRM (IT 4-1)	4000	25000	21000				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas Kesehatan, Dinas KOMINFO

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
			2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 3:	Prioritas Institusi : perbaikan komitmen dan partisipasi institusi dalam WASH dan WRM, termasuk peningkatan keberpihakan pada masyarakat miskin dan pengambilan keputusan berbasis data	Jumlah orang yang dilatih dengan bantuan USG untuk memajukan hasil yang konsisten dengan kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan melalui peran mereka di lembaga atau organisasi sektor publik atau swasta (IT 4-2)	50	100	100				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas P3AKB, Pokja PKP dan Pokja PUG
		Persentase peserta yang melaporkan peningkatan persetujuan terhadap konsep bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang sosial, ekonomi, dan politik (IT 4-4)			20%				USAID - IUWASH	Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura	Dinas P3AKB, Pokja PKP dan Pokja PUG

7. GIZ CPFS

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
TUJUAN 1. ……..												
INDIKATOR SDGs:												
PROGRAM 1:												
Output 1:	Pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk mendorong adanya perbaikan kebijakan yang terkait dengan hak-hak Masyarakat Adat (politik, sosial dan ekonomi dasar, termasuk kesetaraan gender) berdasarkan analisis risiko korupsi	Jumlah rekomendasi/ draft kebijakan	0	1	2					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman)	Kab Jayapura	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)
	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas pencgegahan korupsi sektor kehutanan bagi sektor swasta	Jumlah perusahaan yang telah memiliki dan melaksanakan standar integritas, compliance, dan antisuap	0	6	6					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman)	Kab Jayapura	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)
Output 2:	Pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat terkait tata kepemerintahan yang baik di sektor kehutanan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5%	6,5%	20%					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman)	Kab Jayapura	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)
	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas dalam pencegahan korupsi di sektor kehutanan bagi para anggota KPH	Jumlah kepala KPH yang telah menerapkan manual	0	25%	50%					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Papua	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
		pencegahan korupsi sektor kehutanan								Republik Federal Jerman)		
Output 3	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas bagi masyarakat adat dalam pencegahan korupsi di sektor kehutanan	Jumlah kepala suku yang sudah memahami tentang kebijakan di ektor kehutanan dan posisi hukumnya	12	9	10					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman)	Kab Jayapura	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)
	Pelaksanaan kegiatan forum multi pemangku kepentingan terkait tata kelola kepemerintahan di sektor kehutanan	Jumlah anggota forum multi pemangku kepentingan yang merasakan manfaat forum	0	30	90					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman)	Provinsi Papua	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)
Output 4	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dengan menerapkan metodologi Corruption Risk Assessment yang disusun oleh KPK dalam pembuatan kebijakan daerah yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim (sektor kehutanan dan energi)	Jumlah kebijakan daerah yang telah melalui proses CRA	0	1	1					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman)	Kab Jayapura	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)
	Pelaksanaan serangkaian kegiatan diskusi terkait pencegahan korupsi dalam mitigasi perubahan iklim	Terbentuknya 1 network di daerah yang membaha	0	0	1					BMZ (Kementerian Kerjasama Ekonomi dan	Provinsi Papua	CPFS (kerjasama KPK dan GIZ)

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
		pencegahan korupsi dalam mitigasi perubahan iklim								Pembangunan Republik Federal Jerman)		

8. WAHANA VISI INDONESIA

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
TUJUAN 1. ……												
INDIKATOR SDGs:												
PROGRAM 1:												
Kegiatan 1:	Output 1.1 Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (perencana muda) untuk mengelola dana otonomi khusus	Persentase pejabat pemerintah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi		45%	60%	75%	NA	NA	459,481.66	USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Barat Daya 4. Papua Pegunungan 5. Papua Tengah 6. Papua Selatan	WVI
Kegiatan 2:	Output 1.2 Membina kemampuan teknis pemerintah daerah dalam pemanfaatan data berbasis IT sebagai dasar perencanaan dan penganggaran	Membina kemampuan teknis pemerintah daerah dalam pemanfaatan data berbasis IT sebagai dasar perencanaan dan penganggaran		40%	50%	60%	NA	NA	12,096.06	USAID Kolaborasi	1. Papua Barat	WVI
Kegiatan 3:	Output 2.1 Membentuk Kelompok Kerja Nasional untuk memberikan saran mengenai modul/kurikulum	Jumlah modul/kurikulum yang terus diterapkan dan diperbarui selama proyek berlangsung		100%	100%	0%	NA	NA	-	USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat	WVI

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
	yang berkualitas dan pembinaan teknis											
Kegiatan 4:	Output 2.2 Membentuk Kelompok Kerja Nasional untuk memberikan saran mengenai modul/kurikulum yang berkualitas dan pembinaan teknis	Jumlah modul pengembangan kapasitas yang mengarusutamakan keterlibatan OAP		100%	100%	0%	NA	NA	23,860.95	USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat	WVI
Kegiatan 6:	Output 3.1 Peningkatan praktik pemerintah daerah termasuk inovasi yang mendorong keterlibatan OAP/pejuang lokal dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	Persentase OAP/pejuang lokal yang berpartisipasi dalam platform keterlibatan sipil (yaitu Musrenbang/Musrenbangsus)		50%	75%	0%	NA	NA	833,531.01	USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Barat Daya 4. Papua Pegunungan 5. Papua Selatan	WVI-KBF
		OAP/pejuang lokal yang berpartisipasi dalam platform keterlibatan sipil Jumlah orang miskin, rentan, dan terpinggirkan yang menerima layanan Pemerintah Indonesia yang didukung oleh USAID		1,670	1,100	700	NA	NA				WVI-KBF

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
Kegiatan 8:	Output 3.2 Meningkatkan pemahaman dan kapasitas OAP/pejuang lokal untuk memenuhi peran mereka dalam tata kelola kolaboratif	Jumlah individu yang menerima pendidikan kewarganegaraan melalui program-program yang dibantu oleh USG (DR. 3.2-5)		5,000,000	10,800	10,800	NA	NA		USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Barat Daya 4. Papua Pegunungan 5. Papua Selatan	WVI-KBF-INFID
		Jumlah kegiatan yang didukung oleh USG yang dirancang untuk mempromosikan atau memperkuat partisipasi sipil perempuan (DR.4-1)		61	22	-	NA	NA				WVI-KBF-INFID
Kegiatan 10:	Output 4.1 Memperkuat proses bisnis Bimtek (Bimbingan teknis) termasuk program magang	Jumlah pejabat pemerintah yang menerima pelatihan/pembinaan termasuk magang		60	60	30	NA	NA	2,189,219.55	USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Selatan	WVI-KBF
Kegiatan 11:	Output 4.2 Membina pusat-pusat pembelajaran di universitas-universitas di Papua untuk mendukung implementasi Rencana Induk Papua/ RIPP	Jumlah ringkasan kebijakan yang diusulkan oleh pusat pembelajaran universitas yang memberikan rekomendasi untuk implementasi Otsus		2	1	1	NA	NA		USAID Kolaborasi	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Barat Daya	INFID
		Jumlah produk pengetahuan yang dihasilkan untuk		0	0	0	NA	NA				INFID

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2023)	Target Tahunan (5)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi	Instansi Pelaksana (6)
				2024	2025	2026	2027	2028				
		mendukung implementasi Otsus yang lebih baik										